SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : **PT Jakarta Propertindo (Perseroda)**, yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai 1, Lobby Timur, Jalan M.H. Thamrin Boulevard, RT.8/RW.4, Kb. Melati, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340. ----------

Terlapor II : **PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk**, yang beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jalan Letjend. TB. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760. ---

Terlapor III : **PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk**, yang beralamat di Jalan Taman Bintaro, RTRW 017/008, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330. ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ---------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") menerima Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I2, B1): ----------

   1.1. Tentang Identitas Terlapor. ----------

      1.1.1. PT Jakarta Propertindo (Perseroda), beralamat di Gedung Thamrin City Lantai 1, Lobby Timur, Jalan M.H. Thamrin Boulevard, RT.8/RW.4, Kb. Melati, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Pembangunan Pluit Jaya. Selanjutnya dilakukan perubahan nama menjadi PT Jakarta Propertindo melalui perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor 89 tanggal 15 Desember 2000 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta. Berdasarkan perubahan anggaran dasar tersebut, Terlapor I ditetapkan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang real estat (pengembang) (*vide* Bukti C126). ----------
      Adapun susunan pemegang saham Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

Pemegang Saham	Jumlah Saham		%
DKI Jakarta	39.650	saham	99%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Pemegang Saham	Jumlah Saham		%
PD Pasar Jaya	350	saham	1%

Pada praktiknya, Terlapor I telah melakukan kegiatan tender pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III. --- Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tersebut, Terlapor I menerbitkan Surat Tugas Nomor 118/OP0000/IV/2021/0026 tertanggal 27 April 2021 terkait penugasan Tim Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dengan susunan sebagai berikut: ----------

Ketua Tim	:	1.	Achmad Ismarwan	(Divisi Pengadaan)
Sekretaris	:	2.	Budi Setiawan Nurcahyo	(Divisi Pengadaan)
Anggota	:	3.	Slamet Muhdori	(Divisi MPP)
		4.	Muharam Noor	(Divisi Akuisisi Lahan)
		5.	Irson Rodecorn	(Divisi MPP)
		6.	Surya Nugraha	(Divisi Pengadaan)
		7.	Farhan Ilkarim Hadiputra	(Proyek TIM)
Tim Ahli		1.	Tim MK PT Yodya Karya	
		2.	Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia	

Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2021, Terlapor I menerbitkan Surat Tugas Nomor 118/OP0000/VII/2021/0045 untuk penugasan Tim Pelaksanaan Proses Pengadaan Kembali Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Adapun susunan tim berkaitan dengan tender ulang ini adalah sebagai berikut: ----------

Ketua Tim	:	1. Budi Setiawan Nurcahyo	(Divisi Pengadaan)
Sekretaris	:	2. Andy Irianto	(Divisi Pengadaan)
Anggota	:	3. Surya Nugraha	(Divisi Pengadaan)
		4. Slamet Muhdori	(Divisi MPP)
		5. Irson Rodecorn	(Divisi MPP)
		6. Muharam Noor	(Divisi Akuisisi Lahan)
		7. Sigit Sukatrinenda	(Proyek TIM)
Tim Ahli		1. Tim MK PT Yodya Karya	
		2. Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia	

1.1.2. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jalan Letjend. TB. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, merupakan badan usaha yang semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953 dari Raden Mr. Soewandi Notaris di Jakarta (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2218. ----------

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 *Jo.* Akta Perubahan Nomor 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah Nomor 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 14 September 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249/1974. ----------

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 67 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor. Akta perubahaan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0025609.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor AHU- 0157078.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. ----------

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi jasa konstruksi, realti (pengembang) dan properti, pracetak, peralatan, dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. ----------

1.1.3. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk, beralamat di Jalan Taman Bintaro, RTRW 017/008, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 45 tanggal 23 Desember 1982 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan teknik, perdagangan umum dan mengusahakan perusahaan tanah dan bangunan (*real estate*). ----------

1.2. Tentang Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk ("KSO Terlapor II - Terlapor III/PP-JAKON KSO"). ----------

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, Terlapor II dan Terlapor III membentuk kerja sama operasi untuk mengikuti tender: Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III. ----------

Bahwa berdasarkan akta pembentukan Konsorsium Terlapor II - Terlapor III tersebut disepakati antara lain: ----------

1.2.1. KSO disepakati dibentuk dengan nama PP - JAKON KSO dengan keikutsertaan modal (*sharing*) sebagai berikut: ----------

a. Terlapor II sebesar 60% (*enam puluh persen*). -------

b. Terlapor III sebesar 40% (*empat puluh persen*). -----

Terlepas *sharing* dalam KSO yang ditetapkan di atas, masing - masing anggota KSO akan melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan perjanjian KSO termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat - menyurat dan lain – lain. ----------

1.2.2. Terlapor II merupakan perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan bertindak untuk dan atas nama KSO. Selanjutnya, wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Andek Prabowo yang kedudukannya sebagai *Senior Vice President - Head of Operation Building Division* Terlapor II (Kuasa KSO). ----------

1.2.3. Dalam pelaksanaan tender menyatakan dan menyetujui pakta integritas sebagai berikut: ----------

a. Tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; ----------

b. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ----------

c. Apabila melanggar hal - hal yang dinyatakan dalam huruf a dan b maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai peraturan perundang-undangan. -----

Bahwa pada praktiknya, KSO Terlapor II - Terlapor III (PP - JAKON KSO) telah menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III. ----------

1.3. Tentang Obyek Perkara. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III sebagai berikut: ----------

Nama Pekerjaan	:	Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III
Lokasi Pekerjaan	:	Jalan Cikini Raya Nomor 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
Nilai HPS (Awal)	:	Rp481.997.141.120,- (*empat ratus delapan puluh satu miliyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta serätus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*) belum termasuk PPN 10%
Nilai HPS (Tender Ulang)	:	Rp438.179.219.200,- (*empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*) belum termasuk PPN 10%
Sumber Dana	:	PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Tahun Anggaran 2021

1.4. Tentang Dugaan Pelanggaran. ----------

1.4.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

1.4.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:------

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

1.5. Tentang Latar Belakang Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki merupakan proyek yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Provimsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dalam rangka menyediakan prasarana dan sarana seni, budaya dan wisata edukasi bagi masyarakat, guna mendukung misi Daerah sebagai kota yang cerdas dan berbudaya serta untuk memberikan ruang kreativitas, interaksi dan pendidikan kepada masyarakat, perlu dilakukan revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) beserta fasilitas pendukungnya termasuk di dalamnya fasilitas kegiatan campuran dan ruang terbuka hijau. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (dalam hal ini Terlapor I) untuk melakukan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan PKJ TIM. ----------

Bahwa dalam pelaksanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM, Terlapor I (PT Jakarta Propertindo (Perseroda)) bertanggung jawab: ----------

1.5.1. menyediakan pendanaan untuk Revitalisasi PKJ TIM;--

1.5.2. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pengembangan Revitalisasi PKJ TIM sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;--------

1.5.3. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi Revitalisasi PKJ TIM;----------

1.5.4. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan (good corporate governance) yang balk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

1.5.5. menyiapkan perencanaan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki sekurang-kurangnya berupa: dokumen teknis, dokumen pendanaan, anggaran biaya pembangunan dan pengelolaan serta dokumen hukum dan administrasi yang dipersyaratkan dalam rangka pengurusan perizinan dan dokumen kajian investasi dan nilai ekonomi. ----------

1.5.6. memastikan setiap pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan dan perawatan, pendanaan, kepemilikan aset, kerja sama cliatur dalam tujuan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, yaitu memberi ruang kreativitas, interaksi, pendidikan kepada masyarakat, ruang kesenian dan budaya, dan peningkatan ruang terbuka hijau. ----------

Selanjutnya, dalam pelaksanaan revitalisasi PKJ TIM tersebut, Terlapor I dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya serta lembaga lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

1.6. Bahwa Kronologis Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dapat digambarkan sebagai berikut: ----------

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
TENDER PERTAMA		
6 Mei 2021	Terlapor I (dalam hal ini adalah M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum) membentuk Tim Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dengan susunan sebagai berikut (*vide* Bukti C23):	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Ketua Tim : 1. Achmad Ismarwan Sekretaris : 2. Budi Setiawan Nurcahyo Anggota : 3. Slamet Muhdori 4. Muharam Noor 5. Irson Rodecorn 6. Surya Nugraha 7. Farhan Ilkarim Hadiputra Tim Ahli 1. Tim MK PT Yodya Karya 2. Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia	(Divisi Pengadaan) (Divisi Pengadaan) (Divisi MPP) (Divisi Akuisisi Lahan) (Divisi MPP) (Divisi Pengadaan) (Proyek TIM)
6 Mei 2021	Undangan Pendaftaran	
	Kepala Divisi Pengadaan Terlapor I mengundang 11 (sebelas) perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar sebagai rekanan Terlapor I yaitu (*vide* Bukti C14): (1) PT Hutama Karya (Persero), Tbk (2) PT Wijaya Karya (Persero), Tbk (3) PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (4) PT Waskita Karya (Persero), Tbk (5) PT Adhi Karya (Persero), Tbk (6) PT Brantas Abipraya (Persero) (7) PT Amarta Karya (Persero) (8) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk (9) PT Nindya Karya (Persero) (10) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk (11) PT Adhi Perkasa Gedung Bahwa dalam surat undangan tersebut juga diinformasikan antara lain: – pendaftaran peserta dilakukan secara *online* pada tanggal 6 Mei 2021 (pukul: 09:30 WIB) sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 (pukul 09:30 WIB); – donwnload Dokumen Pengadaan (RKS) dapat dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 (pukul 09:35 - 12:00 WIB) melalui: eproc.jakarta-propertindo.com	
6-7 Mei 2021	Pendaftaran Peserta	
	Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta yaitu (*vide* Bukti C9):	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	(1) PT Hutama Karya (Persero), Tbk (2) PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (3) PT Waskita Karya (Persero), Tbk (4) PT Adhi Karya (Persero), Tbk (5) PT Brantas Abipraya (Persero) (6) PT Amarta Karya (Persero) (7) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk	
10 Mei 2021	Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*)	
	Terlapor I menyelenggaran rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* yang diikuti oleh (*vide* Bukti C11, C12): Terlapor I : 1. Achmad Ismarwan (Ketua Tim Pengadaan) 2. Budi Setiawan Nurcahyo (Sekretaris Tim Pengadaan) 3. Slamet Muhdori (Anggota) 4. Muharam Noor (Anggota) 5. Irson Rodecorn (Anggota) 6. Surya Nugraha (Anggota) 7. Farhan Ilkarim Hadiputra (Anggota) 8. M Saefulloh (QS) 9. Wolter N. Piri (MK) 10 Yofan Saman Agusta (MK) 11. Mulya Hernandang D (Divisi Pengadaan) 12. Rr. Luky Ismayanti (Proyek TIM) 13. Tabah Yanda Noekman (Proyek TIM) Peserta 1. PT Adhi Karya (Persero), Tbk 2. PT Brantas Abipraya (Persero) 3. PT Hutama Karya (Persero) 4. PT PP (Persero), Tbk 5. PT Waskita Karya (Persero), Tbk 6. PT Jaya Kronstruksi Manggala Pratama, Tbk 7. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk 8. PT Amarta Karya (Perseroa)	
24 Mei	Pembukaan Dokumen Penawaran	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>2021</td><td colspan="2">Bahwa hingga akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I menerima penawaran dari 5 (lima) peserta sebagai berikut (vide Bukti C10):
(1) PT Waskita Karya (Persero),Tbk
(2) KSO PT PP–PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (PP – JAKON KSO)
(3) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk
(4) PT Adhi Karya (Persero), Tbk
(5) PT Hutama Karya (Persero), Tbk</td></tr>
<tr><td rowspan="2">30 Mei 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Administrasi Teknis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi teknis (File I) yang dilakukan oleh PT Yodya Karya diperoleh 3 (tiga) peserta yang lulus karena memenuhi ambang batas teknis sebagaimana tabel berikut (vide Bukti C8):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th>Nilai</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Waskita Karya (Persero), Tbk</td><td>77,94</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>92,78</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>92,62</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>89,57</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PT Hutama Karya (Persero)</td><td>79,06</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 Juni 2021</td><td colspan="2">Pembukaan Sampul 2/Harga Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa penawaran harga yang disampaikan ketiga peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi teknis adalah sebagai berikut (vide Bukti C9):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th colspan="2">Nilai Penawaran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>IDR</td><td>446.264.400.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>IDR</td><td>418.388.000.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>IDR</td><td>397.018.888.888</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">10 Juni 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Teknis dan Harga Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa hasil evaluasi teknis dan harga adalah sebagai berikut (vide Bukti C19):</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th colspan="2">Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th>Hasil Evalusi</th><th>Peringkat</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>93.30%</td><td>I</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>92.70%</td><td>II</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>91.64%</td><td>III</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14 Juni 2021</td><td colspan="3">Klarifikasi dan Negosiasi</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Bahwa Tim Pengadaan Terlapor I melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk yang dihadiri: Achmad Ismarwan (Ketua Tim Pengadaan), Dodi Suryosuasta, Khomensyah Nasution, Budi Setiawan, Rosmar H., Djunaidi, dan Rizky Dimas (PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk), Rr. Luky Ismayanti, Tabah Yanda Noekman, dan Sigit Sukatrinenda (Proyek Taman Ismail Marzuki), serta PT Yodya Karya (Persero) (Tim Teknis Management Konstruksi) dan PT Wolferstan Trower Indonesia (Tim Teknis Konsultan Quantity Surveyor) (vide Bukti C21).

Adapun setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi maka disetujui hal - hal sebagai berikut:

1) Penawaran Awal adalah sebesar Rp418.388.000.000,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dan setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi mejadi sebesar Rp418.000.000.000,00 (empat ratus delapan belas miliar rupiah) sudah termasuk PPN 10%;

2) Metode pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tahap 1 dapat berjalan dengan baik karena merupakan pekerjaan PT. Wika Gedung, untuk bangunan yang berhubungan dengan Tahap 2 harus dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kontraktor Tahap 2;

3) Jumlah dan kapasitas peralatan yang dipergunakan harus sesuai dengan KAK yang disyaratkan dan yang ditawarkan adalah jumlah dan kapasitas peralatan minimal. Kontraktor berkewajiban menambah jumlah dan kapasitas tanpa adanya penambahan biaya jika diperlukan;

4) Akses menggunakan Jalan Cikini Raya dan akan berkoordinasi dengan Kontraktor Tahap 2 untuk menggunakan izin jalan dari sekolah seni;

5) Untuk metode percepatan pekerjaan, Kontraktor merencanakan penggunaan passanger hoist;

6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 11 Desember 2021;

7) Terkait personil K3 Ahli Madya yang tidak sesuai karena melihat disiplin pekerjaan yang dilaksanakan, namun apabila harus</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	disesuai dengan KAK Kontraktor bersedia menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan KAK; 8) Mulai Pelaksanaan Pekerjaan tidak perlu menunggu Serah Terima Lahan; 9) Pengalaman Wika Gedung untuk pekerjaan teater di Cibubur namun kelas internasional dan kapasitas lebih kecil dari proyek yang akan dilaksanakan; 10) Rancangan *Guidelines* harus menyesuaikan dengan KAK atau dokumen yang ada. Kontraktor memastikan bahwa dapat memenuhi semua *guidelines* tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Jakpro dan Seniman; 11) Item pekerjaan Rancangan *Guidelines* adalah *Design and Build* yang harus mendapatkan persetujuan dari Jakpro dan MK; 12) Penawaran Kontraktor untuk merk tata suara adalah Meyer; 13) Serah Terima Pekerjaan dan Training untuk *equipment* akan didetailkan lebih lengkap dan harus dihadiri oleh pihak Principal *equipment* tersebut. Untuk kebutuhan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Jakpro; 14) Tidak diperlukan Direksi Keet untuk Tim Jakpro dan Tim Konsultan MK, namun akan ada berbagi pelayanan misal: *Security*; 15) Seluruh spesifikasi material dan *brand* harus sesuai dengan KAK, Gambar dan Outline Spesifikasi yang dipilih dan disetujui; 16) Daftar Sub-kontraktor atau vendor yang ditawarkan tidak dapat diubah dengan alasan apapun tanpa pesetujuan tertulis dari Jakpro dan Konsultan MK; 17) *ZEISS UNIVERSARIUM MVIII Starball Overhaul and Upgrade* akan dilakukan di Kota Jena, Germany dengan skup pekerjaan sebagai berikut: *a) LED Upgrade for stars, milky way deep sky objects;* *b) Motor Controller exchange and upgradel* *c) 1 full set of new slides;* *d) Control System Upgrade (Hardware and Software);* *e) New set of cables and connectors;* *f) New set & wear tear components for the starball;* *g) Diss-assembling, cleaning, re-assembling, repair where necessary and new adjustment;* *h) functional testing;* *i) Instalation (in Jakarta), training.* 18) Kontraktor harus memberikan jaminan secara tertulis dari ZEISS Germany kepada Jakpro bahwa *Overhaul* dan *Upgrade* ZEISS UNIVERSARIUM MVIII Starball dapat berfungsi dengan baik selama 20 tahun dan jaminan ketersediaan spare parts;	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	19) Untuk area Planetarium: a) Interior: *under GuideIines* sebagai *design and build*; b) Kineforum -> seperti bioskop -> akustik treatment - Equipment: Tata suara Dolby Atmos - Proyektor film dlsb; c) Ruang-ruang latihan: disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, contohnya seni musik make diperlukan *equipment-equipment* yang berhubungan dengan alat-alat musik. Hal ini berlaku juga untuk Teater Arena dan ruangan-ruangan lainnya; d) Perencana *Design and Build* harus mendapatkan persetujuan dari Jakpro. 20) Area Theater/Auditorium/GBB: a) Interior : *under GuideIines* sebagai *design and build:* – Akustikal - *wood panel sesuai Specifation RPG made in USA* bukan yang china; – Tirai panggung *safety curtain* berbahan *silika zetex dart* pastikan sesuai dengan persyaratan dalam KAK. b) *Equipment* Tata Suara: – PA; – Space map surrounds; – *Variabel Accoustic - mic* tersembunyi 32 buah, jumlah *speake surrounds* dan *constellation* untuk memastikan hasil terbaik buat *GBB based pn Principal Requirement* mempengaruhi total *chanel* dan *mixer*; – *Mixer* harus berbasis *mixer theatre.* c) Tata Lampu – Lighting konsol; – *Dimmer Rack – modular*; – Harus benar-benar sesuai KAK dan OS. d) *Stace Machinery* – *Flying bar 72* nos harus di *hoist* dengan kerekan variabel speed; – *Hoist* harus bisa *disyncronised, controlled, computerized* dengan fitur-fitur untuk penggunaan user. e) Untuk pembuktian dokumen asli terkait personil yang ditawarkan akan dilakukan tanggal 15 Juni 2021 pukul 17.00 WIB dengan pihak Tim Pengadaan dan Konsultan Manajemen Konstruksi. 21) Tata Cara Pembayaran Adapun tata cara pembayaran akan dilaksanakan setelah diterimanya *invoice*, dengan tahapan sebagai berikut: a) Uang Muka: 10% dari nilai pekerjaan atau sebesar	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani dan diserahkan Jaminan Uang Muka dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum; b) Termin: *Monthly progress payment* berdasarkan progress lapangan sesuai dengan kurva-S dikurangi cicilan uang muka 10% dan retensi 5% dari nilai yang ditagihkan disertai dengan *invoice* dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Tagihan bisa dilakukan setelah kontrak ditandatangani; c) Retensi: sebesar 5% dibayarkan setelah masa pemeliharaan (retensi) selesai dilengkapi dengan BAST II selama 12 bulan. 22) Jangka Waktu Pelaksanaan a) Total waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Penetapan Mitra Kerja (SPMK) sampai dengan 31 Desember 2021 untuk seluruh massa bangunan yang dikerjakan secara keseluruhan; b) Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyusun matrik tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing item pekerjaan; c) Rencana dan Waktu Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang disampaikan.	
PEMBATALAN HASIL TENDER/PENGADAAN		
1) Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, Tim Pengadaan melaporkan secara tertulis (*online*) terkait hasil evaluasi penawaran kepada Direktur SDM dan Umum Terlapor I; 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2021, Tim Pengadaan menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur SDM dan Umum Terlapor I terkait tambahan informasi Pengumuman Peringkat dan Klarifikasi & Negosiasi Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III; 3) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Direktur SDM dan Umum Terlapor I menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Pengadaan bahwa tidak menyetujui tahapan pengumuman pemenang dan tender dinyatakan batal dan meminta kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya; 4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2021, Tim Pengadaan mengumumkan pembatalan lelang. (*vide* Bukti C16, C17, C31)		
TENDER ULANG		
6 Juli 2021	Pembentukan/Pergantian Tim Pengadaan	
	Bahwa Terlapor I (dalam hal ini adalah M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum) membentuk dan/atau penggantian susunan Tim Pengadaan, dengan susunan menjadi sebagai berikut	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(vide Bukti C34):
<table>
<tr><td>Ketua Tim</td><td>:</td><td>1. Budi Setiawan Nurcahyo</td><td>(Divisi Pengadaan)</td></tr>
<tr><td>Sekretaris</td><td>:</td><td>2. Andy Irianto</td><td>(Divisi Pengadaan)</td></tr>
<tr><td>Anggota</td><td>:</td><td>3. Surya Nugraha</td><td>(Divisi Pengadaan)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4. Slamet Muhdori</td><td>(Divisi MPP)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5. Irson Rodecorn</td><td>(Divisi MPP)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>6. Muharam Noor</td><td>(Divisi Akuisisi Lahan)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7. Sigit Sukatrinenda</td><td>(Proyek TIM)</td></tr>
<tr><td>Tim Ahli</td><td></td><td>1. Tim MK PT Yodya Karya</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">12 Juli 2021</td><td colspan="2">Undangan Pendaftaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Kepala Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengundang 11 (sebelas) perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar sebagai rekanan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yaitu (vide Bukti C40):
(1) PT Hutama Karya (Persero), Tbk
(2) PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
(3) PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk
(4) PT Waskita Karya (Persero), Tbk
(5) PT Adhi Karya (Persero), Tbk
(6) PT Brantas Abipraya (Persero)
(7) PT Amarta Karya (Persero)
(8) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk
(9) PT Nindya Karya (Persero)
(10) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk
(11) PT Adhi Perkasa Gedung

Bahwa dalam surat undangan tersebut juga diinformasikan antara lain:
– pendaftaran peserta dilakukan secara online pada tanggal 12 Juli 2021 (pukul: 13:30 WIB) sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 (pukul 15:00 WIB);
– donwload Dokumen Pengadaan (RKS) dapat dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 (pukul 15:05WIB) sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 (pukul 09:00 WIB) melalui: eproc.jakarta-propertindo.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13 Juli 2021</td><td colspan="2">Pendaftaran Peserta</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta yaitu (vide Bukti C33):</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	(1) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk (2) PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (3) PT Waskita Karya (Persero), Tbk (4) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk (5) PT Adhi Karya (Persero), Tbk	
14 Juli 2021	Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*)	
	Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Terlapor I menyelenggaran rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* yang diikuti oleh (*vide* Bukti C79): Terlapor I : 1. Budi Setiawan Nurcahyo (Ketua Tim Pengadaan) 2. Andy Irianto (Sekretaris Tim Pengadaan) 3. Surya Nugraha (Anggota) 4. Slamet Muhdori (Anggota) 5. Irson Rodecorn (Anggota) 6. Muharam Noor (Anggota) 7. Sigit Sukatrinenda (Anggota) 8. M Saefulloh (QS) 9. Tri Wahyuedi (MK) 10 Yofan Saman Agusta (MK) 11. Mulya Hernandang D (Divisi Pengadaan) 12. Rr. Luky Ismayanti (Proyek TIM) 13. Tabah Yanda Noekman (Proyek TIM) Peserta 1. PT Adhi Karya (Persero), Tbk 2. PT Jaya Kronstruksi Manggala Pratama, Tbk 3. PT PP (Persero), Tbk 4. PT Waskita Karya (Persero), Tbk 5. PT Waskita Karya (Persero), Tbk 8. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk	
27 Juli 2021	Pembukaan Dokumen Penawaran	
	Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I menerima penawaran dari 4 (empat) peserta sebagai berikut (*vide* Bukti C25): (1) KSO PT Waskita Karya (Persero),Tbk - PT MSP (2) PT Adhi Karya (Persero), Tbk (3) PP – JAKON KSO) (4) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2 Agustus 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Administrasi Teknis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan oleh PT Yodya Karya diperoleh 2 (dua) peserta yang lulus karena memenuhi ambang batas teknis sebagaimana tabel berikut (vide Bukti C29):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th>Nilai</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KSO PT Waskita Karya (Persero),Tbk - PT MSP</td><td>74,97</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>95,07</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>89,78</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>76,13</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 Agustus 2021</td><td colspan="2">Pembukaan Sampul 2/Harga Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa penawaran harga yang disampaikan ketiga peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi teknis adalah sebagai berikut (vide Bukti C26):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th colspan="2">Nilai Penawaran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PP - JAKON KSO</td><td>IDR</td><td>415.815.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>IDR</td><td>372.752.000.101</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5 Agustus 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Teknis dan Harga Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa hasil evaluasi teknis dan harga adalah sebagai berikut (vide Bukti C24):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th>Hasil Evalusi</th><th>Peringkat</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PP - JAKON KSO</td><td>96,13%</td><td>I</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>92,85%</td><td>II</td></tr>
</table>
Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan harga tersebut maka PP - JAKON KSO disimpulkan memenuhi persyaratan terbaik dari aspek administrasi, teknis, dan harga.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6 Agustus 2021</td><td colspan="2">Klarifikasi dan Negosiasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Tim Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran PP - JAKON KSO yang dihadiri: Budi Setiawan Nurcahyo (Ketua Tim Pengadaan), Joko Rahardjo (PP – JAKON KSO), Rr. Luky Ismayanti, Bapak Tabah Yanda Noekman, dan Bapak Wenang (Proyek Taman Ismail Marzuki), Konsultan Management Konstruksi PT Yodya Karya (Persero), dan Konsultan Quantity Surveyor PT Wolferstan Trower Indonesia.

Adapun setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi maka disetujui hal - hal sebagai berikut (vide Bukti C27):

1) Penawaran Awal adalah sebesar Rp378.013.636.364,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta enam ratus tiga</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) belum termasuk PPN 10%, atau Rp415.815.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi adalah sebesar Rp377.272.727.273,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus Klarifikasi tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh dan negosiasi puluh tiga rupiah) belum termasuk PPN 10, atau Rp415.000.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar rupiah) sudah termasuk PPN 10%. 2) Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan yang diajukan dalam penawaran selama 4,5 bulan kalender sudah dengan pertimbangan terhadap pandemi covid; 3) Bahwa kontraktor tidak akan mengganti kemitraan yang sudah di masukkan dalam penawaran; 4) Semua spesifikasi material yang di gunakan akan menyesuaikan dengan yang ada dalam spesifikasi teknis; 5) Semua personil yang ditugaskan adalah sesuai dengan personil dalam dokumen penawaran, jika ada pergantian personil harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan kualifikasi min sama atau lebih baik; 6) Kontraktor akan melakukan presentasi ke user mengenai Tahap Perencanaan Teknis DED untuk desain "*under guideline*" pada saat dilakukan *kick-off metting*; 7) Kontraktor bersedia untuk mulai kerja setelah Surat Penetapan Mitra Kerja (SPMK) ditandatangani, tanpa menunggu SPK/Kontrak jadi terlebih dahulu; 8) Kontraktor tidak mendetailkan biaya pada Pekerjaan Persiapan (Bill No. 1) sehingga *progress* lapangan pekerjaan ini akan mengikuti *progress* lapangan pekerjaan terukur (Bill No. 2 sd 9); 9) Tata Cara Pembayaran Adapun tata cara pembayaran akan dilaksanakan setelah diterimanya *invoice*, dengan tahapan sebagai berikut: a) Uang Muka: 10% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp37.727.272.727,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) belum termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani dan diserahkan Jaminan Uang Muka dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum; b) Termin Bulanan: *Monthly Progress Payment* berdasarkan progress lapangan sesuai dengan kurva-S dikurangi cicilan uang muka 10% dan retensi 5% dari nilai yang ditagihkan disertai dengan *invoice* dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Tagihan bisa dilakukan setelah kontrak	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ditandatangani;
c) Retensi: Sebesar 5% dibayarkan setelah masa pemeliharaan (retensi) selesai dilengkapi dengan BAST II selama 12 bulan.
10) Jangka Waktu Pelaksanaan
a) Total waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Penetapan Mitra Kerja (SPMK) sampai dengan 31 Desember 2021 untuk seluruh massa bangunan yang dikerjakan secara keseluruhan;
b) Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyusun matrik tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing item pekerjaan;
c) Rencana dan Waktu Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang disampaikan.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8 Agustus 2021</td><td colspan="2">Pemberitahuan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga (File I dan File II</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Tim Pengadaan menyampaikan pemberitahuan kepada para peserta tender terkait hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang pada pokoknya sebagai berikut (vide Bukti C121):
<table>
<tr><th>Nama Peserta</th><th>Adm</th><th>Nilai Teknis</th><th>Penawaran Harga (Rp)</th><th>Harga Koreksi (Rp)</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>Lulus</td><td>96,13</td><td>415.815.000.000</td><td>378.013.636.364</td><td>Peringkat I</td></tr>
<tr><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>Lulus</td><td>92,85</td><td>372.752.000.101</td><td>372.752.000.101</td><td>Peringkat II</td></tr>
<tr><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>Lulus</td><td>76,13</td><td></td><td>-</td><td>Tidak Lulus</td></tr>
<tr><td>Waskita - MSP (KSO)</td><td>Lulus</td><td>74,97</td><td></td><td>-</td><td>Tidak Lulus</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">9 Agustus 2021</td><td colspan="2">Pengumuman Pemenang Tender</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Tim Pengadaan mengumumkan PP-Jakon KSO sebagai pemenang tender dengan masa sanggah ditetapkan mulai tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 pukul 15:30 WIB (vide Bukti C40).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12 Agustus 2021</td><td colspan="2">Usulan Penetapan Pemenang Tender</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Tim Pengadaan menyampaikan laporan proses tender dan mengusulkan PP-Jakon KSO sebagai kontraktor pelaksana kepada Direktur SDM dan Umum Terlapor I (vide Bukti B12, C30, C38).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16 Agustus 2021</td><td colspan="2">Penetapan Pemenang Tender</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa PP-Jakon KSO ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana jasa konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisai Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (vide Bukti B12, C40).</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">Kontrak</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
September 2021	Bahwa Terlapor I menandatangani kontrak pekerjaan dengan pemenang tender (PP-Jakon KSO) dengan nilai proyek sebesar Rp.415.000.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen)(*vide* Bukti C113).	

1.7. Tentang Fakta Lain Mengenai Keberatan/Sanggahan Peserta.---

Bahwa berkaitan dengan pembatalan terhadap hasil tender awal, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk menyampaikan keberatan yang pada pokoknya menyatakan: ----------

a. pembatalan yang didasari hanya ketidaksetujuan oleh Direktur SDM dan Umum tidak mencerminkan terciptanya persaingan yang sehat dalam proses lelang. Selain itu penolakan hasil evaluasi tanpa disertai alasan dan bukti yang kuat merupakan tindakan yang subjektif, jauh dari nilai professional dan transparansi; ----------

b. memohon agar Kepala Divisi Pengadaan mempertimbangkan pembatalan proses lelang serta melanjutkan pengusulan kembali hasil evaluasi yang telah sesuai ketentuan tersebut. ----------

Atas keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk, Terlapor I (dalam hal ini Tim Pengadaan) memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Keberatan peserta tender hanya dapat difasilitasi melalui sanggahan dan keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk di luar mekanisme sanggah yang diatur dalam *Request for Proposal* (RFP) sehingga PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk tidak memiliki *legal standing*; ------

b. Pembatalan proses pengadaan barang dan jasa hanya dapat dilakukan oleh pengguna barang dan jasa, dapat dilakukan setiap saat sebelum penetapan pemenang. Pengguna barang dan jasa tidak memiliki kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta. Alasan perlu disampaikan dalam hal menurut pandangan dari pengguna barang dan jasa seluruh penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menunjukan adanya persaingan yang tidak sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan (Butir 38.3 RFP); ----------

c. Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda)/Terlapor I (Butir 38.2 RFP).---------

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2021, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk kembali menyampaikan keberatan terkait pembatalan hasil tender awal yang tidak disertai oleh alasan yang jelas padahal dalam tender tersebut, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk merupakan peserta dengan peringkat pertama pada tahap evaluasi administrasi teknis dan harga. Selain itu, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk juga menyampaikan keberatan berkaitan dengan transparansi penilaian teknis dimana semua peserta mengalami penurunan nilai kecuali PP - JAKON KSO (Pemenang). ----------

Bahwa keberatan tersebut tidak diterima oleh Tim Pengadaan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keberatan tersebut di luar mekanisme sanggah yang diatur dalam *Request for Proposal* (RFP) sehingga maka proses usulan penetapan ini tetap dilanjutkan. ----------

1.8. Tentang Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.8.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I selaku pihak yang secara badan hukum telah diberikan penugasan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan PKJ TIM. ----------

c. Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir IDENTITAS TERLAPOR sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

d. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada Tim Pengadaan sebagaimana telah diuraikan pada butir IDENTITAS TERLAPOR sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

e. Bahwa Tim Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I sehingga perbuatan dan/atau tindakannya secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk dan atas nama serta menjadi tanggung jawab Terlapor I.----------

f. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----

1.8.2. Unsur Bersekongkol. ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa:----------

1. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---------
2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------
3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----------
4. Menciptakan persaingan semu; ----------
5. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;----------
6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----------

c. Bahwa Terlapor I dengan PP-JAKON KSO (Terlapor II dan Terlapor III) telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam bentuk sebagaimana diuraikan sebagai berikut:----------

1. Bahwa Terlapor I telah melakukan proses tender pengadaan Pembangunan/Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III mulai tanggal 6 Mei 2021 dengan mengundang 11 (*sebelas*) perusahaan rekanan Terlapor I yang memenuhi persyaratan menjadi peserta tender. ----------
   Selanjutnya, proses tender telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk Terlapor I hingga tahap klarifikasi dan negosiasi yang dilakukan terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk selaku penawar terbaik (peringkat I) pada tanggal 14 Juni 2021. ----------
2. Bahwa atas evaluasi teknis dan harga yang telah dilakukan oleh Tim Pengadaan Terlapor I tersebut, pada tanggal 12 Juni 2021, PP-JAKON KSO (KSO Terlapor II dan Terlapor III) mengajukan keberatan atas hasil evaluasi dan meminta diberikan rincian komponen penilaian yang digunakan oleh Tim Pengadaan Terlapor I dalam melakukan evaluasi dan penilaian teknis para peserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Tim Pengadaan Terlapor I melaporkan hasil proses tender yang telah diselesaikan kepada Direktur SDM dan Umum Terlapor I dengan menyatakan: ----------

   Dengan telah dicapainya kesepakatan Klarifikasi & Negosiasi oleh semua pihak dan telah membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi (BAKN) maka untuk selanjutnya dapat dilakukan Pengumuman Pemenang

4. Bahwa atas usulan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2021 (pukul 23.13) Direktur SDM dan Umum Terlapor I menyampaikan pemberitahuan kepada Achmad Ismarwan selaku Ketua Tim Pengadaan bahwa usulan Tim Pengadaan tidak disetujui, dengan menyatakan:

   .... dengan ini selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan tidak menyetujui tahapan pengumuman. pemenang tersebut.

   Maka dengan ini disampaikan lelang dinyatakan batal dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya

5. Bahwa setelah keputusan pembatalan tender oleh Terlapor I tersebut selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021, Terlapor I membentuk Tim Pengadaan yang baru dengan mengganti ketua tim pengadaan sebelumnya dan beberapa anggota tim pengadaan. ----------

6. Bahwa kemudian Tim Pengadaan tersebut melakukan proses tender ulang hingga akhirnya menetapkan PP-JAKON KSO (KSO Terlapor II dan Terlapor III) menjadi peserta dengan peringkat terbaik (peringkat I) dan selanjutnya PP-JAKON KSO (KSO Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Terlapor III) ditetapkan menjadi pemenang tender. ----------

7. Bahwa fakta tersebut membuktikan telah terjadi tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu dan/atau secara langsung maupun tidak langsung merupakan kerja sama yang menguntungkan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah PP-JAKON KSO). ----------
8. Bahwa oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol. --
9. Bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.8.3. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir Unsur Pelaku Usaha sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------
b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------
c. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir IDENTITAS TERLAPOR sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III membuat kerja sama operasi dengan nama PP-JAKON KSO untuk mengikuti proses Tender Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 ("KSO Terlapor II - Terlapor III/PP-JAKON KSO") sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

e. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.8.4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

b. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh Terlapor I setelah KSO Terlapor II dan Terlapor II (PP-JAKON KSO) melakukan keberatan atas hasil evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Pengadaan. ----------

c. Bahwa selanjutnya, Terlapor I menindaklajuti keberatan KSO Terlapor II dan Terlapor II (PP-JAKON KSO) dengan tidak menyetujui hasil tender yang telah selesai dilakukan Tim Pengadaan (yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diketuai oleh Achmad Ismarwan) dan memerintahkan Divisi Pengadaan Terlapor I untuk melakukan tender ulang. ----------

d. Bahwa kemudian Terlapor I membentuk Tim Pengadaan yang baru untuk melakukan tender ulang dan selanjutnya melakukan proses tender dengan lebih mengakomodasi kepentingan KSO Terlapor II dan Terlapor II (PP-JAKON KSO) sehingga pada akhirnya KSO Terlapor II dan Terlapor II (PP-JAKON KSO) menjadi peserta peringkat I (peringkat terbaik) serta diusulkan menjadi pemenang. ----------

e. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Terlapor I menetapkan KSO Terlapor II dan Terlapor II (PP-JAKON KSO) menjadi pemenang tender dan menjadi perusahaan pelaksana Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III. ----------

f. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. ----------

g. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.8.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha karena: ----------

1. Melawan Hukum, dimana tender dilaksanakan dengan menggunakan MMAN-JPP-PPRKN-001 Manual Pengadaan Barang Jasa yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor: 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ----------

   Tindakan Terlapor I yang membatalkan tender secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan transparan jelas bertentangan dengan prinsip dan/atau etika pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Terlapor I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang terlebih telah menghilangkan upaya apapun dari peserta untuk memperjuangkan haknya jika dirugikan dalam proses tender. ----------

   Hal tersebut diperkuat dan dipertegas oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa tindakan pembatalan tender yang cenderung sewenang-wenang dan ketentuan yang mendasarinya tidak dapat dibenarkan. ----------

   Dalam perkara *a quo*, Terlapor I terbukti melakukan diskriminasi terhadap peserta tender yaitu ketika KSO Terlapor II dan Terlapor II (PP-JAKON KSO) mengajukan keberatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait evaluasi teknis maka Terlapor I mengakomodasi dengan membatalkan tender,. Namun ketika PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk mengajukan keberatan terkait dengan alasan pembatalan tender, Terlapor I sama sekali tidak memberikan jawaban substansial dengan alasan keberatan di luar mekanisme sanggah yang telah diatur dalam *Request fo Proposal,* padahal apabila mengacu pada ketentuan *Request fo Proposal*, baik keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk maupun keberatan KSO Terlapor II dan Terlapor II (PP-JAKON KSO) sama - sama di luar mekanisme sanggah sebagaimana diatur dalam *Request fo Proposal.*

2. Menghambat Persaingan Usaha, dimana tindakan yang dilakukan para Terlapor berdampak pada peserta tender lain (dalam hal ini PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk) yang tertutup kesempatannya menjadi pemenang karena tender dibatalkan oleh Terlapor I padahal dalam tender tersebut, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk merupakan penawar terbaik (peringkat I) yang telah melalui tahapan terakhir proses tender dan tinggal persetujuan usulan pemenang. ----------

c. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.9. Tentang Daftar Saksi dan Ahli. ----------

Bahwa daftar Saksi dan Ahli yang diajukan Tim Investigator untuk dapat diperiksa pada Pemeriksaan Lanjutan (dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan bila diperlukan), sebagai berikut: ----------

No	Nama Saksi	Alamat/Domisili
1	M Hamzah	Jakarta Selatan
2	Nur Syamsul Rijal	Jakarta Selatan
3	Aji Pramudiharto	- Jakarta Timur (kantor) - Tangerang Selatan
4	Ahmadi	Jakarta Timur
5	Fariz Andriawan Triyono	- DKI Jakarta Timur (kantor) - Gresik - Jawa Timur
6	Tri Wahyuedi	- Jakarta Timur (kantor) - Bekasi - Jawa Barat
7	M Sovie Irawan Khuswa	- Jakarta Selatan(kantor) - Tangerang Selatan
8	Paramayuda Maulana	- Jakarta Selatan(kantor) - Semarang - Jawa Tengah
9	Antariksa Artini	- Jakarta Timur (kantor) - Bogor - Jawa Barat
10	Hariawan Budi Sulistya	- Jakarta Timur (kantor) - Bekasi - Jawa Barat
11	Andy Faisal	- Jakarta Timur (kantor) - Serang - Banten

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor I yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.4): ----------

2.1. Duduk Posisi dan Argumentasi TERLAPOR I. ----------

TANGGAPAN ATAS KRONOLOGI. ----------

INVESTIGATOR TIDAK TEPAT MENYAMPAIKAN JUMLAH PERUSAHAAN/PESERTA LELANG ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.1.1. Bahwa INVESTIGATOR dalam LDP menyampaikan pada 6 Mei 2021 Kepala Divisi Pengadaan TERLAPOR I mengundang 11 (sebelas) perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar sebagai rekanan TERLAPOR I, hingga batas waktu yang telah ditetapkan terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta, tidak termasuk PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.. (Vide LDP Hal. 9-10). ----------

2.1.2. Bahwa sehubungan dengan rencana Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Kepala Divisi TERLAPOR I mengirimkan Surat Undangan Nomor 001/UND/PKT.18/V/2021 pada 6 Mei 2021 (Bukti T.I – 1) yang mengundang 11 (sebelas) perusahaan untuk menjadi peserta Lelang yang dibatalkan, namun terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta Lelang batal, termasuk di dalamnya PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. Hal ini berdasarkan Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III Nomor 003/BAAW/PKT.18/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 (Bukti T.I – 2). Kronologi INVESTIGATOR dalam LDP tidak sesuai dengan fakta dalam Berita Acara tersebut, hal ini menunjukan INVESTIGATOR kurang cermat dalam menyampaikan fakta dalam LDP. ----------

LELANG BERDASARKAN SURAT TUGAS TANGGAL 07 JULI 2021 MERUPAKAN LELANG BARU BUKAN MERUPAKAN LELANG ULANG ----------

2.1.3. Bahwa INVESTIGATOR dalam LDP menyebut, atau menggunakan terminologi Lelang Ulang. (Vide LDP Hal. 19) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.1.4. Bahwa perlu ditegaskan, Lelang berdasarkan SK Tim Pengadaan No. 18/OP0000/VII/2021/0045 tanggal 07 Juli 2021 (Bukti T.I – 3) bukan merupakan Lelang Ulang, TAPI merupakan Lelang Baru. Lelang Baru merupakan konsekuensi dari Lelang yang dibatalkan, sedangkan Lelang Ulang merupakan konsekuensi dari Lelang Gagal. Yang membedakan antara Lelang Gagal dengan Lelang Baru adalah, pada Lelang Gagal KAK dan RFP tetap sama (tidak ada perubahan) dengan KAK dan RFP lelang pertama, sedangkan pada Lelang Baru KAK dan RFP berbeda atau setidak-tidaknya terdapat perbedaan dengan KAK dan RFP lelang sebelumnya. (Bukti T.I – 4, Bukti T.I - 5, Bukti T.I – 6, Bukti T.I - 7, Bukti T.I - 8) ----------

MEKANISME SANGGAH SEBAGAI SATU-SATUNYA SALURAN KEBERATAN TERHADAP PROSES MAUPUN HASIL PENGADAAN ----------

2.1.5. Bahwa INVESTIGATOR dalam LDP Poin 9 secara sumir mengarahkan, tidak adanya tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan oleh PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. (Vide LDP Hal. 26-28)

2.1.6. Bahwa sesuai dengan RFP atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mekanisme 'SANGGAH' dijadikan sebagai satu-satunya saluran bagi peserta Lelang yang tidak puas terhadap proses, maupun hasil dari pengadaan barang atau jasa. (Bukti T.I – 5, Bukti T.I – 7) ----------

2.1.7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR I untuk tidak menindaklanjuti ketidakpuasan dari PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero),Tbk. melalui surat keberatan di luar waktu dan mekanisme sanggah,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan RFP atau peraturan perundang-undangan. ----------

PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN ----------

Unsur Bersekongkol ----------

2.1.8. Bahwa Investigator dalam LDP Poin 10.2 secara sumir dan terburu-buru membuat kesimpulan terkait dengan pemenuhan unsur bersekongkol dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan mendasarkan pada: ----------

a. Pemberitahuan Direktur SDM dan Umum bahwa tidak menyetujui rapat pengumuman pemenang, menyatakan lelang batal, dan melaksanakan Lelang Baru dalam waktu secepatnya. ----------

b. Penggantian Ketua Tim Pengadaan pada Lelang Baru seolah-olah ditujukan untuk mengarahkan untuk memenangkan salah satu peserta Lelang.

c. Fakta-fakta bahwa KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO menang pada Lelang Baru merupakan hasil dari persekongkolan. (Vide LDP Hal. 29-31)----------

2.1.9. Bahwa pemberitahuan Direktur SDM dan Umum BUKAN merupakan keputusan sepihak melainkan keputusan Direksi TERLAPOR I yang telah melalui proses pembahasan, dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------

a. Terdapat indikasi kuat adanya kolusi/persekongkolan antara oknum Manajemen Konstruksi (MK), dan oknum Tim Pengadaan untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. Hal ini merujuk pada fakta: ----------

1. Berdasarkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah atau mekanisme pengadaan yang berlaku di TERLAPOR I, pasca evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harga Tim Pengadaan harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada TERLAPOR I sebagai User (Pengguna Barang) karena berdasarkan mekanisme pengadaan yang berlaku di Negara Indonesia ini, tahapan Penetapan Pemenang sampai dengan Penandatanganan Kontrak adalah kewenangan User (Pengguna Barang), bukan kewenangan Tim Pengadaan lagi. (Bukti T.I – 9). Tetapi Tim Pengadaan, di dalamnya terdapat oknum Manajemen Konstruksi (MK) tidak melakukan hal tersebut, padahal evaluasi harga sudah dilakukan sejak tanggal 2 Juni 2021. (Bukti T.I – 10). Setelah itu TERLAPOR I mendapatkan informasi bahwa terdapat peserta lelang yang hasil evaluasi administrasi teknis tertinggi, tetapi menjadi peringkat terendah setelah evaluasi harga. Hal ini aneh, karena lelang *a quo* adalah lelang kualitas (*quality bidding*) yang memberikan porsi teknis lebih besar dari porsi harga (70% : 30%). Menyikapi hal tersebut TERLAPOR I meminta kepada Tim Pengadaan untuk melakukan review ulang atas hasil evaluasi teknis untuk memastikan penilaian dilakukan dengan objektif; (Bukti T.I – 13) ------

2. Hasil dari review yang dilakukan tersebut ditemukan 2 hal penting, yaitu: ----------
   i. Tim Pengadaan telah salah menafsirkan penilaian “interior” dan “pengalaman di lokasi kota besar” sebagaimana yang dibutuhkan oleh TERLAPOR I sebagai User (Pengguna Barang); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Terdapat perbedaan hasil penilaian teknis awal dengan hasil review, dimana KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO yang sebelumnya telah menduduki Peringkat I dalam evaluasi teknis awal, nilainya menjadi semakin tinggi setelah Tim Pengadaan menghitung ulang penilaian aspek interior dan pengalaman di lokasi kota besar, dengan perbandingan sebagai berikut: (Bukti T.I – 21)----------

- Penilaian Terhadap Interior ----------

  Nilai Awal----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Interior / Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballrom	27.27	1.91	100	7.00	36.36	2.55
2	Interior / Fitting Out Gedung Hotel Kelas Miniml Bintang 3	100	7.00	38.46	2.69	46.15	3.23
3	Interior / Fitting Out Ruang Kantor Min. 1000m2	86	6.00	93	6.50	99	6.50
4	Interior / Fitting Out Komersial Lainnya	100	6.00	88.89	5.33	51.85	3.11

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
5	Pekerjaan *Equipment* Gedung Pertunjukan Auditorium dan Ballrom	50	3.50	83.33	5.83	100	7.00
6	Pekerjaan *Equipment* Gedung atau Ruang Komersil Lainnya	80	4.80	100	6.00	40	2.40

Hasil Reviu ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Interior / Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballrom	27.27	1.91	100	7.00	0	0.00
2	Interior / Fitting Out Gedung Hotel Kelas Miniml Bintang 3	86	6.00	78.57	5.50	50	3.50
3	Interior / Fitting Out Ruang Kantor Min. 1000m2	29	2.00	67.86	4.75	57	4.00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
4	Interior / Fitting Out Komersial Lainnya	91	5.45	72.73	4.36	59.09	3.55
5	Pekerjaan *Equipment* Gedung Pertunjukan Auditorium dan Ballrom	0	0.00	100	7.00	20	1.40
6	Pekerjaan *Equipment* Gedung atau Ruang Komersil Lainnya	100	6	100	6.00	50	3.00

- Penilaian Terhadap Pengalaman di Lokasi Kota Besar----------

Nilai Awal----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Pengalaman di Lokasi Kota Besar	100	7.50	52.38	3.93	100	7.50

Hasil Reviu ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Pengalaman di Lokasi Kota Besar	100	7.50	72.73	5.45	36.36	2.73

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Setelah Tim Pengadaan mengetahui kesalahannya berdasarkan review yang dilakukan, tiba-tiba Tim Pengadaan mengumumkan pemenang pada tanggal 10 Juni 2021 secara sepihak. (Bukti T.I – 11, Bukti T.I – 12). Bahkan oknum Manajemen Konstruksi (MK) sekalipun mengakui terjadi perbedaan hasil penilaian antara nilai awal dengan nilai hasil review, tetap memaksakan untuk mengumumkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. sebagai pemenang, padahal PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk bukan yang terbaik dalam penilaian awal maupun penilaian review, dengan dalih hasil review tidak dikenal dalam RFP (Bukti T.I – 21). Tim lelang pada saat itu melupakan fakta bahwa pembiayaan proyek ini berasal dari uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, dengan cara terpilihnya peserta lelang yang terbaik, apalagi lelang *a quo* adalah lelang kualitas (*quality bidding*). ----------
4. Atas fakta kecurigaan adanya indikasi kuat kolusi itulah kemudian TERLAPOR I mengambil tindakan sebagai berikut: ----------
   i. Membatalkan lelang; ----------
   ii. Meminta PT. Yodya Karya sebagai Manajemen Konstruksi mengganti oknum yang mereka tugaskan di pengadaan *a quo*; -
   iii. Mengganti Ketua Tim Pengadaan. ----------

b. Ditemukan fakta Manajemen Konstruksi (MK) gagal menerjemahkan kebutuhan dan konsep TERLAPOR I pada Lelang yang dibatalkan. Dimana, KAK Lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Batal (Bukti T.I – 6) yang disusun oleh Manajemen Konstruksi (MK) tidak sesuai dengan kebutuhan dan konsep TERLAPOR I. ----------

2.1.10. Bahwa penggantian Tim Pengadaan dalam Lelang Baru terkait dengan temuan adanya dugaan persekongkolan antara oknum Manajemen Konstruksi (MK) dan oknum Tim Pengadaan untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. menjadikan Tim Pengadaan tersebut adalah Tim Pengadaan yang baru, hal ini menegaskan kembali bahwa Lelang ini merupakan Lelang Baru, BUKAN Lelang Ulang. (Bukti T.I – 3)----------

2.1.11. Bahwa sebagai konsekuensi dari Lelang Baru dimana RFP (Bukti T.I – 7) dan KAK (Bukti T.I – 8) juga baru, berdampak pada komponen dan komposisi penilaian baru, sehingga apabila didapatkan pemenang yang berbeda dari Lelang Batal adalah suatu hal yang wajar. Perlu ditambahkan, FAKTANYA dalam Lelang Batal KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO merupakan Peringkat I dalam evaluasi administrasi dan teknis. (Bukti T.I – 14, Bukti T.I – 15) ----------

No	Nama Peserta	Nilai	Keterangan
1	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	77.94	TIDAK LULUS
2	PT. PP -JAKON KSO	92,78	LULUS
3	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk	92,62	LULUS
4	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	89,57	LULUS
5	PT. Hutama Karya (Persero)	79,06	TIDAK LULUS

2.1.12. Bahwa perlu ditegaskan kembali pada tanggapan ini sebagaimana telah disinggung pada angka 9 huruf a di atas, kecurigaan TERLAPOR I terhadap persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oknum Manajemen Konstruksi (MK) dan oknum Tim Pengadaan untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk., salah satunya terlihat dari FAKTA bahwa KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO merupakan Peringkat I (Bukti T.I – 14, Bukti T.I – 15) dalam evaluasi administrasi dan teknis, tetapi setelah evaluasi harga KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO berada di peringkat ketiga (Bukti T.I – 24, Bukti T.I – 11) Padahal Lelang Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III merupakan Lelang Kualitas (*Quality Bidding*) yang mengutamakan kualitas dibanding harga oleh karena itu komponen penilaian dibagi menjadi 70% penilaian teknis, 30% penilaian harga. ----------

2.1.13. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta di atas, unsur bersekongkol yang dituduhkan oleh Investigator dalam LDP adalah prematur dan tidak tepat, justru sebaliknya jika Lelang tidak dibatalkan oleh TERLAPOR I maka akan dihasilkan pemenang Lelang yang terindikasi kuat merupakan hasil kolusi. Disamping fakta bahwa, TERLAPOR I pada khususnya dan Negara pada umumnya akan dirugikan jika Lelang tidak dibatalkan. ----------

Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

2.1.14. Bahwa Investigator dalam Poin 10.8 LDP telah membuat kesimpulan terkait dengan pemenuhan unsur pelaku usaha lain dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan mendasarkan pada: ----------

a. Pelaku usaha lain didefinisikan sebagai pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

b. Pelaku usaha lain dalam perkara adalah KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO.--------

c. TERLAPOR I dianggap telah memberikan perlakuan istimewa kepada KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO. (Vide LDP Hal. 32-33) ----------

2.1.15. Bahwa seluruh proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III tunduk pada RFP, KAK, dan hasil *aanwijzing* yang BERLAKU DAN MENGIKAT bagi semua peserta Lelang, tanpa terkecuali. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat perlakuan istimewa kepada siapapun. (Bukti T.I - 5, Bukti T.I – 6, Bukti T.I - 7, Bukti T.I - 8, Bukti T.I - 2, Bukti T.I - 18) ----------

2.1.16. Bahwa proses pengadaan ini melibatkan pihak independen dalam menyusun spesifikasi teknis, KAK, dan RFP yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) dan HPS oleh Konsultan *Quantity Surveyor* (QS) (Bukti T.I – 19, Bukti T.I – 20, Bukti T.I – 22, Bukti T.I - 23). Jadi, tidak ada perlakuan istimewa yang dilakukan oleh TERLAPOR I kepada siapapun peserta Lelang sebagaimana dituduhkan, sehingga apabila terjadi perlakuan istimewa yang paling mungkin melakukan adalah pihak di luar TERLAPOR I. Argumentasi ini dikaitkan dengan Fakta bahwa TERLAPOR I meminta supaya oknum Manajemen Konstruksi (MK) diganti dengan yang baru pada Lelang Baru karena oknum Manajemen Konstruksi (MK) pada Lelang Batal memiliki indikasi kolusi/bersekongkol untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. (Bukti T.I – 3) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.1.17. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta, unsur pelaku usaha lain yang diajukan oleh Investigator dalam LDP adalah prematur dan tidak tepat. ----------

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Lelang-------

2.1.18. Bahwa dalam Poin 10.9 LDP, Investigator telah menyimpulkan terpenuhinya unsur mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (Vide LDP Hal. 32-33). ----------

a. Seolah-olah TERLAPOR I menindaklanjuti keberatan dari KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO dengan membatalkan Lelang. ---

b. Seolah-olah Pembentukan Tim Pengadaan Baru ditujukan untuk mengakomodir KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO.----------

2.1.19. Bahwa terkait dengan dugaan TERLAPOR I menindaklanjuti keberatan dari KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO dengan membatalkan Lelang adalah tidak tepat, karena Pembatalan Lelang didasarkan pada alasan-alasan obyektif, sebagai berikut: ----------

a. Ditemukan spesifikasi teknis, KAK dan RFP yang dibuat oleh oknum Manajemen Konstruksi (MK) tidak sesuai dengan kebutuhan TERLAPOR I (Bukti T.I – 5, Bukti T.I – 6, Bukti T.I – 7, Bukti T.I – 8) sedangkan pembiayaan proyek berasal dari penyertaan modal daerah (uang negara) sehingga harus sangat sesuai dengan kebutuhan.----------

b. Bahwa ditemukan indikasi kuat adanya kolusi antara oknum Tim Pengadaan dengan oknum Manajemen Konstruksi (MK) untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero),Tbk padahal secara teknis, PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero),Tbk bukan merupakan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbaik berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis. Dimana Lelang ini merupakan lelang yang mengutamakan kualitas teknis ketimbang komponen harga (Lelang Kualitas/*Quality Bidding*).

c. Bahwa pembatalan itu merupakan kewenangan dari TERLAPOR I berdasarkan Pasal 38.2 dan 38.3 RFP (Bukti T.I – 5) yang berlaku dan mengikat bagi seluruh peserta lelang. Dimana apabila pembatalan lelang tidak dilakukan oleh TERLAPOR I, maka justru akan menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat dan kolusi. Hal ini sesuai dengan kualifikasi kondisi yang dapat menyebabkan lelang dibatalkan. (Bukti T.I – 16) ----------

Pasal 38.2 RFP

Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda).

Pasal 38.3 RFP

Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, ***apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat****, **terjadi pengaturan bersama (kolusi)**, dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.*

d. Bahwa untuk menjamin *fairness* dan independensi dalam penilaian atau evaluasi dalam Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Taman Ismail Marzuki Tahap III TERLAPOR I juga menyerahkan tugas tersebut kepada Manajemen Konstruksi (MK) untuk memberikan penilaian/evaluasi termasuk menentukan bobot dan kriteria penilaian sesuai dengan RFP. (Bukti T.I -19, Bukti T.I – 20, Bukti T.I – 22, Bukti T.I - 23)----

e. Bahwa dengan penugasan kepada pihak independen, dalam hal ini adalah Manajemen Konstruksi (MK) untuk menyusun Spesifikasi Teknis, menentukan bobot dan kriteria penilaian, serta melakukan penilaian. Hal ini membuat TERLAPOR I tidak mungkin, atau sangat sulit untuk melakukan tindakan mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang. Sehingga unsur mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang yang diajukan INVESTIGATOR dalam LDP adalah prematur dan tidak tepat. ----------

Unsur Persaingan Tidak Sehat----------

2.1.20. Bahwa dalam Poin 10.10 LDP, INVESTIGATOR menyatakan bahwa TERLAPOR I telah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk membatalkan Lelang secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan transparan, dimana tindakan tersebut disimpulkan INVESTIGATOR sebagai penyalahgunaan wewenang yang juga telah menghilangkan upaya apapun dari peserta untuk memperjuangkan haknya jika dirugikan dalam proses Lelang. (Vide LDP Hal. 34) ----------

2.1.21. Bahwa tuduhan pembatalan lelang secara sepihak, tanpa alasan yang jelas dan transparan sudah dijawab dengan tegas pada angka 19 di atas, dimana pembatalan lelang didasarkan pada argumentasi yang obyektif dan transparan, serta menciptakan pengadaan yang memenuhi prinsip-prinsip persaingan sehat.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.1.22. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, menjadikan mekanisme sanggah sebagai satu-satunya saluran bagi peserta Lelang yang tidak puas terhadap proses maupun hasil pengadaan. Dimana hal tersebut juga telah diatur dalam KAK, RFP dan Kesimpulan hasil *aanwijzing* yang disepakati oleh seluruh peserta lelang, dan mengikat dalam lelang a quo. Dengan demikian, tidak ada upaya TERLAPOR I untuk menghilangkan upaya apapun dari peserta lelang untuk memperjuangkan haknya jika tidak puas dalam proses maupun hasil lelang, sepanjang peserta lelang menggunakan mekanisme sanggah. (Bukti T.I - 5, Bukti T.I – 6, Bukti T.I - 7, Bukti T.I - 8, Bukti T.I - 2, Bukti T.I - 18)----------

2.1.23. Bahwa dalam Poin 10.10 LDP INVESTIGATOR menyimpulkan telah terjadi tindakan menghambat persaingan usaha dengan tertutupnya kesempatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. menjadi pemenang Lelang, karena Lelang dibatalkan oleh TERLAPOR I. (Vide LDP Hal. 34)----------

2.1.24. Bahwa terkait dengan alasan obyektif pembatalan lelang telah dijelaskan di atas. Adapun terkait dengan tertutupnya kesempatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. adalah tidak tepat. Hal ini terjawab dengan fakta dalam proses pelaksanaan Lelang Baru, TERLAPOR I telah menyampaikan Undangan Pendaftaran Lelang Baru pada tanggal 12 Juli 2021 kepada 11 (sebelas) perusahaan (Bukti T.I – 17) yang terlibat dalam Lelang Batal termasuk PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), dan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. termasuk salah satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari 5 (lima) peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran, dan mengikuti seluruh tahapan proses lelang (Bukti T.I – 18). Hal ini menggugurkan dalil INVESTIGATOR bahwa PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) dirugikan, atau tidak memiliki kesempatan sebagai pemenang lelang. Karena apabila PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) merasa dirugikan, dan tidak menerima pembatalan lelang, serta pelaksanaan lelang baru, maka dia tidak akan mengikuti lelang baru apalagi sampai memasukan dokumen penawaran dan mengikuti tahapan lelang baru. Sehingga, unsur persaingan tidak sehat yang diajukan INVESTIGATOR dalam LDP adalah prematur dan tidak tepat.

Kesimpulan Tanggapan.----------

Berdasarkan argumentasi hukum, dan pembuktian pada angka I dapat diambil kesimpulan, Bahwa TERLAPOR I tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Berdasarkan argumentasi dan bukti yang disampaikan dalam tanggapan ini, kami memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menghentikan pemeriksaan ini dengan mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan perkara *a quo* atau jika Majelis komisi berpendapat lain, agar menyatakan bahwa TERLAPOR I tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor II yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.4): ----------

3.1. TENDER AWAL PROYEK TIM TAHAP III & PEMBATALAN TENDER. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.1.1. Bahwa TERLAPOR II merupakan penyedia barang dan/atau jasa yang telah terdaftar sebagai rekanan dalam sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) milik TERLAPOR I *i.c* PT Jakarta Propertindo (Perseroda); ----------

3.1.2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, TERLAPOR II menerima undangan dari TERLAPOR I untuk mendaftar/mengikuti tender PROYEK TIM TAHAP III (Bukti TII - 1). Dalam undangan tersebut disampaikan bahwa pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal 6 Mei 2021 s/d tanggal 7 Mei 2021 dan Dokumen Pengadaan/*Request for Proposal* ("RfP") (Bukti TII - 2) dapat diunduh (*download*) melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/; ----------

3.1.3. Bahwa selanjutnya TERLAPOR II mendaftar sebagai peserta tender PROYEK TIM TAHAP III melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/; (Bukti TII - 3); -

3.1.4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, TERLAPOR II menerima undangan rapat penjelasan dokumen pengadaan (*Aanwijzing*) PROYEK TIM TAHAP III (Bukti TII - 4) dari TERLAPOR I. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021, TERLAPOR II menghadiri rapat penjelasan dokumen tender (*aanwijzing*) secara *online* melalui aplikasi *Microsoft Team*. ----------

3.1.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor: 003/BA.AW/PKT.18/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 *jo.* Risalah Aanwijzing tanggal 10 Mei 2021 (Bukti TII - 5), diketahui/diklarifikasi mengenai hal-hal antara lain sebagai berikut: ----------

a. Total HPS untuk pengadaan adalah sebesar Rp 481.997.141.120,- sudah termasuk PPN 10%;---

b. Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Evaluasi penawaran dilakukan dengan penilaian komposisi Teknis 70% dan Harga 30% serta ambang batas teknis (*passing grade*) 80.----------

d. Peserta diperbolehkan untuk membentuk Kerja Sama Operasi ("KSO") (*vide ketentuan BAB II huruf B angka 16.2 RfP*);----------

e. KSO harus didukung dengan surat perjanjian KSO dalam bentuk Akta Notaris (*vide ketentuan BAB II huruf D angka 31.7 RfP*); ----------

f. Sesuai dengan RfP, Peserta mengunggah/*upload* dokumen penawaran ke sistem aplikasi *eProcurement* JAKPRO dan mengirimkan *hardcopy* dokumen penawaran administrasi, teknis dan jaminan penawaran asli; ----------

g. Batas waktu pemasukan penawaran sampai dengan hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Pukul 12:00 WIB (melalui *eProcurement*), sedangkan penyerahan *hardcopy* penawaran dan jaminan dilakukan sampai dengan pukul 15:30 WIB ke kantor TERLAPOR I; ----------

h. Masa sanggah banding tanggal 10 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021 dengan jaminan sanggah banding sebesar Rp 5.000.000.000,- (*Lima milyar Rupiah*).---

3.1.6. Bahwa oleh karena dalam mengikuti tender PROYEK TIM TAHAP III peserta diperbolehkan untuk membentuk KSO, maka TERLAPOR II dan TERLAPOR III *i.c* PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, telah sepakat untuk membentuk KSO dengan nama PP-JAKON KSO, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, No. 01, tanggal 10 Mei

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2021, dibuat di hadapan Fatimah Anwar, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti TII - 6);----------

3.1.7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021, PP-JAKON KSO telah mengunggah/*upload* dokumen *softcopy* Dokumen Penawaran File I (*administrasi & teknis*) dan Dokumen Penawaran File II (*harga*) melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/, serta telah pula menyerahkan *hardcopy* Dokumen Penawaran File I dan II tersebut kepada kantor Tim Pengadaan TERLAPOR I (Bukti TII - 7);----------

3.1.8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2021, PP-JAKON KSO menerima *email* mengenai "Pengumuman Peringkat Teknis" (Bukti TII - 8), di mana dalam *email* tersebut diketahui bahwa hasil evaluasi dan penilaian atas Dokumen Penawaran File I (*dokumen administrasi & teknis*) PP-JAKON KSO dinyatakan lulus dan memperoleh skor tertinggi dengan nilai 92,78, sebagaimana dimaksud dalam tabel sebagai berikut:-----

Data Penyedia Barang/Jasa

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	92.78	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	92.62	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	89.57	3
4.	PT Hutama Karya (Persero)	LULUS	79.06	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
5.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	77.94	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

3.1.9. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB II Huruf D angka 32.2 RfP, pembukaan Dokumen Penawaran File II (*harga*) hanya dilakukan untuk peserta yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran File I. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2022, Tim Pengadaan yang dibentuk oleh TERLAPOR I telah melakukan pembukaan Dokumen Penawaran File II, dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan pada tanggal 10 Juni 2021 (Bukti TII - 9), diperoleh hasil/peringkat penilaian bahwa PP-JAKON KSO menduduki peringkat ke-3, sebagaimana tabel di bawah ini: ----------

Data Penyedia Barang/Jasa

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Adminstrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	77.94	409.678.000.000,00	0,00	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
2.	PT Hutama Karya (Persero)	LULUS	79.06	382.200.382.200,00	0,00	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
3.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	92.62	418.388.404.711,00	418.388.000.000,00	1
4.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	89.57	397.018.888.888,00	397.018.888.888,00	2
5.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	92.78	446.264.400.000,00	446.264.400.000,00	3

3.1.10. Bahwa sehubungan dengan pengumuman hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga di mana PP-JAKON KSO hanya menduduki peringkat ke-3, PP-JAKON KSO ingin mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/ penilaian, mengingat berdasarkan hasil evaluasi teknis PP-JAKON memperoleh skor tertinggi dengan nilai 92,78, sedangkan berdasarkan ketentuan BAB III butir 11 huruf F dan G RfP, mengenai Lembar Data Pemilihan, disebutkan bahwa tender PROYEK TIM TAHAP III mengutamakan evaluasi penawaran teknis dengan bobot 70% dan evaluasi penawaran harga dengan bobot 30%. ----------

F. Bobot penilaian masing-masing, yaitu:
- Bobot penawaran teknis: **70%**
- Bobot penawaran biaya: **30%**

G. Tim Lelang Jakpro melakukan perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan penawaran biaya terkoreksi, dengan ketentuan sebagai berikut: NILAI AKHIR={Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.1.11. Bahwa selanjutnya, untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/penilaian, maka PP-JAKON KSO mengirimkan *email* kepada Tim Pengadaan yang berisi surat Nomor: 002/Ext/VI/PP-JAKON/2021, tanggal 12 Juni 2021, Perihal: Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III ("Surat PP-JAKON KSO No.002/2021") (Bukti TII - 10), namun Tim Pengadaan belum memberikan respons baik secara lisan maupun tertulis terhadap Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut; ----------

3.1.12. Bahwa dalam rentang waktu menunggu adanya tanggapan/respons dari Tim Pengadaan atas Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut, pada tanggal 22 Juni 2021, PP-JAKON KSO menerima *email* dari Tim Pengadaan yang berisikan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang Nomor: 013/PENG-PKT.18/VI/2021, di mana dalam surat tersebut disampaikan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III dinyatakan batal (Bukti TII - 11); ----------

3.1.13. Bahwa terhadap pengumuman pembatalan tender tersebut, PP-JAKON KSO tidak memberikan tanggapan, namun sebagaimana diuraikan pada halaman 26 s/d halaman 27 LDP Tim Investigator KPPU, sehubungan dengan pembatalan tender tersebut, terdapat keberatan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk., dan atas keberatan tersebut, Tim Pengadaan TERLAPOR I telah memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut: ----------

a. Keberatan peserta tender hanya dapat difasilitasi melalui sanggahan dan keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk di luar mekanisme

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sanggah yang diatur dalam Request for Proposal (RFP) sehingga PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk tidak memiliki legal standing;----------

b. Pembatalan proses pengadaan barang dan jasa hanya dapat dilakukan oleh pengguna barang dan jasa, dapat dilakukan setiap saat sebelum penetapan pemenang. Pengguna barang dan jasa tidak memiliki kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta. Alasan perlu disampaikan dalam hal menurut pandangan dari pengguna barang dan jasa seluruh penawaran menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi) dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan (Butir 38.3 RFP);----------

c. Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/ peserta lelang setuju untuk tidak melakukan penuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Butir 38.2 RFP). ----------

3.2. TENDER BARU PROYEK TIM TAHAP III.----------

3.2.1. Bahwa setelah tender awal dinyatakan batal, pada tanggal 12 Juli 2021 TERLAPOR I melakukan tender baru dengan mengirimkan undangan kepada TERLAPOR II untuk mendaftar/mengikuti pengadaan/tender PROYEK TIM (Bukti TII - 12);----------
Dalam undangan tersebut juga disampaikan bahwa pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal 12 Juli 2021 pukul 13:30 s/d tanggal 12 Juli 2021 pukul 15:00 dan Dokumen Pengadaan/RfP (Bukti TII - 13) dapat diunduh (*download*) melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.2.2. Bahwa setelah menerima undangan tersebut, selanjutnya TERLAPOR II telah mendaftar sebagai peserta tender PROYEK TIM TAHAP III melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/(Bukti TII - 14); -

3.2.3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021, TERLAPOR II menerima undangan rapat *Aanwijzing* PROYEK TIM TAHAP III (Bukti TII - 15), dan kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 TERLAPOR II telah menghadiri rapat *Aanwizjing* secara *online* melalui aplikasi *Microsoft Team*; ----------

3.2.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor 003/BAAW/PKT.25/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021 *jo.* Risalah *Aanwijzing* tanggal 14 Juli 2021 (Bukti TII - 16), diketahui/diklarifikasi mengenai hal-hal antara lain sebagai berikut: ----------

a. Total HPS untuk pengadaan adalah sebesar Rp 438.179.219.200,- belum termasuk PPN 10%;----

b. Metode pemasukan dokumen penawaran adalah 2 (dua) File yang terdiri dari File I (administrasi dan teknis) dan File II (harga) serta dokumen kualifikasi;----------

c. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode skoring dengan komposisi penilaian teknis 70% dan harga 30% dengan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) 85%;----------

d. Peserta diperbolehkan membentuk KSO dengan peserta lain; ----------

e. KSO harus didukung dengan surat Perjanjian KSO dalam bentuk Akta Notaris; ----------

f. Sesuai RfP, Peserta mengunggah/*upload* dokumen penawaran ke sistem aplikasi *e-Procurement* JAKPRO dan mengirimkan hardcopy dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran administrasi, teknis dan jaminan penawaran asli; ----------

g. Batas waktu pemasukan penawaran sampai dengan hari Senin, 27 Juli 2021 Pukul 12.00 WIB (melalui *e-Procurement*), sedangkan penyerahan *hardcopy* penawaran dan jaminan dilakukan sampai dengan pukul 15.30 WIB ke kantor TERLAPOR I; ----------

h. Masa sanggah banding tanggal 09 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2021 dengan jaminan sanggah banding sebesar Rp 5.000.000.000,- (*Lima milyar Rupiah*). ----------

3.2.5. Bahwa oleh karena dalam tender baru PROYEK TIM TAHAP III, peserta tetap diperbolehkan untuk membentuk KSO, maka TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah sepakat untuk membentuk KSO baru dengan nama PP-JAKON KSO, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, No.1, tanggal 19 Juli 2021, dibuat di hadapan Fatimah Anwar, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti TII - 17);----------

3.2.6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2021, PP-JAKON KSO telah mengunggah/*upload softcopy* Dokumen Penawaran File I (*administrasi &* teknis) dan Dokumen Penawaran File II (*harga*) yang secara substansi berbeda dengan Dokumen Penawaran File I dan II pada tender awal PROYEK TIM TAHAP III (*i.c tender yang dibatalkan*), melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/ serta telah pula menyerahkan *hardcopy* Dokumen Penawaran File I dan II tersebut kepada kantor Tim Pengadaan TERLAPOR I (Bukti TII - 18); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.2.7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, PP-JAKON KSO menerima *email* "Pengumuman Peringkat Teknis" dari Tim Pengadaan (Bukti TII - 19), di mana dalam *email* tersebut diketahui bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penawaran administrasi dan teknis, PP-JAKON KSO dinyatakan lulus dan memperoleh skor tertinggi dengan nilai 95,07, sebagai berikut: ----------

PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021
Tanggal 02/08/2021

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis no : 005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021 tanggal 02/08/2021 tentang hasil evaluasi atas penawaran Administrasi dan teknis untuk Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III

Dengan ini kami sampaikan hasil peserta yang dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan Pembukaan Penawaran Harga Sampul II adalah sebagai berikut :

Data Penyedia Barang/Jasa				
No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	95.07	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	89.78	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	76.13	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
4.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	74.97	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

Selanjutnya akan dilakukan Pembukaan dan Evaluasi Sampul II terhadap peserta yang dinyatakan lulus.

3.2.8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2021, PP-JAKON KSO menerima *email* pemberitahuan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga (Bukti TII - 20) sebagai berikut: ----------

Data Penyedia Barang / Jasa						
No	Nama Penyedia Barang / Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1	PP – JAKON (KSO)	Lulus	96,13%	Rp415.815.000.000,- (*empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp378.013.636.364,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat I
2	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.	Lulus	92,85%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat II

3.2.9. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga tersebut PP-JAKON KSO memperoleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peringkat I, sehubungan dengan itu Tim Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi atas penawaran PP-JAKON KSO tersebut (Bukti TII - 21); ----------

3.2.10. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga, pada tanggal 9 Agustus 2021 Tim Pengadaan TERLAPOR I menyampaikan *email* "Pengumuman Pemenang Tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III", di mana dalam *email* tersebut menyatakan PP-JAKON KSO sebagai Pemenang Tender PROYEK TIM TAHAP III (Bukti TII - 22);----------

3.2.11. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya PP-JAKON KSO sebagai Pemenang Tender PROYEK TIM TAHAP III, terdapat keberatan atau sanggah yang diajukan oleh salah satu peserta tender sebagaimana diuraikan pada halaman 27 s/d 28 LDP Tim Investigator KPPU;----------

3.2.12. Bahwa sebagaimana diuraikan pada halaman 28 LDP Tim Investigator KPPU, terhadap keberatan atau sanggahan tersebut, Tim Pengadaan TERLAPOR I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena keberatan tersebut di luar mekanisme sanggah yang diatur dalam RfP.----------

Berdasarkan uraian kronologis di atas, PP-JAKON KSO telah melaksanakan seluruh tahapan dalam proses tender PROYEK TIM TAHAP III sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam RfP baik untuk Tender Awal (Batal) maupun Tender Baru. Dengan demikian penetapan PP-JAKON KSO sebagai Pemenang Tender PROYEK TIM TAHAP III telah final dan sah menurut hukum. ----------

3.3. DALAM POKOK PERKARA. ----------

TERLAPOR II menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP-nya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tegas kebenarannya oleh TERLAPOR II di dalam Tanggapan ini, berkenaan dan terbatas pada hal-hal relevan dengan kepentingan hukum TERLAPOR II, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

TENTANG PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN PASAL 22 UU No.5 TAHUN 1999

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli, berbunyi sebagai berikut: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*".

Dengan demikian, dari bunyi ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli sebagaimana dikutip di atas, maka unsur-unsur Pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut: ----------

a. *Unsur Pelaku Usaha;*----------
b. *Unsur Bersekongkol;* ----------
c. *Unsur Pihak Lain;*----------
d. *Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan* ----------
e. *Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.*----------

Bahwa TERLAPOR II menolak dengan tegas dalil-dalil Tim Investigator KPPU pada halaman 28 s/d halaman 35 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa PARA TERLAPOR diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli dan memenuhi unsur-unsur pasal yang dituduhkan, berdasarkan alasan hukum dan argumentasi yuridis sebagai berikut: ----------

3.3.1. <u>Mengenai Unsur Pelaku Usaha. ----------</u>

a. Bahwa Pelaku Usaha sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.2 Tahun 2010 ("Peraturan KPPU No.2/2010"), adalah:-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*"

b. Bahwa TERLAPOR II (PP-JAKON KSO) sepakat dengan dalil Tim Investigator sebagaimana diuraikan pada halaman 29 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa: ----------

1. Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah TERLAPOR I selaku pihak yang secara badan hukum telah diberikan penugasan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan dan perawatan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM); ----------
2. TERLAPOR I telah membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada Tim Pengadaan yang melaksanakan proses pengadaan berdasarkan penugasan dari TERLAPOR I sehingga perbuatan dan/atau tindakannya secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk dan atas nama serta menjadi tanggung jawab TERLAPOR I. ----------

c. Bahwa dengan demikian, PP-JAKON KSO sependapat bahwa unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo telah terpenuhi. ----------

3.3.2. <u>Mengenai Unsur Bersekongkol.</u> ----------

a. Bahwa bersekongkol menurut Peraturan KPPU No.2/2010, adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".

Adapun unsur bersekongkol dapat berupa: ----------

1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;* ----------
2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;* ----------
3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* ----------
4. *menciptakan persaingan semu;* ----------
5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------
6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;* ----------
7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.* ----------

b. Bahwa Tim Investigator pada butir 10.2 halaman 29 s/d 31 LDP, pada intinya menyatakan: ----------

1. TERLAPOR I telah melaksanakan proses pengadaan Pembangunan/Pekerjaan PKJ TIM *Tahap* III mulai tanggal 6 Mei 2021 dengan mengundang 11 (sebelas) perusahaan rekanan TERLAPOR I yang memenuhi persyaratan menjadi peserta tender. ----------
2. Selanjutnya proses tender dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk TERLAPOR I hingga tahap klarifikasi dan negosiasi yang dilakukan terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang ditetapkan sebagai penawar terbaik (peringkat I); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Atas hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I, pada tanggal 12 Juni 2021, PP-JAKON KSO mengajukan keberatan atas hasil evaluasi dan meminta diberikan rincian komponen penilaian yang digunakan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I dalam melakukan evaluasi dan penilaian teknis para peserta tender;----------
4. Pada tanggal 21 Juni 2021, Tim Pengadaan TERLAPOR I melaporkan hasil proses tender kepada Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I dengan menyatakan: ----------

   "Dengan telah dicapainya kesepakatan Klarifikasi & Negosiasi oleh semua pihak dan telah membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi (BAKN) maka untuk selanjutnya dapat dilakukan pengumuman pemenang".
5. Atas usulan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2021 (pukul 23.13) Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I menyampaikan pemberitahuan kepada Achmad Ismarwan selaku Ketua Tim Pengadaan bahwa usulan Tim Pengadaan tidak disetujui dengan menyatakan: ----------

   "... dengan ini selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan tidak menyetujui tahapan pengumuman pemenang tersebut.

   Maka dengan ini disampaikan lelang dinyatakan batal dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya."

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. Setelah keputusan pembatalan tender oleh TERLAPOR I tersebut, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 TERLAPOR I membentuk Tim Pengadaan yang baru dengan mengganti ketua Tim Pengadaan dan beberapa anggota Tim Pengadaan sebelumnya.----------
7. Kemudian Tim Pengadaan tersebut melakukan proses tender baru hingga akhirnya menetapkan PP-JAKON KSO menjadi peserta terbaik dan selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang tender.

Fakta tersebut membuktikan telah terjadi tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu dan/atau secara langsung maupun tidak langsung merupakan kerja sama yang menguntungkan peserta tender tertentu (*i.c PP-JAKON KSO*) dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol.- Atas dasar hal tersebut, maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----------

c. Bahwa TERLAPOR II (PP-JAKON KSO) menolak kesimpulan Tim Investigator sebagaimana diuraikan pada butir ii di atas yang pada intinya menyatakan bahwa unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* telah terpenuhi, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

1. Tim Investigator sama sekali tidak dapat menguraikan/ membuktikan terpenuhinya unsur-unsur bersekongkol dalam Peraturan KPPU No.2/2010, bagian tindakan/ perbuatan mana dari PARA TERLAPOR yang dimaksudkan oleh Tim Investigator dalam 10.2 halaman 29 s/d 31 LDP termasuk unsur bersekongkol, seperti: ---
   - *kerjasama antara dua pihak atau lebih;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;* ----------
- *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* ----------
- *menciptakan persaingan semu;* ----------
- *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*----------
- *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*----------
- *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.* ----------

2. Jika yang dimaksudkan adalah tindakan PP-JAKON KSO dalam mengirimkan Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 kepada Tim Pengadaan melalui *email* tanggal 12 Juni 2021 (*vide Bukti TII - 10*), faktanya surat tersebut hanya berisikan permintaan/permohonan PP-JAKON KSO kepada Tim Pengadaan untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/ penilaian teknis PROYEK TIM TAHAP III dan sama sekali TIDAK berisikan permintaan/ permohonan kepada Tim Pengadaan untuk membatalkan Tender Awal. ----
3. Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut semata-mata disampaikan kepada Tim Pengadaan karena PP-JAKON KSO sangat memahami adanya ketentuan BAB III butir 11 huruf F dan G RfP, mengenai Lembar Data Pemilihan, yang menyebutkan bahwa tender PROYEK TIM TAHAP III mengutamakan evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran teknis dengan bobot 70% dan evaluasi penawaran harga dengan bobot 30%.----

F. Bobot penilaian masing-masing, yaitu:
- Bobot penawaran teknis: **70%**
- Bobot penawaran biaya: **30%**

G. Tim Lelang Jakpro melakukan perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan penawaran biaya terkoreksi, dengan ketentuan sebagai berikut: NILAI AKHIR={Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}

Hal yang sama juga disampaikan dalam rapat *Aanwijzing* tanggal 10 Mei 2021 bahwa dalam tender PROYEK TIM TAHAP III antara lain ditetapkan bahwa sistem penilaian komposisi adalah penawaran Teknis 70% dan penawaran Harga 30% serta ambang batas teknis (*passing grade*) 80.----------

Berdasarkan sistem penilaian yang diatur dalam BAB III butir 11 huruf F dan G RfP, mengenai Lembar Data Pemilihan dan klarifikasi pada saat *Aanwijzing* tanggal 10 Mei 2021, PP-JAKON KSO memiliki keyakinan bahwa total nilai atas penawaran teknis yang seharusnya diperoleh PP-JAKON KSO berdasarkan hasil kajian/ perhitungan sendiri (*internal*) adalah 95,77 (Bukti TII - 23) dan dengan penawaran harga sebesar Rp 446.264.400.000,- sudah termasuk PPN, maka seharusnya PP-JAKON KSO berada pada peringkat I Tender Awal (yang dibatalkan); -

4. Dalam surat Tim Pengadaan mengenai Pengumuman Pembatalan Lelang Nomor: 013/Peng-PKT.18/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, disebutkan pembatalan lelang didasarkan pada Keputusan Direktur SDM dan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR I tanggal 21 Juni 2021 yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 38.2 dan 38.3 RfP, BUKAN didasarkan pada Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut. ----------

PENGUMUMAN PEMBATALAN LELANG

PENGADAAN PEKERJAAN REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III.
Nomor : 013/PENG-PKT.18/VI/2021
Tanggal 22 Juni 2021

Berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pada pasal 38.2 dan 38.3 dalam Request for Proposal disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal.

Demikian agar pengumuman ini diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2021
Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi
Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki – Tahap III
Ketua,

Achmad Ismarwan

Sehingga surat Pengumuman Pembatalan Lelang tersebut, tidak memiliki hubungan/keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Surat PP-JAKON KSO No.002/2021.------

5. Tim Investigator sendiri bahkan telah mendalilkan bahwa atas usulan Ketua Tim Pengadaan, Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I tidak menyetujui usulan Tim Pengadaan dengan menyatakan: ----------

"... dengan ini selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan tidak menyetujui tahapan pengumuman pemenang tersebut.

Maka dengan ini disampaikan lelang dinyatakan batal dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya."

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fakta Hukum demikian sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 dengan Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan Tender Awal dan selanjutnya mengadakan Tender Baru dengan mengganti Tim dan Dokumen Pengadaan, karena senyatanya Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tidak pernah mendapatkan respons/ tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari Tim Pengadaan maupun TERLAPOR I dan tidak pula dijadikan dasar untuk mengambil keputusan pembatalan tender. ----------

Dengan demikian dugaan Tim Investigator KPPU yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan bersekongkol dalam bentuk memfasilitasi peserta tender tertentu dan/atau secara langsung atau tidak langsung merupakan kerja sama yang menguntungkan peserta tender tertentu (*i.c PP-JAKON KSO*) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terbukti. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Komisi menolak LDP Tim Investigator KPPU tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

3.3.3. Mengenai Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

a. Bahwa TERLAPOR II (PP-JAKON KSO) sepakat dengan dalil Tim Investigator sebagaimana diuraikan dalam halaman 31 s/d 32 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah TERLAPOR II dan TERLAPOR III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa dengan demikian, PP-JAKON KSO sependapat dengan Tim Investigator KPPU bahwa unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* telah terpenuhi. ----------

3.3.4. Mengenai Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.----------

a. Bahwa unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam Peraturan KPPU No.2/2010 adalah:----------

"*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.*

b. Bahwa Tim Investigator pada butir 10.9 halaman 32 s/d 33 LDP, pada intinya menyatakan: ----------

1. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh TERLAPOR I setelah PP-JAKON KSO melakukan keberatan atas hasil evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Pengadaan; ----------
2. Selanjutnya TERLAPOR I menindaklanjuti keberatan PP-JAKON KSO dengan tidak menyetujui hasil tender yang telah selesai dilakukan Tim Pengadaan (yang diketahui oleh Achmad Ismarwan) dan memerintahkan Divisi Pengadaan TERLAPOR I untuk melakukan tender ulang; ----------
3. Kemudian TERLAPOR I membentuk Tim Pengadaan yang baru untuk melakukan tender ulang dan selanjutnya melakukan proses tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan lebih mengakomodasi kepentingan PP-JAKON KSO sehingga pada akhirnya PP-JAKON KSO menjadi peserta peringkat I serta diusulkan menjadi pemenang; ----------

4. Pada tanggal 16 Agustus 2021, TERLAPOR I menetapkan PP-JAKON KSO menjadi pemenang tender dan menjadi perusahaan pelaksana PROYEK TIM TAHAP III. ----------

Atas dasar fakta tersebut, maka tindakan PARA TERLAPOR dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. ----------

Oleh karena itu, Tim Investigator berpendapat unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

c. Bahwa TERLAPOR II (PP-JAKON KSO) menolak kesimpulan Tim Investigator sebagaimana diuraikan pada butir ii di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

1. PP-JAKON KSO TIDAK pernah mengajukan keberatan atas hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan pada tanggal 10 Juni 2021. ----------
2. Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 yang diajukan pada tanggal 12 Juni 2021 kepada Tim Pengadaan merupakan surat yang berisikan permintaan/ permohonan untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/penilaian teknis PROYEK TIM TAHAP III dan sama sekali TIDAK berisikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan untuk membatalkan Tender Awal. ----------
Bahkan terhadap Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut, TERLAPOR I maupun Tim Pengadaan, TIDAK pernah memberikan respons baik secara lisan maupun tertulis. ----------

3. Sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengumuman Pembatalan Tender Tim Pengadaan, bahwa Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan Tender Awal dilakukan berdasarkan ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP (*Vide Bukti TII - 2*), yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:----------

38. HAK PENGGUNA BARANG/JASA UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PENAWARAN	38.1	Apabila pemenang seleksi mengundurkan diri, Tim pengadaan berhak langsung menetapkan kandidat terbaik berikutnya sebagai pelaksana pekerjaan dan pengadaan barang.
	38.2	Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda).
	38.3	Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP, keputusan pembatalan Tender Awal merupakan hak TERLAPOR I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai pengguna barang dan jasa (Pelaku Usaha) dan calon penyedia jasa *i.c* PP-JAKON KSO (Pelaku Usaha Lain) sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apa pun terhadap TERLAPOR I dan bahwa pembatalan proses pengadaan dapat dilakukan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan oleh TERLAPOR I. ----------

4. Selanjutnya keputusan TERLAPOR I untuk membentuk Tim Pengadaan baru dan melakukan tender baru merupakan kewenangan TERLAPOR I selaku Perseroan Daerah yang telah ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, sebagaimana diuraikan juga dalam halaman 7 s/d halaman 8 LDP Tim Investigator KPPU. -------
5. PP-JAKON KSO TIDAK PERNAH melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung, dengan Tim Pengadaan, TERLAPOR I maupun peserta tender (*calon penyedia jasa*) lainnya, dengan tujuan untuk mengatur dan/atau menetapkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender PROYEK TIM TAHAP III. ----------

Dengan demikian, kesimpulan Tim Investigator KPPU yang menyatakan tindakan PARA TERLAPOR sebagaimana diuraikan pada *butir* ii di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang i.c PP-JAKON KSO merupakan kesimpulan yang menyesatkan, tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, unsur mengatur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau menentukan pemenang tender tidak terbukti dan karenanya LDP Tim Investigator KPPU haruslah ditolak oleh Majelis Komisi.----------

3.3.5. Mengenai Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat----------

a. Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Peraturan KPPU No.2/2010 adalah:----------

"*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

b. Bahwa Tim Investigator pada butir 10.10 halaman 33 s/d 35, pada intinya menyatakan tindakan PARA TERLAPOR dalam pengadaan PROYEK TIM TAHAP III dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha, berdasarkan alasan sebagai berikut:----------

1. Tindakan TERLAPOR I membatalkan tender secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan transparan bertentangan dengan prinsip dan/atau etika pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan TERLAPOR I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang terlebih telah menghilangkan upaya apa pun dari peserta untuk memperjuangkan haknya jika dirugikan dalam proses tender;----------
2. Dalam perkara *a quo* TERLAPOR I terbukti melakukan diskriminasi terhadap peserta tender yaitu ketika PP-JAKON KSO mengajukan keberatan terkait evaluasi teknis maka TERLAPOR I mengakomodasi dengan membatalkan tender. Namun ketika PT Wijaya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karya Bangunan Gedung Tbk, mengajukan keberatan terkait dengan alasan pembatalan tender, TERLAPOR I sama sekali tidak memberikan jawaban yang substansial dengan alasan keberatan di luar mekanisme sanggah yang telah diatur dalam RfP, padahal apabila mengacu pada RfP, baik keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, maupun keberatan PP-JAKON KSO sama-sama di luar mekanisme sanggah sebagaimana diatur dalam RfP. ----------

3. Tindakan yang dilakukan PARA TERLAPOR berdampak pada peserta tender lain (i.c PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk) yang tertutup kesempatannya menjadi pemenang karena tender dibatalkan oleh TERLAPOR I padahal dalam tender tersebut PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk merupakan penawar terbaik (peringkat I) yang telah melalui tahapan terakhir proses tender dan tinggal persetujuan pemenang. ----------

Atas dasar analisis tersebut, maka Tim Investigator menyimpulkan unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. -

c. Bahwa TERLAPOR II (PP-JAKON KSO) menolak kesimpulan Tim Investigator KPPU sebagaimana diuraikan pada butir ii di atas yang pada intinya menyatakan unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

1. Materi kesimpulan Tim Investigator sebagaimana diuraikan pada butir ii di atas sangatlah menyesatkan, tendensius dan terkesan hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mencari-cari kesalahan karena faktanya TERLAPOR I tidak pernah berkomunikasi/ berinteraksi dengan TERLAPOR II (PP-JAKON KSO) untuk mengatur pemenang tertentu dalam tender PROYEK TIM TAHAP III. Oleh karena itu, terbukti TERLAPOR I tidak pernah mengakomodir keberatan PP-JAKON KSO, karena memang senyatanya PP-JAKON KSO tidak pernah menyampaikan keberatan dan/atau sanggahan atas hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I;----------

2. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 kepada Tim Pengadaan hanya merupakan surat yang berisikan permintaan/ permohonan untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/penilaian teknis PROYEK TIM TAHAP III dan sama sekali TIDAK berisikan permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan untuk membatalkan Tender Awal. ---- Bahkan terhadap Surat PP-JAKON KSO No.002/2021, TERLAPOR I maupun Tim Pengadaan, TIDAK pernah memberikan respons baik secara lisan maupun tertulis. Fakta hukum ini cenderung diabaikan oleh Tim Investigator meskipun sebagai peserta tender PP-JAKON KSO sepatutnya berhak untuk mendapatkan penjelasan terkait hasil evaluasi penawaran teknis yang dilakukan oleh Tim Pengadaan. ------
3. Sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengumuman Pembatalan Tender Tim Pengadaan, bahwa Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan Tender Awal dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP, yang pada intinya mengatur bahwa pembatalan Tender Awal merupakan hak TERLAPOR I sebagai pengguna barang dan jasa dan calon penyedia jasa *i.c* PP-JAKON KSO sudah sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap TERLAPOR I dan bahwa pembatalan proses pengadaan dapat dilakukan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan oleh TERLAPOR I. ----------

Dengan demikian, pembatalan Tender Awal oleh TERLAPOR I sama sekali tidak berhubungan dengan Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 dan karenanya terbukti TERLAPOR I tidak pernah mengakomodir keberatan dari PP-JAKON KSO dan bahwa PP-JAKON KSO terbukti tidak pernah menyampaikan surat keberatan kepada Tim Pengadaan. ----------

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kesimpulan Tim Investigator KPPU yang menyatakan tindakan PARA TERLAPOR dalam pengadaan PROYEK TIM TAHAP III dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha merupakan kesimpulan yang menyesatkan, tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi tidak terbukti dan karenanya LDP Tim Investigator KPPU haruslah ditolak oleh Majelis Komisi. ----------

3.3.6. Bahwa sebagaimana telah TERLAPOR II uraikan pada angka 2.1 s/d 2.5 di atas, terbukti bahwa: ----------

a. TERLAPOR I selaku Pelaku Usaha dengan PP-JAKON KSO selaku Pelaku Usaha Lain tidak melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan dalam bentuk memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender PROYEK TIM TAHAP III;----------

b. TERLAPOR I, Tim Pengadaan dan PP-JAKON KSO terbukti tidak pernah mengatur dan/atau menentukan pemenang tender PROYEK TIM TAHAP III. ----------

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun unsur pelaku usaha dan unsur pelaku usaha lain terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang dan unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi/tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur pasal 22 UU Antinomopoli tentang Persekongkolan menjadi tidak terbukti.----------

3.4. Sebagai peserta tender, PP-JAKON KSO telah mengikuti dan menjalani tahapan dan proses tender PROYEK TIM TAHAP III sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Tim Pengadaan, sebagaimana tertuang dalam RfP, dan dijalankan secara "*jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha*". ----------

3.4.1. Terlebih proses investigasi sampai dengan dibacakannya LDP pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2023 telah berlangsung selama ± 1 tahun dan pada saat ini PP-JAKON KSO telah menyelesaikan pekerjaan PROYEK TIM TAHAP III hingga mencapai progres 100% (Bukti TII-24 a s/d BUKTI TII-24) dan telah dioperasikan untuk masyarakat umum. ----------

3.4.2. Dengan telah dapat difungsikannya PROYEK TIM TAHAP III untuk kepentingan masyarakat umum, maka investasi yang dilakukan oleh TERLAPOR I terbukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena pada saat ini Taman Ismail Marzuki telah menjadi bangunan multifungsi atau *mixed-use building* yang bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat luas termasuk bagi para seniman tanah air untuk berkarya dan berkreasi. ----------

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil/tuduhan Tim Investigator KPPU dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar, keliru, mengada-ada dan sangat menyesatkan dan karenanya telah sangat merugikan reputasi TERLAPOR II sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Konstruksi ternama yang selalu melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan berpedoman pada *Good Coorporate Governance* (GCG). ----------

3.5. Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERLAPOR II (PP-JAKON KSO) mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -------

3.5.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, tidak terbukti karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan; ----------

3.5.2. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada sidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemeriksaan pendahuluan tanggal 16 Januari 2023 untuk seluruhnya; dan----------

3.5.3. Menyatakan TERLAPOR II tidak melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III. ----------

Atau, apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*). ----------

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor III yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.3):----------

4.1. TENDER AWAL (BATAL).----------

4.1.1. Bahwa TERLAPOR III merupakan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa konstruksi yang telah terdaftar sebagai rekanan dalam sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) milik TERLAPOR I *i.c* PT Jakarta Propertindo (Perseroda); ----------

4.1.2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, TERLAPOR III menerima undangan dari TERLAPOR I untuk mendaftar/mengikuti tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (Bukti TIII - 1). ----------

4.1.3. Bahwa dalam undangan tersebut disampaikan bahwa pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal 6 Mei 2021 s/d tanggal 7 Mei 2021 dan Dokumen Pengadaan/Request for Proposal (“RfP”) (Bukti TIII - 2) dapat diunduh (*download*) melalui website https://eproc.jakarta-propertindo.com/; ----------

4.1.4. Bahwa selanjutnya TERLAPOR III mendaftar sebagai peserta tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III melalui website https://eproc.jakarta-propertindo.com/; (Bukti TIII - 3);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, TERLAPOR III menerima undangan rapat mengenai penjelasan dokumen pengadaan (*Aanwijzing*) Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (Bukti TIII - 4) TERLAPOR I. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021, TERLAPOR III menghadiri rapat penjelasan dokumen tender (*aanwijzing*) secara *online* melalui aplikasi *Microsoft Team*. ----------

4.1.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor: 003/BA.AW/PKT.18/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 *jo.* Risalah *Aanwijzing* tanggal 10 Mei 2021 (Bukti TIII - 5), diketahui bahwa hasil rapat *Aanwizing* tersebut antara lain sebagai berikut: ----------

a. Total HPS untuk pengadaan adalah sebesar Rp 481.997.141.120,- sudah termasuk PPN sebesar 10%;----------

b. Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;----------

c. Evaluasi penawaran dilakukan dengan penilaian komposisi Teknis 70% dan Harga 30% serta ambang batas teknis (*passing grade*) 80.----------

d. Peserta diperbolehkan untuk membentuk Kerja Sama Operasi ("KSO") (*vide ketentuan BAB II huruf B angka 16.2 RfP*);----------

e. KSO harus didukung dengan surat perjanjian KSO dalam bentuk Akta Notaris (vide *ketentuan BAB II huruf D angka 31.7 RfP*);----------

f. Sesuai dengan RfP, Peserta mengunggah/*upload* dokumen penawaran ke sistem aplikasi *eProcurement* JAKPRO dan mengirimkan *hardcopy* dokumen penawaran administrasi, teknis dan jaminan penawaran asli; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Batas waktu pemasukan penawaran sampai dengan hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Pukul 12:00 WIB (melalui *eProcurement*), sedangkan penyerahan *hardcopy* penawaran dan jaminan dilakukan sampai dengan pukul 15:30 WIB ke kantor TERLAPOR I;-----

h. Masa sanggah tanggal 10 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021 dengan jaminan sanggah sebesar Rp 5.000.000.000,- (*Lima milyar Rupiah*). ----------

4.1.7. Bahwa oleh karena dalam mengikuti tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III peserta diperbolehkan untuk membentuk KSO, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR II *i.c* PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, telah sepakat untuk membentuk KSO dengan nama PP-JAKON KSO, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, No. 01, tanggal 10 Mei 2021, dibuat di hadapan Fatimah Anwar, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti TIII - 6);----------

4.1.8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021, PP-JAKON KSO telah mengunggah/*upload* dokumen *softcopy* Dokumen Penawaran File I (*administrasi & teknis*) dan Dokumen Penawaran File II (*harga*) melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/, serta telah pula menyerahkan *hardcopy* Dokumen Penawaran File I dan II tersebut kepada kantor Tim Pengadaan TERLAPOR I (Bukti TIII - 7); ----------

4.1.9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021, PP-JAKON KSO menerima *email* terkait "Pengumuman Peringkat Teknis" (Bukti TIII - 8), isi dari *email* tersebut diketahui merupakan hasil evaluasi dan penilaian atas Dokumen Penawaran File I (*dokumen administrasi & teknis*) DIMANA PP-JAKON KSO *i.c* TERLAPOR III dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR II dinyatakan lulus dan memperoleh skor tertinggi dengan nilai 92,78, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut: ----------

Data Penyedia Barang/Jasa

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	92.78	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	92.62	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	89.57	3
4.	PT Hutama Karya (Persero)	LULUS	79.06	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
5.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	77.94	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

4.1.10. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB II Huruf D angka 32.2 RfP, pembukaan terhadap *Dokumen* Penawaran File II (*harga*) hanya dilakukan kepada peserta yang lulus pada evaluasi Dokumen Penawaran File I. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2022, Tim Pengadaan yang dibentuk oleh TERLAPOR I telah melakukan pembukaan Dokumen Penawaran File II, dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Tim Pengadaan pada tanggal 10 Juni 2021 (Bukti TIII - 9), diperoleh hasil/peringkat penilaian bahwa TERLAPOR III dalam hal ini namanya diwakili oleh TERLAPOR II selaku *leader* dalam KSO menduduki peringkat ke-3, sebagaimana tabel dibawah ini: ----------

Data Penyedia Barang/Jasa

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Adminstrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	77.94	409.678.000.000,00	0,00	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
2.	PT Hutama Karya (Persero)	LULUS	79.06	382.200.382.200,00	0,00	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
3.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	92.62	418.388.404.711,00	418.388.000.000,00	1
4.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	89.57	397.018.888.888,00	397.018.888.888,00	2
5.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	92.78	446.264.400.000,00	446.264.400.000,00	3

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.11. Bahwa terhadap hasil evaluasi teknis dan harga tersebut, PP-JAKON KSO *i.c* KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II mengirimkan *email* kepada Tim Pengadaan yang berisi surat Nomor: 002/Ext/VI/PP-JAKON/2021, tanggal 12 Juni 2021, Perihal: Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (Bukti TIII - 10), namun Tim Pengadaan tidak pernah memberikan respons baik secara lisan maupun tertulis terhadap surat PP-JAKON KSO tersebut; ----------

4.1.12. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, TERLAPOR III menerima *email* dari Tim Pengadaan yang berisikan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang Nomor: 013/PENG-PKT.18/VI/2021, di mana dalam surat tersebut disampaikan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III serta tender dinyatakan batal (Bukti TIII - 11);----------

4.1.13. Bahwa berdasarkan dengan pembatalan tender tersebut, terdapat keberatan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk., sebagaimana yang telah diuraikan dalam LDP Tim Investigator KPPU pada halaman 26 s/d halaman 27. Atas keberatan tersebut, Tim Pengadaan TERLAPOR I juga sudah memberikan jawaban atas keberatan dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. yang pada intinya sebagai berikut:----------

a. Keberatan peserta tender hanya dapat difasilitasi melalui sanggahan dan keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk di luar mekanisme sanggah yang diatur dalam Request for Proposal (RFP) sehingga PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk tidak memiliki legal standing; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pembatalan proses pengadaan barang dan jasa hanya dapat dilakukan oleh pengguna barang dan jasa, dapat dilakukan setiap saat sebelum penetapan pemenang. Pengguna barang dan jasa tidak memiliki kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta. Alasan perlu disampaikan dalam hal menurut pandangan dari pengguna barang dan jasa seluruh penawaran menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi) dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan (Butir 38.3 RFP);----------

c. Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/ peserta lelang setuju untuk tidak melakukan penuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Butir 38.2 RFP). ----------

4.2. TENDER BARU. ----------

4.2.1. Bahwa setelah tender awal dinyatakan batal, pada tanggal 12 Juli 2021 TERLAPOR I melakukan tender baru dengan mengirimkan undangan kepada TERLAPOR III untuk mendaftar/mengikuti pengadaan/tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (Bukti TIII - 12);----------
Dalam undangan tersebut juga disampaikan bahwa pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal 12 Juli 2021 pukul 13:30 s/d tanggal 12 Juli 2021 pukul 15:00 dan Dokumen Pengadaan/ RfP (Bukti TIII - 13) dapat diunduh (*download*) melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/;----------

4.2.2. Bahwa setelah menerima undangan tersebut, selanjutnya TERLAPOR III telah mendaftar sebagai peserta tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahap III melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/ (Bukti TIII - 14); ----------

4.2.3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021, TERLAPOR III menerima undangan rapat *Aanwijzing* Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (Bukti TIII - 15), dan kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 TERLAPOR III telah menghadiri rapat *Aanwizjing* secara *online* melalui aplikasi *Microsoft Team*; ----------

4.2.4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor 003/BAAW/PKT.25/VII/2021, tertanggal 14 Juli 2021 jo. Risalah *Aanwijzing* tanggal 14 Juli 2021 (Bukti TIII - 16), diketahui rincian hasil rapat *Aanwizjing* tersebut adalah sebagai berikut: --------

a. Total HPS untuk pengadaan adalah sebesar Rp 438.179.219.200,- belum termasuk PPN 10%; --------
b. Metode pemasukan dokumen penawaran adalah 2 (dua) File yang terdiri dari File I (administrasi dan teknis) dan File II (harga) serta dokumen kualifikasi;
c. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode skoring dengan komposisi penilaian teknis 70% dan harga 30% dengan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) 85%; ----------
d. Peserta diperbolehkan membentuk KSO dengan peserta lain;----------
e. KSO harus didukung dengan surat Perjanjian KSO dalam bentuk Akta Notaris;----------
f. Sesuai dengan RfP, Peserta yang mengikuti tender mengunggah/*upload* dokumen penawaran ke sistem aplikasi *e-Procurement* JAKPRO dan mengirimkan hardcopy dokumen penawaran administrasi, teknis dan jaminan penawaran asli; ----------
g. Batas waktu pemasukan penawaran sampai dengan hari Senin, 27 Juli 2021 Pukul 12.00 WIB (melalui *e-*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Procurement). sedangkan penyerahan *hardcopy* penawaran dan jaminan dilakukan sampai dengan pukul 15.30 WIB ke kantor TERLAPOR I; ----------

h. Masa sanggah tanggal 09 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2021 dengan jaminan sanggah sebesar Rp 5.000.000.000,- (*Lima milyar Rupiah*). ----------

4.2.5. Bahwa dikarenakan dalam tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (*i.c tender baru*), peserta tender tetap diperbolehkan untuk membentuk KSO, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR II telah sepakat untuk membentuk KSO baru dengan nama PP-JAKON KSO, sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, No.1, tanggal 19 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Fatimah Anwar, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor (Bukti TIII - 17);----------

4.2.6. Bahwa selanjutnya PP-JAKON KSO telah mengunggah/*upload softcopy* Dokumen Penawaran File I (*administrasi & teknis*) dan Dokumen Penawaran File II (*harga*) pada tanggal 27 Mei 2021,yang secara substansi berbeda dengan Dokumen Penawaran File I dan II pada tender awal (*i.c tender yang dibatalkan*), melalui https://eproc.jakarta-propertindo.com/ serta PP-JAKON KSO telah menyerahkan *hardcopy* Dokumen Penawaran File I dan II tersebut kepada kantor Tim Pengadaan TERLAPOR I (Bukti TIII - 18); ----------

4.2.7. Bahwa, KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II menerima *email* terkait “Pengumuman Peringkat Teknis” dari Tim Pengadaan (Bukti TIII - 19) pada tanggal 2 Agustus 2021, di mana dalam *email* tersebut diketahui bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penawaran administrasi dan teknis, PP-JAKON KSO dinyatakan lulus dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperoleh skor tertinggi dengan nilai 95,07, sebagai berikut: ----------

PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021
Tanggal 02/08/2021

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis no : 005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021 tanggal 02/08/2021 tentang hasil evaluasi atas penawaran Administrasi dan teknis untuk Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III

Dengan ini kami sampaikan hasil peserta yang dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan Pembukaan Penawaran Harga Sampul II adalah sebagai berikut :

Data Penyedia Barang/Jasa				
No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	95.07	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	89.78	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	76.13	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
4.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	74.97	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

Selanjutnya akan dilakukan Pembukaan dan Evaluasi Sampul II terhadap peserta yang dinyatakan lulus.

4.2.8. Bahwa selanjutnya, PP-JAKON KSO menerima pemberitahuan hasil evaluasi administrasi, terkait teknis dan harga pada tanggal 8 Agustus 2021 (Bukti TIII - 20) dengan rincian sebagai berikut: ----------

Data Penyedia Barang / Jasa						
No	Nama Penyedia Barang / Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1	PP – JAKON (KSO)	Lulus	96,13%	Rp415.815.000.000,- (*empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp378.013.636.364,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat I
2	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.	Lulus	92,85%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat II

4.2.9. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga tersebut PP-JAKON KSO *i.c* KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II memperoleh score tertinggi dan menduduki peringkat I, kemudian sebagai tindak lanjut Tim Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi atas penawaran KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II tersebut (Bukti TIII - 21);----------

4.2.10. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga, pada tanggal 9 Agustus 2021 Tim Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR I menyampaikan melalui *email* perihal "Pengumuman Pemenang Tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III", yang mana dalam *email* tersebut menyatakan bahwa PP-JAKON KSO sebagai Pemenang Tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (Bukti TIII - 22);----------

4.2.11. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya PP-JAKON KSO pada *email* dari Terlapor I tertanggal 9 Agustus 2021 sebagai Pemenang Tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, dimana terkait penetapan tersebut terdapat keberatan atau sanggah yang diajukan oleh salah satu peserta tender sebagaimana dalam uraian Tim Investigator KPPU pada halaman 27 s/d 28 LDP;----------

4.2.12. Bahwa sebagaimana uraian yang ada pada halaman 28 LDP Tim Investigator KPPU, keberatan atau sanggahan tersebut yang diajukan oleh salah satu peserta tender, Tim Pengadaan TERLAPOR I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena keberatan tersebut di luar mekanisme sanggah yang diatur dalam RfP; ------

Dari uraian penjelasan kronologis di atas, PP-JAKON KSO (*i.c KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II*) telah melaksanakan seluruh rangkaian proses tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III yang berpedoman pada ketentuan dan tata cara yang tertulis dalam RfP baik pada Tender Awal (Batal) maupun Tender Baru. ----------

Oleh karena itu terkait penetapan PP-JAKON KSO i.c KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II sebagai Pemenang Lelang dan Pelaksana Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III telah FINAL DAN SAH menurut hukum. ----------

4.3. DALAM POKOK PERKARA. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III secara tegas menolak semua dalil-dalil tuduhan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP-nya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERLAPOR III yang tercantum di dalam Tanggapan ini, berkenaan dan hanya terbatas pada hal-hal yang relevan dengan kepentingan hukum TERLAPOR III, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

KSO TERLAPOR III DAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR I TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PROYEK REVITALISASI TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III

4.3.1. Bahwa TERLAPOR III menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Tim Investigator KPPU pada halaman 29 s/d halaman 31 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa TERLAPOR I dengan KSO TERLAPOR II dan TERLAPOR III *i.c* PP-JAKON KSO telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol berdasarkan alasan hukum dan argumentasi yuridis sebagai berikut:----------

a. Bahwa berdasarkan Surat PP-JAKON KSO Nomor: 002/Ext/VI/PP-JAKON/ 2021, tertanggal 12 Juni 2021, Perihal: Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III ("Surat PP-JAKON KSO No.002/2021"), sama sekali tidak memiliki hubungan/keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Keputusan yang diambil oleh TERLAPOR I untuk membatalkan tender. ----------

b. Bahwa Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 yang telah disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Tim Pengadaan melalui *email* tanggal 12 Juni 2021 (*vide Bukti TIII - 10*) tersebut, merupakan surat yang berisikan permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan untuk dapat memberikan dokumen yang berisi rincian penilaian teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III dan BUKAN merupakan surat permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan dan/atau TERLAPOR I untuk membatalkan Tender Awal. ----------

c. Bahwa surat yang disampaikan PP-JAKON KSO dengan No.002/2021 disampaikan kepada Tim Pengadaan hanya karena KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II memiliki keyakinan bahwa total nilai atas penawaran teknis yang seharusnya diperoleh KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II berdasarkan hasil kajian/perhitungan sendiri (*internal*) (Bukti TIII - 23) score seharusnya adalah 95,77 bukan 92,78;---

d. Surat Pengumuman terkait Pembatalan Lelang Nomor: 013/Peng-PKT.18/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang disampaikan oleh Tim Pengadaan didasarkan pada Keputusan Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I tanggal 21 Juni 2021 dan ketentuan Pasal 38.2 dan 38.3 RfP, BUKAN disebabkan pada Surat yang dikirimkan oleh PP-JAKON KSO atau Surat No.002/2021 tersebut. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

S A L I N A N

PENGUMUMAN PEMBATALAN LELANG

PENGADAAN PEKERJAAN REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III.
Nomor : 013/PENG-PKT.18/VI/2021
Tanggal 22 Juni 2021

Berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pada pasal 38.2 dan 38.3 dalam Request for Proposal disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal.

Demikian agar pengumuman ini diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2021
Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi
Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki – Tahap III
Ketua,

Achmad Ismarwan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan uraian-uraian yang ada di atas, sudah nyata dan terbukti bahwa Surat yang dikirimkan PP-JAKON KSO dengan No.002/2021 dan dengan Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan tender, TIDAK memiliki hubungan atau keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. ----------

Oleh sebab itu, terhadap dugaan-dugaan Tim Investigator KPPU yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan bersekongkol dalam bentuk memfasilitasi peserta tender tertentu baik secara langsung atau tidak langsung merupakan kerja sama yang menguntungkan peserta tender tertentu (*i.c* PP-JAKON KSO) tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Komisi menolak LDP dari Tim Investigator KPPU atau setidak-tidaknya menyatakan LDP tersebut tidak dapat diterima. ----------

4.3.2. Bahwa TERLAPOR III menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator KPPU khususnya pada butir 10.9 halaman 32 s/d halaman 33, yang pada inti

permasalahannya menduga bahwa PARA TERLAPOR telah melakukan pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender, karena faktanya:----------

a. PP-JAKON KSO (KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II) TIDAK pernah mengajukan keberatan terhadap hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengadaan pada tanggal 10 Juni 2021.----------

b. Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 kepada Tim Pengadaan merupakan surat yang hanya berisikan permintaan/permohonan dokumen yang memuat rincian penilaian teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III yang dilakukan oleh Tim Pengadaan dalam hal ini TERLAPOR I.----------

c. Keputusan yang diambil oleh TERLAPOR I untuk membatalkan tender awal merupakan hak TERLAPOR I sebagai pengguna barang dan jasa untuk menerima atau menolak penawaran sebagaimana tertulis dalam ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP (*Vide Bukti TIII - 2*), sebagai berikut: ----

38. HAK PENGGUNA BARANG/JASA UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PENAWARAN	38.1	Apabila pemenang seleksi mengundurkan diri, Tim pengadaan berhak langsung menetapkan kandidat terbaik berikutnya sebagai pelaksana pekerjaan dan pengadaan barang.
	38.2	Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda).

38.3 Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.

d. Selanjutnya terkait keputusan TERLAPOR I untuk membentuk Tim Pengadaan baru dan melakukan tender baru merupakan kewenangan TERLAPOR I selaku Perseroan Daerah yang telah menerima penugasan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. ------

e. PP-JAKON KSO TIDAK PERNAH melakukan komunikasi dengan Tim Pengadaan dan/atau TERLAPOR I untuk diunggulkan dalam tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III sehingga ditetapkan sebagai pemenang. ----------

4.3.3. Bahwa TERLAPOR III secara tegas menolak dalil-dalil LDP Tim Investigator KPPU pada butir 10.10 halaman 33 s/d halaman 35, yang pada intinya mendalilkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa pihak TERLAPOR I selaku Tim Pengadaan melakukan diskriminasi terhadap peserta tender, yaitu mengakomodasi keberatan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II dengan membatalkan tender awal sedangkan TERLAPOR I sama sekali tidak memberikan jawaban yang substansi atas keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, karena faktanya: ----------

a. KSO TERLAPOR II dan TERLAPOR III tidak pernah menyampaikan keberatan dan/atau sanggahan atas hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I; ----------
b. Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 kepada Tim Pengadaan HANYA merupakan sebuah surat permintaan dokumen yang memuat rincian penilaian teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, BUKAN surat permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan dan/atau TERLAPOR I untuk membatalkan Tender Awal. ----------
c. KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II tidak pernah mendapatkan kesempatan/perlakuan khusus dari TERLAPOR I, karena TERLAPOR I tidak pernah memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis terhadap Surat PP-JAKON dengan No.002/2021 tersebut.----------
d. Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan tender awal sama sekali tidak ada hubungannya atau keterkaitannya dengan Surat PP-JAKON KSO dengan No.002/2021.----------

TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PASAL 22 UU ANTIMONOPOLI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.3.4. Bahwa dalam LDP, Tim Investigator KPPU telah mendalilkan bahwa PARA TERLAPOR (i.c TERLAPOR I, TERLAPOR II dan TERLAPOR III) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli, yang mana isi Pasal tersebut sebagai berikut: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*".

4.3.5. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam BAB III butir 3.2, Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli"), menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut: ----------

a. *Unsur Pelaku Usaha;*
b. *Unsur Bersekongkol;*
c. *Unsur Pihak Lain;*
d. *Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan*
e. *Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

4.3.6. Bahwa Tim Investigator KPPU <u>TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN</u> terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli, yang telah didalilkan dilakukan oleh PARA TERLAPOR, khususnya Unsur Bersekongkol, Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:----------

a. <u>Unsur Bersekongkol.</u> ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pada butir 10.2 halaman 29 s/d 31 LDP Tim Investigator KPPU, pada intinya mendalilkan bahwa TERLAPOR I dengan PP-JAKON KSO (*KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II*) telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol karena: ----------

1. Tim Pengadaan TERLAPOR I telah melaksanakan proses pengadaan/tender sampai dengan tahap klarifikasi dan negosiasi terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang ditetapkan sebagai penawar terbaik (peringkat I) berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga. ----------
2. Pada tanggal 12 Juni 2021, PP-JAKON KSO *i.c* KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II menyampaikan keberatan atas hasil evaluasi dan meminta diberikan rincian komponen penilaian yang digunakan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I dalam melakukan evaluasi dan penilaian teknis para peserta tender.----------
3. Pada tanggal 21 Juni 2021, Tim Pengadaan TERLAPOR I melaporkan hasil proses tender kepada Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I. Terhadap usulan tersebut Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua Tim Pengadaan bahwa usulan Tim Pengadaan tidak disetujui dan lelang dinyatakan batal. ----------
4. Setelah keputusan pembatalan tender oleh TERLAPOR I tersebut, pada tanggal 6 Juli 2021 TERLAPOR I membentuk Tim Pengadaan yang baru dan mengganti ketua Tim Pengadaan dan beberapa anggota Tim Pengadaan sebelumnya.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Kemudian Tim Pengadaan tersebut melakukan proses tender hingga akhirnya menetapkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender. ----------

Bahwa untuk menjawab terkait dugaan pemenuhan unsur bersekongkol tersebut, TERLAPOR III mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Antimonopoli diartikan sebagai berikut: ----------

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".

Selanjutnya dalam BAB III butir 3.2 angka (2), Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli disebutkan bahwa: ----------

"Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".

Adapun rincian unsur bersekongkol dapat berupa: --

1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;*----------
2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;* ----------
3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*----------
4. *menciptakan persaingan semu;*----------
5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------
6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;* ----------
7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh karenanya, merujuk pada uraian point ii tersebut, TERLAPOR III secara tegas menolak dalil Tim Investigator KPPU yang menyatakan TERLAPOR III terbukti -*Quod Non*- telah bersekongkol untuk memenangkan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III berdasarkan alasan sebagai berikut: ----------

1. TERLAPOR I tidak pernah memfasilitasi PP-JAKON KSO baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan PP-JAKON KSO.
2. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 11 s/d 13 di atas, Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN/KETERKAITAN baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan tender, karena faktanya: ----------
   - ❖ Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 yang disampaikan kepada Tim Pengadaan melalui *email* tanggal 12 Juni 2021 (*vide Bukti TIII - 10*) tersebut, merupakan surat yang berisi permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan untuk dapat memberikan dokumen yang memuat rincian penilaian teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, BUKAN surat permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan dan/atau TERLAPOR I untuk membatalkan Tender Awal.
   - ❖ Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut disampaikan kepada Tim Pengadaan, karena KSO TERLAPOR II dan TERLAPOR III memiliki keyakinan berdasarkan hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kajian/perhitungan sendiri (*internal*) bahwa KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II memiliki keyakinan bahwa total nilai atas penawaran teknis yang seharusnya diperoleh KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II berdasarkan hasil kajian/ perhitungan sendiri (*internal*) (*vide Bukti TIII - 23*) adalah 95,77 bukan 92,78;

- Surat Pengumuman Pembatalan Lelang Nomor: 013/Peng-PKT.18/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang disampaikan oleh Tim Pengadaan didasarkan pada Keputusan Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I tanggal 21 Juni 2021 dan ketentuan Pasal 38.2 dan 38.3 RfP, BUKAN didasarkan pada Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 (*vide Bukti TIII - 10*).
- Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan tender awal merupakan hak TERLAPOR I sebagai pengguna barang dan jasa untuk menerima atau menolak penawaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP (*Vide Bukti TIII - 2*).

Dengan demikian, terbukti bahwa PP-JAKON KSO i.c KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II tidak pernah mendapatkan fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari TERLAPOR I untuk ditetapkan sebagai pemenang tender.----------

Berdasarkan unsur-unsur bersekongkol sebagaimana telah TERLAPOR III uraikan di atas, maka tuduhan adanya tindakan memfasilitasi peserta tender baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan kerja sama untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menguntungkan peserta tender i.c KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II merupakan hal yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang berlaku serta tidak dapat dikategorikan sebagai "*tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan*" maupun "*pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*", sehingga unsur bersekongkol dalam ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli sama sekali tidak terpenuhi.----------

b. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Sebagaimana telah TERLAPOR III uraikan pada butir 6.1 di atas, TERLAPOR I sebagai Pelaku Usaha dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II selaku Pelaku Usaha Lain, jelas-jelas tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan cara memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan PP-JAKON KSO (*i.c KSO TERLAPOR II dan TERLAPOR III*) sebagai pemenang tender dan Pelaksana Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III.----------

Oleh karena itu terhadap unsur bersekongkol tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender MENJADI TIDAK TERBUKTI. ----------

Namun demikian, untuk lebih jelasnya TERLAPOR III ingin mengutip ketentuan dalam Bab III butir 32.9 Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli tentang Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, yang berbunyi sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan spesifikasi, proses tender, dan sebagainya".

Sebagaimana telah dipaparkan dalam butir 6.1 di atas, TERLAPOR III secara tegas menolak dengan tegas dalil Tim Investigator KPPU tentang tuduhan bahwa PP-JAKON KSO mendapatkan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung dari TERLAPOR I untuk menetapkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III.----------

TERLAPOR III tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I, sehingga tidak terdapat "tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang" dalam Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator KPPU.-

Maka dengan demikian terbukti dalil/tuduhan Tim Investigator KPPU yang didalilkan/dinyatakan dalam LDP tersebut ADALAH TIDAK BENAR, MENGADA-ADA, KELIRU SERTA MENYESATKAN, oleh karenanya tidak memenuhi unsur "Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender" dalam ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli. ----------

c. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

Sebagaimana telah TERLAPOR III uraikan pada butir 6.1 dan 6.2 di atas, telah terbukti bahwa:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. TERLAPOR I selaku Pelaku Usaha dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR II selaku Pelaku Usaha lain tidak melakukan persekongkolan dalam memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III; -----
2. TERLAPOR I maupun KSO TERLAPOR II dan TERLAPOR III terbukti tidak pernah mengatur dan/atau menentukan pemenang Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III. -----

Oleh karena unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur persaingan usaha tidak sehat menjadi TIDAK TERBUKTI.----------

Namun demikian untuk lebih jelasnya TERLAPOR III kutip ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Antimonopoli yang berbunyi sebagai berikut:----------

"*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".*

Sebagai peserta tender, PP-JAKON KSO telah mengikuti dan menjalani tahapan dan proses tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Tim Pengadaan, sebagaimana tertuang dalam RfP, dan dijalankan secara "*jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha*". ----------

Berdasarkan pengertian dari "Persaingan Usaha Tidak Sehat" dalam Pasal 1 angka 6 UU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Antimonopoli, maka tuduhan/dalil dari Tim Investigator KPPU yang mendalilkan bahwa tindakan PARA TERLAPOR dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha, menjadi tidak jelas, tidak benar, dipaksakan dan sangat keliru, sehingga unsur "Persaingan Usaha Tidak Sehat" dalam ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli TIDAK TERPENUHI. -------

Terlebih proses investigasi sampai dengan dibacakannya LDP pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2023 telah berlangsung selama ± 1 tahun dan pada saat ini PP-JAKON KSO telah menyelesaikan pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki hingga mencapai progress 100%. Hal ini membuktikan bahwa TERLAPOR I sebagai Perseroan Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, telah melakukan investasi yang sangat besar pada Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, yang mana Taman Ismail Marzuki telah menjadi bangunan multifungsi atau *mixed-use building* dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas termasuk bagi para seniman tanah air untuk berkarya dan berkreasi. Sehingga sangat tidak adil jika Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III terganggu hanya karena adanya LDP Tim Investigator KPPU yang didasarkan pada asumsi-asumsi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta terkesan hanya untuk memenuhi kepentingan Pelapor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan hal-hal yang sudah kami diuraikan di atas, dalil/tuduhan dari Tim Investigator KPPU perkara *a quo* tidak berdasar, keliru, mengada-ada dan sangat menyesatkan, dan juga sangat merugikan reputasi dari TERLAPOR III sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Swasta yang selalu melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip *Good Coorporate Governance* (GCG).----------

4.4. Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERLAPOR III mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----------

4.4.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, TIDAK TERBUKTI karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan; ----------

4.4.2. MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 16 Januari 2023 untuk seluruhnya; dan----------

4.4.3. Menyatakan TERLAPOR III TIDAK melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III. ----------

Atau, apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*). ----------

5. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan sebagaimana diuraikan dalam butir 2, Terlapor I telah menyampaikan Daftar Saksi dan/atau Ahli untuk dapat diperiksa pada Pemeriksaan Lanjutan (dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan bila diperlukan) kepada Majelis Komisi sebagai berikut (*vide* Bukti T1.30):----------

	Nama Saksi
1	M. Taufiqurrachman
2	Tri Wahyuedi
	Nama Ahli
1	Hari Prasetiyo, S.H., M.H.

6. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan sebagaimana diuraikan dalam butir 3, Terlapor II telah menyampaikan Daftar Saksi dan/atau Ahli untuk dapat diperiksa pada Pemeriksaan Lanjutan (dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan bila diperlukan) kepada Majelis Komisi sebagai berikut (*vide* Bukti T2.5): ----------

	Nama Saksi
1	Githa Maharani selaku CRP Manager
2	Hendra Riatno selaku Quantity Surveyor Manager
	Nama Ahli
1	Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM., CPT. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan sebagaimana diuraikan dalam butir 4, Terlapor III tidak menyampaikan Daftar Saksi dan/atau Ahli kepada Majelis Komisi sebagai berikut (*vide* Bukti B2, T3.3). ----------

8. Menimbang bahwa Terlapor II dan Terlapor III melalui Kuasa Hukum yang ditunjuk mengajukan Surat Nomor 084/NSR.NS/2/2023 ter tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan Perubahan Nama Ahli dan Permohonan Menghadirkan Saksi Fakta untuk Saksi dan/atau Ahli Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut (*vide* Bukti T2.32, T3.28):----------

Penambahan Saksi Terlapor III	
1	Alhabibi Aditya P.N. selaku Kepala Bagian Prakualifikasi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk

Nama Ahli	**Perubahan Ahli Terlapor II**
1 Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM., CPT. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa	Ir. Riad Horem, Dipl., H.E.

9. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: ----------

9.1. Saksi Saudara Fariz Andriawan Triyono selaku *Marketing Officer* PT Waskita Karya (Persero) Tbk (*vide* Bukti B3). ----------

9.2. Saksi Saudara Ahmadi selaku Manager Marketing PT Waskita Karya (Persero) Tbk (*vide* Bukti B4). ----------

9.3. Saksi Saudara Paramayuda Maulana selaku *Interior Designer* PT Andramatin (*vide* Bukti B5).----------

9.4. Saksi Saudara Mochamad Sovie Irawan Khuswa selaku *Technical Advisor* atau *Project Advisor* PT Andramatin (*vide* Bukti B6). ----------

9.5. Saksi Saudara Nur Syamsul Rijal selaku *Project Manager* PT Adhi Karya (Persero), Tbk (*vide* Bukti B7). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.6. Saksi Saudara Aji Pramudiharto, S.T selaku *Manager Engineering* PT Hutama Karya (Persero) (*vide* Bukti B10). --------

9.7. Saksi Saudara Tri Wahyuedi, S.Sn. selaku Kepala Divisi Pemukiman dan Pengembangan Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Periode sebelum Bulan Februari 2022 (*vide* Bukti B11).----------

9.8. Saksi Saudara Antariksa Artidi selaku Kepala Divisi Pemukiman dan Pengembangan Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Periode sampai dengan Bulan Februari 2022 (*vide* Bukti B12). ----------

9.9. Saksi Saudara Alhabibi Aditya P.N. selaku Kepala Bagian Prakualifikasi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk (*vide* Bukti B14). ----------

9.10. Saksi Saudara Hendra Riatno selaku *Quantity Surveyor Manager* PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (*vide* Bukti B15). ----------

9.11. Saksi Saudari Githa Maharani selaku *CRP Manager* PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (*vide* Bukti B16). ------

9.12. Saksi Saudara Andy Faisal selaku Manager Pemasaran Wilayah 2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk (*vide* Bukti B17). ----

9.13. Saksi Saudara Yofan Saman Agusta selaku Staf Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero) (*vide* Bukti B18).----------

9.14. Saksi Saudara Wolter N. Piri selaku Staf Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero) (*vide* Bukti B19).----------

9.15. Saudara Ir. Riad Horem, Dipl., H.E. selaku Ahli Pengadaan Barang dan.atau Jasa (*vide* Bukti B20). ----------

9.16. Saudara M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM & Umum PT Jakarta Propertindo (Perseroda)) (*vide* Bukti B21). ----------

9.17. Saudara Sabela Gayo, Ph.D., S.H., M.H. selaku Ahli Hukum di Bidang Pengadaan Barang/Jasa (*vide* Bukti B23). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.18. Saudara Dr. Anton Soekiman selaku Ahli Manajemen Konstruksi dari Universitas Parahyangan Bandung (*vide* Bukti B24).----------

9.19. Saudara Setyabudi Arijanta selaku Ahli Pengadaan Barang dan.atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (*vide* Bukti B25). ----------

9.20. Pemeriksaan Setempat di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (*vide* Bukti B26).----------

9.21. Pemeriksaan Saudara Solihin selaku Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai Terlapor I (*vide* Bukti B27). ----------

9.22. Pemeriksaan Saudara Solihin selaku Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai Terlapor II (*vide* Bukti B28). ----------

9.23. Pemeriksaan Saudara Solihin selaku Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai Terlapor III (*vide* Bukti B29). ----------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B30). ----------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B31). ----------

12. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I4): ----------

TENTANG LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN (“LDP”).----------

12.1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya terkait dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Taman Ismail Marzuki Tahap III yang dilakukan oleh: PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai Terlapor I, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk sebagai Terlapor II dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk sebagai Terlapor III;----------

12.2. Bahwa indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut:----------

12.2.1. Terlapor I diduga melakukan Tindakan berupa memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (PP-JAKON KSO) untuk memenangkan tender dengan cara Terlapor I membatalkan tender pertama dan melakukan tender ulang untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III (PP-JAKON KSO); ----------

12.2.2. Bahwa pembatalan tender pertama dilakukan oleh Direktur SDM dan Umum Terlapor I setelah keluar hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang mana pada tender pertama tersebut peringkat pertama adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk dan peringkat kedua adalah PP-JAKON KSO (Terlapor II dan Terlapor III); ----------

12.2.3. Bahwa pengumuman pembatalan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Terlapor I hanya memberitahukan bahwa Direktur SDM dan Umum tidak menyetujui tahapan pengumuman tender dan tender dinyatakan batal tanpa menyertakan alasan pembatalan tender tersebut; ----------

12.2.4. Bahwa Terlapor I melakukan diskriminasi dalam bentuk mengakomodasi keberatan Terlapor II dan Terlapor III terkait hasil evaluasi teknis, namun tidak memberikan jawaban substansial terhadap keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk dilakukan diluar mekanisme sanggah; ----------

12.2.5. Bahwa pada tender ulang, PP – JAKON KSO (Terlapor II dan Terlapor III) memenangkan tender dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) Tbk menjadi peringkat kedua. ----------

TENTANG BUKTI-BUKTI DALAM PEMERIKSAAN. ----------

12.3. Bahwa Terlapor I menyelenggarakan tender pengadaan barang/jasa konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ) Tahap III dengan melibatkan Manajemen Konstruksi ("MK") dari PT Yodya Karya (Persero) dan Tim Quantity Surveyor ("QS") dari PT Wolferstan Trower Indonesia (*vide Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran File I, Berita Acara Pembukaan Dokumen Fiile II, BAP Saksi M. Taufiqurrahman*); ----------

12.4. Bahwa rancangan dan desain untuk proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ) Tahap III didasarkan pada rancangan dari Andramatin (*vide BAP Saksi M. Taufiqurrahman, BAP Saksi Paramayudha*); ----------

12.5. Bahwa Kerangka Acuan Kerja ("KAK") telah dipersiapkan *user* yang dalam hal ini adalah proyek Tim Terlapor I (*vide BAP Saksi M. Taufiqurrahman*); ----------

12.6. Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) butir XII terkait persyaratan peserta, disebutkan: ----------

12.6.1. Pekerjaan interior/*fitting out*: ----------

a. Gedung pertunjukan, auditorium dan *ballroom* ---------

b. Hotel kelas minimal bintang 3 ----------

c. Ruang kantor minimal 1000m2 ----------

d. Komersial lainnya ----------

12.6.2. Pekerjaan *equipment*: ----------

a. Gedung pertunjukan, auditorium dan *ballroom* ---------

b. Gedung atau ruang komersial lainnya ----------

(*vide Kerangka Acuan Kerja tanggal 21 April 2021*); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.7. Bahwa berdasarkan KAK tersebut, Tim Pengadaan Bersama MK dan QS membuat Dokumen Permintaan Proposal (*Request For Proposal/"RfP"*) termasuk membuat kriteria penilaian(*vide Dokumen Permintaan Proposal, BAP, BAP Saksi M. Taufiqurrahman, BAP Yofan Saman Agusta*);----------

12.8. Bahwa dalam RfP, terkait dokumen administrasi, dalam pengalaman disebutkan antara lain: ----------

12.8.1. Mempunyai pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik unutk jasa konstruksi untuk pekerjaan interior dan peralatan;----------

12.8.2. Melampirkan copy kontrak dan BAST dari pengguna jasa dilengkapi dengan BQ pekerjaan interior dan peralatan; ----------

12.8.3. uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, **lokasi,** pemberi tugas, nilai dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun)----------

(*vide Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*); ----------

12.9. Bahwa dalam RfP, terkait dokumen teknis, dalam hal pengalaman disebutkan antara lain: ----------

12.9.1. Daftar pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) terakhir baik untuk jasa konstruksi, terutama untuk pekerjaan interior dan peralatan; ----------

12.9.2. Referensi dari pengguna jasa; ----------

12.9.3. Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nilai dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);----------

(*vide Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*); ----------

12.10. Bahwa dalam RfP, terkait evaluasi teknis, dilakukan dengan memberikan bobot angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan ("**LDP**"). Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Tim Pengadaan Jakpro sesuai yang tercantum dalam LDP (*vide Bukti Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*); ----------

12.11. Bahwa dalam RfP, terkait klarifikasi teknis dan negosiasi harga disebutkan bahwa aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau negosiasi terutama antara lain: biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran (*Vide Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*);----------

12.12. Bahwa dalam RfP, butir 38. Hak Pengguna Barang/Jasa Untuk Menerima Atau Menolak Penawaran disebutkan antara lain: ----

12.12.1. Pada butir 38.2 apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun terhadap PT Jakarta Propertindo (Perseroda); ----------

12.12.2. Pada butir 38.3, pengguna barang dan jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan tanpa tuntutan dari peserta pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta pengadaan apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan Bersama (kolusi) dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen penawaran; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*); ----------

12.13. Bahwa dalam BAB III Lembar data pemilihan (LDP) butir 11 terkait evaluasi teknis, bobot unsur pokok yang dinilai: ----------

Unsur Pokok	Nilai
Pengalaman perusahaan	15%
Metode pelaksanaan	20%
Jadwal pelaksaan pekerjaan	10%
Daftar Personil Inti	10%
Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material Yang Digunakan	20%
Daftar Spesifikasi Teknis, Alat, Workshop, dan Gudang Yang Digunakan	20%
Rencana Penerapan Building Information Modelling (BIM) Yang Digunakan	5%

(*vide Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*); ----------

12.14. Bahwa dalam RfP, BAB III Lembar Data Pemilihan disebutkan antara lain: bobot pengalaman adalah 15% (lima belas persen) dengan uraian terdiri dari: ----------

12.14.1. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya yang menunjukkan kinerja perusahaan perserta bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/pemberi tugas /pemilik pekerjaan; ----------

12.14.2. Apabila tidak dilengkapi referensi atau kontrak sebelumnya yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka tidak dinilai; -----

12.14.3. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam; ----------

12.14.4. Sub unsur yang dinilai adalah pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, untuk bangunan bertingkat tinggi, manajerial mengelola kontrak, dan kapastias mempekerjakan pegawai tetap; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.14.5. Ambang batas untk penilaian pengalaman perusahaan adalah 70 (tujuh puluh);----------

(*vide Bukti Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*); ----------

12.15. Bahwa dalam RfP disebutkan ambang batas nilai teknis adalah 80 (delapan puluh) (*vide Dokumen Permintaan Proposal Mei 2021*); ----------

12.16. Bahwa Hasil Evaluasi Teknis sebagaimana yang diumumkan tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Nilai	Keterangan
1	PT Waskita Karya (Persero), Tbk	77,94%	TIDAK LULUS
2	PT PP – JAKON KSO	92,78%	LULUS
3	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk	92,62%	LULUS
4	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	89,57%	LULUS
5	PT Hutama Karya (Persero)	79,06%	TIDAK LULUS

(*vide Bukti Saksi Yofan Saman Agusta, pengumuman peringkat teknis No. 005/BAEVT/PKT.18/V/2021*); ----------

12.17. Bahwa rincian hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No	Aspek Diniai	Nilai				
		PT Adhi Karya (Persero), Tbk	PT Hutama Karya (Persero)	PT PP (Persero) – PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk KSO	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk	PT Waskita Karya (Persero), Tbk
1	Pengalaman Perusahaan (15%)	10,57%	7,98%	12,50%	12,72%	5,13%
2	Metode Pelaksanaan (20%)	18.00%	16.20%	18.15%	17.65%	15.00%
3	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (15%)	10.00%	7.68%	9.86%	9,23%	9,09%
4	Daftar Personil Inti (10%)	10.00%	8.45%	10.00%	9,85%	10.00%
5	Spesifikasi Teknis, daftar barang dan material yang digunakan (20%)	18.00%	18.50%	20.00%	20.00%	18.00%
6	Spesifikasi Peralatan Yang Digunakan (20%)	20.00%	17.00%	18.50%	20.00%	17.75%
7	Rencana Penerapan BIM (5%)	3.00%	3.25%	3.77%	3.17%	2.98%
Jumlah		89.57%	79.06%	92.78%	92.62%	77,94%
Keterangan		LULUS	TIDAK LULUS	LULUS	LULUS	TIDAK LULUS

(*vide Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga*); ----------

12.18. Bahwa dalam kertas kerja penilaian teknis terkait unsur pengalaman, unsur dan sub sunsur yang dinilai adalah sebagai berikut: ----------

				Jumlah nilai
Pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir	1	Pengalaman pekerjaan sejenis kurun waktu 10 tahun terakhir		100
	a	Pekerjaan interior/fitting out Gedung pertunjukan , auditorium	8,00	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		dan ballroom,		
	b	Pekerjaan interior/fitting out hotel kelas minimal bintang 3 (main lobby dan kamar)	8,00	
	c	Pekerjaan interior/fitting out ruang kantor minimal 1000 m^2 (main lobby, ruang kerja)	8,00	
	d	Pekerjaan interior/*fitting out cinema* dan mall	8,00	
	e	Pekerjaan *equipment* Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (system tata suara)	10,00	
	f	Pekerjaan *equipment* Gedung atau ruang lainnya (*furniture fixtures* dan *equipment*)	8,00	
	2	Pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan	20,00	
	3	Pengalaman mengelola kontrak	20,00	

(*vide Dokumen Penilaian Teknis*); ----------

12.19. Bahwa berdasarkan pengumuman hasil evaluasi teknis tersebut, Direktur SDM Dan Umum,pada tanggal 3-9 Juni 2021 mengirimkan *e-mail* kepada MK yang meminta kepada MK untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis. Hal yang dibahas mengenai cara melakukan evaluasi, dan poin-poin yang dievaluasi (*vide BAP Saksi Yofan Saman Agusta, Laporan Hasil Reviu*); ----------

12.20. Bahwa Tim Pengadaan pada tanggal 2 Juni 2021 melakukan pembukaan dokumen penawaran harga (*vide bukti Laporan hasil reviu, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga No 006/BAPMB2/PKT.18/VI/2021*);----------

12.21. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan dokumentasi Berita Acara Evaluasi Harga No. 007/BAEVH/PKT.18/VI/2021, hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran Sebelum Koreksi Aritmetik	Nilai Penawaran Setelah Koreksi Aritmetik	Hasil Evaluasi Akhir			Peringkat
				Skor Teknis	Skor Biaya	Total Skor	
1	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Rp 418.388.404.711 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sebelas miliar rupiah) termasuk PPN 10%	Rp 418.388.000.000 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) termasuk PPN 10%	64,83%	28,47%	93,30%	I
2	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Rp 397.018.888.8888 (tiga ratus Sembilan	Rp 397.018.888.8888 (tiga ratus Sembilan	62,70%	30,00%	92,70%	II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		puluh tujuh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) termasuk PPN 10%	puluh tujuh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) termasuk PPN 10%				
3	PT PP (Persero), Tbk – PT jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk KSO	Rp 446.264.400.000 (empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) termasuk PPN 10%	Rp 446.264.400.000 (empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) termasuk PPN 10%	64,95%	26,69%	91,64%	III

(*vide Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis dan Harga, Laporan Hasil Reviu*)----------

12.22. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, diumumkan peringkat pemenang kepada peserta yang lolos *passing grade* (*vide laporan hasil reviu*); ----------

12.23. Bahwa Tim Pengadaan dan MK diminta untuk melakukan evaluasi ulang terhadap aspek teknis setelah dilakukan pemaparan tersebut (*vide Saksi Yofan Saman Agusta*);----------

12.24. Bahwa dalam laporan hasil evaluasi tanggal 10 Juni 2021, memuat hal-hal sebagai berikut: ----------

12.24.1. Terdapat perbedaan terhadap penafsiran definisi interior (pada KAK tidak dinyatakan secara eksplisit tentang pekerjaan interior; ----------

Nilai Awal ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP-JAKON KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Interior/Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballroom	27.27	1.91	100	7.00	36.36	2.55
2	Interior/Fitting Out Gedung Hotel Kelas Minimal bintang 3	100	7.00	38.46	2.69	46.15	3.23
3	Interior/fitting out ruang kantor min. 10000 m2	86	6.00	93	6.50	99	6,50
4	Interior/fitting out komersial lainnya	100	6.00	88.89	5.33	51.85	3.11
5	Pekerjaan equipment Gedung pertunjukan auditorium dan ballroom	50	3.50	83.33	5.83	51.85	3.11
6	Pekerjaan equipment Gedung atau ruang komersial lainnya	80	4.80	100	6.00	40	2.40

Hasil Review ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP-JAKON KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Interior/Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballroom	27.27	1.91	100	7.00	0	0.00
2	Interior/Fitting Out Gedung Hotel Kelas Minimal bintang 3	86	6.00	78,57	5.50	50	3.50
3	Interior/fitting out ruang kantor min. 10000 m2	29	2.00	67.86	4.75	57	4.00
4	Interior/fitting out komersial lainnya	91	5.45	72.73	4.36	59.09	3.55
5	Pekerjaan equipment Gedung pertunjukan auditorium dan ballroom	0	0.00	100	7.00	20	1.40
6	Pekerjaan equipment Gedung atau ruang komersial lainnya	100	6	100	6	50	3.00

12.24.2. Perbedaan terhadap penafsiran kota besar untuk pengalaman di lokasi kota besar substansinya adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kontraktor mengenal *chemistry* bekerja di kota besar baik dari sisi environment nya maupun dari sisi aturan setempat. Pekerjaan interior itu juga hal yang melekat dengan aturan setempat apalagi mengenai manajemen lalu lintas di lokasi kota besar dan segala macam hal lainnya. Karena itu pengalaman di lokasi kota besar tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sejenis;------

Nilai Awal ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP-JAKON KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Pengalaman di lokasi kota besar	100	7.50	52.38	3.93	100	7.50

Hasil Review ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP-JAKON KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Pengalaman di lokasi kota besar	100	7.50	72.73	5.45	36.36	2.73

(*vide laporan Pembahasan Atas Pengumuman Hasil Evaluasi teknis*); ----------

12.25. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021, Tim Panitia Pengadaan menyampaikan memo kepada Direktur SDM dan Umum selaku Direktur yang membawahi Divisi Pengadaan yang memuat antara lain:----------

12.25.1. Terhadap hasil pengumuman dan laporan evaluasi harga, terdapat permintaan dari Direktur atasan pengadaan untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis. Pembahasan dilakukan Bersama dengan user (Proyek TIM) yang berdampak pada penundaan pengumuman peringkat dan jadwal selesainya tender;----------

12.25.2. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap definisi interior pada aspek pengalaman kerja yang pada saat pembahasan akhir Kembali berkembang ke penafsiran terhadap pengalaman kota besar; ----------

12.25.3. MK diminta untuk membantu user (Proyek TIM) untuk menghitung Kembali score teknis. Terhadap hasil perhitungan Kembali tersebut dan memperhitungkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahapan-tahapan selanjutnya, Tim Pengadaan berpendapat: ----------

a. Tidak melakukan pengumuman terhadap score hasil reviu yang dimaksud karena mekanisme tersebut tidak di atur dalam RfP dan berpotensi besar untuk diajukannya sanggah serta tingginya kemungkinan sanggah terbukti yang berakibat pada kondisi lelang gagal;----------

b. Apabila diumumkan, maka dalam proses negosiasi tidak berjalan optimal karena nilai peringkat pertama adalah peserta yang menawar dengan harga tertinggi, sementara penawar harga terendah tidak lolos passing grade sub aspek teknis pengalaman perusahaan;----------

(*vide Dokumen Hasil Revieu*);----------

12.26. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, dikirimkan undangan klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. Dan berdasarkan klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 yang dihadiri Tim Pengadaan, Konsultan MK, Konsultan QS dan Tim Proyek (user), diperoleh kesepakatan dengan nilai Rp 418.000.000.000,- (empat ratus delapan belas miliar rupiah) (*vide Laporan Hasil Reviu*);----------

12.27. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, Tim Pengadaan menyampaikan memo kepada Direktur SDM dan Umum, yang memuat antara lain:----------

12.27.1. Pada tanggal 5 Juni 2021, sesuai permintaan dilakukan reviu atas hasil evaluasi teknis proposal dengan hasil adanya perbedaan penafsiran antara Tim MK dan user yang tidak dijelaskan secara eksplisit di RfP dan KAK, namun pihak MK dan Tim Pengadaan tetap berpegang pada hasil pengumuman teknis yang sudah diterima peserta; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.27.2. Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang, tanpa tuntutan dari peserta pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan Bersama (kolusi) dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen pengadaan; ----------

12.27.3. Menurut pandangan Tim Pengadaan, telah terjadi persaingan usaha yang sehat, karena seluruh peserta yang menyampaikan penawaran telah lulus evaluasi administrasi, 3 (tiga) peserta dinyatakan lulus teknis dan harga serta nilai penawaran yang bersaing. Dalam pelaksanaannya tim independen dan diikat dengan pakta integritas, peserta telah tanggap (responsif) terhadap RfP dan hasil *aanwijzing* dengan disampaikan baik administrasi, teknis dan harga termasuk penyampaian surat dukungan dari kontraktor spesialis; ----------

12.27.4. Mengingat proses telah mengalami pengunduran jadwal yang lama maka sebaiknya hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilanjutkan ke tahap pengumuman pemenang; ----------

12.27.5. Dilaporkan juga mengenai surat pengaduan PP – JAKON KSO, Tim Pengadaan telah membahas Bersama MK dan Divisi Pengadaan dan disimpulkan pengaduan PP-JAKON KSO tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan lelang ulang; ----------

(*vide Laporan Hasil Reviu*);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.28. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, dalam Rapat Direksi, terkait proyek TIM Tahap III, dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut: ----------

12.28.1. Telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap rangking 1 dari 3 yang lolos perhitungan Tim Adhoc dan telah dilakukan pembahasan dengan M. Taufiqurrahman, Satuan Pengawas Intern, Legal, dan TKPMR dan Pengadaan terkait resiko GCG dan Pro dan Cons terhadap proses yang telah dilakukan dengan kesimpulan bahwa M. Taufiqurrahman yang membawahi pengadaan memutuskan untuk melakukan lelang ulang; ----------

12.28.2. Tim Proyek menyampaikan bahwa telah dilakukan pembahasan mengenai cara penilaian teknis dan pemahaman Tim MK mengenai cara menilai serta definisi yang agak meragukan;----------

12.28.3. Divisi hukum menyampaikan bahwa jika ada proses pengadaan yang tidak tepat maka harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai dasar bagi Terlapor I jika ingin melakukan pembatalan; ----------

12.28.4. Alasan Direktur SDM dan Umum membatalkan lelang karena terdapat perbedaan definisi kriteria dan melakukan skoring yang berbeda, hal ini diakui oleh MK. Namun keputusan hasil reviu tidak mengikat/tidak diumumkan kepada peserta karena tidak ada dalam RfP;----------

12.28.5. Direktur Utama terlapor I menyampaikan bahwa proses usulan pemenang diganti menjadi usulan pembatalan tender dengan dokumentasi hasil meeting klarifikasi antara MK dan user;----------

(*vide Notulen Rapat tanggal 17 Juni 2021*); ----------

12.29. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Direktur SDM dan Umum mengirimkan *e-mail* kepada Ketua Tim Pengadaan yang pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pokoknya berisi lelang dinyatakan batal dan meminta agar Tim Pengadaan melakukan lelang ulang (*vide Laporan Hasil Reviu*); -

12.30. Bahwa pertimbangan pembatalan lelang adalah:----------

12.30.1. Laporan dari Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III tanggal 11 Juni 2021; ----------

12.30.2. Laporan Pembahasan Atas Pengumuman Hasil Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dari Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) tanggal 10 Juni 2021 yang mengindikasikan terdapat kesalahan dalam skoring beberapa aspek teknis; ------

(*vide Laporan Hasil Reviu*);----------

12.31. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Tim Pengadaan menyampaikan Laporan Hasil Pengadaan dengan kesimpulan sebagai berikut: ----------

Direktur SDM dan Umum mengadakan rapat perihal pembatalan lelang Bersama-sama dengan Senior Manajer Divisi Pengadaan, Ketua Tim Pengadaan Revitalisasi TIM Tahap III, dan user secara *online* melalui *Microsoft Teams* pada tanggal 22 Juni 2021 dengan hasil: ----------

12.31.1. Senior Divisi Pengadaan menyampaikan bahwa dengan pembatalan lelang maka proses pengadaan dinyatakan selesai dan akan ditindaklanjuti dengan pengumuman pembatalan lelang; ----------

12.31.2. Ketua Tim Pengadaan Revitalisasi PKJ Tahap III membacakan aturan yang tertuang dalam RfP terkait pembatalan lelang, lelang gagal dan lelang ulang serta menyatakan bahwa pembatalan lelang oleh Direktur SDM dan Umum dengan alasan terdapat kesalahan dalam skoring tidak diatur dalam RfP. Dengan demikian, alasan pembatalan lelang ini diserahkan sepenuhnya kepada Direktur SDM dan Umum; --------

12.31.3. Senior Divisi Pengadaan menyampaikan konfirmasi apakah pembatalan lelang ini akan dilanjutkan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembatalan pengumuman lelang mengingat pembatalan lelang ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam RfP;----------

12.31.4. Direktur SDM dan Umum menyatakan tetap pada keputusannya yaitu tetap menyatakan pembatalan lelang; ----------

(*vide Laporan Hasil Reviu*);----------

12.32. Bahwa Saksi Tafiqurrahman yang pada saat peristiwa ini terjadi menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum menyatakan bahwa alasan pembatalan adalah karena adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa harga yang sangat rendah pada beberapa item penawaran serta Tim Pengadaan tidak melaporkan secara rutin pelaksanaan proses pengadaan (*vide BAP Saksi M. Taufiqurrahman*); ----------

12.33. Bahwa dalam SOP pengadaan JAKPRO, terkait laporan pengadaan, pada butir 6.2.6 disebutkan Laporan Pengadaan merupakan ringkasan kronologis proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa beserta keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga satu alasan untuk pembatalan tender karena Tim Pengadaan tidak menyampaikan laporan adalah tidak tepat karena faktanya Tim Pengadaan telah membuat laporan pengadaan pada tanggal 11 Juni 2021 (*Vide Manual Pengadaan Barang Dan Jasa*); ----------

12.34. Bahwa berdasarkan Surat WT Partnership kepada Ketua Tim Pengadaan terkait perbandingan penawaran harga tanggal 7 Juni 2021, berisi tentang pemeriksaan dokumen penawaran dan tidak ditemukan kesalahan aritmatika sehingga tidak ada perubahan penilaian penawaran. Serta telah dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang melibatkan Tim Pengadaan, user, konsultan MK dan Konsultan QS yang fungsinya adalah untuk menilai kewajaran harga, harga penawaran dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk telah disepakati. Dengan demikian, alasan ada harga yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengindikasikan persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti (*vide Laporan Hasil Reviu, Surat WT Partnership tanggal 7 Juni 2021, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 14 Juni 2021, BAP Saksi M.Tafiqurrahman*);----------

12.35. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, diumumkan pembatalan lelang kepada para peserta yang memuat antara lain: "Berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pada Pasal 38.2 dan 38.3 dalam *Request for Proposal* disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal"; (*vide Laporan Hasil Reviu, Pengumuman Pembatalan*);----------

12.36. Bahwa dalam tender ulang, kriteria dan persyaratan penyedia jasa yang dimuat dalam KAK yang dipersiapkan oleh Direktur Proyek adalah sebagai berikut:----------

12.36.1. Pekerjaan interior/fitting out----------

a. Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom -----

b. Hotel kelas minimal bintang 3 ----------

c. Ruang kantor minimal 1000 m2----------

d. Cinema dan Retail----------

12.36.2. Pekerjaan *equipment*----------

a. Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom -----

b. Gedung atau ruang komersial lainnya----------

(*vide KAK tanggal 6 Juli 2021*);----------

12.37. Bahwa dalam RfP yang disiapkan oleh Tim Pengadaan, mencantumkan mengenai ketentuan persyaratan pengalaman perusahaan dalam dokumen administrasi yang meliputi: --------

12.37.1. Mempunyai pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi untuk pekerjaan interior dan peralatan; ----------

12.37.2. Melampirkan *copy* kontrak dan BAST dari pengguna jasa dan BQ pekerjaan interior dan peralatan serta bukti-bukti lain yang mendukung;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.37.3. Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);----------

(*vide dokumen permintaan proposal tanggal 12 Juli 2021*);--------

12.38. Bahwa dalam RfP yang disiapkan oleh Tim Pengadaan, mencantumkan mengenai ketentuan persyaratan pengalaman perusahaan dalam dokumen teknis yang meliputi: ----------

Daftar pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun); ----------

(*vide dokumen permintaan proposal tanggal 12 Juli 2021*);--------

12.39. Bahwa dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP), unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis dan bobotnya adalah sebagai berikut: ----------

No	Unsur	Bobot
1	Pengalaman perusahaan	15%
2	Metode Pelaksanaan	20%
3	Penilaian terhadap proposal desain	10%
4	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	5%
5	Daftar Personil Inti	10%
6	Daftar Spesifikasi Teknis Barang Dan Material Yang Digunakan	20%
7	Daftar Spesifikasi Teknis, Alat, Workshop dan Gudang Yang Digunakan	15%
8	Rencana Penerapan Building Information Modelling (BIM) yang digunakan	5%

(*vide dokumen permintaan proposal tanggal 12 Juli 2021*);--------

12.40. Bahwa uraian mengenai pengalaman perusahaan dalam LDP terdiri dari: ----------

12.40.1. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/pemberi tugas/pemilik pekerjaan; ----------

12.40.2. Apabila tidak dilengkapi referensi atau kontrak sebelumnya yang tidak dilengkapi Berita Acarta Serah Terima Pekerjaan maka tidak dinilai; ----------

12.40.3. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam; ----------

12.40.4. Sub unsur yang dinilai adalah pengalaman kerja selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan; ----------

(*vide dokumen permintaan proposal tanggal 12 Juli 2021*);--------

12.41. Bahwa kertas kerja yang digunakan secara internal untuk menilai proposal teknis terkait pengalaman pekerjaan adalah sebagai berikut: ----------

				Jumlah nilai
Pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir	1	Pengalaman pekerjaan sejenis kurun waktu 10 tahun terakhir		100
	a	Pekerjaan interior/fitting out Gedung pertunjukan , auditorium dan ballroom,	8,00	
	b	Pekerjaan interior/fitting out hotel kelas minimal bintang 3 (main lobby dan kamar)	8,00	
	c	Pekerjaan interior/fitting out ruang kantor minimal 1000 m^2 (main lobby, ruang kerja)	8,00	
	d	Pekerjaan interior/fitting out cinema dan mall	8,00	
	e	Pekerjaan equipment Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (system tata suara)	10,00	
	f	Pekerjaan equipment Gedung atau ruang lainnya (furniture fixtures dan equiopment)	8,00	
	2	Pengalaman sesuai KD yang	20,00	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		dipersyaratkan		
	3	Pengalaman mengelola kontrak	20,00	

12.42. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, perubahan dalam dokumen tender pertama dan tender ulang sekitar 10% (sepuluh persen) (*vide BAP Saksi Syamsul Rizal*); ----------

12.43. Bahwa hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1	PP – JAKON KSO	LULUS	96.13%	Rp 415.815.000.000 (empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) termasuk PPN 10%	Rp 378.013.636.364 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) belum termasuk PPN 10%	Peringkat I
2	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk	LULUS	92,85%	Rp 372.752.000.101 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta serratus satu rupiah) belum termasuk PPN 10%	Rp 372.752.000.101 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta serratus satu rupiah) belum termasuk PPN 10%	Peringkat II
3	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	TIDAK LULUS	76.13%	-	-	Tidak lulus karena dibawah ambang batas kelulusan teknis 85%
4	PT Waskita Karya (Persero)	TIDAK LULUS	74,97%	-	-	Tidak lulus karena dibawah ambang batas kelulusan teknis 85%

(*vide Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga*);-----

TENTANG ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN. ----------

12.44. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III di duga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -

12.45. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun berbunyi: "*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -------

12.46. Bahwa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perkara *a quo*, maka akan dibuktikan dibawah ini melalui pembuktian unsur-unsurnya; ----------

12.47. Bahwa unsur-unsur yang dibuktikan terkait pemenuhan unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----------

12.47.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah: "*pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*";--

b. Bahwa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Pembangunan Pluit Jaya, yang selanjutnya diubah menjadi PT Jakarta Propertindo berdasarkan akta Nomor 89 tanggal 15 Desember 2000 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H. Notaris Pengganti di Jakarta;----------

c. Bahwa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) berkedudukan di Gedung Thamrin City Lantai 1 Lobby Timur Jalan Thamrin Boulevard Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;----------

d. Bahwa kegiatan usaha PT Jakarta Propertindo (Perseroda) antara lain adalah kegiatan real estate termasuk menjalankan kegiatan usaha Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pelaku Usaha terpenuhi;---------

12.47.2. Unsur Bersekongkol. ----------

a. Bahwa yang dimaksud bersekongkol menurut Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah" *Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan tender tertentu"*; ----------

b. Bahwa perubahan konstruksi Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 terkait frasa pihak lain, maka dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, maka yang dimaksud bersekongkol adalah "*Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan tender tertentu*";----------

c. Bahwa dalam pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bersekongkol dapat berupa:----------

1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; --------
2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan Tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------
3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
4. Menciptakan persaingan semu;----------
5. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
6. Tidak menolak melakukan suatu Tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Tindakan tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ---------

7. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;----------

d. Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

Terlapor I melakukan Tindakan berupa menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.----------

(1) Terlapor I membatalkan tender proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dengan alasan yang berubah-ubah; ----------

(2) Bahwa dalam pemeriksaan Saksi M. Taufiqurrahman, yang pada saat tender dilaksanakan, menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum, menyampaikan bahwa alasan pembatalan adalah karena adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu adanya praktik banting harga yang tidak wajar dan adanya oknum Tim Pengadaan yang tertutup, oleh karenanya kemudian Direksi melakukan rapat dan memutuskan untuk membatalkan lelang tersebut;----------

(3) Bahwa dalam dokumen Notulensi Rapat Direksi tanggal 18 Juni 2021, tidak ada pembahasan mengenai alasan pembatalan karena adanya praktik persaingan usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak sehat berupa praktik banting harga yang tidak wajar dan adanya oknum Tim Pengadaan yang tertutup, namun hal yang disampaikan alasannya adalah karena terdapat perbedaan definisi kriteria dan melakukan skoring yang berbeda; ----------

(4) Bahwa demikian pula dalam Laporan Laporan Hasil reviu Proyek TIM III, diketahui bahwa pertimbangan pembatalan proyek adalah kesalahan skoring dalam beberapa aspek teknis;----------

(5) Bahwa perbedaan definisi kriteria sehingga dinilai berakibat kesalahan skoring dalam beberapa aspek teknis yaitu pada kriteria pengalaman terkait perbedaan penafsiran pengalaman kota besar; ----------

(6) Bahwa penilaian aspek pengalaman kota besar sebagai unsur yang mempengaruhi nilai tidak terdapat dalam KAK maupun RfP yang dibuat pada bulan Mei tahun 2021. Namun demikian, apabila aspek pengalaman kota besar merupakan unsur yang turut mempengaruhi nilai, hal ini juga tidak terdapat secara eksplisit dalam KAK maupun RfP yang dibuat tanggal 12 Juli 2021 pada tender ulang;----------

(7) Bahwa apabila hal tersebut dianggap suatu kesalahan dalam menilai aspek teknis sehingga menjadi dasar pembatalan, maka seharusnya aspek pengalaman di kota besar dicantumkan dalam KAK dan RfP pada tender ulang, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terlapor I; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(8) Bahwa menurut Ahli LKPP Setyabudi Arijanta, persyaratan harus bersifat kuantitatif dan tidak boleh bersifat kualitatif sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Dalam KAK dan RfP tender ulang, persyaratan pengalaman dalam sub unsurnya masih bersifat kualitatif dan bahkan untuk persyaratan pengalaman kota besar tidak dicantumkan sehingga akan menimbulkan sengketa; ----------

(9) Bahwa dalam penilaian dokumen tender menggunakan sistem nilai, Tim Pengadaan harus melakukan evaluasi berdasarkan yang tertulis di dokumen tender. Apabila Tim Pengadaan menilai diluar yang ada dalam dokumen tender, maka terjadi *post bidding* dan *post bidding* dilarang. Dalam perkara *a quo*, tambahan kriteria pengalaman kota besar tidak tercantum dalam KAK dan RfP tender pertama maupun tender ulang sehingga dapat dinilai telah terjadi *post bidding*; ----------

(10) Bahwa terkait pembatalan tender, dalam Rapat Direksi tanggal 18 Juni 2021 tersebut, Direktur Utama juga meminta agar usulan penetapan pemenang Tim Pengadaan di ubah menjadi usulan pembatalan agar dasar pembatalan adalah dari Tim Pengadaan yang mengusulkan pembatalan; ----------

(11) Bahwa Tim pengadaan tetap berpegang pada hasil pengumuman teknis yang sudah diterima peserta sehingga dapat dnilai bahwa Tim Pengadaan menolak untuk mengusulkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembatalan karena menilai proses telah dilaksanakan dengan dokumen tender;--------

(12) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Senior Pengadaan menyampaikan kepada Direktur SDM dan Umum bahwa alasan terdapat kesalahan dalam skoring untuk membatalkan tender tidak di atur dalam RfP sehingga alasan pembatalan tender diserahkan sepenuhnya kepada Direktur SDM dan Umum. Dengan demikian, pembatalan tender tidak dilakukan dalam Rapat Direksi tanggal 18 Juni 2021, namun dalam rapat tersebut hanya mendengarkan mengenai perkembangan tender proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dan meminta agar dicari solusi apabila tender tersebut akan dibatalkan;----------

(13) Bahwa dalam pemeriksaan Saksi M. Taufiqurrahman, yang pada saat tender dilaksanakan, menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum, menyampaikan bahwa alasan pembatalan adalah karena adanya indikasi praktek persaingan usaha tidak sehat yaitu adanya praktek banting harga yang tidak wajar tidak dapat dibuktikan;------

(14) Bahwa dugaan adanya prakek banting harga yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu dalam menyampaikan penawaran harga tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena berdasarkan penilaian QS, harga yang ditawarkan oleh peserta sudah wajar;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(15) Bahwa demikian juga dalam prosesnya, telah dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dimana negosiasi harga adalah untuk menilai kewajaran harga dari harga pada umumnya, dan telah diperoleh kesepakatan. Sehingga dengan demikian, tidak ada alasan bahwa harga yang ditawarkan adalah harga banting-bantingan; ----------

(16) Bahwa terkait dengan alasan oknum Tim Pengadaan yang tertutup, Tim Pengadaan telah membuat laporan pelaksanaan pada tanggal 11 Juni 2021, dan hal ini telah sesuai dengan SOP internal yang menyatakan bahwa laporan adalah berisi ringkasan pelaksanaan proses pengadaan. Sehingga dengan demikian tidak ada hal yang ditutup tutupi oleh Tim Pengadaan; ----------

(17) Bahwa dengan demikian tidak ada alasan yang kuat untuk membatalkan tender. Dan apabila dianggap ada perbedaan tafsir dalam menilai pengalaman, maka alasan ini makin menguatkan adanya praktek *post bidding* karena dalam tender ulang, kriteria pengalaman kota besar tidak dicantumkan dalam dokumen tender;----------

(18) Bahwa alasan lain yang terkait pembatalan tender adalah untuk melengkapi dokumen KAK dan RfP. Namun menurut para Saksi, penambahan dan/atau pengurangan pekerjaan tidak lebih dari 10%; ----------

(19) Bahwa menurut ahli Anton Soekiman, apabila perubahannya minor sekitar 10% (sepuluh persen) maka cukup menggunakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

addendum (CCO) tanpa perlu membatalkan tender; ----------

(20) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan pembatalan tender dan hanya merupakan bentuk fasilitasi terhadap pelaku usaha tertentu untuk memenangkan tender; ----------

Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan Tindakan penyesuaian dokumen. ------

(1) Bahwa pembatalan tender pertama proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki Tahap III dilakukan setelah diumumkan hasil penilaian teknis dan harga yang pada pokoknya terkait dengan ketidaksetujuan Direktur SDM dan Umum Terlapor I terhadap hasil penilaian teknis;----------

(2) Bahwa alasan ketidaksetujuan Direktur SDM dan Umum Terlapor I terhadap hasil penilaian teknis yang dilakukan oleh konsultan MK karena menilai konsultan MK tidak memahami isi KAK terkait pengalaman di kota besar; ----------

(3) Bahwa setelah tender dibatalkan dan dilakukan tender ulang, PP – JAKON KSO (Terlapor II dan Terlapor III) menambahkan dokumen data terkait dengan pengalaman pekerjaan; ----------

(4) Bahwa penambahan data pengalaman pekerjaan dalam jumlah yang cukup banyak yang dilakukan oleh PP – JAKON KSO (Terlapor II dan Terlapor III) didasarkan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hasil evaluasi atas pelaksanaan tender yang batal dan memperkirakan perlu menambah pengalaman untuk meningkatkan nilai; -------

(5) Bahwa penambahan data pengalaman yang dilakukan oleh PP-JAKON KSO (Terlapor II dan Terlapor III) berkesuaian dengan permasalahan tafsir antara konsultan MK dengan user dan Direktur SDM dan Umum berkaitan dengan penilaian teknis dalam unsur pengalaman pekerjaan yang mana Direktur SDM dan Umum menekankan pada aspek pengalaman di kota besar yang tidak tercantum dalam KAK dan RfP baik pada tender pertama dan tender ulang; ----------

(6) Bahwa bukti petunjuk adanya Tindakan penambahan dokumen pengalaman yang dilakukan oleh PP – JAKON KSO dengan tindakan yang dilakukan oleh Direktur SDM dan Umum Terlapor I terkait penilaian aspek pengalaman merupakan bukti adanya Tindakan secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan Tindakan penyesuaian dokumen;----------

(7) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti terjadi Tindakan berupa: menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan Tindakan penyesuaian dokumen sehingga dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi; ----------

12.47.3. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan;---------

b. Bahwa pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah:----------

PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.-------

(1) Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang pada awalnya Bernama NV Pembangunan Perumahan dan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 67 tanggal 28 Desember 2016 di buat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta;--------

(2) Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk berkedudukan di Plaza PP, Gedung Wisma Subiyanto, Jalan Letjend TB Simatupang Nomor 57 Pasar Rebo Jakarta Timur, DKI Jakarta; ----------

(3) Bahwa kegiatan usaha PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk antara lain adalah jasa konstruksi termasuk menjalankan kegiatan usaha konstruksi Gedung dan interior; ----------

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. -------

(1) Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 45 tanggal 23 Desember 1982

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Notaris Hobropoerwanto, S.H., Notaris di Jakarta;----------

(2) Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk berkedudukan di Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya RT 17/RW 08, Bintaro, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; ----------

(3) Bahwa kegiatan usaha PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk antara lain adalah pembangunan dan Teknik;----------

(4) Bahwa dalam tender perkara *a quo*, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk membentuk konsorsium dengan nama PP – JAKON KSO;----------

(5) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk telah memenuhi unsur pelaku usaha lain;----------

12.47.4. Unsur Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau memenangkan tender adalah:" *suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*"; ----------

b. Bahwa pembatalan tender pertama proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dilakukan setelah proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi administrasi, teknis dan harga telah dilakukan dan telah ada peringkat hasil tender; ---

c. Bahwa sejak diumumkan hasil evaluasi teknis tanggal 31 Mei 2021, Direksi SDM dan Umum Terlapor I, pada tanggal 3-9 Juni 2021 menyampaikan *e-mail* kepada konsultan MK untuk melakukan review ulang atas hasil penilaian teknis tersebut; ----------

d. Bahwa meskipun proses masih berlangsung, Direktur SDM dan Umum yang meminta kepada MK untuk melakukan evaluasi ulang atas penilaian teknis tersebut. Hal ini menurut Ahli Riad Horem tidak dapat dilakukan karena evaluasi ulang hanya bisa dilakukan pada masa sanggah atau sanggah banding. Pada proses yang masih berjalan, Direksi atau user hanya bisa memonitor sampai proses penetapan pemenang; --

e. Bahwa tindakan Direktur SDM dan Umum yang meminta evaluasi ulang penilaian teknis secara implisit menurut Ahli Riad Horem merupakan tindakan intervensi karena proses tender masih berlangsung;----------

f. Bahwa hasil evaluasi ulang yang menyatakan ada perbedaan tafsir terkait definisi pengalaman di kota besar dijadikan landasan oleh Direktur SDM dan Umum untuk membatalkan tender padahal unsur pengalaman kota besar sebagai aspek penilaian tidak tercantum dalam KAK maupun RfP baik ditender pertama maupun tender ulang; ------

g. Bahwa dalam tender ulang, PP – JAKON KSO menambahkan pengalaman dalam dokumen tendernya sehingga menjadi petunjuk adanya tindakan menyesuaikan secara terang-terangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun diam-diam untuk memfasilitasi PP-JAKON KSO menjadi pemenang tender; ----------

h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur bersekongkol, telah terbukti adanya unsur bersekongkol, oleh karenanya tindakan membatalkan tender pertama dan tindakan PP-JAKON KSO menyesuaikan dokumen penawaran dengan kriteria penilaian yang tidak ada dalam dokumen KAK maupun RfP merupakan tindakan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga unsur tersebut terpenuhi; --------

12.47.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: "*persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

b. Bahwa dalam tender proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, proses tender dijalankan secara tidak jujur dalam aspek penilaiannya.

c. Bahwa tata cara penilaian yang digunakan oleh Tim Pengadaan baik pada tender pertama dan tender kedua bersifat kualitatif sehingga menimbulkan multitafsir dan mudah disalahgunakan; ----------

d. Bahwa dalam aspek penilaian pengalaman perusahaan, Tim Pengadaan memiliki kertas kerja yang mencantumkan penilaian secara kuantitatif atas sub unsur pengalaman sebagai berikut: -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

				Jumlah nilai
Pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir	1	Pengalaman pekerjaan sejenis kurun waktu 10 tahun terakhir		100
	a	Pekerjaan interior/fitting out Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom	8,00	
	b	Pekerjaan interior/fitting out hotel kelas minimal bintang 3 (main lobby dan kamar)	8,00	
	c	Pekerjaan interior/fitting out ruang kantor minimal 1000 m^2 (main lobby, ruang kerja)	8,00	
	d	Pekerjaan interior/fitting out cinema dan mall	8,00	
	e	Pekerjaan equipment Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (system tata suara)	10,00	
	f	Pekerjaan equipment Gedung atau ruang lainnya (furniture fixtures dan equipment)	8,00	
	2	Pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan	20,00	
	3	Pengalaman mengelola kontrak	20,00	

e. Bahwa dalam dokumen RfP, sub unsur pengalaman bersifat kualitatif sebagai berikut: ----

(1) Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya yang menunjukkan kinerja perusahaan perserta bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menghubungi penerbit referensi/pemberi tugas /pemilik pekerjaan; ----------

(2) Apabila tidak dilengkapi referensi atau kontrak sebelumnya yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka tidak dinilai; ----------

(3) Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam; ----------

(4) Sub unsur yang dinilai adalah pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, untuk bangunan bertingkat tinggi, manajerial mengelola kontrak, dan kapastias mempekerjakan pegawai tetap; ----------

(5) Ambang batas untk penilaian pengalaman perusahaan adalah 70 (tujuh puluh; ----------

f. Bahwa kriteria penilaian yang kualitatif dalam dokumen tender menurut ahli LKPP Setyabudi Arijanta merupakan dokumen yang akan menimbulkan multitafsir dan sengketa; sedangkan dokumen penilaian kualitatif yang tidak disampaikan dalam dokumen tender merupakan tindakan *post bidding*; ----------

g. Bahwa hasil penilaian teknis dari MK khususnya terkait aspek penilaian pengalaman perusahaan terbukti telah menimbulkan permasalahan tafsir antara Tim Pengadaan, MK dengan user dan Direktur SDM dan Umum; ----------

h. Bahwa Direktur SDM dan Umum meminta agar penilaian dilakukan atas dasar pengalaman di kota besar, namun hal ini pun tetap tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dicantumkan dalam dokumen tender pada tender ulang dan kriteria sub unsur bersifat kualitatif; ---

i. Bahwa kriteria penilaian sub unsur pengalaman yang bersifat kualitatif merupakan cara tidak jujur dalam melakukan penilaian karena mengandung unsur subyektif tanpa ada tolok ukur yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam tender baik pengguna barang, pelaksana tender dan peserta tender; ----------

j. Bahwa tindakan membuat kriteria penilaian bersifat kualitatif khususnya pada sub unsur pengalaman merupakan cara tidak jujur yang dapat menghambat terjadinya persaingan yang sehat, oleh karenanya unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;----------

KESIMPULAN. ----------

Berdasarkan uraian Analisis Dugaan Pelanggaran Di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan bahwa Terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

13. Menimbang bahwa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.44): ----------

Duduk Posisi dan Argumentasi TERLAPOR I----------

HAL-HAL DI LUAR PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN----------

SAKSI INVESTIGATOR, YOVAN SAMAN AGUSTA, TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN DIPERSIDANGAN ----------

13.1. Bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, Investigator menghadirkan saksi dengan nama Yofan Saman Agusta yang merupakan anggota Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) pada lelang *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2. Bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah, Yovan Saman Agusta menyampaikan keterangan yang merugikan Para Terlapor. Salah satu keterangan Yovan Saman Agusta adalah menyatakan bahwa ia tidak terlibat lagi dalam lelang baru. Padahal dalam Bukti T1.23 ditemukan Yovan Saman Agusta terlibat dan menghadiri kegiatan *aanwijzing* Lelang Baru. Dimana tahapan *aanwijzing* adalah tahapan lanjutan setelah perbaikan dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja ("KAK") dan *Request for Proposal* ("RFP"), serta tahapan setelah penyampaian undangan kepada peserta lelang.----------

13.3. Bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Saksi Yovan Saman Agusta harus masuk dalam kategori memberikan sumpah palsu dalam persidangan, terlepas dari hak untuk melakukan laporan pidana yang dimiliki oleh Para Terlapor. Sudah seharusnya keterangan saksi Yovan Saman Agusta harus ditolak. ----------

LELANG BERDASARKAN SURAT TUGAS TANGGAL 07 JULI 2021 MERUPAKAN LELANG BARU BUKAN MERUPAKAN LELANG ULANG ---

13.4. Bahwa INVESTIGATOR dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan berkali-kali menyebut, atau menggunakan terminologi Lelang Ulang. ----------

13.5. Bahwa perlu ditegaskan, Lelang berdasarkan SK Tim Pengadaan No. 18/OP0000/VII/2021/0045 tanggal 07 Juli 2021 (Bukti T1.8) bukan merupakan Lelang Ulang, TAPI merupakan Lelang Baru. Lelang Baru merupakan konsekuensi dari Lelang Batal, sedangkan Lelang Ulang merupakan konsekuensi dari Lelang Gagal. ----------

13.6. Bahwa, yang membedakan antara Lelang Ulang dengan Lelang Baru adalah, pada Lelang Ulang KAK dan RFP tetap sama (tidak ada perubahan) dengan KAK dan RFP lelang pertama, sedangkan pada Lelang Baru KAK dan RFP berbeda atau setidak-tidaknya terdapat perbedaan dengan KAK dan RFP lelang sebelumnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.7. Bahwa argumentasi ini berkesesuaian dan dibenarkan oleh 3 (tiga) orang ahli pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang terdiri dari Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta, serta bukti surat Bukti T1.10, Bukti T1.11 , Bukti T1.12, Bukti T1.13. ----------

KLAUSUL PEMBATALAN DALAM RFP SESUAI DENGAN HUKUM YANG MENGATUR PENGADAAN BARANG DAN JASA ----------

13.8. Bahwa INVESTIGATOR dalam tahapan pembuktian berkali-kali mempermasalahkan Klausul Pembatalan yang terdapat dalam RFP lelang batal maupun RFP lelang baru, karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dari Terlapor I. ----------

13.9. Bahwa hal yang dipermasalahkan oleh INVESTIGATOR justru merupakan hal yang sudah sesuai dengan hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa. Klausul pembatalan lelang adalah klausul penting yang menjamin lelang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna barang dan jasa. ----------

13.10. Bahwa dalam klausul pembatalan lelang dapat diatur hal yang menjadi penyebab pembatalan seperti persaingan usaha tidak sehat, maupun kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sehingga sepanjang penyebab pembatalan terjadi maka pembatalan justru harus dilakukan.----------

13.11. Bahwa argumentasi ini berkesesuaian dan dibenarkan dengan keterangan 4 (empat) orang ahli yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang terdiri dari Anton Soekiman, Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta. ----------

MEKANISME SANGGAH SEBAGAI SATU-SATUNYA SALURAN KEBERATAN TERHADAP PROSES MAUPUN HASIL EVALUASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ----------

13.12. Bahwa INVESTIGATOR dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan secara sumir mengarahkan, tidak adanya tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan oleh PT. Wijaya Karya Bangunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gedung (Persero), Tbk., pada tanggal 12 Agustus 2021 (Bukti C107) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. ----------

13.13. Bahwa sesuai dengan RFP atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mekanisme 'SANGGAH' dijadikan sebagai satu-satunya saluran bagi peserta Lelang yang tidak puas terhadap proses, maupun hasil evaluasi dari pengadaan barang atau jasa. ----------

13.14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR I untuk tidak menindaklanjuti ketidakpuasan dari PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero),Tbk. melalui surat keberatan di luar waktu dan mekanisme sanggah, merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan RFP atau peraturan perundang-undangan. ----------

13.15. Bahwa argumentasi di atas, berkesesuaian dan dibenarkan oleh keterangan Saksi Fariz Andriawan Triyono, Saksi Alhabibi Aditya P.N di bawah sumpah, keterangan dari 3 (tiga) Ahli Pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta, serta Bukti T1.10 dan Bukti T1.12. ----------

PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN ----------

Unsur Bersekongkol ----------

13.16. Bahwa INVESTIGATOR dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan tetap mengarahkan adanya pemenuhan unsur bersekongkol dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan mendasarkan pada: ----------

13.16.1. Pemberitahuan Direktur SDM dan Umum bahwa tidak menyetujui rapat pengumuman pemenang, menyatakan lelang batal, dan melaksanakan Lelang Baru dalam waktu secepatnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.16.2. Penggantian Ketua Tim Pengadaan pada Lelang Baru seolah-olah ditujukan untuk mengarahkan untuk memenangkan salah satu peserta Lelang. ----------

13.16.3. Fakta-fakta bahwa KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO menang pada Lelang Baru merupakan hasil dari persekongkolan. ----------

13.17. Bahwa pemberitahuan Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I BUKAN merupakan keputusan sepihak melainkan keputusan Direksi TERLAPOR I yang telah melalui proses pembahasan sebagaimana terdapat dalam Bukti T1.32 dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------

13.17.1. Tim Pengadaan tertutup dalam menjalankan tugasnya dan memiliki kecenderungan terhadap salah satu peserta lelang. Hal ini merujuk pada fakta:

a. Berdasarkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah atau mekanisme pengadaan yang berlaku di TERLAPOR I, dalam setiap tahapan lelang Tim Pengadaan harus melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada TERLAPOR I sebagai *User* (Pengguna Barang) karena berdasarkan mekanisme pengadaan yang berlaku di Negara Indonesia, tahapan Penetapan Pemenang sampai dengan Penandatanganan Kontrak adalah kewenangan *User* (Pengguna Barang), bukan kewenangan Tim Pengadaan lagi. Namun, Tim Pengadaan, yang di dalamnya terdapat oknum Manajemen Konstruksi (MK) tidak melakukan pelaporan berkala tersebut, padahal evaluasi harga sudah dilakukan sejak tanggal 2 Juni 2021. Setelah itu TERLAPOR I mendapatkan informasi bahwa terdapat peserta lelang yang hasil evaluasi administrasi teknis tertinggi, tetapi menjadi peringkat terendah setelah evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harga. Hal ini aneh, karena lelang *a quo* adalah lelang kualitas (*quality bidding*) yang memberikan porsi teknis lebih besar dari porsi harga (70% : 30%). Menyikapi hal tersebut TERLAPOR I meminta kepada Tim Pengadaan untuk melakukan reviu ulang atas hasil evaluasi teknis untuk memastikan penilaian dilakukan dengan objektif. Fakta dan Argumentasi berkesesuaian dengan keterangan Saksi M. Taufiqurrachman di bawah sumpah, dan dibenarkan oleh 3 (tiga) Ahli Pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta, serta Bukti T1.14, Bukti T1.15, Bukti T1.18. ----------

b. Hasil Reviu Ulang atas Hasil Evaluasi Teknis yang dilakukan oknum Manajemen Konstruksi (MK) pada tanggal 10 Juni 2021 ditemukan 2 hal penting, yaitu: (Bukti T1.26) ----------

(1) Tim Pengadaan telah salah menafsirkan penilaian “interior” dan “pengalaman di lokasi kota besar” sebagaimana yang dibutuhkan oleh TERLAPOR I sebagai *User* (Pengguna Barang); ----------

(2) Terdapat perbedaan hasil penilaian teknis awal dengan hasil reviu, dimana KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO yang sebelumnya telah menduduki Peringkat I dalam evaluasi teknis awal, nilainya menjadi semakin tinggi setelah Tim Pengadaan menghitung ulang penilaian aspek interior dan pengalaman di lokasi kota besar, dengan perbandingan sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Penilaian Terhadap Interior----------

Nilai Awal ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Interior / Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballrom	27.27	1.91	100	7.00	36.36	2.55
2	Interior / Fitting Out Gedung Hotel Kelas Miniml Bintang 3	100	7.00	38.46	2.69	46.15	3.23
3	Interior / Fitting Out Ruang Kantor Min. 1000m2	86	6.00	93	6.50	99	6.50
4	Interior / Fitting Out Komersial Lainnya	100	6.00	88.89	5.33	51.85	3.11
5	Pekerjaan Equipment Gedung Pertunjukan Auditorium dan Ballrom	50	3.50	83.33	5.83	100	7.00
6	Pekerjaan Equipment Gedung atau Ruang Komersil	80	4.80	100	6.00	40	2.40

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Lainnya						

Hasil Reviu ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Interior / Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballrom	27.27	1.91	100	7.00	0	0.00
2	Interior / Fitting Out Gedung Hotel Kelas Miniml Bintang 3	86	6.00	78.57	5.50	50	3.50
3	Interior / Fitting Out Ruang Kantor Min. 1000m2	29	2.00	67.86	4.75	57	4.00
4	Interior / Fitting Out Komersial Lainnya	91	5.45	72.73	4.36	59.09	3.55
5	Pekerjaan Equipment Gedung Pertunjukan Auditorium dan Ballrom	0	0.00	100	7.00	20	1.40
6	Pekerjaan	100	6	100	6.00	50	3.00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Equipment Gedung atau Ruang Komersil Lainnya						

Penilaian Terhadap Pengalaman di Lokasi Kota Besar ----------

Nilai Awal ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Pengalaman di Lokasi Kota Besar	100	7.50	52.38	3.93	100	7.50

Hasil Reviu ----------

No	Jenis Pengalaman	PT Adhi Karya		PP- JAKON, KSO		Wika Gedung	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	Pengalaman di Lokasi Kota Besar	100	7.50	72.73	5.45	36.36	2.73

c. Setelah Tim Pengadaan mengetahui kesalahannya berdasarkan reviu yang dilakukan, secara TIBA-TIBA Tim Pengadaan mengumumkan pemenang pada tanggal 10 Juni 2021 secara sepihak. (Bukti T1.16, Bukti T1.17). Bahkan oknum Manajemen Konstruksi (MK) sekalipun mengakui terjadi perbedaan hasil penilaian antara nilai awal dengan nilai hasil reviu tetap memaksakan untuk mengumumkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. sebagai pemenang. Padahal PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk bukan peserta terbaik dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penilaian awal maupun penilaian reviu, di sisi lain pengumuman tersebut dilakukan oleh oknum Manajemen Konstruksi (MK) dengan dalih hasil reviu tidak dikenal dalam RFP (Bukti T1.26). Tim lelang pada saat itu melupakan fakta bahwa pembiayaan proyek ini berasal dari uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, dengan cara terpilihnya peserta lelang yang terbaik, apalagi lelang *a quo* adalah Lelang Kualitas (*Quality Bidding*). Fakta ini sesuai dengan keterangan Saksi M. Taufiqurrachman dan Saksi Tri Wahyuedi di bawah sumpah. ----------

d. Atas fakta kecurigaan adanya indikasi kuat kolusi itulah kemudian TERLAPOR I mengambil tindakan sebagai berikut: ----------

(1) Membatalkan lelang; ----------

(2) Meminta PT. Yodya Karya sebagai Manajemen Konstruksi (MK) mengganti oknum yang mereka tugaskan di pengadaan *a quo;*----------

(3) Mengganti Ketua Tim Pengadaan. ----------

13.17.2. Ditemukan fakta Manajemen Konstruksi (MK) gagal menerjemahkan kebutuhan dan konsep TERLAPOR I pada Lelang yang dibatalkan. Dimana, RFP Lelang Batal (Bukti T1.10) yang disusun oleh Manajemen Konstruksi (MK) tidak sesuai dengan kebutuhan dan konsep TERLAPOR I. Fakta ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi M. Taufiqurrachman dan Saksi Tri Wahyuedi di bawah sumpah.----------

13.18. Bahwa penggantian Tim Pengadaan dalam Lelang Baru dikarenakan adanya temuan adanya tindakan tidak profesional, yang dapat mengarah pada dugaan persekongkolan untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. menjadikan Tim Pengadaan tersebut adalah Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan yang baru, hal ini menegaskan kembali bahwa Lelang ini merupakan Lelang Baru, BUKAN Lelang Ulang. (Bukti T1.8).----------

13.19. Bahwa sebagai konsekuensi dari Lelang Baru, dimana RFP (Bukti T1.12) dan KAK (Bukti T1.13) juga baru, berdampak pada komponen dan komposisi penilaian teknis yang baru, sehingga apabila didapatkan pemenang yang berbeda dari Lelang Batal adalah suatu hal yang wajar. Argumentasi tersebut berkesesuaian dan dibenarkan oleh 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Fariz Andriawan triyono, Saksi Ahmadi, Saksi Sovie Irawan Kushwa, Saksi Nur Syamsul Rijal, Saksi Hendra Riatno, Saksi Githa Maharani, Saksi Andy Faisal, serta sesuai dengan keterangan dari 3 (tiga) Ahli Pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta. ----------

13.20. Bahwa perlu ditambahkan, FAKTANYA dalam Lelang Batal KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO merupakan Peringkat I dalam evaluasi administrasi dan teknis. (Bukti T1.19, Bukti T1.20). ----------

No	Nama Peserta	Nilai	Keterangan
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	77.94	TIDAK LULUS
2	PT PP -JAKON KSO	92,78	LULUS
3	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk	92,62	LULUS
4	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	89,57	LULUS
5	PT Hutama Karya (Persero)	79,06	TIDAK LULUS

13.21. Bahwa perlu ditegaskan kembali pada tanggapan ini sebagaimana telah disinggung pada angka 17 di atas, kecurigaan TERLAPOR I terhadap dugaan persekongkolan Oknum untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk., salah satunya terlihat dari FAKTA bahwa KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan Peringkat I (Bukti T1.19, Bukti T1.20) dalam evaluasi administrasi dan teknis, tetapi setelah evaluasi harga KSO TERLAPOR II – TERLAPOR III/PP-JAKON KSO berada di peringkat ketiga (Bukti T1.16) Padahal Lelang Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III merupakan Lelang Kualitas (*Quality Bidding*) yang mengutamakan kualitas dibanding harga oleh karena itu komponen penilaian dibagi menjadi 70% penilaian teknis, 30% penilaian harga. Hal ini berkesesuaian dengan 3 (tiga) Ahli Pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta. ----------

13.22. Bahwa dalam pembuktian ditemukan fakta, telah terpenuhinya salah satu syarat pembatalan lelang yang diatur dalam angka 38.3 RFP, yaitu penawaran tidak menunjukan adanya persaingan yang sehat. Tindakan ini dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. dengan memasukan harga rugi (*predatory pricing*) dalam dokumen harga di lelang batal untuk item *Overhaul* Peralatan Teater Bintang, yaitu sebesar ± Rp. 8 milyar, dimana harga ini memiliki selisih harga yang sangat jauh (± Rp. 12 milyar) dengan 2 (dua) peserta lain dan harga HPS (Bukti T1.38). Tindakan *predatory pricing* untuk memenangkan lelang batal yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. menjadi sempurna dengan adanya bukti bahwa pada lelang baru, PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. memasukan harga sebesar ± Rp 23 Milyar untuk item yang sama (Bukti T1.39). Sehingga pembatalan yang dilakukan oleh Terlapor I sudah tepat untuk menjaga persaingan dan menghindari kerugian negara. Hal ini berkesesuain dengan keterangan Saksi M. Taufiqurrachman di bawah sumpah. ----------

13.23. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta di atas, dengan adanya Tim Pengadaan yang tertutup dengan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pernah melaporkan perkembangan lelang, kemudian adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam angka 38.3 RFP, dan perbedaan interpretasi oknum Manajemen Konstruksi (MK) atas "interior" dan "pengalaman di lokasi kota besar" hal tersebut telah menjadikan dasar pembatalan lelang sangat beralasan, maka unsur bersekongkol yang dituduhkan oleh INVESTIGATOR pada Tahap Pemeriksaan Lanjutan adalah tidak tepat. ----------

13.24. Bahwa sebaliknya jika Lelang tidak dibatalkan oleh TERLAPOR I maka akan menghasilkan pemenang Lelang yang telah nyata melakukan Jual Rugi (*Predatory Pricing*), dan kemungkinan terindikasi hasil kolusi/persekongkolan, serta akan merugikan TERLAPOR I pada khususnya, dan Negara pada umumnya. Hal ini juga didukung dan dibenarkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi M. Taufiqurrachman dan sesuai dengan keterangan dari 3 (tiga) Ahli Pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta. ----------

13.25. Bahwa atas, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dapatlah disimpulkan bahwa unsur bersekongkol tidak terbukti. ----------

Unsur Pelaku Usaha Lain----------

13.26. Bahwa INVESTIGATOR dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan mengarahkan adanya pemenuhan unsur pelaku usaha lain dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 didasari pada: ----------

13.26.1. Pelaku usaha lain didefinisikan sebagai pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.26.2. Pelaku usaha lain dalam perkara adalah KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO. ----------

13.26.3. TERLAPOR I dianggap telah memberikan perlakuan istimewa kepada KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO. ----------

13.27. Bahwa seluruh proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III tunduk pada RFP, KAK, dan hasil *aanwijzing* yang BERLAKU DAN MENGIKAT bagi semua peserta Lelang, tanpa terkecuali. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat perlakuan istimewa kepada siapapun. Hal ini berkesesuaian dan dibenarkan oleh 9 (sembilan) Saksi yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Fariz Andriawan Triyono, Saksi Ahmadi, Saksi Ahmadi, Saksi Hendra Riatno, Saksi Githa Maharani, Saksi Nur Syamsul Rijal, Saksi Andy Faisal, Saksi Alhabibi Aditya P.N dan Saksi Tri Wahyuedi, serta Bukti T1.10, Bukti T1.11, Bukti T1.12, Bukti T1.13, Bukti T1.7, Bukti T1.23.----------

13.28. Bahwa proses pengadaan ini melibatkan pihak independen dalam menyusun spesifikasi teknis, KAK, dan RFP yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) dan HPS oleh Konsultan *Quantity Surveyor* (QS) (Bukti T1.24, Bukti T1.25). Jadi, tidak ada perlakuan istimewa yang dilakukan oleh TERLAPOR I kepada siapapun peserta Lelang sebagaimana dituduhkan, sehingga apabila terjadi perlakuan istimewa yang paling mungkin melakukan adalah pihak di luar TERLAPOR I. Argumentasi ini dikaitkan dengan Fakta bahwa TERLAPOR I meminta supaya oknum Manajemen Konstruksi (MK) diganti dengan yang baru pada Lelang Baru karena fakta-fakta menunjukan ada kecenderungan untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. (Bukti T1.8 dan Bukti T1.9). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.29. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta, unsur pelaku usaha lain yang dituduhkan oleh INVESTIGATOR dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan adalah tidak terbukti. ----------

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Lelang ----------

13.30. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan INVESTIGATOR menyatakan adanya unsur mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang, didasari hal-hal sebagai berikut: ----------

13.30.1. Seolah-olah TERLAPOR I menindaklanjuti keberatan dari KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO dengan membatalkan Lelang. ----------

13.30.2. Seolah-olah Pembentukan Tim Pengadaan Baru ditujukan untuk mengakomodir KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO. ----------

13.31. Bahwa terkait dengan dugaan TERLAPOR I menindaklanjuti keberatan dari KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III/PP-JAKON KSO dengan membatalkan Lelang adalah tidak tepat, karena Pembatalan Lelang didasarkan pada alasan-alasan obyektif, sebagai berikut: ----------

13.31.1. Ditemukan spesifikasi teknis dan RFP yang dibuat oleh oknum Manajemen Konstruksi (MK) tidak sesuai dengan kebutuhan TERLAPOR I (Bukti T1.10, Bukti T1.11, Bukti T1.12, Bukti T1.13) sedangkan pembiayaan proyek berasal dari penyertaan modal daerah (uang negara) sehingga harus sangat sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berkesesuaian dan dibenarkan oleh 4 (empat) Saksi yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Paramayuda Maulana, Saksi Tri Wahyuedi, Saksi Wolter N. Piri dan Saksi M. Taufiqurrachman. ----------

13.31.2. Bahwa ditemukan fakta Tim Pengadaan yang tertutup dengan tidak pernah melaporkan secara berkala perkembangan lelang. Yang mana hal ini mengarah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada indikasi tindakan untuk memenangkan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero),Tbk padahal secara teknis, PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero),Tbk bukan merupakan peserta terbaik berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis. Dimana Lelang ini merupakan lelang 2 sampul yang mengutamakan kualitas teknis ketimbang komponen harga (Lelang Kualitas/*Quality Bidding*). Fakta ini sesuai dengan keterangan Saksi M. Taufiqurrachman di bawah sumpah serta Bukti T1. 20, Bukti T1.26. ----------

13.31.3. Bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat, berupa tindakan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero),Tbk yang memasukan harga jual rugi (*predatory pricing*) item *Overhaul* Peralatan Teater Bintang, yaitu sebesar ± Rp. 8 milyar dimana harga ini memiliki selisih harga yang sangat jauh (± Rp. 12 milyar) dengan 2 (dua) peserta lain dan harga HPS. Fakta ini sesuai dengan keterangan Saksi M. Taufiqurrachman di bawah sumpah serta Bukti T1.38, Bukti T1.39. ----------

13.31.4. Bahwa pembatalan itu merupakan kewenangan dari TERLAPOR I berdasarkan Pasal 38.2 dan 38.3 RFP (Bukti T1.10) yang berlaku dan mengikat bagi seluruh peserta lelang serta merupakan hal yang lazim terjadi dalam prosedur lelang di Indonesia (Bukti C160), khusus mengenai lelang *a quo* seluruh peserta lelang tidak ada yang keberatan atas Pasal 38.2 dan 28.3 dalam tahapan *aanwijzing* (Bukti TI.7, Bukti C11). Hal ini juga didukung dan dibenarkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Saksi Tri Wahyuedi, Saksi Hendra Riatno, Saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Githa Maharani, Saksi Andy Faisal, Saksi Fariz Andriawan Triyono dan Saksi Ahmadi. Apabila pembatalan lelang tidak dilakukan oleh TERLAPOR I, maka justru akan menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat dan kolusi. Hal ini sesuai dengan kualifikasi kondisi yang dapat menyebabkan lelang dibatalkan. (Bukti T1.21).----------

Pasal 38.2 RFP

Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda).

Pasal 38.3 RFP

Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, ***apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat****, dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.*

Argumentasi ini telah berkesesuaian dan dibenarkan oleh 3 (tiga) Ahli Pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta. ----------

13.31.5. Bahwa untuk menjamin *fairness* dan independensi dalam penilaian atau evaluasi dalam Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III TERLAPOR I juga menyerahkan tugas tersebut kepada Manajemen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Konstruksi (MK) untuk memberikan penilaian/evaluasi termasuk menentukan bobot dan kriteria penilaian sesuai dengan RFP. (Bukti T1.24, Bukti T1.25). ----------

13.32. Bahwa dengan penugasan kepada pihak independen, dalam hal ini adalah Manajemen Konstruksi (MK) untuk menyusun Spesifikasi Teknis, menentukan bobot dan kriteria penilaian, serta melakukan penilaian. Hal ini membuat TERLAPOR I tidak mungkin, atau sangat sulit untuk melakukan tindakan mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang. Sehingga unsur mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang yang dituduhkan INVESTIGATOR dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan adalah tidak terbukti. ----------

Unsur Persaingan Tidak Sehat----------

13.33. Bahwa dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, INVESTIGATOR menyatakan bahwa TERLAPOR I telah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk membatalkan Lelang secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan transparan, dimana tindakan tersebut disimpulkan INVESTIGATOR sebagai penyalahgunaan wewenang yang juga telah menghilangkan upaya apapun dari peserta untuk memperjuangkan haknya jika dirugikan dalam proses Lelang. ----------

13.34. Bahwa tuduhan pembatalan lelang secara sepihak, tanpa alasan yang jelas dan transparan sudah dijawab dengan tegas pada angka 31 di atas, dimana pembatalan lelang didasarkan pada argumentasi yang objektif dan transparan, serta menciptakan pengadaan yang memenuhi prinsip-prinsip persaingan sehat. ----------

13.35. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, menjadikan mekanisme sanggah sebagai satu-satunya saluran bagi peserta Lelang yang tidak puas terhadap proses maupun hasil pengadaan. Dimana hal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut juga telah diatur dalam KAK, RFP dan Kesimpulan hasil *aanwijzing* yang disepakati oleh seluruh peserta lelang dan mengikat dalam lelang *a quo*. Dengan demikian, tidak ada upaya TERLAPOR I untuk menghilangkan upaya apapun dari peserta lelang untuk memperjuangkan haknya jika tidak puas dalam proses maupun hasil lelang, sepanjang peserta lelang menggunakan mekanisme sanggah. Argumentasi ini berkesesuaian dan dibenarkan oleh 3 (tiga) Saksi yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Fariz Saksi Indrawan Triyono, dan Saksi Ahmadi, serta keterangan dari 3 (tiga) Ahli Pengadaan yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Riad Horem, Sabela Gayo, dan Setya Budi Arijanta, serta Bukti T1.10, Bukti T1.11, Bukti T1.12, Bukti T1.13, Bukti T1.7, Bukti T1.23. ----------

13.36. Bahwa terkait dengan alasan obyektif pembatalan lelang telah dijelaskan di atas, adapun terkait dengan tertutupnya kesempatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. adalah tidak tepat. Hal ini terjawab dengan fakta dalam proses pelaksanaan Lelang Baru, TERLAPOR I telah menyampaikan Undangan Pendaftaran Lelang Baru pada tanggal 12 Juli 2021 kepada 11 (sebelas) perusahaan (Bukti T1.22) yang terlibat dalam Lelang Batal termasuk PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), dan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. termasuk salah satu dari 5 (lima) peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran, dan mengikuti seluruh tahapan proses lelang baru (Bukti T1.23). Hal ini berkesesuaian dan dibenarkan oleh 5 (lima) Saksi yang dihadirkan dalam sidang *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Ahmadi, Saksi Andy Faisal, Saksi Tri Wahyuedi, Saksi Hendra Riatno, dan Saksi Githa Maharani. ----------

13.37. Hal ini menggugurkan dalil INVESTIGATOR bahwa PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) dirugikan, atau tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki kesempatan sebagai pemenang lelang. Karena apabila PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) merasa dirugikan, dan tidak menerima pembatalan lelang, serta pelaksanaan lelang baru, maka dia tidak akan mengikuti lelang baru apalagi sampai memasukan dokumen penawaran dan mengikuti tahapan lelang baru. Sehingga, unsur persaingan tidak sehat yang dituduhkan INVESTIGATOR dalam Pemeriksaan Lanjutan adalah tidak terbukti. ----------

Kesimpulan ----------

13.38. Berdasarkan argumentasi hukum, dan pembuktian pada angka I dapat diambil kesimpulan, Bahwa TERLAPOR I tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

13.39. Berdasarkan argumentasi dan bukti yang disampaikan dalam tanggapan ini, kami memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa TERLAPOR I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. ----------

14. Menimbang PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk selaku Terlapor II dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk selaku Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.52, T3.52): ---

BAB I PENDAHULUAN

Sebelum sampai pada materi Kesimpulan, TERLAPOR II dan TERLAPOR III terlebih dahulu ingin menguraikan secara singkat bagaimana perjalanan yang harus dilalui oleh TERLAPOR II dan TERLAPOR III dalam proses pemilihan hingga ditetapkan sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenang tender Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (selanjutnya disebut sebagai "Proyek TIM Tahap III"), sebagai berikut: ----------

14.1. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang Proyek TIM Tahap III, TERLAPOR II dan TERLAPOR III adalah *pemenang tender Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap II*, di mana pada saat itu, TERLAPOR II dan TERLAPOR III mengadakan Kerja Sama Operasi ("KSO") dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("PT WIKA") dengan nama WIKA-PP-JAKON KSO dan WIKA-PP-JAKON KSO telah berhasil melaksanakan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap II tersebut sesuai dengan ketentuan Kontrak.----------

14.2. Bahwa selanjutnya TERLAPOR I mengumumkan Tender Proyek TIM Tahap III. Untuk kepentingan mengikuti Tender Proyek TIM Tahap III tersebut, TERLAPOR II berinisiatif mengajak TERLAPOR III dan PT WIKA untuk kembali membentuk KSO. Namun, oleh karena PT WIKA menolak untuk membentuk KSO, maka TERLAPOR II akhirnya memutuskan untuk mengadakan KSO dengan TERLAPOR III dengan nama PP-JAKON KSO;-------

14.3. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan, PP-JAKON KSO telah mengikuti tender Proyek TIM Tahap III yang dilaksanakan oleh TERLAPOR I. Untuk tender Pertama (Awal) setelah dilakukan serangkaian proses tender Proyek TIM Tahap III, TERLAPOR I memutuskan untuk membatalkan tender Pertama (Awal) tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 38.2 & 38.3 Dokumen Permintaan Proposal /Request for Proposal ("RfP"). Selanjutnya diketahui TERLAPOR I melakukan tender Proyek TIM Tahap III Kedua (Baru) dan PP-JAKON KSO kembali mengikuti seluruh rangkaian tender tersebut sebagaimana dilakukan oleh peserta tender lainnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga PP-JAKON KSO telah ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang tender Proyek TIM Tahap III. Atas penetapan PP-JAKON KSO sebagai pemenang terdapat keberatan/sanggah yang diajukan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan atas keberatan/sanggah tersebut TERLAPOR I telah memberikan tanggapan dan/atau klarifikasi. Terhadap tanggapan dan/atau klarifikasi TERLAPOR I tersebut, dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan terbukti PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dapat menerima serta tidak mengajukan sanggah banding, sehingga penetapan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender Proyek TIM Tahap III harus dinyatakan sah menurut hukum. ----------

14.4. Bahwa sebagai Kontraktor, PP-JAKON KSO telah melaksanakan pekerjaan Proyek TIM Tahap III tersebut secara professional sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak berikut Addendum-addendumnya, hal mana terbukti:----------

14.4.1. Selama melaksanakan pekerjaan Proyek TIM Tahap III, PP-JAKON KSO tidak pernah mendapat teguran maupun sanksi dari *Owner* i.c PT Jakarta Propertindo (Perseroda) ("PT JAKPRO"), baik selama masa pelaksanaan konstruksi maupun selama masa pemeliharaan; ----------

14.4.2. Hasil pekerjaan PP-JAKON KSO telah dilakukan serah terima (*Provisional Hand Over*) secara parsial dan hasil pekerjaan tersebut telah bermanfaat dan difungsikan untuk kepentingan masyarakat umum; dan----------

14.4.3. Saat ini, PP-JAKON KSO dan TERLAPOR I sedang melakukan perhitungan (*final account*) untuk memastikan terlaksananya seluruh hak dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kewajiban Para Pihak sebelum dilakukan serah terima akhir (*Final Hand Over*). ----------

14.5. Bahwa oleh karena itu, TERLAPOR II dan TERLAPOR III merasa heran dan terkejut ketika menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat dugaan Persekongkolan dalam proses Tender Proyek TIM Tahap III, mengingat TERLAPOR II dan TERLAPOR III, telah mengikuti seluruh tahapan tender sesuai dengan prosedur dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I, telah pula melalui mekanisme sanggah dari Peserta lain yang merasa keberatan atas penetapan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender dan bahkan TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Proyek TIM Tahap III sesuai Kontrak berikut Addendumnya; ----------

14.6. Bahwa baik dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan, dapat dibuktikan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Fakta yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan, keterangan Ahli dan Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat dibuktikan bahwa TERLAPOR II dan TERLAPOR III tidak pernah melakukan tindakan persekongkolan baik dengan Peserta tender lain (*vertikal*) dan/atau dengan TERLAPOR I selaku *Owner* (*horizontal*) maupun secara bersama-sama dengan Peserta tender lain dan *Owner* (*vertikal dan horizontal*) sebagaimana dituduhkan oleh Tim Investigator. ----------

Sehubungan dengan itu, untuk membuktikan bahwa TERLAPOR II dan TERLAPOR III i.c PP-JAKON KSO tidak melakukan tindakan persekongkolan dalam Tender Proyek TIM Tahap III, baik secara vertikal, horizontal maupun secara vertikal dan horizontal, maka TERLAPOR II dan TERLAPOR III melengkapi uraian Kesimpulan ini dengan menguraikan dan menanggapi satu persatu Fakta-fakta, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti-bukti surat yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terungkap dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diuraikan di bawah ini. ----------

BAB II DUGAAN PELANGGARAN YANG DITUDUHKAN KEPADA TERLAPOR II dan TERLAPOR III

Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") Tim Investigator, yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, pada intinya berisikan dugaan bahwa TERLAPOR II dan TERLAPOR III bersama-sama dengan TERLAPOR I, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 85/PUU-XIV/2016, tanggal 20 September 2017, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.7. Unsur Bersekongkol ----------

Tim Investigator pada butir 10.2 halaman 29 s.d 31 LDP pada intinya menyatakan: ----------

14.7.1. *TERLAPOR I telah melaksanakan proses pengadaan Pembangunan/Pekerjaan PKJ TIM Tahap III mulai tanggal 6 Mei 2021 dengan mengundang 11 (sebelas) perusahaan rekanan TERLAPOR I yang memenuhi persyaratan menjadi peserta tender.* ----------

14.7.2. *Selanjutnya proses tender dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk TERLAPOR I hingga tahap klarifikasi dan negosiasi yang dilakukan terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang ditetapkan sebagai penawar terbaik (peringkat I);* ----------

14.7.3. *Atas hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I, pada tanggal 12 Juni 2021, PP-JAKON KSO mengajukan keberatan atas hasil evaluasi dan meminta diberikan rincian komponen penilaian yang digunakan oleh Tim Pengadaan TERLAPOR I dalam*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan evaluasi dan penilaian teknis para peserta tender;----------

14.7.4. *Pada tanggal 21 Juni 2021, Tim Pengadaan TERLAPOR I melaporkan hasil proses tender kepada Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I dengan menyatakan: ----------*
"Dengan telah dicapainya kesepakatan Klarifikasi & Negosiasi oleh semua pihak dan telah membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi (BAKN) maka untuk selanjutnya dapat dilakukan pengumuman pemenang".----------

14.7.5. *Atas usulan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2021 (pukul 23.13) Direktur SDM dan Umum TERLAPOR I menyampaikan pemberitahuan kepada Achmad Ismarwan selaku Ketua Tim Pengadaan bahwa usulan Tim Pengadaan tidak disetujui dengan menyatakan: ----*
"... dengan ini selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan tidak menyetujui tahapan pengumuman pemenang tersebut. ----------

14.7.6. *Maka dengan ini disampaikan lelang dinyatakan batal dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya."----------*

14.7.7. *Setelah keputusan pembatalan tender oleh TERLAPOR I tersebut, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 TERLAPOR I membentuk Tim Pengadaan yang baru dengan mengganti ketua Tim Pengadaan dan beberapa anggota Tim Pengadaan sebelumnya.----------*

14.7.8. *Kemudian Tim Pengadaan tersebut melakukan proses tender baru hingga akhirnya menetapkan PP-JAKON KSO menjadi peserta terbaik dan selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang tender. ----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fakta tersebut membuktikan telah terjadi tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu dan/atau secara langsung maupun tidak langsung merupakan kerja sama yang menguntungkan peserta tender tertentu (i.c PP-JAKON KSO) dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol. ----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur bersekongkol dalam perkara a quo terpenuhi. ----------

14.8. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ------

Tim Investigator pada butir 10.9 halaman 32 s.d halaman 33 LDP pada intinya menyatakan: ----------

14.8.1. *Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh TERLAPOR I setelah PP-JAKON KSO melakukan keberatan atas hasil evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Pengadaan;* ----------

14.8.2. *Selanjutnya TERLAPOR I menindaklanjuti keberatan PP-JAKON KSO dengan tidak menyetujui hasil tender yang telah selesai dilakukan Tim Pengadaan (yang diketahui oleh Achmad Ismarwan) dan memerintahkan Divisi Pengadaan TERLAPOR I untuk melakukan tender ulang;* ----------

14.8.3. *Kemudian TERLAPOR I membentuk Tim Pengadaan yang baru untuk melakukan tender ulang dan selanjutnya melakukan proses tender dengan lebih mengakomodasi kepentingan PP-JAKON KSO sehingga pada akhirnya PP-JAKON KSO menjadi peserta peringkat I serta diusulkan menjadi pemenang;* ----------

14.8.4. *Pada tanggal 16 Agustus 2021, TERLAPOR I menetapkan PP-JAKON KSO menjadi pemenang tender dan menjadi perusahaan pelaksana PROYEK TIM TAHAP III.* ----------

Atas dasar fakta tersebut, maka tindakan PARA TERLAPOR dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh karena itu, Tim Investigator berpendapat unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara a quo Terpenuhi. ----------

14.9. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

Tim Investigator pada butir 10.10 halaman 33 s/d 35, pada intinya menyatakan tindakan PARA TERLAPOR dalam pengadaan PROYEK TIM TAHAP III dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha, berdasarkan alasan sebagai berikut: ----------

14.9.1. *Tindakan TERLAPOR I membatalkan tender secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan transparan bertentangan dengan prinsip dan/atau etika pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan TERLAPOR I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang terlebih telah menghilangkan upaya apa pun dari peserta untuk memperjuangkan haknya jika dirugikan dalam proses tender;*----------

14.9.2. *Dalam perkara a quo TERLAPOR I terbukti melakukan diskriminasi terhadap peserta tender yaitu ketika PP-JAKON KSO mengajukan keberatan terkait evaluasi teknis, maka TERLAPOR I mengakomodasi dengan membatalkan tender. Namun ketika PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, mengajukan keberatan terkait dengan alasan pembatalan tender, TERLAPOR I sama sekali tidak memberikan jawaban yang substansial dengan alasan keberatan di luar mekanisme sanggah yang telah diatur dalam RfP, padahal apabila mengacu pada RfP, baik keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, maupun keberatan PP-JAKON KSO sama-sama di luar mekanisme sanggah sebagaimana diatur dalam RfP.* ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.9.3. *Tindakan yang dilakukan PARA TERLAPOR berdampak pada peserta tender lain (i.c PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk) yang tertutup kesempatannya menjadi pemenang karena tender dibatalkan oleh TERLAPOR I, padahal dalam tender tersebut PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk merupakan penawar terbaik (peringkat I) yang telah melalui tahapan terakhir proses tender dan tinggal persetujuan pemenang.* ----------

Atas dasar analisis tersebut, maka Tim Investigator menyimpulkan unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara a quo Terpenuhi. ----------

Bahwa terhadap dugaan Tim Investigator tersebut, TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah memberikan tanggapan/klarifikasi/penjelasan tertulis secara detail, sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan TERLAPOR II dan Tanggapan TERLAPOR III yang masing-masing disampaikan pada persidangan tahap Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 Januari 2023 ("Tanggapan TERLAPOR II Dan TERLAPOR III"), dan karenanya Tanggapan TERLAPOR II dan TERLAPOR III tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini. ----------

BAB III URAIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI FAKTA, KETERANGAN AHLI DAN PERSESUAIAN BUKTI-BUKTI SURAT SERTA TANGGAPAN TERLAPOR II DAN TERLAPOR III

Uraian Keterangan Saksi-saksi Fakta Dan Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh Tim Investigator. ----------

Keterangan Saksi-saksi Fakta----------

14.10. Saksi Faris Adriawan Triono selaku Staff Marketing Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) ("Waskita"), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Februari 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.10.1. Tender Proyek TIM III dilakukan dengan Metode 2 Sampul, dimana sampul 1 dinilai berdasarkan aspek Administrasi dan Teknisnya, sementara sampul 2 adalah dinilai berdasarkan aspek penawaran harga; --

14.10.2. Saksi mengatakan untuk Tender Proyek TIM III yang pertama dibatalkan oleh Tim Pengadaan;----------

14.10.3. Setelah ada pembatalan Tender Proyek TIM III yang pertama, Waskita mendapatkan kembali undangan dari JAKPRO untuk mengikuti Tender Proyek TIM III kedua, dimana dalam tender tersebut ada persyaratan tambahan yang berbeda daripada tender pertama; ----------

14.10.4. Pada tahap hasil evaluasi teknis tender pertama, PP-JAKON KSO menempati posisi 1, PT Wika Gedung menempati posisi 2, namun setelah evaluasi admin, teknis dan harga posisinya berubah yakni PT Wika Gedung menempati posisi 1 karena penawaran harganya yang rendah, sedangkan PP-JAKON KSO menempati posisi 3;----------

14.10.5. Tender Proyek TIM III pertama dibatalkan, Saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan pada tanggal 22 Juni 2021 melalui Surat Pengumuman Pembatalan Lelang yang berdasarkan keputusan Direktur SDM dan Umum;----------

14.10.6. Perbedaan antara tender pertama dan tender kedua adalah pada tender pertama, tidak ada syarat mengenai penjelasan konsep desain interior sehingga Waskita mengajukan tender sendiri, sedangkan pada tender kedua karena terdapat syarat konsep desain interior tersebut dan Waskita belum mempunyai pengalaman, oleh karenanya Waskita ber-KSO dengan PT MSP; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.10.7. Pengumuman pembatalan tender pertama diterima oleh Waskita pada tanggal 22 Juni 2021, dimana dalam surat pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pembatalan tender pertama dilakukan mengacu pada ketentuan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP; ----------

14.10.8. Waskita tidak melakukan sanggah atas tidak lolosnya Waskita dalam tender tersebut, dikarenakan Waskita ingin menjaga hubungan bisnisnya dengan JAKPRO; -

14.10.9. Selain untuk menjaga hubungan bisnis dengan JAKPRO, alasan tidak melakukan sanggahan karena ada kekhawatiran apabila Waskita melakukan sanggah, maka Waskita akan di *blacklist*, karena sebelumnya pernah mengalami hal tersebut pada tender proyek lain; ----------

14.10.10. Waskita tidak pernah menanyakan alasan pembatalan tender pertama yang mengacu pada Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP; ----------

14.10.11. Waskita menyadari bahwa pada tender kedua, Waskita harus melakukan KSO karena ada penambahan Penilaian terhadap proposal desain 10% yang cukup signifikan terhadap penilaian teknis; ------

14.10.12. Waskita memahami bahwa kewenangan penilaian dalam tender ada pada panitia, dimana sebelumnya para peserta tender telah diberitahukan mengenai kriteria penilaiannya dalam dokumen tender;----------

14.10.13. Ambang batas penilaian tahapan evaluasi teknis pada tender pertama adalah sebesar 80 sedangkan pada tender kedua sebesar 85; ----------

14.10.14. Tender Proyek TIM III berbeda dengan pembangunan Gedung dari nol, karena proyek tersebut lebih berfokus pada pekerjaan interior; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.10.15. Waskita sebelumnya pernah mengikuti proyek pekerjaan interior namun dengan skala yang lebih kecil dari Proyek TIM III; ----------

14.10.16. Setiap peserta Tender Proyek TIM III mengetahui pengumuman/ proses tender tersebut, karena pada setiap tahapan tender JAKPRO selaku panitia tender memberitahukannya kepada para peserta tender; -----

14.10.17. Dalam tender di lingkup pemerintahan sering sekali terjadi pembatalan tender dengan berbagai alasan, salah satunya tender batal karena belum tersedianya anggaran; ----------

14.10.18. Baik tender awal maupun tender baru, merupakan tender yang sama karena objek pekerjaannya juga sama, hanya terdapat perbedaan yakni penambahan penilaian terhadap proposal desain 10%; ----------

14.11. Saksi Ahmadi selaku Vice President (VP) Marketing Divisi Gedung Waskita, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Februari 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.11.1. Pada Tender Proyek TIM III pertama dan tender kedua Waskita tidak lulus evaluasi teknis dan gugur dari tender;----------

14.11.2. Waskita gugur tender pertama karena tidak memenuhi ambang batas penilaian teknis, saat itu Waskita mendapatkan nilai 77.94; ----------

14.11.3. Tender Proyek TIM III, dilakukan dengan metode 2 sampul, yang terdiri dari sampul 1 yakni penilaian administrasi dan teknis, sedangkan sampul 2 adalah penilaian dari sisi harga;----------

14.11.4. Waskita tidak lulus tender karena belum mempunyai pengalaman yang mencukupi untuk mengikuti Tender Proyek Tim III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.11.5. Parameter penilaian teknis pada tender pertama berdasarkan RfP adalah: ----------
a. Pengalaman Perusahaan senilai 15%; ----------
b. Metode Pelaksanaan senilai 20%; ----------
c. Jadwal Pelaksanaan senilai 10%; ----------
d. Daftar Personal Inti senilai 10%; ----------
e. Daftar spesifikasi teknis Barang dan Material senilai 20%; ----------
f. Daftar spesifikasi teknis alat senilai 20%; ----------
g. Rencana Penerapan senilai 5%. ----------

14.11.6. Parameter penilaian teknis pada tender kedua berdasarkan RfP adalah: ----------
a. Pengalaman Perusahaan senilai 15%; ----------
b. Metode Pelaksanaan senilai 20%; ----------
c. Penilaian terhadap proposal desain senilai 10%; ---
d. Jadwal Pelaksanaan senilai 5%; ----------
e. Daftar Personal Inti senilai 10%; ----------
f. Daftar spesifikasi teknis Barang dan Material senilai 20%; ----------
g. Daftar spesifikasi teknis alat senilai 15%; ----------
h. Rencana Penerapan senilai 5%. ----------

14.11.7. Salah satu kriteria pengalaman Perusahaan yang disyaratkan dalam RfP adalah Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/Pemberi Tugas/Pemilik Pekerjaan; -

14.11.8. Waskita tidak melakukan sanggah atas hasil tender karena Waskita saat itu belum mempunyai pengalaman dalam proyek seperti TIM III, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karenanya dapat menilai diri bahwa Waskita belum mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut; -----

14.11.9. Setelah pembatalan tender pertama, Waskita kembali mengikuti tender baru dengan melakukan JO dengan PT MSP yang mempunyai pengalaman dalam proyek interior, serta merupakan salah satu rekanan Waskita;----------

14.11.10. Pada tender kedua, Waskita juga mengikuti proses *Aanwijzing* yang saat itu dihadiri oleh PP-JAKON KSO, Waskita-MSP KSO, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya; ----------

14.11.11. Surat pembatalan lelang yang dikeluarkan oleh tim tender adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktur SDM dan Umum tanggal 22 Juli 2021; -------

14.11.12. Saksi mengatakan karena tender pertama dibatalkan maka semua proses harus dimulai dari 0 (nol), hal tersebut berbeda dengan evaluasi tender; ----------

14.11.13. Saksi mengatakan tidak mengetahui secara detail mengenai alasan kenapa tender pertama Proyek TIM III dibatalkan, saksi hanya mengetahuinya berdasarkan Surat Pembatalan Tender dari Procurement PT JAKPRO yang menyampaikan bahwa pembatalan tender dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP;----------

14.11.14. Tender pertama dan tender kedua proyek TIM III, merupakan objek pekerjaan yang sama namun terdapat perbedaan pada persyaratannya;----------

14.11.15. Sanggah dalam tender adalah hak dari kontraktor/calon peyedia jasa, hal tersebut boleh dilakukan atau tidak dilakukan; ----------

14.11.16. Bobot penilaian tender adalah 70 untuk teknis sedangkan harga sebesar 30, baik tender pertama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun tender kedua mempunyai bobot yang sama, yang berbeda adalah nilai ambang batas;----------

14.11.17. Pada pelaksaan tender kedua, Waskita tidak melakukan sanggah, karena ada detail persyaratan yang memang cukup berat bagi Waskita; ----------

14.11.18. Saksi mengatakan RfP pada tender awal dengan tender baru terdapat perbedaan; ----------

14.11.19. Waskita pernah menyanggah hasil tender para proyek lain, setelah melakukan sanggah Waskita pernah tidak diundang untuk tender-tender berikutnya dari *owner* pekerjaan tersebut; ----------

14.11.20. Tender pertama dan tender kedua merupakan tender yang berbeda menurut saksi, karena ada perbedaan persyaratan dalam tender pertama dengan tender kedua;----------

14.12. Saksi Paramayuda Maulana, selaku *Staff Interior Design* pada Andramartin, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Februari 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------

14.12.1. Bahwa Adramartin merupakan Konsultan Perencana pada Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III.----------

14.12.2. Pada tahun 2007 Andramartin memenangkan sayembara *Design* Revitalisasi Taman Ismail Marzuki ("Revitalisasi TIM").----------

14.12.3. Sepengetahuan Saksi, antara tahun 2016/2017 Andramartin baru diminta untuk mengembangkan *design* hasil sayembara tersebut menjadi Konsep *Design* yang dibuat secara bertahap mulai dari Tahap I (*Arsitektur)*, Tahap II (*Master Plan*) dan Tahap III (*Interior).* ----------

14.12.4. Saksi baru terlibat dalam perencanaan, membuat konsep *design* Tahap III (interior) pada tahun 2019.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Konsep *design* Tahap III terbagi menjadi 2 (dua) area, yaitu (i) area ter*design*; dan (ii) area *guidelines*.---------

14.12.5. Untuk area ter*design* Andramartin menyiapkan konsep gambar hingga gambar kerja yang akan digunakan oleh Kontraktor Pelaksana, sedangkan untuk area *guidelines* Andramartin hanya memberikan konsep gambar/panduan mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat disampaikan oleh peserta tender dalam proposal/penawarannya.---

14.12.6. Saksi menyatakan bahwa gambar kerja yang dibuat oleh Andramartin, biasanya tidak dapat secara langsung digunakan di lapangan. Sehingga Kontraktor pelaksana selalu membuat *Shop Drawing* (Gambar Kerja) sendiri yang harus disetujui oleh Management Konstruksi ("MK") dan di akhir pekerjaan, Kontraktor akan membuat *As Built Drawing* (Gambar Terlaksana).----------

14.12.7. Pada area ter*design*, Andramartin juga menyampaikan detail dari gambar yang disampaikan seperti material bahan yang digunakan, jarak antar kursi dan lain-lain. Sedangkan untuk area *guidelines*, Andramartin hanya memberikan panduan, sebagai contoh untuk toko buku, pedoman yang diberikan mengenai tata letak rak buku dan sebagainya. ---------

14.12.8. Peserta tender hanya dapat melakukan pengembangan *design*/gambar pada area *guidelines*.

14.12.9. Saksi tidak menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi *design* dalam *Aanwijzing* tender awal tersebut, karena waktu yang diberikan hanya 10 menit sedangkan materi yang harus disampaikan cukup luas. ----------

14.12.10. Saksi mengetahui bahwa tender TIM Tahap III dilakukan 2 (dua) kali, setelah tender awal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibatalkan, Andramartin diminta untuk menjelaskan kembali konsep gambar dalam Rapat Penjelasan Aanwjzing tender baru.----------

14.12.11. Pada tender baru, Andramartin diminta oleh Tim Pengadaan/Jakpro untuk melakukan penilaian terhadap proposal *design* yang disampaikan oleh peserta tender dalam dokumen penawaran, dengan parameter dan bobot penilaian yang telah ditentukan oleh MK, sebagai berikut: ----------

a. Sesuai Konsep *Design* = 100 ----------
b. Sesuai Tetapi Kurang Jelas = 75 ----------
c. Tidak Sesuai = 50 ----------
d. Tidak Menyampaikan = 0 ----------

14.12.12. Proposal *Design* peserta tender yang dinilai oleh Andramartin hanya pada area *guidelines*. Hasil penilaian terhadap proposal *design* peserta tender adalah sebagai berikut: ----------

a. Adhi Karya 50 ----------
b. PP-JAKON 80 ----------
c. Waskita Karya 28 ----------
d. Wika Gedung 80 ----------

14.12.13. Saksi menyatakan bahwa 90% dari Konsep *Design* yang dibuat oleh Andramartin, telah direalisasikan dalam Proyek TIM Tahap III.----------

14.12.14. Saksi tidak pernah mengetahui dokumen tender brupa *Request for Proposal* (RfP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) baik untuk tender awal maupun tender baru.----------

14.12.15. Saksi tidak mengetahui adanya perubahan item untuk interior yaitu penambahan special lighting, *overhaul* proyektor Graha Bintang dan *Starball* pada tender baru. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.12.16. Saksi tidak pernah menyerahkan gambar tender kepada peserta tender sebelum dilakukannya tender.

14.12.17. Saksi tidak pernah membantu peserta tender untuk menyusun proposal *design*. ----------

14.12.18. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan peserta tender baik secara lisan maupun tertulis di luar proses tender Revitalisasi TIM Tahap III. ----------

14.13. Saksi M. Sovie Irawan Khuswa, selaku Technical Advisor pada Andramartin, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Februari 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.13.1. Pada tahun 2007, Andramartin memenangkan sayembara *design* Revitalisasi TIM Tahap III. Kemudian pada tahun 2016, melalui Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Pemprov DKI meminta Andramartin untuk memaparkan *design* Revitalisasi TIM Tahap III. ----------

14.13.2. Andramartin sebagai konsultan perencana mendesign arsitektur dan interior untuk Proyek Revitalisasi TIM. Pada saat proses pengadaan untuk pekerjaan interior (Tahap III), Tim Pengadaan Jakpro dibantu oleh MK PT Yodya Karya (Persero). ----------

14.13.3. Andramartin menyerahkan seluruh gambar-gambar yang telah di*design* kepada MK dan kemudian digunakan oleh QS untuk menghitung Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”). ----------

14.13.4. *Design* yang disiapkan oleh Andramartin untuk interior Tahap III, meliputi *design* lengkap hingga *Detail Engineering Design* (“DED”). Khusus untuk area *guidelines*, Andramartin hanya menyiapkan gambar petunjuk yang nantinya akan dikembangkan oleh peserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.13.5. Detail *design* dan *guidelines* yang dibuat oleh Andramartin merupakan acuan bagi peserta tender untuk menyampaikan proposal *design*. Dan sepengetahuan Saksi, *design* yang disiapkan oleh Andramartin tersebut dituangkan dalam dokumen tender.----------

14.13.6. Pada tender awal, Andramartin hanya terlibat pada proses *Aanwijzing*. Sepengetahuan Saksi, pihak Andramartin yang menyampaikan paparan *design* pada saat *Aanwijzing* tender awal adalah Sdr. Paramayuda. ----------

14.13.7. Sepengetahuan Saksi, untuk Revitalisasi TIM Tahap III dilakukan 2 (dua) kali tender, di mana setelah tender awal dibatalkan kemudian pada tender baru Andramartin diminta untuk melakukan penilaian terhadap proposal *design* yang disampaikan oleh peserta tender.----------

14.13.8. Permintaan penilaian dilakukan karena Tim Pengadaan/Jakpro khawatir adanya kesalahan/kekeliruan peserta tender dalam menafsirkan gambar pada area *guidelines*. ----------

14.13.9. Andramartin tidak terlibat penilaian dokumen penawaran perserta tender secara keseluruhan, penilaian yang dilakukan oleh Andramartin terbatas pada *design* untuk area *guidelines* yang disampaikan oleh para peserta tender. ----------

14.13.10. Dalam melakukan penilaian terhadap proposal *design* peserta tender, Andramartin menggunakan tabel penilaian dengan beberapa kriteria dan bobot penilaian sudah ditentukan oleh MK. ----------

14.13.11. Saksi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara *design* area *guidelines* pada tender awal dengan *design* area *guidelines* pada tender baru. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.13.12. Saksi tidak mengetahui adanya dokumen RfP dan KAK untuk tender baru. Setelah ditunjukkan dokumen RfP tender awal dan dokumen RfP tender baru, Saksi menyatakan bahwa terdapat perbedaan pekerjaan jasa spesialis antara RfP tender awal dan RfP tender baru. ----------

14.13.13. Saksi tidak pernah menyampaikan gambar tender kepada peserta sebelum dimulainya tender baik tender awal maupun tender baru. ----------

14.13.14. Saksi tidak pernah membantu peserta tender untuk menyusun proposal *design*. ----------

14.14. Saksi Nur Syamsul Rijal, selaku *Project Manager* Divisi Gedung PT Adhi Karya (Persero), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Februari 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.14.1. Pada dokumen tender terdapat gambar-gambar dari panitia tender, di mana hal tersebut menjadi dasar penawaran yang diakukan oleh Adhi Karya;----------

14.14.2. Adhi Karya tidak mengajukan keberatan/sanggah pada saat panitia tender membatalkan tender pertama, karena hal tersebut merupakan kewenangan panitia berdasarkan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP yang tidak dapat diganggu gugat, dan hal tersebut wajar terjadi; ----------

14.14.3. Jika dalam tender terdapat item penilaian teknis mengenai perencanaan terhadap bangunan, seharusnya tender tersebut adalah *design and built*, bukan *unit price*;----------

14.14.4. Nilai ambang batas pada tender pertama senilai 80 sedangkan pada tender kedua senilai 85;----------

14.14.5. Adhi Karya pada saat pengumuman peringkat evaluasi teknis tender kedua mendapatkan nilai 76,13, dan saat itu Adhi Karya menyampaikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keberatan atas pengumuman tersebut dengan mengirimkan surat pada tanggal 12 Agustus 2021 kepada panitia tender dengan alasan sebagai berikut:

a. Adhi Karya tidak puas atas keputusan panitia tender; ----------
b. Adhi Karya meminta penjelasan kenapa pada saat tender pertama Adhi Karya lulus evaluasi teknis tetapi pada tender kedua tidak lulus evaluasi teknis; ----------
c. Nilai evaluasi teknis yang diterima oleh Adhi Karya pada tender pertama adalah sebesar 89,57 sedangkan pada tender kedua 76,13, padahal berdasarkan perhitungan sendiri Adhi Karya pada tender kedua setidaknya harus mendapatkan nilai 92,25. ----------

14.14.6. Atas surat keberatan yang disampaikan oleh Adhi Karya tersebut, panitia tender tidak merespons surat tersebut; ----------

14.14.7. Saksi mengatakan penilaian pada Tender Proyek TIM III, adalah 70% dinilai dari evaluasi teknis dan 30% dinilai dari evaluasi harga;----------

14.14.8. Adhi Karya tidak mempelajari dokumen tender kedua secara menyeluruh, sehingga saat itu tidak mengetahui nilai ambang batas pada tender kedua adalah 85; ----------

14.14.9. Saksi mengatakan tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 38.2 dan 38.3 RfP pada proyek/tender lain yang diikuti oleh Adhi Karya;-------

14.14.10. Perbedaan/penambahan nilai teknis mengenai proposal desain sebesar 10% pada tender kedua merupakan perubahaan yang sangat signifikan, karena bobot nilai teknis adalah 70% dari total

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keseluruhan nilai tender, sehingga tender tersebut tidak didasarkan pada harga terendah; ----------

14.14.11. Saksi mengatakan dibalas atau tidaknya surat keberatan yang disampaikan oleh Adhi Karya kepada panitia tender, merupakan hak prerogatif dari panitia tender;----------

14.14.12. Saksi mengatakan terdapat perbedaan pada tender awal dan tender baru yaitu pada tender awal tidak menjelaskan detail dari proposal desain, sedangkan pada tender baru ada penjelasan lebih detail mengenai proposal desain;----------

14.14.13. Saksi mengatakan tidak ada Kerjasama antara para peserta tender untuk memenangkan peserta tender lain;----------

14.14.14. Penilaian terhadap proposal desain pada tender kedua nilainya 10%, yang terdiri dari:----------

a. Interior khusus finishing dinding, plafon, lantai;---
b. Akustik dan tata suara;----------
c. Special lighting/dekoratif lighting;----------
d. Tata panggung;----------
e. Elemen estetis; ----------
f. Furniture; ----------

14.14.15. Secara garis besar dokumen tender awal dan kedua tidak terdapat perbedaan, hanya ada penambahan penilaian proposal desain; ----------

14.14.16. Saksi mengatakan sudah bekerja di Adhi Karya selama 14 tahun, dan sudah sering mengikuti tender dari *owner* yg berbeda-beda, namun saksi tidak mengetahui apakah ada tender-tender lain yang terdapat klausul pembatalan persis seperti pada Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP; ----------

14.14.17. Saksi mengatakan secara garis besar tidak terdapat perbedaan pada tender batal dan tender baru, hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat penambahan evaluasi teknis mengenai proposal desain 10% pada tender baru; ----------

14.14.18. Saksi mengatakan evaluasi teknis tidak berhubungan atau tidak mempengaruhi harga, karena apabila peserta tender tidak lolos pada evaluasi teknis, maka sampul harga tidak akan dibuka oleh panitia tender; -

14.14.19. Dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Adhi Karya pada tender awal dan tender baru berbeda; -----

14.14.20. Tahapan-tahapan pada tender awal maupun tender baru hampir semuanya sama, kecuali pada tender baru yang tidak melaksanakan site visit; ----------

14.14.21. Saksi mengikuti semua tahapan pada tender pertama, sedangkan pada tender kedua saksi tidak mengikuti *aanwijzing*; ----------

14.14.22. Saksi mengatakan pembatalan tendar merupakan hal yang wajar terjadi, sehingga Adhi Karya saat itu tidak mempunyai alasan untuk melakukan sanggah atau keberatan karena hal tersebut merupakan hak dari panitia tender; ----------

14.14.23. Pada tender kedua setelah Adhi Karya menerima nilai evaluasi teknis, Adhi Karya mengajukan surat keberatan untuk meminta penjelasan kepada panitita tender mengenai perhitungan penilaian dokumen teknis yang berubah signifikan dari pada tender pertama/awal sebesar 89,57 menjadi 76,13 pada tender kedua/baru; ----------

14.14.24. Harga penawaran yang ditawarkan oleh Adhi Karya pada tender kedua lebih rendah daripada tender pertama, karena saat itu Adhi Karya berharap jika penilaian teknis pada tender kedua tetap senilai 89,57 seperti tender pertama dan harga penawaran diturunkan, Adhi Karya akan terpilih jadi pemenang. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.15. Saksi Aji Hendrawan, selaku Manager Engineering Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 28 Februari 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------

14.15.1. Saksi telah bekerja di PT Hutama Karya (Persero) ("PT HK") selama 12 (dua belas) tahun dengan jabatan terakhir sebagai Manager Engineering, Saksi bertugas untuk menyiapkan proposal teknis dalam setiap paket-paket pelelangan/tender yang diikuti oleh PT HK;----------

14.15.2. Saksi menjelaskan keikutsertaan PT HK dalam tender awal Proyek TIM Tahap III sebagai berikut: PT HK telah mengikuti proses tender mulai dari mendaftar sebagai peserta, mengunduh (*download*) dokumen tender (RfP), mengikuti *Aanwijzing* yang dilakukan secara *online*, hingga mengunggah (*upload*) dokumen penawaran teknis dan harga; ----------

14.15.3. Kemudian setelah dilakukan pengumuman nilai teknis dan pengumuman peringkat atas evaluasi administrasi, teknis serta harga, Tim Pengadaan mengumumkan adanya pembatalan tender TIM III;----

14.15.4. Saksi menyampaikan bahwa Saksi mengikuti proses *Aanwjizing* yang dilakukan secara *online*. Dalam *Aanwijzing* tersebut juga disampaikan poin-poin dalam dokumen RfP termasuk poin 38.2 dan 38.3 mengenai pembatalan tender.----------

14.15.5. Saksi menyatakan bahwa bobot penilaian yang digunakan dalam tender TIM III tersebut adalah 70:30, dengan ambang batas 80, di mana penilaian 70 diberikan untuk penawaran teknis dan penilaian 30 diberikan untuk penawaran harga; ----------

14.15.6. Nilai 70 untuk penilaian teknis tersebut, antara lain terdiri dari: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pengalaman perusahaan dengan skor 15%;---------
b. Metode pekerjaan dan peralatan 20%; ----------
c. Jadwal pekerjaan 10%; ----------
d. Kapasitas dan jenis peralatan utama 5%; ----------
e. Spesifikasi alat yang digunakan 20%;----------
f. Daftar personil 10%; ----------
g. Organisasi manajemen dan pelaksanaan 20%;-----

14.15.7. Saksi menyatakan bahwa dalam mengikuti tender proyek TIM III PT HK tidak ber-KSO dengan peserta lain, karena PT HK mampu memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga tidak ada keharusan untuk membentuk KSO; ----------

14.15.8. Berdasarkan hasil pembukaan dokumen teknis, nilai PT HK adalah 79,06 dan PT HK dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi nilai *passing grade* ambang batas; ----------

14.15.9. Saksi menyampaikan bahwa setelah PT HK dinyatakan tidak lulus penilaian teknis, PT HK tidak mengajukan keberatan dan/atau sanggah, karena tahapan tender belum memasuki masa sanggah; ------

14.15.10. Saksi menyatakan bahwa nilai penawaran teknis yang diumumkan oleh Tim Pengadaan berbeda dengan perhitungan nilai yang dilakukan sendiri (internal) oleh PT HK. PT HK meyakini telah memenuhi porsi kebutuhan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan sehingga asumsi nilai teknis PT HK telah melampaui ambang batas, namun untuk bobot penilaian atas dokumen peserta menjadi kewenangan Tim Pengadaan.----------

14.15.11. Setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, PT HK menerima pengumuman dari Tim Pengadaan bahwa tender di batalkan;---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengumuman pembatalan tender tersebut disampaikan secara resmi melalui *e-mail* oleh Tim Pengadaan dengan menjelaskan bahwa "*berdasarkan keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pasal 38.2 dan 38.3 RfP disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal*"; ----------

14.15.12. Saksi menyatakan bahwa pembatalan tender tersebut hanya mengacu pada Pasal 38.2 dan 38.3 RfP, tidak mengacu kepada hal lain;----------

14.15.13. Saksi menyampaikan bahwa pada saat pembatalan tender tersebut belum ada pengumuman pemenang tender;----------

14.15.14. Selanjutnya setelah tender pertama dibatalkan, pada tanggal 12 Mei 2021, PT HK menerima *e-mail* dari Tim Pengadaan yang berisikan undangan tender baru;-----

14.15.15. Saksi menyatakan bahwa dalam undangan tersebut tidak menyebutkan undangan tender ulang; ----------

14.15.16. Saksi menyampaikan bahwa dalam undangan tender baru tersebut juga disampaikan batas waktu pendaftaran di hari yang sama yaitu tanggal 12 Juli 2021 dari pukul 13:30 s.d pukul 15:00 dan batas waktu untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan yaitu tanggal 12 Juli 2021 pukul 15:05 s/d tanggal 13 Juli 2021 pukul 09:00; ----------

14.15.17. Saksi menyampaikan bahwa PT HK tidak membatalkan keikutsertaannya dalam tender baru, namun PT HK tidak mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, karena ada kesalahan dalam membaca undangan tender baru, sehingga PT HK berasumsi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa jangka waktu yang diberikan untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan adalah sama dengan jangka waktu yang diberikan pada tender awal; ----------

14.15.18. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 11:31, PT HK menerima undangan *Aanwijzing* tender baru, namun karena PT HK tidak mengunduh (*download*) dokumen pengadaan tender baru, maka pada pukul 12:15 PT HK kembali menerima *e-mail* dari Tim Pengadaan, yang menganulir undangan *Aanwijzing* sebelumnya;----------

14.15.19. Selanjutnya setelah menerima *email* yang menganulir undangan *Aanwijzing* tersebut, pada pukul 12:50, PT HK mengirimkan *e-mail* kepada Tim Pengadaan yang pada intinya berisi permohonan agar dapat diberikan kesempatan untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan tender baru, namun permohonan PT HK tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tim Pengadaan;

14.15.20. Saksi menyampaikan pula bahwa PT HK tidak menyampaikan dokumen penawaran (dokumen teknis & harga) pada tender baru, karena telah dianulir oleh Tim Pengadaan;----------

Selain itu, Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan antara RfP dan KAK pada tender awal dengan RfP dan KAK pada tender baru, karena PT HK tidak mengunduh (*download*) dokumen pengadaan (RfP dan KAK) pada tender baru. ----------

14.15.21. PT HK telah beberapa kali mengikuti tender proyek-proyek Terlapor I *i.c* JakPro, di antaranya Tim Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta tender proyek Jakarta International Stadium (JIS), namun PT HK belum pernah menjadi pemenang dalam proyek-proyek yang dilaksanakan oleh JakPro;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.15.22. Saksi tidak mengetahui apakah pada tender Tim Tahap I, Tahap II dan tender proyek JIS, terdapat ketentuan pembatalan lelang seperti pada Pasal 38.2 dan 38.3 RfP pada tender Tim III. Namun berdasarkan pengalaman Saksi selama mengikuti lelang, pernah ada peraturan lelang yang salah satu klausulanya berbunyi bahwa *'panitia sewaktu-waktu dapat membatalkan lelang'*; ----------

14.16. Saksi Antariksa Artini, selaku Kepala Bagian Operasional Tender Proyek TIM Tahap III (Karyawan PT Yodya Karya (Persero)), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Maret 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.16.1. Saksi adalah karyawan dari PT Yodya Karya, dan posisi terakhir saat ini sebagai Kepala Divisi Program Pengembangan Wilayah dan akan memberikan keterangan terkait keterlibatan PT Yodya Karya dalam Tender Proyek TIM III; ----------

14.16.2. Pada saat Tender Proyek TIM III berjalan saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional PT Yodya Karya dengan jobdes mengoperasikan seluruh proyek yang ada dibawah kendali divisi, dimulai dari pelaksanaan kontrak s/d penerimaan kontrak; --------

14.16.3. Terkait dengan tender, terdapat tim tersendiri yang bertanggung jawab dalam proses tender, sedangkan saksi tidak terlibat secara langsung;----------

14.16.4. Untuk tender Proyek TIM III, saksi mendampingi pada awal tender, salah satunya terkait dengan teknis tender, namun saksi tidak terlibat dalam perubahan-perubahan sistem penilaian tender;----------

14.16.5. Saat itu saksi mendampingi Sdr. Tri Wahyu Adi selaku Kepala Divisi di PT Yodya Karya, karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sekitar pertengahan tahun 2021 PT JAKPRO akan melakukan tender Proyek TIM III; ----------

14.16.6. Saksi tidak ikut/tidak mengetahui detail tender Proyek TIM III, karena saksi tidak terlibat dalam pembahasan sisi penilaian tender, sehingga saksi tidak begitu memahami mengenai tender tersebut; ----

14.16.7. Yang terlibat dari PT Yodya Karya saat Tender Baru Proyek TIM III, adalah teman-teman saksi yang ada di lapangan, yakni Sdr. Lukman, Sdr. Wahyu, dan Sdr. Yovan; ----------

14.16.8. Sementara yang terlibat pada tender awal proyek TIM III adalah Sdr. Wolter, Sdr. Yovan, dan beberapa orang lainnya yang saat itu seingat saksi sebanyak 6 (enam) orang; ----------

14.16.9. Saksi tidak mengetahui proses penilaian tender baru Proyek TIM III, namun saksi hanya mengetahui nilai akhir peserta tender melalui surat penetepan pemenang lelang; ----------

14.16.10. Menurut pengalaman saksi, biasanya Konsultan Manajemen Konstruksi tidak memberikan masukan-masukan secara teknis pada KAK, melainkan memberikan masukan secara sistem penilaian, dan sebagainya; ----------

14.16.11. Konsultan Manajemen Konstruksi dalam membuat RfP, tidak melakukan *benchmarking*; ----------

14.16.12. Saksi mengatakan tugas saksi sebagai Kepala Bagian Operasional adalah mengoperasikan seluruh proyek yang ada dibawah kendali divisi, dimulai dari pelaksanaan kontrak s/d penerimaan kontrak, (Kontrak antara PT Yodya Karya dengan *Owner*, bukan dengan pelaksana); ----------

14.16.13. Dalam proses tender baru dimana saksi saat itu terlibat pada tahap awal, seingat saksi saat itu ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diskusi yang berkaitan dengan proposal, yakni pekerjaan spesialis interior, dimana saat itu PT JAKPRO selaku *owner* mengharapkan adanya spesialis interior; ----------

14.17. Saksi Andy Faisal, selaku Manager Pemasaran PT Wika Gedung, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 27 Maret 2023, pada intinya menyampaikan hal-hak sebagai berikut: ----------

14.17.1. Saksi mulai bekerja di PT WIKA Gedung sejak tahun 2000, posisi sekarang sebagai Manager Pemasaran; ---

14.17.2. Adapun tupoksi Manager Pemasaran adalah mengikuti proses tender yang ada di Kementerian, BUMN, Swasta, dimana saksi memastikan bahwa PT WIKA Gedung mengikuti tender-tender tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh panitia tender; ----------

14.17.3. Saksi mengatakan ikut terlibat dalam tender TIM Tahap III, karena setelah PT WIKA Gedung mendapatkan dokumen tender dari panitia,nbiasanya akan disebarkan kepada tim-tim terkait seperti tim estimating, engineering, dan lainnya di PT WIKA Gedung, untuk dilakukan perhitungan;----------

14.17.4. Dalam mengikuti tender TIM Tahap III tersebut, PT WIKA Gedung menyampaikan dokumen penawaran melalui *e-Procurement* PT JAKPRO dan juga langsung kepada panitia tender;----------

14.17.5. Saksi juga ikut menghadiri acara *Aanwijzing* dan *site visit* pada pelaksanaan tender TIM Tahap III; ----------

14.17.6. Saksi mengatakan nilai evaluasi teknis pada tender awal adalah PP JAKON KSO menempati posisi ke-1 dengan nilai 92.78, WIKA Gedung menempati posisi ke-2 dengan nilai 92.62, dan PT Adhi Karya menempati posisi ke-3 dengan nilai 89.57, PT Hutama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karya posisi ke-4 dengan nilai 79.06 dan PT Waskita Karya posisi ke-5 dengan nilai 77,94;----------

14.17.7. Setelah adanya pengumuman evaluasi teknis, panitia tender melakukan pembukaan sampul harga, dimana saat itu PT Adhi Karya menawarkan dengan nilai Rp 397 M mendapatkan prosentase nilai 30, PT WIKA Gedung menawarkan Rp 418 M mendapatkan prosentase nilai 28,47, dan PP JAKON KSO menawarkan Rp 446 mendapatkan prosentasi nilai 19,69; ----------

14.17.8. Setelah adanya pembukaan harga, PT WIKA Gedung menempati peringkat ke-1, dan selanjutnya mendapatkan undangan klarifikasi dan negosiasi dari panitia tender; ----------

14.17.9. Saksi mengatakan, seharusnya pengumuman pemenang dilakukan pada 9 Juni 2021, namun pada 15 Juni 2021 ada pengunduran pengumuman pemenang yang disampaikan kepada semua peserta tender, hingga batas waktu yang tidak ditentukan; ----

14.17.10. Pada tanggal 21 Juni 2021, panitia tender menyampaikan pengumuman bahwa Tender TIM Tahap III dibatalkan;----------

14.17.11. Atas pembatalan tersebut, PT WIKA Gedung menyampaikan surat keberatan kepada panitia tender terkait pembatalan lelang tersebut yang ditanggapi oleh panitia tender pada tanggal 14 Juli 2021; ---------

14.17.12. Pada tanggal 12 Juli 2021, PT WIKA Gedung mendapatkan undangan kembali untuk mengikuti Tender baru TIM Tahap III; ----------

14.17.13. Saksi mengatakan perbedaan tender baru dibandingkan dengan tender awal adalah adanya perubahan-perubahan pada komponen teknis; ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.17.14. Saksi mengatakan perbedaan dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT WIKA Gedung pada tender awal dan tender baru, lebih ke arah adminisitrasi;-----

14.17.15. Saksi mengatakan hasil evaluasi teknis pada tender baru, yang menempati peringkat ke-1 adalah PP JAKON KSO dengan nilai 95,07 dan PT WIKA Gedung dengan nilai 89.97;----------

14.17.16. Pada pembukaan sampul harga, nilai yang ditawarkan oleh PP JAKON KSO adalah Rp 378 M *excl. PPN,* dan nilai yang ditawarkan PT WIKA Gedung adalah RP 372 M *excl. PPN;* ----------

14.17.17. Saksi mengatakan saat PT WIKA Gedung memasukkan dokumen penawaran pada tender baru, menggunakan dokumen penawaran yang baru juga, mengikuti penambahan persyaratan yang disyaratkan dalam tender baru (penambahan pengalaman, personil, dan lain-lain);----------

14.17.18. Saksi mengatakan PT WIKA Gedung pernah menyampaikan aduan pada 12 Agustus 2021 kepada PT JAKPRO karena adanya penurunan penilaian yang didapatkan oleh PT WIKA Gedung pada tender baru;--

14.17.19. PT WIKA Gedung saat itu tidak mengajukan sanggah karena adanya biaya yang harus dibayar sekitar Rp 5 Milyar untuk melakukan sanggah pada tender baru;--

14.17.20. Saksi mengatakan ikut berperan aktif dalam Tender TIM Tahap I yang dimenangkan oleh PT WIKA Gedung dan Tender TIM Tahap III; ----------

14.17.21. Saksi mengatakan tidak mengingat apakah ada klausul mengenai pembatalan tender pada Tender TIM Tahap I;----------

14.17.22. Saksi mengatakan pada tender baru, PT WIKA Gedung dalam dokumen penawarannya memasukkan beberapa pekerjaan yang disubkonkan, antara lain:---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pekerjaan jasa spesialis interior yang disubkonkan kepada PT NIPOTEK dan PT Global Furniture; -----
b. Audio Visual disubkonkan kepada PT Kayros Multijaya;----------
c. Lampu Pangung disubkonkan kepada LELCO Tri Graha Nusantara;----------
d. Lighting disubkonkan kepada PT Mandala; ---------
e. System Teater Teropong Bintang kepada Perusahaan Malaysia Virtual Reality; ----------

14.17.23. Pada tender awal, tidak ada Berita Acara yang disampaikan oleh PT JAKPRO yang berisikan tahapan tender dari awal s/d pengumuman pemenang; ---------

14.17.24. Saksi mengatakan tidak ingat berapa jumlah pengalaman yang di submit oleh PT WIKA Gedung baik pada tender awal maupun tender baru;----------

14.17.25. Saksi mengatakan walaupun PT WIKA Gedung menyampaikan keberatan pada tender awal yang dibatalkan, PT WIKA Gedung tetap mengikuti tender baru karena proyek tersebut merupakan proyek yang prestisius dan mempunyai nilai proyek yang besar; ---

14.17.26. PT WIKA Gedung pada tender TIM Tahap III mendaftarkan diri sendiri dan tidak ber-KSO karena merasa sudah mempunyai pengalaman yang mumpuni; ----------

14.17.27. Setiap tender yang diikuti oleh PT WIKA Gedung, pasti akan dilakukan self assesment, utamanya pada bagian teknis;----------

14.17.28. Saksi mengatakan pada Aanwijizing tender baru, PT WIKA Gedung tidak menyampaikan hal apapun terkait pembatalan tender awal; ----------

14.17.29. Saksi mengatakan baik tender awal maupun tender baru adalah tender proyek yang mempunyai nama yang sama, namun terkait substansi, ruang lingkup

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan, dan spesifikasi teknis, maka tender tersebut adalah tender yang berbeda; ----------

14.17.30. Saksi mengatakan komponen penilaian pada tender awal dan tender baru terdapat perbedaan, passing grade yang sebelumnya sebesar 80 menjadi 85, penilaian teknis dari 7 unsur, menjadi 8 unsur pada tender baru, sementara bobot penilaian masih sama dengan tender awal yakni 70 untuk evaluasi teknis dan 30 untuk evaluasi harga; ----------

14.17.31. Saksi mengatakan yang memenangkan Tender TIM Tahap I adalah PT WIKA Gedung, sedangkan untuk Tahap II adalah WIKA PP JAKON KSO, dan pada Tahap III adalah PP JAKON KSO;----------

14.17.32. Saksi mengatakan penawaran PT WIKA Gedung pada tender awal adalah Rp 418 M incl. PPN, dan pada tender baru sebesar Rp 372 M excl. PPN sedangkan apabila ditambah PPN maka nilai penawarannya menjadi Rp 410 M; ----------

14.17.33. Saksi mengatakan penurunan harga penawaran terjadi karena adanya perhitungan ulang seperti penurunan margin, resiko dan lain sebagainya; --------

14.17.34. Saksi mengatakan tidak mengingat apakah ada mekanisme keberatan yang diatur dalam RfP; ----------

14.17.35. Saksi mengatakan dalam RfP tender baru, tidak diatur mengenai mekanisme aduan yang dilakukan oleh PT WIKA Gedung;----------

14.17.36. Saksi mengatakan penambahan item pekerjaan/spesifikasi dalam tender, tidak selalu menyebabkan harga penawaran yang akan ditawarkan menjadi bertambah; ----------

14.17.37. Saksi mengatakan mempelajari RfP baik pada tender awal maupun tender baru, namun saksi lebih mempelajari bagian administrasinya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.17.38. Saksi mengatakan terhadap keberatan PT WIKA Gedung pada tender awal yang ditanggapi oleh PT JAKPRO, PT WIKA Gedung menerimanya karena PT JAKPRO sudah menjelaskan alasan pembatalan, sehingga pada akhirnya PT WIKA Gedung mengikuti kembali tender baru; ----------

14.17.39. Saksi mengatakan baik saksi maupun PT WIKA Gedung tidak pernah berkomunikasi dengan peserta tender lain dan panitia tender, untuk memenangkan suatu peserta tender; ----------

14.17.40. Saksi mengatakan bahwa Proyek TIM Tahap III sudah selesai dilaksanakan, dan sepengelihatan saksi sudah ada aktivitas di lokasi tersebut; ----------

14.18. Saksi Yofan Saman A, selaku Karyawan PT Yodya Karya (Persero)/Project Manager Management Konstruksi Tender TIM Tahap III, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 28 Maret 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.18.1. Saksi merupakan Karyawan PT Yodya sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan saat ini menjabat bertugas sebagai Manajer Pemasaran di wilayah Medan; ----------

14.18.2. Saksi pada tahun 2019, ditugaskan oleh PT Yodya untuk terlibat menjadi Project Manager dari Manajemen Konstruksi pada Proyek TIM Tahap I, II, dan III; ----------

14.18.3. Saat itu PT Yodya merupakan Manajemen Konstruksi pada proyek TIM I, II, dan III, saat itu saksi diberikan tugas untuk mengkoordinir tim Manajemen Konstruksi dan membuat laporan kepada PT Yodya terkait progress pekerjaan proyek-proyek tersebut; ----

14.18.4. Saksi terlibat dalam rangka evaluasi teknis Tender TIM Tahap III tender awal, termasuk dalam rangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membantu pemilik pekerjaan untuk membuat RfP, bersama-sama dengan Team Leader PT Yodya yakni Sdr. Wolter Piri;----------

14.18.5. Saksi mengatakan tidak ikut terlibat dalam tender baru karena saksi saat itu sudah dipindahkan ke PT Yodya wilayah Medan pada 4 Maret 2021;----------

14.18.6. Saksi mengatakan kriteria penilaian dalam Tender TIM Tahap III ditetapkan secara bersama-sama oleh panitia tender, Konsultan QS dan PT Yodya selaku Manajemen Konstruksi;----------

14.18.7. Hasil evaluasi teknis Tender TIM Tahap III yang dilakukan oleh tim PT Yodya saat itu diserahkan kepada panitia tender pada 30 Mei 2021 melalui *email*, yang pada intinya: ----------

a. PT Waskita Karya dengan nilai 77 dinyatakan tidak lulus;----------

b. PP JAKON KSO dengan nilai 92.78 dinyatakan lulus;----------

c. PT WIKA Gedung dengan nilai 92.62 dinyatakan lulus;----------

d. PT Adhi Karya dengan nilai 89 dinyatakan lulus;

e. PT Hutama Karya dengan nilai 79 dinyatakan tidak lulus;----------

14.18.8. Saksi mengatakan setelah hasil evaluasi teknis diserahkan kepada panitia tender, maka langkah selanjutnya yakni pengumuman hasil evaluasi teknis oleh panitia tender; ----------

14.18.9. Saksi saat itu tidak terlibat dalam proses pengumuman hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia tender, namun menurut sepengetahuan saksi nilai dalam pengumuman tersebut hasilnya sama dengan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh PT Yodya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.18.10. Saksi mengatakan pada tanggal 2 Juni 2021, PT Yodya melakukan pemaparan hasil evaluasi teknis kepada PT JAKPRO, dimana dalam pemaparan tersebut dihadiri oleh Direktur Umum dan SDM PT Jakpro, dan beberapa orang tim dari PT JAKPRO; -----

14.18.11. Saksi mengatakan pemaparan tersebut dilaksanakan atas dasar adanya permintaan dari PT JAKPRO; -------

14.18.12. Dalam pemaparan tersebut, PT JAKPRO selaku pemilik pekerjaan tidak pernah mengarahkan, meminta, atau intervensi kepada PT Yodya untuk melakukan suatu hal tertentu; ----------

14.18.13. Saksi mengatakan PT JAKPRO pernah meminta PT Yodya untuk melakukan evaluasi ulang teknis, namun hasil evaluasi ulang teknis tersebut masih sama seperti evaluasi pertama; ----------

14.18.14. Saksi mengatakan hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh PT Yodya selaku Manajemen Konstruksi adalah murni hasil perhitungan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun;----------

14.18.15. Saksi mengatakan kriteria penilaian pada Tender TIM Tahap III, tidak menjadi issue yang dibahas secara komprehensif dalam Aanwijizing;----------

14.18.16. Saksi mengatakan kriteria peniliaian *Building Information Modelling* (“BIM”) ditetapkan oleh PT JAKPRO, mengenai biaya ditetapkan oleh QS, dan teknis ditetapkan oleh PT Yodya selaku Manajemen Konstruksi; ----------

14.18.17. Saksi mengatakan pada Tender TIM Tahap I dan II tidak ada review ulang seperti Tender TIM Tahap III, adapun saat itu dasar dilakukannya review ulang karena PT JAKPRO menilai bahwa PT Yodya kurang memahami pekerjaan desain; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.18.18. Saksi mengatakan mekanisme pengumuman evaluasi teknis tidak diatur dalam RfP; ----------

14.18.19. Kapasitas PT Yodya selaku Manajemen Konstruksi adalah membantu evaluasi teknis pada Tender TIM Tahap III, untuk masalah penetapan pemenang dari tender tersebut sepenuhnya adalah kewenangan dari PT JAKPRO selaku pemilik pekerjaan;----------

14.18.20. Saksi mengatakan setelah ikut terlibat dalam evaluasi teknis Tender TIM III yang awal, saksi tidak ikut lagi dalam pelaksanaan evaluasi teknis tender baru, namun saksi sempat terlibat hingga penjelasan teknis pada Aanwijizing tender baru; ----------

14.18.21. Saksi mengatakan dalam RfP dan KAK, didalamnya terdapat persyaratan mengenai pengalaman perusahaan di bidang interior, dan audio video;--------

14.18.22. Pekerjaan spesifik dalam Tender TIM Tahap III, yakni pekerjaan Interior dan pekerjaan Audio Video;----------

14.18.23. Saksi mengatakan pada RfP tender baru, ada pendetailan pekerjaan jasa spesialis, namun secara ruang lingkup tidak berubah;----------

14.18.24. Saksi mengatakan pekerjaan akustik merupakan bagian dari system suara, dan merupakan pekerjaan penunjang; ----------

14.18.25. Pekerjaan proyek TIM Tahap I, lebih spesifik kepada pekerjaan pembangunan Gedung; ----------

14.18.26. Saksi mengatakan dalam RfP Tender TIM Tahap I, II, III, semuanya mengatur ketentuan pembatalan lelang;

14.18.27. Saksi mengatakan pembatalan lelang adalah sepenuhnya wewenang dari JAKPRO selaku pemilik pekerjaan; ----------

14.18.28. Saksi mengatakan dalam penyusunan RfP Tender TIM Tahap III tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk peserta tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.18.29. Saksi mengatakan dalam evaluasi teknis Tender TIM Tahap III tender awal dimana saksi ikut terlibat, tidak ada intervensi untuk menaikkan nilai evaluasi teknis suatu peserta tender dari pihak manapun termasuk peserta tender; ----------

14.18.30. Saksi mengatakan Proyek TIM Tahap III sudah diserahkan kepada pemilik pekerjaan dan sudah dalam masa pemeliharaan, dan menurut sepengelihatannya sudah digunakan oleh pemilik pekerjaan. ----------

14.19. Saksi Wolter Piri, selaku Karyawan PT Yodya Karya (Persero)/Tim Leader Management Konstruksi Tender TIM Tahap III, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 28 Maret 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.19.1. Saksi mengatakan saat ini bekerja di PT Yodya sebagai ahli management proyek dan manajemen konstruksi; ----------

14.19.2. Keterlibatan saksi dalam Tender TIM Tahap III adalah sebagai Team Leader dari Manajemen Konstruksi PT Yodya; ----------

14.19.3. Adapun tugas dari team leader dalam Tender TIM Tahap III adalah mengatur dan memeriksa, memberi tugas kepada staf saksi untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan, termasuk evaluasi teknis para peserta tender; ----------

14.19.4. Saksi mengatakan sebagai Manajemen Konstruksi, saksi terlibat dalam penyusunan RfP Tender TIM Tahap III bersama-sama dengan PT JAKPRO dan QS; -

14.19.5. Saksi mengatakan dasar penilaian evaluasi teknis adalah RfP yang telah disusun secara bersama; --------

14.19.6. Saksi mengatakan KAK Tender TIM Tahap III disusun oleh pemilik pekerjaan yakni PT JAKPRO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.19.7. Saksi mengatakan hanya terlibat pada Tender TIM Tahap III yang awal, sedangkan pada tender baru saksi tidak terlibat karena sudah dipindahtugaskan;--

14.19.8. Saksi tidak terlibat langsung dalam evaluasi teknis para peserta tender, namun saksi menugaskan Sdr. Yofan beserta tim-nya untuk melakukan evaluasi Tender TIM Tahap III awal; ----------

14.19.9. Saksi mengatakan mengetahui hasil penilaian evaluasi teknis berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdr. Yofan; ----------

14.19.10. Saksi mengatakan pemaparan yang diminta oleh PT JAKPRO dilakukan secara *online*, PT Yodya selaku Manajemen Konstruksi menyampaikan hasil-hasil evaluasi teknis yang telah dilaksanakan; ----------

14.19.11. Setelah paparan, saksi tidak ingat apakah ada surat review penilaian yang ditandatangani oleh saksi;-------

14.19.12. Saksi mengatakan review penilaian dilakukan untuk memastikan apakah penilaian sudah sesuai dengan RfP; ----------

14.19.13. Saksi mengatakan tidak ada permintaan review ulang penilaian teknis pada Tender TIM Tahap I & II setelah hasil evaluasi dikirimkan kepada pemilik pekerjaan yakni PT JAKPRO;----------

14.19.14. Saksi mengatakan yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pengawasan dan penilaian adalah Sdr. Yofan dan tim; ----------

14.19.15. Saksi mengatakan tidak ingat apakah ada ketentuan pembatalan tender dalam RfP Tender TIM Tahap I, II & III, karena yang lebih ikut andil dalam penyusunannya adalah Sdr. Yofan; ----------

14.19.16. Saksi mengatakan dalam Tender TIM Tahap III hanya memberikan intruksi kepada Sdr. Yofan, karena saat itu pekerjaan TIM Tahap I & II masih dalam masa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengerjaan sehingga saksi fokus pada pekerjaan TIM Tahap I & II;----------

14.19.17. Pekerjaan TIM Tahap III sudah dilakukan PHO, dan sudah dalam masa pemeliharaan, sepengetahuan saksi proyek tersebut sudah digunakan oleh pemilik pekerjaan yakni PT JAKPRO.----------

Keterangan Ahli ----------

14.20. Ahli Dr. Anton Soekirman, M.T., M.Sc, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Mei 2023 pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

14.20.1. Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen teknis antara lain kelengkapan dokumen dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta tender dalam menyusun dan mengajukan penawaran serta untuk Panitia perlu menyiapkan tata cara dan bobot penilaian yang akan digunakan untuk menilai penawaran peserta; ----------

Selain itu, dokumen gambar dan spesifikasi juga merupakan acuan bagi peserta tender untuk mengajukan dokumen penawarannya, karena dari gambar dan spesifikasi peserta dapat mengetahui kompleksitas pekerjaan; ----------

14.20.2. Dalam pelaksanaan suatu proyek, Panitia harus membuat perencanaan secara detail dan lengkap untuk menghindari adanya perubahan-perubahan, namun dalam pelaksanaan di lapangan sering kali terdapat hal-hal di luar dugaan sehingga harus dilakukan perubahan (revisi *design*) atau perubahan juga dapat terjadi karena adanya permintaan dari *Owner* (Pemilik Pekerjaan) atau adanya aturan yang secara spesifik sehingga harus melakukan perubahan, namun perubahan-perubahan tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memerlukan justifikasi teknis yang dapat dipertanggung jawabkan. ----------

14.20.3. Di dalam proses tender, gambar, spesifikasi dan pedoman harus lengkap karena hal tersebut merupakan persyaratan tender, sehingga tender dapat dilakukan secara fair, efisien dan efektif. Perubahan dokumen teknis dapat dilakukan sebelum dilakukan proses tender jika terjadi perubahan *design* yang sangat signifikan. Namun jika proses tender sudah berjalan, dan terjadi perubahan yang disebabkan karena terjadi hal-hal di luar dugaan, maka perubahan cukup dengan CCO (*Contract Change Order*) atau Addendum; ----------

14.20.4. Apabila di dalam proses tender terjadi perubahan *design* yang tidak secara spesifik, maka perubahan tersebut cukup dilakukan dengan CCO, misalnya dalam suatu proyek terdapat perubahan maka perubahan tersebut dapat dilakukan dengan CCO, kecuali jika perubahan terjadi pada semua pekerjaan maka harus diubah secara keseluruhan. ----------

Sebagai contoh, pada tahun 2005 akan dibuat infrastruktur terowongan bawah laut sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, namun kemudian diubah menjadi jembatan. Perubahan tersebut mengubah seluruh keahlian dan spesifikasi. Apabila pekerjaannya tidak berubah secara signifikan maka atas perubahan tersebut cukup dengan Addendum atau CCO. ----------

14.20.5. Jika tender dibatalkan harus ada justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan bahwa terjadi perubahan yang signifikan. Justifikasi teknis untuk pembatalan tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat diperoleh dari Tenaga Ahli baik dari internal maupun eksternal yang mendampingi Panitia Tender.

14.20.6. Sepengetahuan ahli, tidak diatur secara spesifik mengenai batasan perubahan yang dapat dilakukan dengan CCO, namun biasanya CCO dilakukan atas perubahan +10% dari Nilai Proyek, yang dianggap sebagai pekerjaan minor yang dapat dilakukan CCO, sehingga tidak perlu diulang total/dari awal, cukup dengan CCO baik untuk pekerjaan tambah maupun pekerjaan kurang.----------

14.20.7. Spesifikasi teknis dalam dokumen tender biasanya disusun oleh Perencana sesuai dengan *design* dan didiskusikan dengan *Owner*. ----------

14.20.8. Apabila proses tender sudah dilaksanakan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, seharusnya tender tidak boleh dibatalkan, karena hal tersebut melanggar ketentuan pengadaan, karena pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara *fair*, efisien dan efektif. Sehingga jika tiba-tiba dibatalkan, apakah dalam dokumen tender masih ada yang kurang. Biasanya jika tidak ada perubahan signifikan pembatalan tender tidak wajar dilakukan. -

14.20.9. Dokumen Kerangka Acuan Kerja ("KAK") merupakan pedoman yang sudah dipersiapkan oleh Panitia dan sebagai acuan bagi seluruh peserta. Jika ada hal-hal di dalam KAK yang perlu didetailkan atau dijelaskan, maka pada saat pelaksanaan tender, hal tersebut dapat disampaikan pada saat rapat-rapat/*aanwijzing*.

14.20.10. Perubahan dalam dokumen KAK terkait dengan Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pekerjaan, cukup disampaikan pada saat *aanwijzing*, tidak perlu dilakukan pembatalan tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.20.11. Tujuan tender adalah untuk memilih pelaksana jasa konstruksi yang betul-betul mampu untuk menyelesaikan Project sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *Owner*.----------

14.20.12. Apabila pekerjaannya sudah baik dan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh *Owner* (*fair, efektif dan efisien*), semestinya proses tendernya juga sudah berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya, tender tersebut harus berjalan dengan. ----------

14.20.13. Pengadaan Barang dan Jasa dalam bidang konstruksi berbeda dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada bidang lainnya. Di dalam bidang konstruksi, tujuan dari tender adalah untuk mendapatkan harga termurah dengan kualitas terbaik. Selain itu, proses pelaksanaannya harus benar dan sesuai. ----------
Jika proses tender sudah benar dan sesuai serta tujuan dari PBJ tersebut sudah tercapai, maka seharusnya sudah tidak ada masalah. ----------

14.20.14. Berdasarkan pengalaman ahli dalam membantu panitia tender, Ahli akan mengecheck seberapa signifikan perubahan dalam dokumen tender tersebut. Karena jika proses tendernya sudah berjalan dan kemudian di ulang akan banyak menimbulkan kerugian. ----------

14.20.15. Jika terdapat indikasi/dugaan adanya tindakan kolusi yang dilakukan oleh Panitia, maka hal tersebut harus diperiksa apakah ada peserta yang terlibat atau tidak, jika ternyata terbukti bahwa seluruh peserta terlibat, maka tender tersebut harus dibatalkan.-------

14.20.16. Apabila di dalam dokumen tender terdapat klausul mengenai ketentuan pembatalan tender, yang salah satunya mengatur bahwa jika ditemukan adanya persaingan usaha tidak sehat/kolusi, maka klausul

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut dapat digunakan oleh *Owner* untuk membatalkan tender. ----------

14.20.17. Ahli pernah diminta sebagai tenaga Ahli untuk membantu Panitia Tender, pada umumnya Panitia Tender sudah memiliki draf dokumen tender, sehingga ahli hanya membantu untuk memeriksa dan memberi masukan saja. ----------

14.20.18. Penyusunan dokumen tender merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Tender dan peserta tender tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam penyusunan dokumen tender. ----------

14.20.19. Di dalam Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan tender/tender gagal. Ketentuan mengenai pembatalan tender/tender gagal tersebut juga dapat dimuat di dalam dokumen tender. ----------

14.20.20. Apabila terdapat keberatan atau hal-hal lain dalam dokumen tender yang tidak disetujui oleh peserta, maka peserta dapat menyampaikan keberatan terhadap hal-hal tersebut pada saat *aanwijzing*. Kemudian panitia berwenang untuk menolak atau menyetujui keberatan atau hal-hal yang disampaikan oleh peserta tersebut. ----------

14.20.21. Ketika terdapat ketentuan pembatalan tender di dalam dokumen tender, maka yang berwenang melakukan pembatalan adalah Panitia, dengan catatan adanya alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu atasan dari Panitia tender (*Pengguna Anggaran*) juga dapat melakukan pembatalan jika ditemukan hal-hal lain yang dapat membatalkan tender. ----------

14.20.22. Apabila proses tender sudah sangat terbuka dan dibuka di depan umum maka sudah tidak ada lagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mekanisme keberatan, kecuali terdapat bukti tertentu terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan tender. ----------

14.20.23. Sepengetahuan Ahli, mekanisme Sanggah dan Sanggah Banding adalah proses hukum, sehingga ahli tidak memberikan pendapat mengenai mekanisme Sanggah dan Sanggah Banding. ----------

14.20.24. Di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rancang Bangun (*Design and Build*) dengan kontrak *lump sum price* (harga dan spesifikasi tetap), dimungkinkan adanya perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaan tersebut dapat dituangkan ke dalam CCO, sepanjang ada justifikasi teknisnya; ----------

14.20.25. Dalam proses tender, tidak ada larangan bagi peserta untuk menyampaikan surat-surat kepada Panitia/*Owner* terkait hal-hal umum seperti menanyakan jadwal, rincian data dan hasil evauasi. Panitia/*Owner* tidak berkewajiban untuk menjawab hal-hal yang disampaikan oleh peserta yang sifatnya umum.----------

14.21. Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., KN., yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 16 Mei 2023, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

14.21.1. Mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa secara umum diatur sebagai berikut:----------

a. Untuk pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya menggunakan dana dari APBN/APBD harus tunduk pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; ----------

b. Untuk pengadaan barang dan jasa yang dananya berasal dari BUMN, maka pengadaannya diatur oleh Surat Keputusan Direksi BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Untuk pengadaan barang dan jasa BUMD, aturan pengadaannya diatur oleh Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah boleh mendelegasikan kepada Direksi BUMD masing-masing untuk membuat aturan pengadaan yang lebih teknis. ----

Semua pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi baik anggaran APBN/APBN atau BUMN/BUMD, harus mengacu pada UU Jasa Konstruksi (tidak boleh bertentangan);----------

14.21.2. Pemerintah dalam hal ini LKPP telah membuat standar dokumen tender baik untuk jenis pekerjaannya *(konstruksi, konsultan, barang, dan jasa lainnya)*, tahap penilaian *(pra kualifikasi/pasca kualifikasi)*, sistem penilaiannya *(sistem nilai atau sistem gugur)* dan lain-lain. ----------

Secara prinsip, dalam menyusun dokumen tender itu harus *fair*, tidak boleh membuat persyaratan yang diskriminatif (persyaratan yang mengarah pada peserta tertentu); ----------

14.21.3. Sebelum batas akhir penawaran, dokumen tender bisa diubah. Namun jika telah melewati batas waktu pengajuan penawaran, maka dokumen tender tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi perubahan dokumen tender setelah jangka waktu pengajuan penawaran berakhir, maka hal tersebut merupakan *post bidding*; ----------

14.21.4. Perubahan dokumen tender dapat di mungkinkan karena: ----------

a. Adanya usulan dari peserta tender pada saat *aanwijzing*, yang selanjutnya perubahan tersebut akan dituangkan dalam BA *Aanwijzing* dan dilakukan addendum dokumen tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Adanya keputusan user untuk mengubah dokumen tender, karena ditemukan adanya kekurangan/kekeliruan. Jika perubahan dilakukan setelah *aanwijzing*, maka harus dilakukan *aanwijzing* ulang; ----------

14.21.5. Semua persyaratan yang diatur dalam dokumen tender harus kuantitatif, sehingga siapa pun yang menilai maka hasilnya akan sama. ----------

Menurut Ahli, untuk pekerjaan konstruksi tendernya tidak boleh dilakukan dengan sistem nilai, kecuali pekerjaan konstruksi yang *Design and Build* (terintegrasi), dan pekerjaan EPC (*Enggineering, Procurement and Construction*) (terintegrasi yang lebih luas dari pada DB). Untuk tender pekerjaan konstruksi konvensional (yang sudah ada gambar dan *design*) harus dilakukan dengan sistem gugur. ---------

Untuk tender yang menggunakan sistem nilai, penilaiannya variabelnya harus kuantitatif, lengkap (detail) dan transparan. Panitia tidak boleh menambah/mengganti/mengurangi kriteria pada saat melakukan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam dokumen tender. -------

Dalam tender yang menggunakan sistem nilai, setiap peserta tender sudah dapat mengukur kemampuan sendiri; ----------

Dalam tender pekerjaan *Design and Build*, item proposal *design* harus dinilai. Kalau proposal tidak dinilai, maka hal tersebut sangat fatal.----------

14.21.6. Jika ternyata panitia tidak mampu melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta (akibat adanya penambahan lingkup pekerjaan), maka untuk menghindari adanya/terjadinya *post bidding*, tender tersebut seharusnya dibatalkan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.21.7. Begitu pula jika ditemukan adanya penyimpangan/ kesalahan dalam dokumen tender, maka tendernya harus dibatalkan dulu. Setelah itu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen tendernya, lalu peserta diundang kembali dan dilakukan tender ulang;----------

Pembatalan tender juga dapat dilakukan jika terdapat kekurangan-kekurangan dokumen tender yang berakibat pada *output*. Panitia/*user* harus melakukan penambahan kriteria agar *output* tender dapat tercapai. Justifikasi tercapai atau tidaknya *output* dalam proses tender dilakukan oleh Konsultan Teknis. ----------

Pembatalan dapat dilakukan segera setelah indikasi pembatalan diketahui, tanpa harus melakukan pembuktian.----------

14.21.8. Klausula mengenai pembatalan tender, biasanya tercantum dalam dokumen tender. Namun demikian, pembatalan tender harus disertai dengan alasan yang sah sesuai dengan aturan, misalnya terjadinya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), indikasi terjadinya *post bidding* (ada kesalahan pada dokumen tender atau ada pelanggaran prosedur tender) atau adanya indikasi persekongkolan. Pembatalan tender harus disampaikan kepada semua peserta tender disertai dengan alasan pembatalan. ----------

14.21.9. Dokumen tender atau *Request for Proposal* (RfP) disusun oleh Pokja/Panitia. Pada saat aanwijing, peserta tender diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan/masukan terhadap RfP. Jika tidak ada yang keberatan/menyanggah atas klausula-klausula yang tercantum dalam RfP, maka seluruh peserta tender tersebut dianggap menyetujui isi RfP tersebut;-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.21.10. Indikasi persekongkolan dapat terjadi sejak perencanaan anggaran, misalnya: ----------

a. Adanya usulan tender yang tidak sesuai dengan RKAP; ----------

b. Adanya perencanaan yang tidak logis, misalnya proyek bangun jalan yang 1 minggu selesai; ------

c. Indikasi persekongkolan saat menyusun dokumen tender yang spesifikasi dan kriterianya diarahkan kepada peserta tertentu; ----------

d. Adanya perusahaan besar yang gugur dalam evaluasi teknik. ----------

14.21.11. Indikasi persekongkolan vertikal dapat terjadi sejak awal desain, spesifikasi, kriteria administrasi dan tekniknya diarahkan pada peserta tender tertentu. ----

14.21.12. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang difasilitasi oleh pembuat peraturan/ketentuan tender i.c RfP dengan peserta tender, misalnya adanya penyelundupan pasal RfP. ----------

14.21.13. Panitia boleh mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa *"apabila lelang ini dibatalkan, maka peserta tender setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada penyelenggara tender"* dalam dokumen tender, sepanjang alasan pembatalannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tapi dokumen tender juga harus mengatur bahwa peserta tender berhak untuk menerima alasan pembatalan tender tersebut. Jika peserta tender tidak diberi kesempatan untuk menerima alasan pembatalan tender, maka panitia telah bersikap sewenang-wenang dan menyalahi GCG.

14.21.14. Tender yang gagal terjadi apabila (i) pesertanya kurang dari 3; (ii) tidak ada peserta yang lulus; dan (iii) penawaran peserta tender di atas HPS. Tindak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lanjut dari tender yang gagal adalah dengan dilakukan evaluasi ulang (proses tender tidak dilakukan dari awal). ----------

14.21.15. Tender dibatalkan apabila terjadi indikasi adanya KKN, ada kesalahan dokumen/prosedur (*post bidding*) atau ada persekongkolan) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: ----------

a. Apabila terdapat indikasi KKN dan/atau persekongkolan, maka user dapat melakukan penggantian Pokja/PPK dan/atau memberikan sanksi kepada Pokja/PPK. Selanjutnya dapat pula melakukan *blacklist* terhadap calon penyedia yang terbukti terindikasi melakukan persekongkolan;---

b. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan pada dokumen tender atau adanya perubahan spesifikasi pekerjaan, sehingga terjadi multi tafsir pada dokumen tender, maka dokumen tender tersebut harus dievaluasi ulang. ----------

Tindak lanjut dari tender yang dibatalkan adalah dengan melakukan tender ulang (proses tender dilakukan dari awal). Boleh juga dilakukan tender baru jika spesifikasi pekerjaannya berubah; ----------

14.21.16. Dokumen pengadaan terdiri dari dokumen prakualifikasi dan dokumen tender/RfP (ketentuan umum, lingkup pekerjaan, tata cara evaluasi, sumber dana, draft kontrak, dll); ----------

14.21.17. Pengaduan dapat dilakukan oleh siapapun (bukan hanya peserta tender) dan ditujukan kepada pihak manapun (panitia/user atau instansi lainnya). Sedangkan upaya sanggah hanya dapat dilakukan oleh peserta tender kepada panitia. Semua surat yang dilakukan diluar mekanisme/masa masa sanggah dianggap sebagai surat pengaduan. Terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengaduan tersebut wajib direspons oleh panitia/user;

14.21.18. Pembatalan lelang dapat mengakibatkan kerugian bagi semua peserta tender. Peserta tender yang ikut lagi dalam tender baru, dapat diartikan bahwa peserta tersebut telah menerima pembatalan tender;--

14.21.19. Dulu BUMN/BUMD sering berkonsultasi dengan LKPP untuk membuat ketentuan/peraturan tender. Saat ini tidak ada kewajiban bagi instansi pemerintah, BUMN/BUMD untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada LKPP. Namun sebagai informasi bahwa Presiden saat ini memerintahkan LKPP untuk membuat peraturan pengadaan yang lingkupnya menaungi BUMN/BUMD dan APBN/APBD; ----------

Uraian Keterangan Saksi-Saksi Fakta Dan Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh TERLAPOR I, TERLAPOR II dan TERLAPOR III. ----------

Keterangan Saksi Fakta TERLAPOR I----------

14.22. Saksi Tri Wahyuedi, selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT Yodya Karya (Persero), yang hadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Maret 2023, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.22.1. Saksi bekerja di PT Yodya Karya (Persero) sejak tahun 1996 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis; ----------

14.22.2. Saksi menyatakan bahwa PT Yodya Karya (Persero) merupakan Management Konstruksi (MK) pada Proyek TIM Tahap III;----------

14.22.3. Pada tahap pengadaan/tender TIM Tahap III, sebagai MK, PT Yodya Karya (Persero) bertugas melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis dari para peserta lelang; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.22.4. Dasar PT Yodya Karya dalam melakukan evaluasi adalah dokumen KAK dan RfP. Dokumen KAK disiapkan oleh Pemberi Pekerjaan (i.c Jakpro) sedangkan RfP disusun bersama dengan Tim Pengadaan, QS dan PT Yodya Karya (Persero); ----------

14.22.5. Sistem penilaian disiapkan secara bersama oleh Tim Pengadaan QS dan PT Yodya Karya (Persero). Adapun penilaian yang disiapkan yaitu penilaian teknis seperti kualifikasi perusahaan dan pengalaman, usulan teknis & metodologi, jadwal lelang, alat dan penilaian secara khusus terhadap pengembangan *basic design*; ----------

14.22.6. Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengikuti proses Tender Awal (yang dibatalkan). Saksi hanya mengikuti proses Tender Baru TIM Tahap III; ----------

14.22.7. Sepengetahuan Saksi, dari pihak PT Yodya Karya (Persero) yang ikut pada proses Tender Awal adalah Pak Wolter N. Piri dan Pak Yofan Saman Agusta; -------

14.22.8. Saksi menyampaikan bahwa alasan mengenai adanya tender baru karena adanya kekhususan pekerjaan interior pada Proyek TIM Tahap III, Saksi mengetahui hal tersebut pada saat rapat koordinasi dengan Tim Pengadaan, QS dan Jakpro sebelum proses Tender baru; ----------

14.22.9. Saksi menyampaikan bahwa Pekerjaan interior adalah pekerjaan yang kompleks terutama pada bagian *finishing*, auditorium, hotel (wisma), *equipment theater* auditorium, *overhoul* dan sebagainya, sehingga pemenang tender/penyedia jasa yang diharapkan adalah penyedia jasa yang benar-benar menguasai pekerjaan interior. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh karena itu dalam tender Tim Tahap III, pekerjaan-pekerjaan interior tersebut harus di detailkan. ----------

14.22.10. Saksi menyatakan bahwa pada tender baru terdapat beberapa orang yang baru ditambahkan sebagai anggota Tim MK khususnya tenaga ahli yang berpengalaman di wilayah pekerjaan interior;----------

14.22.11. Saksi mengetahui terdapat perubahan pada RfP dan KAK pada tender baru, perubahan tersebut + 30 s/d 40%, antara lain dalam hal perubahan pendetailan pengalaman, dokumen kemitraan dan dokumen-dokumen yang dicantumkan misalnya RAB dan BQ; --

14.22.12. Saksi tidak terlibat dalam penentuan usulan pemenang tender baru, yang terlibat dan berwenang dalam menetapkan usulan pemenang tender adalah Tim Pengadaan;----------

14.22.13. Hasil penilaian teknis pada tender baru Tim Tahap III adalah sebagai berikut: Waskita KSO 74,97, PP-JAKON 95,07**,** Wika Gedung 89 dan Adhi Karya 76, sehingga yang lolos ambang batas hanya 2 (dua) peserta, yaitu PP-JAKON & Wika Gedung. ----------

14.22.14. Saksi menyampaikan bahwa terdapat penguatan/penambahan anggota tim MK dari PT Yodya Karya (Persero) pada tender baru, hal tersebut dikarenakan ada pekerjaan spesifik sehingga Jakpro meminta adanya pihak yang mengerti mengenai pekerjaan interior; ----------

14.22.15. Saksi menyampaikan bahwa terdapat perubahan nilai ambang batas pada tender baru. Adapun alasan perubahan nilai tersebut bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap *Inovasi basic design* atau pengembangan *design*, sehingga penilaiannya menjadi lebih detail;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.22.16. Selain itu, terdapat pula perubahan sub unsur penilaian pada dokumen RfP tender baru, hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa pekerjaan lebih mengarah ke interior, lighting, dan pengalaman perusahaan, dengan demikian pemenang diharapkan benar-benar menguasai dan berpengalaman dalam pekerjaan interior, karena tidak banyak kontraktor yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan interior;----------

14.22.17. Saksi menyatakan bahwa oleh karena terdapat perubahan sub unsur penilaian pada dokumen RfP tersebut maka hasil penilaiannya juga berubah. Perubahan penilaian tersebut antara lain meliputi pengalaman perusahaan dan alat-alat yang dipakai. -

14.22.18. Saksi menyampaikan bahwa bobot penilaian untuk pengembangan *basic design* memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penilaian teknis peserta tender;----------

14.22.19. Hasil penilaian teknis yang diberikan oleh MK kepada Tim Pengadaan langsung disetujui tanpa adanya koreksi. Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum MK menyampaikan hasil penilaian, Tim MK terlebih dahulu mempresentasikan hasil penilaian beserta alasan-alasannya; ----------

14.22.20. Saksi menyatakan tidak terdapat intervensi dari PP-JAKON KSO dalam proses penilaian untuk membuat penilaian teknis PP-JAKON KSO menjadi paling tinggi atau untuk memenangkan PP-JAKON KSO;----------

14.22.21. Saksi menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari peserta tender pada saat Tim MK, QS dan Tim Pengadaan menyusun dokumen RfP; ----------

14.23. Saksi M. Taufiqurrachman, selaku Mantan Direktur SDM dan Umum PT Jakarta Propertindo (Perseroda), yang dihadirkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Mei 2023, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

14.23.1. Saksi merupakan Direktur SDM dan Umum PT JAKPRO i.c TERLAPOR I sejak 7 November 2019 sampai dengan 26 November 2022. Sebagai Direktur SDM dan Umum, Saksi membawahi Divisi Human Capital, Divisi Pengadaan, dan Divisi Facility Management dan IT; ----------

14.23.2. Tujuan proses tender pengadaan Proyek Revitalisasi TIM Tahap III adalah karena adanya amanat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyertaan modal daerah kepada PT JAKPRO yang sudah dianggarkan dalam APBD, sehingga ada kewajiban/tugas yakni dari PT JAKPRO untuk: -------

a. memilih penyedia jasa/pelaksana yang mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan desain yang dibuat oleh konsultan yang ditunjuk dan sudah disetujui oleh PT JAKPRO; ----------

b. Mendapatkan penyedia jasa/pelaksana yang mampu dan berkualitas dalam mengerjakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi, dan syarat ketentuan yang diberikan; ----------

c. Memilih penyedia jasa/pelaksana yang akan bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah direncanakan; ----------

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan modal daerah adalah dengan melakukan laporan-laporan progress atas pelaksanaan proyek-proyek yang kemudian akan dilakukan diaudit oleh BPK, BPKP dan akuntan publik. Semua proyek dari Pemprov DKI Jakarta selaku diawasi oleh inspektorat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.23.3. Proyek Revitalisasi TIM Tahap III merupakan kelanjutan dari Proyek Revitalisasi TIM Tahap I dan Tahap II. Ruang lingkup Tender TIM Tahap III, adalah pekerjaan interior, elektrikal, elektronik, special lighting interior, *operating equipment*, *overhaul* proyektor teater bintang, dan Building Information Modelling;----------

14.23.4. Metode-metode tender yang digunakan/diatur pada PT JAKPRO, adalah berdasarkan Standar Operating Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa tanggal 24 Januari 2020 dan Manual Pengadaan Barang Dan Jasa tanggal 12 Maret 2021. Dimana didalamnya diatur bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT JAKPRO bisa melalui pemilihan langsung, pengadaan langsung, tender sederhana, tender/seleksi, dan penunjukan langsung; ----------

14.23.5. Mekanisme tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III, mengacu pada SOP pengadaan barang dan jasa tanggal 24 Januari 2020, dalam proses pengadaan ini dimulai dengan adanya disposisi penanggung jawab pengadaan barang dan jasa, penyusunan dokumen pengadaan, pengumuman undangan pengadaan, *aanwijzing*, penerimaan dokumen penawaran, pengumuman hasil evaluasi penawaran, klarifikasi, negosiasi, pengumuman pemenang, masa sanggah (jika ada sanggah), laporan pengadaan dan selanjutnya penentuan pemenang;----------

14.23.6. *Request for Proposal* (RfP) Tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III disusun oleh Manajemen Konstruksi yang ditunjuk oleh PT JAKPRO, dokumen RfP ini disepakati oleh seluruh peserta tender (penandatangan pakta integritas) pada saat *aanwijing*.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan ditandatanganinya RfP oleh peserta tender, maka peserta setuju dengan semua ketentuan yang diatur dalam RfP termasuk ketentuan mengenai pembatalan tender; ----------

14.23.7. Pembatalan tender pada Tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III dilakukan karena saat itu Direksi PT JAKPRO/user mendapat indikasi bahwa: ----------

a. Adanya persaingan yang tidak sehat yakni informasi mengenai banting harga yang tidak reasonable yang dilakukan oleh salah satu peserta tender. ----------

Tindakan banting harga yang dilakukan oleh salah satu peserta tender terhadap salah satu alat untuk teater bintang yakni lensa proyektor yang canggih dan harus di beli dari luar negeri dengan harga yang cukup mahal. Berdasarkan informasi dari produsen lensa dan Konsultan QS harga lensa proyektor untuk teater bintang harganya sekitar Rp 24 Milyar. Sedangkan harga yang ditawarkan oleh salah satu peserta tender, harganya jauh sekali dibawah harga yang ada di pasaran saat itu. ----------

Oleh karena itu, PT JAKPRO sangat berhati-hati dalam menjaga amanat dari Pemprov DKI Jakarta, jangan sampai Proyek Revitalisasi TIM Tahap III ini mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dengan harapan dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh PT JAKPRO; ----------

b. Adanya informasi dari Konsultan QS bahwa terdapat oknum panitia tender yang tertutup kepada direksi/manajemen dalam pelaksanaan tender, yaitu tidak melakukan penyampaian laporan kegiatan tender dan penyampaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paparan hasil evaluasi. Akibatnya informasi mengenai spesifikasi yang diperlukan dan pertimbangan perhitungan/evaluasi teknis, tidak tersampaikan dengan baik kepada Direksi PT JAKPRO i.c tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh PT JAKPRO. ----------

Oknum panitia tender yang diduga melakukan pelanggaran telah menerima sanksi kedisiplinan berupa ditegur dari PT JAKPRO. Selain keputusan PT JAKPRO untuk mengganti personil panitia, penggantian tersebut juga karena adanya permintaan dari MK. Penggantian personil dilakukan karena PT JAKPRO memerlukan personil yang memahami bidang akustik. ----------

Dengan ada nya indikasi – indikasi tersebut, maka Direksi PT JAKPRO (Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis, Direktur SDM dan Umum) melakukan rapat dan memutuskan untuk membatalkan lelang/tender proyek Revitalisasi TIM Tahap III tersebut; ----------

14.23.8. Penunjukkan panitia tender diusulkan oleh Tim Pengadaan dan Tim Proyek kepada Direksi. Atas usulan tersebut kemudian Direksi menerbitkan surat tugas kepada panitia tender; ----------

14.23.9. PT JAKPRO sebelumnya pernah melakukan pembatalan tender, yakni pada tender LRT Jakarta Fase I. Alasan pembatalan, karena saat itu anggaran yang sudah direncanakan tidak terealisasi dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga akhirnya dilakukan pembatalan lelang dan dilakukan tender baru; ---------

14.23.10. Dasar pembatalan lelang Tender TIM Tahap III adalah Pasal 38.2 RfP, yang menyebutkan bahwa lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dibatalkan oleh pejabat berwenang karena beberapa pertimbangan; ----------

14.23.11. Selain alasan adanya persaingan yang tidak sehat dan adanya oknum panitia tender yang tertutup kepada Direksi, alasan pembatalan juga dilakukan karena pemahaman Managemen Konstruksi terhadap hasil lelang/tender yang kemudian dipaparkan dihadapan kepada Direksi ternyata tidak memenuhi kriteria dipersyaratkan, yaitu kriteria pengalaman peserta di kota besar dan pengalaman peserta pada pekerjaan interior, mengingat pekerjaan interior untuk teater (akustik dan cinematik) yang bertaraf internasional berbeda dengan interior untuk gedung-gedung pada umumnya (seperti gedung pertemuan atau gedung pernikahan);----------

14.23.12. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada tender yang dibatalkan dibandingkan dengan KAK tender baru berbeda. Perbedaan tersebut antara lain: ----------

a. Pada KAK tender baru terdapat penambahan spesifikasi pada pekerjaan *special lighting*, interior, *overhaul* proyektor teater bintang dan penambahan 1 orang personil ahli perencana interior; ----------

b. Pada KAK tender baru ada penambahan persyaratan peserta untuk pekerjaan *fitting out cimmercial* harus ada tata *fitting out* untuk cinema dan retail; ----------

c. Pada KAK tender yang dibatalkan, disebutkan bahwa *"Peserta dapat kemitraan/kerjasama operasi dengan penyedia jasa spesialis interior..."*. Sedangkan pada KAK tender baru *"Peserta wajib kemitraan/kerjasama operasi dengan penyedia jasa spesialis interior..."*;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Pada RfP lama yang disebutkan bahwa *"pekerjaan spesialis adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan interior, special lighting interior, operating equipment dan lain-lain"*. Sedangkan pada RfP tender baru terdapat penambahan dan penyempurnaan yakni menyebutkan bahwa *"pekerjaan spesialis adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan interior, akustik, special lighting interior, operating equipment, overhaul proyektor teater bintang, dan lain-lain pekerjaan interior yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan khusus finishing elemen ruang, elemen tata cahaya, furnitur, elemen estetis untuk kenyamanan ruang, pekerjaan akustik"*; ----------

14.23.13. Dengan adanya perbedaan antara KAK pada tender awal dan KAK pada tender baru (penambahan spesifikasi dan pekerjaan-pekerjaan spesialis) menyebabkan parameter penilaian teknisnya menjadi sangat berbeda;----------

14.23.14. Bentuk transparansi dalam kegiatan tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III adalah dimana setiap peserta tender akan menerima surat hasil penilaian teknis dan harga yang dilakukan oleh Panitia Tender;

14.23.15. Sehubungan dengan pembatalan lelang Tender Proyek Revitalisasi Tahap III, PT JAKPRO telah mengirimkan surat pembatalan tender tersebut kepada seluruh peserta tender. Terhadap pembatalan lelang tersebut PT WIKA GEDUNG menyampaikan surat keberatan dan PT JAKPRO telah menyampaikan jawaban atas keberatan tersebut. ----------

Setelah PT JAKPRO membatalkan tender dan melakukan penyesuaian terhadap dokumen tender,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT JAKPRO kembali mengundang para peserta tender untuk mengikuti tender baru termasuk mengundang PT WIKA GEDUNG dan PT WIKA GEDUNG kembali mendaftar/mengikuti tender baru tersebut. Pemenang lelang pada tender proyek Revitalisasi Tahap III adalah PP-JAKON KSO; ----------

14.23.16. Proyek Revitalisasi TIM Tahap III sudah dilakukan serah terima pada bulan Desember 2022. Pada bulan November 2022 sudah dilakukan *soft opening* oleh Gubernur DKI. Secara umum semua proyek Revitalisasi TIM tahap I, II dan III telah diresmikan secara soft opening dan sampai saat ini semua sudah berjalan lancarsesuai yang diharapkan, dan sudah sesuai dengan tujuan Revitalisasi TIM tersebut;--------

14.23.17. Saksi mengatakan Hasil Revitalisasi TIM Tahap I, II, III tidak pernah mendapatkan komplain dari pihak manapun mengenai pelaksanaan dan hasil Revitalisasi TIM ini; ----------

14.23.18. Terkait penyusunan KAK dan RfP, awalnya user (PT JAKPRO) menyampaikan paparan kepada MK mengenai kebutuhan proyek sesuai dengan apa yang ada dalam KAK. Kemudian spesifikasinya dituangkan dalam RfP yang disusun oleh Manajemen Konstruksi.

14.23.19. Dalam penyusunan KAK dan RfP tersebut tidak ada sama sekali intervensi dari peserta tender (pesanan untuk memasukkan klausul pembatalan tender);------

14.23.20. Sdr. Andramatin adalah penyedia desain dari Revitalisasi TIM, dimana desain tersebut menjadi acuan dalam proyek Revitalisasi TIM Tahap I, II, III;---

14.23.21. Pembatalan tender dilakukan bukan atas dasar adanya permintaan dari salah satu peserta tender, melainkan karena PT JAKPRO fokus pada amanat yang telah diberikan oleh Pemprov DKI kepada PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

JAKPRO yakni agar spesifikasi proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki harus sesuai dengan apa yang telah disyaratkan; ----------

14.23.22. Pembatalan tender dilakukan karena hasil evaluasi tidak menunjukan kriteria dan spesifikasi yang diharapkan Pemprov DKI Jakarta dan PT JAKPRO belum terakomodasi. Kerumitan spesifikasi sinematik, akustik, special lighting pada sebuah planetarium tidak terpaparkan dalam penawaran peserta pada tender awal, sehingga dibatalkan dan melakukan tender baru. ----------

Gambar tender yang terdiri dari area yang ter*design* dan area *guideline* pada tender baru menjadi komponen yang juga dinilai, namun saksi tidak yakin apakah pada tender awal hal tersebut menjadi penilaian atau tidak. Jika area *guideline* pada tender batal tetap diteruskan (tidak diubah) dan terjadi ketidaksesuaian, maka yang bertanggungjawab kepada Pemprov adalah PT JAKPRO. ----------

Keterangan Saksi-saksi Fakta TERLAPOR II Dan TERLAPOR III----------

14.24. Saksi Ahlabibi Aditya P.N., selaku Marketing Manager Wilayah I PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Maret 2023, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

14.24.1. Saksi memberikan keterangan terkait keterlibatan PT JAKON sebagai peserta tender dalam Tender Proyek TIM III; ----------

14.24.2. Saksi mulai bekerja di PT JAKON sejak 3 Maret 2008, posisi saat ini sebagai Marketing Manager Wilayah 1 Sumatera; ----------

14.24.3. Saat Tender Proyek TIM III, saksi merupakan Kepala Bagian Prakualifikasi di PT JAKON;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.24.4. Tupoksi dari Kabag Prakualifikasi, adalah bertugas dan bertanggung jawab pada setiap tender yg diikuti PT JAKON, dimulai dari pemenuhan kualifikasi dari sisi administrasi, pengalaman, peralatan, dan lainnya;

14.24.5. Sebagai Kabag Prakualifikasi, saksi dibantu oleh 3 anggota tim, dimana setiap orangnya mempunyai tanggung jawab pada masing-masing tender yang diikuti oleh PT JAKON; ----------

14.24.6. Pada tender proyek TIM III, saksi mengikuti semua tahapan tender dimulai dari pendaftaran, aanwijizing, menyiapkan dokumen penawaran, memasukkan dokumen penawaran, hingga proses tender selesai; ---

14.24.7. PT JAKON, mulai melakukan KSO dengan PT PP setelah PT JAKON mendaftar sebagai peserta tender secara mandiri, namun setelah mempelajari syarat-syarat yang ada dalam tender, PT JAKON merasa belum mampu memenuhi syarat-syarat pengalaman, sehingga akhirnya PT JAKON memutuskan untuk ber-KSO dengan PT PP;----------

14.24.8. Saksi mengatakan tidak ikut tahapan *aanwijzing* TIM III pada tender awal, namun saksi mendapatkan laporan dari anggota timnya mengenai hasil *aanwijzing* tersebut; ----------

14.24.9. Adapun laporan yang saksi dapatkan dari timnya adalah penjelasan mengenai sisi kualifikasi perusahaan, yakni dari sisi pengalaman yang diminta, pemenuhan tenaga ahli, peralatan yang dibutuhkan, dan lain-lain;----------

14.24.10. Dalam RfP terdapat 7 unsur yang menjadi bobot penilaian, setiap unsurnya terdapat ambang batas, dan dari keseluruhan teknis tersebut juga terdapat ambang batas yang nilainya sebesar 80; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.24.11. Komposisi bobot penilaian tender proyek TIM III dibagi 2 (dua) yakni 70 untuk nilai teknis dan 30 untuk nilai harga; ----------

14.24.12. Ketika penyusunan dokumen penawaran, PP JAKON KSO menyusun dokumen penawaran tersebut secara bersama-sama; ----------

14.24.13. Nilai teknis PP JAKON KSO adalah sebesar 92,78 dimana saat itu menempati peringkat ke-1 dan dinyatakan lolos evaluasi teknis; ----------

14.24.14. Adapun peringkat evaluasi teknis yakni PP JAKON KSO menempati peringkat ke-1, PT WIKA Gedung menempati peringkat ke-2, dan PT Adhi Karya menempati peringkat ke-3; ----------

14.24.15. Setelah pengumuman evaluasi teknis, dilakukan pembukaan sampul 2/Dokumen harga, adapun hasil evaluasi penawaran teknis, administrasi dan harga setelah digabungkan, PP JAKON KSO menempati peringkat ke-3;----------

14.24.16. PP JAKON KSO melakukan *self assesment*/simulasi internal pada saat tender, dan berdasarkan perhitungan sendiri nilai teknis yang seharusnya diterima oleh PP JAKON KSO adalah sebesar 95,78;

14.24.17. Setelah dilakukan pengumuman dokumen harga (dimana PP JAKON KSO menempati peringkat ke-3), PP JAKON KSO tidak pernah mengajukan keberatan kepada panitia tender, namun pernah menyampaikan surat permintaan/permohonan rincian terhadap penilaian teknis kepada tim tender untuk meminta penjelasan bagaimana penilaian teknis PP JAKON KSO, dimana saat mendapatkan nilai teknis sebesar 92 sedangkan berdasarkan *self assessment* nilai teknis yang didapatkan adalah sebesar 95, atas surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PP JAKON KSO tersebut, panitia tender tidak memberikan tanggapan apapun; ----------

14.24.18. Dengan tidak adanya tanggapan dari panitia tender tersebut, PP JAKON KSO tidak lagi menanyakan kembali kepada panitia tender, karena hal tersebut merupakan wewenang dari panitia tender dan PP JAKON KSO selanjutnya hanya mengikuti proses tender selanjutnya; ----------

14.24.19. Saksi mengatakan saat itu terdapat pengumuman pembatalan lelang dari pemilik pekerjaan dalam bentuk surat yang disampaikan melalui *email* kepada PP JAKON KSO; ----------

14.24.20. Adapun berdasarkan surat dari pemilik pekerjaan tersebut mengatakan bahwa pembatalan tender dilakukan atas dasar pasal 38.2 dan 38.3 RfP; ---------

14.24.21. Saksi mengatakan pernah mempelajari RfP, dan secara spesifik pada pasal 38.2 mengatur pembatalan lelang yang berbunyi *"Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda)"* ----------

14.24.22. Sementara pada padal 38.3 RfP mengatakan bahwa "*Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan"----------

14.24.23. Saksi mengatakan pembatalan tender oleh pemilik pekerjaan tidak didasari oleh surat permohonan/klarifikasi dari PP JAKON KSO, melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 38.2 dan 38.3 RfP;----------

14.24.24. Saksi mengatakan setelah pembatalan tender awal, pada tanggal 12 Juli 2021, PT JAKON kembali mendapatkan undangan dari panitia Tender TIM III untuk mengikuti tender baru, adapun tahapan tendernya masih sama dengan tender awal;----------

14.24.25. Setelah saksi mempelajari dokumen tender baru, terdapat perbedaan antara tender awal yang dibatalkan dan tender baru, yakni terkait perubahan unsur penilaian dimana yang awalnya sebanyak 7 unsur menjadi 8 unsur, nilai ambang batas teknis yang pada tender awal sebesar 80 menjadi 85 pada tender baru, perubahan persyaratan personil dan peralatan;----------

14.24.26. Sedangkan dari sisi teknis terdapat perubahan mengenai penilaian proposal desain senilai 10%, dimana sebelumnya pada tender awal tidak ada penilaian tersebut, ada pun perubahan-perubahan tersebut merupakan hal yang sangat signifikan; -------

14.24.27. Pada tender baru, PT JAKON kembali melakukan kerjasama dengan PT PP, dengan membentuk KSO baru;----------

14.24.28. Pada tender baru, PP JAKON KSO menyampaikan kembali dokumen penawaran yang baru, karena terdapat perubahan penilaian teknis, personil, pengalaman, dan lain-lain sehingga dokumen penawaran harus disusun ulang dan disesuaikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada tender baru; ----------

14.24.29. Nilai teknis dari PP JAKON KSO pada tender baru sebesar 95,07 dan menempati peringkat ke-1; ---------

14.24.30. Nilai ambang batas teknis pada tender baru sebesar 85, komposisi penilaian keseluruhan masih sama dengan tender awal, yakni nilai teknis sebesar 70 dan nilai harga sebesar 30; ----------

14.24.31. PP JAKON KSO dinyatakan lulus penilaian teknis pada tender baru karena mendapatkan nilai 95,07; ---

14.24.32. Besaran nilai penawaran harga PP JAKON KSO pada tender baru sebesar Rp 415 Milyar termasuk PPN, dan pada evaluasi teknis tersebut PP JAKON KSO menempati peringkat ke-2; ----------

14.24.33. Setelah penilaian teknis dimana PP JAKON KSO menempati peringkat ke-2 dan penilaian harga digabungkan, PP JAKON KSO menempati peringkat ke-1; ----------

14.24.34. Saksi mengatakan setelah pengumuman bahwa PP JAKON KSO menempati peringkat ke-1, dilakukan klarifikasi/negosiasi antara Panitia Tender/Pemilik Pekerjaan dengan PP JAKON KSO; ----------

14.24.35. Setelah pelaksanaan klarifikasi/negosiasi, Panitia Tender mengumumkan pemenang Tender TIM III, dimana PP JAKON KSO dinyatakan sebagai pemenang; ----------

14.24.36. Saksi mengatakan tidak mengetahui apakah ada peserta tender lain yang melakukan sanggah atas ditetapkannya PP JAKON KSO sebagai pemenang Tender TIM III; ----------

14.24.37. PP JAKON KSO tidak pernah berkomunikasi dengan panitia tender maupun pemilik pekerjaan apalagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meminta kepada pemilik pekerjaan agar PP JAKON KSO dimenangkan dalam tender; ----------

14.24.38. PP JAKON KSO tidak pernah meminta kepada panitia tender maupun pemilik pekerjaan untuk membatalkan tender awal berdasarkan pasal 38.2 dan 38.3 RfP;----------

14.24.39. Dalam tender TIM III, tidak ada peserta lain yang melakukan KSO selain PP JAKON KSO; ----------

14.24.40. Pada saat penilaian teknis PP JAKON KSO tidak melakukan komunikasi dengan peserta tender lain; ---

14.24.41. Saksi mengatakan proyek TIM III sudah selesai dikerjakan dan sudah digunakan oleh publik; ----------

14.24.42. Saksi mengatakan pembatalan tender adalah hal yang umum terjadi dalam pelaksanaan tender, dan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden dan peraturan lainnya; ----------

14.24.43. Saksi mengatakan klarifikasi dan negosiasi setelah PP JAKON KSO diumumkan menempati peringkat ke-1, dilaksanakan secara *online*, saksi saat itu tidak menghadiri acara tersebut, namun anggota tim dari saksi menghadirinya; ----------

14.24.44. Saksi mengatakan kriteria-kriteria atau penjelasan tender telah disampaikan oleh panitia tender kepada para peserta tender; ----------

14.24.45. Pada tender baru, PP JAKON KSO juga melakukan *self assessment*/penilaian sendiri; ----------

14.24.46. Saksi mengatakan inti dari surat permohonan/klarifikasi PP-JAKON KSO kepada panitia tender adalah, memohon penjelasan mengenai perincian nilai teknis yang didapatkan pada tender awal, sebelum dilakukan tahapan tender selanjutnya;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.24.47. Surat Permohonan/klarifikasi disampaikan oleh PP JAKON KSO pada 12 Juni 2021, setelah pembukaan sampul 2/harga pada 10 Juni 2021; ----------

14.24.48. Saksi mengatakan pada tender baru, PP JAKON KSO menambahkan beberapa pengalaman, salah satunya pengalaman subkon interior, yakni pengalaman pekerjaan interior pada proyek hotel ibis, dan hotel santika; ----------

14.24.49. Pada saat *aanwijzing* tender baru, berdasarkan berita acara poin 10, PP JAKON KSO pernah menanyakan kepada panitia tender mengenai pengalaman interior, saat itu ditanyakan apakah memasukkan 1 pengalaman interior, bisa mendapatkan nilai 100? lalu tim tender menjawab penilaian dilakukan berdasarkan semua pengalaman interior para peserta tender. Sehingga saat itu PP JAKON KSO berasumsi bahwa semakin banyak pengalaman yang dimasukkan, maka akan semakin bagus/tinggi nilainya;----------

14.24.50. Saksi mengatakan Tender TIM I dimenangkan oleh PT WIKA GEDUNG, Tender TIM II dimenangkan oleh WIKA JAKON PP KSO, dan tahap III dimenangkan oleh PP JAKON KSO;----------

14.24.51. PT JAKON cukup banyak melakukan KSO dengan PT PP pada tender-tender proyek lain;----------

PT JAKON pernah kalah pada tender-tender proyek milik PT JAKPRO lainnya, terakhir pada tender rusun HPP JIS, saat itu yang memenangkan tender adalah PP URBAN. ----------

14.25. Saksi Hendra Riatno, selaku Quantity Surveyor Manager PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Maret 2023, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.25.1. Saksi memberikan keterangan terkait keterlibatan PT PP sebagai peserta tender dalam Tender Proyek TIM III;----------

14.25.2. Saksi mulai bekerja di PT PP sejak 1994 hingga saat ini, jabatan terakhir saksi adalah Quantity Surveyor Manager, adapun Tupoksi saksi adalah mengikuti setiap tahapan lelang yang diikuti oleh PT PP; ----------

14.25.3. Saksi ikut terlibat dalam Tender TIM III sebagai QS Manager, tugasnya mengikuti lelang dari awal sampai akhir, dimulai dari adanya undangan panitia lelang, daftar lelang, *Aanwijizing*, memasukkan dokumen lelang, dan seterusnya;----------

14.25.4. Saksi mengatakan PT PP pada saat mendaftarkan tender masih atas nama PT PP sendiri, barulah setelah adanya *aanwijzing*, PT PP melakukan KSO dengan PT JAKON;

14.25.5. Seingat saksi saat itu, dalam *aanwijizing* tender awal Proyek TIM III, ada beberapa peserta tender lain yang mengikuti *aanwijzing* tersebut, antara lain PT WIKA Gedung, PT Adhi Karya, PT JAKON, dan PT WASKITA;

14.25.6. Saksi mengatakan bobot penilaian dalam tender awal, adalah 70 poin dari evaluasi teknis dan 30 poin dari evaluasi harga;----------

14.25.7. Nilai teknis PP JAKON KSO pada tender awal adalah 92,78 dan menempati peringkat ke-1, sedangkan harga yang ditawarkan saat itu adalah sebesar Rp 446M incl. PPN;----------

14.25.8. Saksi mengatakan peserta tender TIM III awal yang lolos evaluasi teknis adalah PP JAKON KSO, PT WIKA Gedung, dan PT Adhi Karya; ----------

14.25.9. Pada evaluasi harga tender TIM III awal, peserta tender yang lolos evaluasi harga adalah PT WIKA Gedung dan PP JAKON KSO;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.25.10. Setelah adanya penggabungan nilai evaluasi teknis dan harga, PP JAKON KSO menempati peringkat ke-3;

14.25.11. Saksi mengatakan setiap tender yang diikuti oleh PT PP, pastinya akan ada perhitungan sendiri atau self assessment atas nilai yang diperoleh dalam suatu tender, pada saat Tender Proyek TIM III, PP pun juga melakukan hal tersebut; ----------

14.25.12. Saksi mengatakan pada tender awal, PP JAKON KSO pernah mengajukan surat klarifikasi kepada panitia tender mengenai penilaian teknis yang didapatkan oleh PP JAKON KSO, namun tidak ada tanggapan apapun dari panitia tender; ----------

14.25.13. Saksi mengatakan pembatalan tender awal yang dilakukan oleh panitia tender tidak ada hubungan atau keterkaitannya dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh PP JAKON KSO, karena pembatalan tender didasarkan dengan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP; ----------

14.25.14. Saksi mengatakan setelah adanya pembatalan tender awal oleh panitia tender, PT PP kembali menerima undangan dari panitia tender mengenai adanya tender baru proyek TIM III; ----------

14.25.15. Saksi mengatakan tahapan pada tender baru proyek TIM III hampir sama dengan tender awal;----------

14.25.16. Saksi mengikuti proses *Aanwijzing* pada tender baru, dimana saat itu panitia tender memberikan penjelasan-penjelasan yang berbeda daripada tender awal, karena pada tender baru ada scope-scope pekerjaan yang lebih detail, komposisi nilai teknis yang berubah, nilai ambang batas yang naik dari sebelumnya 80 menjadi 85, serta ada penilaian teknis tambahan mengenai proposal desain yang mempunyai bobot 10%; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.25.17. Pada saat tender baru, PT PP mendaftarkan atas nama diri sendiri sebagaimana tender awal, baru setelah proses *Aanwijzing*, PT PP melakukan KSO dengan PT JAKON dengan membentuk KSO baru;-----

14.25.18. Saksi mempelajari hal-hal yang disyaratkan dalam RfP, namun saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kualifikasi teknis yang diajukan oleh PP JAKON KSO saat itu, karena saksi sebagai QS Manager lebih ikut andil dalam perhitungan harga penawaran yang akan diajukan oleh PP JAKON KSO saat itu; ----------

14.25.19. Saksi mengatakan nilai harga penawaran yang diajukan oleh PP JAKON KSO pada tender awal lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tender baru, karena saat itu PP JAKON KSO melakukan evaluasi total secara menyeluruh, sehingga harga penawaran pada tender baru menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan tender awal;----------

14.25.20. Saksi mengatakan pada tender baru setelah penggabungan nilai teknis dan harga, PP JAKON KSO menempati peringkat ke-1; ----------

14.25.21. Setelah adanya pengumuman tersebut, ada proses klarifikasi dan negosiasi yang hanya diikuti oleh peserta tender yang menempati peringkat ke-1, setelah proses tersebut selesai barulah panitia tender mengumumkan pemenang tender dimana saat itu PP JAKON KSO dinyatakan sebagai pemenang; ----------

14.25.22. Saksi mengatakan tidak mengetahui apakah ada peserta tender yang melakukan sanggah atas ditetapkannya PP JAKON KSO sebagai pemenang tender;----------

14.25.23. Saksi mengatakan saat ini proyek TIM III sudah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada *owner*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan yakni PT JAKPRO dan sudah digunakan oleh publik;----------

14.25.24. Saksi mengatakan pembatalan tender awal oleh panitia tender dilakukan atas dasar Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP;----------

14.25.25. Saksi mengatakan menurut pengalaman saksi pada tender-tender lain yang pernah diikuti, ada juga yang tendernya dibatalkan oleh panitia tender, dimana pembatalan tender dilakukan sebelum adanya penetapan pemenang oleh panitia tender; ----------

14.25.26. Saksi mengatakan pada tender baru, PP JAKON KSO mengajukan dokumen penawaran yang baru juga dan berbeda dengan tender awal, karena pada tender baru terdapat persyaratan-persyaratan yang baru, seperti persyaratan personil, proposal rancangan desain, jadwal pelaksanaan, dan lain sebagainya; ----------

14.25.27. Perbedaan komponen penilaian teknis pada tender awal dengan tender baru merupakan hal yang sangat signifikan perbedaannya; ----------

14.25.28. PP JAKON KSO tidak pernah intervensi dalam penyusunan RfP yang dilakukan oleh panitia tender; -

14.25.29. PP JAKON KSO tidak pernah melakukan komunikasi khusus dengan PT JAKPRO maupun dengan para peserta tender lain; ----------

14.25.30. Saksi mengatakan dalam *aanwijizing*, panitia tender menjelaskan kepada para peserta tender mengenai adanya klausul RfP Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 mengenai pembatalan tender, termasuk juga mengenai mekanisme sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta tender;----------

14.25.31. Saksi mengatakan pada tender-tender lain juga terdapat klausul yang mengatur mengenai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembatalan tender, dan hal tersebut merupakan hal yang selalu ada dalam setiap tender. ----------

14.26. Saksi Githa Maharani, selaku Contract Risk & Pra-Qualification Manager PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 27 Maret 2023, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

14.26.1. Saksi mulai bekerja di PT PP sejak Agustus 2015, saat ini bertugas di Divisi Gedung Departemen *Bidding and Engineering*, dan menjabat sebagai Contract Risk & Praqualification Manager; ----------

14.26.2. Tupoksi saksi sebagai *Contract Risk & Praqualification Manager*, dimana saksi berada di bagian *Praqualification Section* yang mempunyai tugas penyusunan dokumen tender, saksi mengikuti proses awal tender sampai dengan penunjukan/pengumuman pemenang, termasuk penyusunan dokumen tender bagian kualifikasi dan administrasi; ----------

14.26.3. Saksi mengatakan mengikuti seluruh tahapan Tender Proyek TIM Tahap III, dimulai dari proses pengumuman tender hingga pengumuman pemenang;

14.26.4. PT PP saat itu mendapatkan notifikasi dari *e-Procurement* PT JAKPRO melalui *email* bahwa ada Tender Proyek TIM Tahap III;----------

14.26.5. Adapun tahapan Tender Proyek TIM Tahap III yakni sebagai berikut:----------

a. Setelah mendapatkan notifikasi, PT PP mendaftar sebagai peserta tender melalui *e-Procurement* PT JAKPRO;----------

b. PT PP melakukan *download* dokumen tender;------

c. Selanjutnya pelaksanaan *Aanwijzing* secara *online* (melalui MS Team); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. PT PP melakukan penyusunan dokumen penawaran; ----------
e. *Upload* dokumen penawaran melalui e-Procurement PT JAKPRO; ----------
f. Pengumuman Sampul 1 (Evaluasi Teknis);----------
g. Pengumuman Sampul 2 (Evaluasi Harga); ----------
h. Pengumuman Pemenang.----------

14.26.6. Saksi mengatakan megikuti *aanwijizing* secara *online*, saat itu saksi adalah salah satu yang mewakili PT PP, tim tender lainnya dari PT PP yang hadir saat itu adalah Sdr. Hendra Riatno beserta timnya;----------

14.26.7. Dalam pelaksanaan *Aanwijizing*, panitia tender menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tender tersebut, dan saat itu panitia tender memberikan kesempatan kepada peserta tender yang menghadiri Aanwijzing untuk menyampaikan pertanyaan;----------

14.26.8. Saksi mengatakan bobot/komposisi penilaian dalam Tender TIM Tahap III adalah sebesar 70% nilai teknis, dan 30% nilai harga penawaran; ----------

14.26.9. Adapun bobot teknis sebesar 70% tersebut, terdiri dari 7 unsur penilaian yang memilik bobot masing-masing, yang terdiri dari: ----------
a. Pengalaman perusahaan sebesar 15%; ----------
b. Metode kerja sebesar 20%; ----------
c. Personil inti sebesar 10%; ----------
d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan sebesar 10%; ------
e. Daftar spesifikasi barang 20%; ----------
f. Daftar spesifikasi alat, workshop dan warehouse 20%; ----------
g. Rencana penerapan sebesar 5%.----------

14.26.10. Dalam Tender TIM Tahap III, peserta tender diperbolehkan untuk melakukan KSO;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.26.11. Setelah pelaksanaan *Aanwijzing*, PT PP pada akhirnya melakukan KSO dengan PT JAKON, adapun alasan dilakukannya KSO adalah saat itu PT PP sedang dalam keadaan *load* pekerjaannya yang tinggi sehingga kekurangan *sources* untuk mengikuti tender tersebut, karena PT PP sudah ada pengalaman KSO dengan PT JAKON sebelumnya pada proyek lain, maka akhirnya PT PP melakukan KSO dengan PT JAKON dalam Tender TIM Tahap III;----------

14.26.12. Setelah para peserta tender memasukkan dokumen penawaran, maka panitia tender TIM Tahap III saat itu mengumumkan hasil evaluasi teknis yang disampaikan melalui *email* kepada seluruh peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran;-------

14.26.13. Dalam pengumuman tersebut disebutkan peringkat-peringkat dari seluruh peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran, adapun peringkat peserta tender dalam pengumuman tersebut adalah, PP JAKON KSO dinyatakan lulus menempati peringkat ke-1 dengan nilai 92,78, PT WIKA Gedung dinyatakan lulus menempati peringkat ke-2 dengan nilai 92,68, PT Adhi Karya dinyatakan lulus menempati peringkat ke-3 dengan nilai 89,57; ---------

14.26.14. Setelah pengumuman evaluasi teknis, maka tahapan selanjutnya adalah pembukaan sampul 2 (harga), adapun harga yang ditawarkan oleh PP JAKON KSO pada tender tersebut adalah sebesar Rp 446.264.400.000, *incl.* PPN; ----------

14.26.15. Setelah nilai dari evaluasi teknis dan harga digabungkan, panitia tender mengumumkan peringkat dari peserta tender, dimana saat itu PP JAKON KSO menempati peringkat ke-3; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.26.16. Setelah pengumuman tersebut, PP JAKON KSO tidak pernah mengajukan keberatan/sanggah, hanya saja PP JAKON KSO menyampaikan permohonan rincian penilaian teknis kepada panitia tender, untuk digunakan sebagai evaluasi internal; ----------

14.26.17. Saksi mengatakan PP JAKON KSO dalam mengikuti tender TIM Tahap III, juga melakukan *self assesment* terhadap penilaian teknis, dimana saat itu nilai yang diperkirakan akan didapatkan oleh PP JAKON KSO adalah sebesar 95,77; ----------

14.26.18. Saksi mengatakan panitia tender tidak memberikan tanggapan/respons atas surat permohonan rincian penilaian teknis yang disampaikan oleh PP JAKON KSO, dan saat itu PP JAKON KSO tidak menindaklanjuti kembali surat tersebut; ----------

14.26.19. Saksi mengatakan setelah adanya pengumuman peringkat sampul 1 dan sampul 2, panitia tender menyampaikan pembatalan tender dalam bentuk surat yang di tandatangani oleh Direktur Umum dan SDM, dikirimkan melalui *email* kepada seluruh peserta tender;----------

14.26.20. Saksi mengatakan dalam surat pembatalan tender disebutkan bahwa dasar pembatalan tender adalah Pasal 38.2 & Pasal 38.3 RfP; ----------

14.26.21. Saksi mengatakan selama bekerja di PP bagian tender proyek, saksi pernah melihat tender-tender proyek lain yang juga dibatalkan oleh pemilik pekerjaan, salah satu contohnya adalah proyek di Kutai Kartanegara, proyek Stadion Jambi, RSUP Vertikal Makassar dan Surabaya;----------

14.26.22. Saksi mengatakan dalam tender-tender yang pernah saksi ikut pada tender proyek lain, didalam RfP-nya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

juga terdapat klausul-klausul pembatalan lelang seperti yang ada pada RfP Proyek TIM Tahap III; -------

14.26.23. Saksi mengatakan tidak lama setelah panitia tender mengumumkan pembatalan tender, PT PP kembali menerima undangan dari panitia tender untuk mengikuti tender baru Proyek TIM Tahap III; ----------

14.26.24. Pada saat melakukan pendaftaran pada tender baru, PP masih mendaftarkan atas nama PT PP sendiri, belum melakukan KSO; ----------

14.26.25. Setelan *Aanwijizing* tender baru, PT PP kembali melakukan KSO dengan PT JAKON dengan membentuk KSO baru dengan perjanjian KSO baru; --

14.26.26. Saksi mengatakan dalam tender baru terdapat perbedaan-perbedaan, utamanya dari sisi teknis; ------

14.26.27. Dalam RfP dan KAK tender baru tersebut, nilai *passing grade* teknis naik menjadi 85, unsur penilaian teknis naik menjadi 8 unsur penilaian yang rinciannya sebagai berikut: ----------

a. Pengalaman Perusahaan sebesar 15%; ----------
b. Metode Pelaksanaan sebesar 20%;----------
c. Penilaian terhadap proposal desain sebesar 10%;--
d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan sebesar 5%; --------
e. Daftar personal inti sebesar 10%----------
f. Daftar spesifikasi teknis barang dan material sebesar 20%;----------
g. Daftar spesifikasi teknis alat, workshop dan gudang sebesar 15%;----------
h. Rencana penerapan Building Information Modelling (BIM) sebesar 5%. ----------

14.26.28. Saksi mengatakan perubahan-perubahan teknis pada tender baru tersebut, merupakan perubahan yang sangat signifikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap penawaran yang ditawarkan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.26.29. Saksi mengatakan dokumen penawaran yang ditawarkan PP JAKON KSO pada tender baru berbeda dari tender awal, karena persyaratan-persyaratan pada tender baru berbeda dengan tender awal, sehingga dokumen penawaran yang ditawarkan pada tender baru harus menyesuaikan dengan syarat-syarat yang baru;----------

14.26.30. Nilai teknis yang diperoleh PP JAKON KSO pada tender baru adalah sebesar 95.07, adapun nilai tersebut bisa naik daripada nilai teknis pada tender awal karena, PP JAKON KSO saat itu mengevaluasi ulang persyaratan-persyaratan yang ada dan menambahkan pengalaman-pengalaman perusahaan yang lebih baik, subkon spesialis, dan persyaratan-persyaratan lainnya;----------

14.26.31. Saksi mengatakan dalam tender awal maupun tender baru Proyek TIM Tahap III, tidak ada ketentuan mengenai jumlah subkon yang harus dimasukkan;----

14.26.32. Saksi mengatakan dari 4 peserta tender yang mengikuti tender baru, hanya 2 peserta tender yang dinyatakan lulus evaluasi teknis, yakni PP JAKON KSO dengan nilai 96.07 menempati peringkat ke-1 dan PT WIKA Gedung dengan nilai 89.07; ----------

14.26.33. Pada pembukaan sampul harga tender baru, PP JAKON KSO mengajukan penawaran sebesar Rp 415.815.000.000 *incl. PPn;* ----------

14.26.34. Saksi mengatakan setelah digabungkan antara nilai teknis dan nilai harga penawaran, PP JAKON KSO menempati peringkat ke-1; ----------

14.26.35. Setelah diumumkannya peringkat gabungan tersebut, PP JAKON KSO mendapatkan undangan dari panitia tender untuk klarifikasi dan negosiasi yang diadakan secara *online* dan saksi menghadiri acara tersebut;----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.26.36. Dalam acara klarifikasi dan negosiasi tersebut, panitia tender melakukan negosiasi dan harga penawaran yang disepakati adalah sebesar Rp 415.000.000.000 *incl. PPN;*----------

14.26.37. Saksi mengatakan 2 atau 3 hari setelah acara klarifikasi dan negosiasi, panitia tender mengumumkan pemenang lelang, dan PP JAKON KSO dinyatakan sebagai pemenang; ----------

14.26.38. Saksi mengatakan tidak pernah melakukan komunikasi dengan panitia tender, dan komunikasi dengan peserta tender lain untuk memenangkan suatu peserta tender; ----------

14.26.39. Saksi mengatakan pekerjaan Proyek TIM Tahap III sudah selesai 100% dan sudah diserah terimakan kepada pemilik pekerjaan;----------

14.26.40. Saksi mengatakan PP JAKON memutuskan untuk kembali melakukan KSO pada tender baru karena kendala resources yang dialami PT PP saat itu seperti tender awal; ----------

14.26.41. Saksi mengatakan PP JAKON KSO tidak pernah terlibat dalam penyusunan komponen penilaian evaluasi teknis dan harga pada Tender TIM Tahap III;-

14.26.42. Saksi mengatakan nilai harga yang ditawarkan PP JAKON KSO pada tender awal adalah sebesar Rp 446.264.400.000 *incl. PPN* sedangkan pada tender baru sebesar Rp 415.000.000.000 *incl. PPN;*----------

14.26.43. Saksi mengatakan turunnya harga penawaran PP JAKON KSO pada tender baru dikarenakan adanya evaluasi ulang penawaran yang dilakukan secara menyeluruh;----------

14.26.44. Saksi mengatakan pada Tender Proyek TIM Tahap I yang memenangkan pekerjaan tersebut adalah PT WIKA Gedung, sedangkan pada Tender Proyek Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahap II yang memenangkan pekerjaan adalah WIKA PP JAKON KSO, dan pada Tender Proyek TIM Tahap III yang memenangkan pekerjaan adalah PP JAKON KSO; ----------

14.26.45. Saksi mengatakan proses penyusunan dokumen penawaran pada tender awal dan tender baru yang dilakukan oleh PP JAKON KSO hampir sama, namun pada tender baru terdapat penambahan persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan RfP tender baru;----------

14.26.46. Saksi mengatakan Pekerjaan TIM Tahap III fokus pada pekerjaan interior, dan PT PP mempunyai pengalaman pekerjaan interior, antara lain pekerjaan BNI Pejompingan, ISS Tower, Colomadu, pekerjaan bandara, pekerjaan interior kantor-kantor Bank Indonesia di Gorontalo dan Papua;----------

14.26.47. Saksi mengatakan subkon yang dimasukkan dalam penawaran PP JAKON KSO saat itu adalah PT Nuansa Asri Selaras dan PT Gema Graha Sarana, kedua subkon tersebut mempunyai pengalaman di bidang interior; ----------

14.26.48. Saksi mengatakan nilai penawaran teknis para peserta tender semuanya dibuka oleh panitia tender, sedangkan untuk nilai harga hanya peserta tender lulus evaluasi teknis yang nilai harga penawarannya dibuka;----------

14.26.49. Saksi mengatakan keputusan PP JAKON untuk melakukan KSO adalah atas inisiatif perusahaan masing-masing;----------

14.26.50. PP JAKON KSO tidak mengajukan sanggah atas kekalahannya pada tender awal, namun PP JAKON KSO saat itu meminta klarifikasi penilaian teknis,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

namun panitia tender tidak memberikan tanggapan atau respons apapun; ----------

14.26.51. Saksi mengatakan penyampaian dokumen teknis dan harga pada tender baru pasti berubah dari tender awal, karena nilai *passing grade* dan bobot penilaian pada tender baru sudah berbeda dengan tender awal;

14.26.52. Saksi mengatakan permintaan untuk permohonan data/ klarifikasi saat PP JAKON KSO gagal pada tender awal merupakan hal yang umum dilakukan; ---

14.26.53. Saksi mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang disubkonkan oleh PP JAKON KSO pada tender awal ada 7 subkontraktor, antara lain sebagai berikut: -----

a. Subkon Interior: PT Nuansa Asri Selaras ----------
b. Subkon Special Lighting: PT Mandala Putra Prima
c. Subkon Audio Video Communication: Visualindo Presentatima dan PT Kairo Multi Jaya ----------
d. Subkon *Overhaul* Sistem Teater Bintang: Virtual Reality Solution ----------
e. Subkon Plavon: CV Indah Dwijaya----------
f. Subkon Cat: PT Aldela Surya Kencana----------

14.26.54. Saksi mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang disubkonkan oleh PP JAKON KSO pada tender awal ada beberapa pekerjaan subkontraktor, antara lain sebagai berikut:----------

a. Subkon Interior: PT Gema Graha Sarana & PT Nuansa Asri Selaras ----------
b. Subkon Special Lighting: PT Mandala Putra Prima & PT Alupi Hijau Wina ----------
c. Subkon Audio Video Communication: PT Kairos Multi Jaya & PT Promedia Inovatice Solution -------
d. Subkon Perlengkapan Teater Graha Bakti Budaya dan Planetarium: PT Lelco Trindo Graha Nusantara ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Subkon *Overhaul* Sistem Teater Bintang: Virtual Reality Solution ----------

f. Subkon Cat: PT Aldela Surya Kencana----------

14.26.55. Saksi mengatakan pada tender awal PP JAKON KSO melampirkan 24 pengalaman yang disampaikan dalam dokumen penawaran; ----------

14.26.56. Sementara pada tender baru, PP JAKON KSO melampirkan 104 pengalaman yang disampaikan dalam dokumen penawaran; ----------

14.26.57. Saksi mengatakan sejak tahun 2015 hingga sekarang, saksi pernah ikut andil dalam tender JAKPRO sebanyak 3 tender proyek, yakni proyek Jakarta International Stadium, Proyek TIM Tahap III, dan Rusun HPP JIS;----------

14.26.58. Saksi mengatakan perbedaan nilai penawaran pada tender awal yang sebesar Rp 446 M dan pada tender baru turun menjadi Rp 415 M, terjadi karena adanya perhitungan ulang secara menyeluruh terhadap dokumen penawaran, penurunan nilai penawaran tidak hanya terjadi pada item pekerjaan interior saja, ada item-item lain juga yang dapat di efisiensikan. ----

Keterangan Ahli TERLAPOR II Dan TERLAPOR III----------

14.27. Ahli Ir. Riad Horem, Dipl. H.E., yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Mei 2023, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

14.27.1. Pengadaan Barang dan Jasa (“PBJ”) di Indonesia, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu PBJ yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (”APBD”) dan PBJ yang tidak menggunakan APBN/APBD;----------

14.27.2. Untuk PBJ yang menggunakan APBN/APBD tunduk pada Peraturan Presiden (“Perpres”) mengenai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan untuk PBJ yang tidak menggunakan APBN/APBD, seperti PBJ di lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") atau institusi-institusi di luar APBN/APBD (swasta), tidak tunduk pada Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga BUMN, BUMD atau institusi swasta dapat membentuk aturan PBJ nya sendiri; ----------

14.27.3. Dalam mengatur sendiri aturan PBJ, baik BUMN, BUMD atau swasta, dapat bertentangan dari ketentuan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, sepanjang ada justifikasi dan disetujui oleh Direksi BUMN/BUMD atau swasta. Sebagai contoh, Ahli pernah membuat aturan PBJ di BUMN yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500 Miliar. ----------

14.27.4. Penunjukan Langsung dengan nilai di atas Rp 500 M tersebut tidak dibenarkan dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, namun dapat diatur dalam aturan PBJ BUMN/BUMD karena hal tersebut merupakan kepentingan BUMN/BUMD. Artinya ada hal-hal yang boleh menyimpang dari Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan etika PBJ;----------

14.27.5. Kegiatan PBJ dibagi menjadi 2, yaitu: ----------

a. Tahap Perencanaan. ----------

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemilik Pekerjaan (*Owner*) meliputi:----------

(1) Perencanaan Tender Dalam proses tender, perencanaan dan pelaksanaannya disiapkan oleh panitia tender----------

(2) Perencanaan Pekerjaan Fisik (Konstruksi).----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam proses konstruksi, perencanaan dan pelaksanaannya disiapkan oleh Tim Pelaksanaan Konstruksi (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) atau tim yang dibentuk oleh *Owner* dalam rangka memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan Kontraknya;----------

b. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan. ----------

Proses Tender terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:----------

(1) Tahapan Kualifikasi, yaitu proses untuk menyaring kemampuan dan pengalaman Peserta untuk mengikuti tender. Peserta yang dinyatakan lolos kualifikasi dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya. Sedangkan untuk peserta yang tidak lolos kualifikasi dan merasa keberatan atas keputusan *Owner*, maka peserta tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan upaya sanggah. Tahapan Kualifikasi dibagi lagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap Pra-kualifikasi atau tahap Pasca kualifikasi; ----------

(2) Tahapan Evaluasi, yaitu evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Bagi peserta yang dinyatakan lolos evaluasi administrasi dan teknis kemudian dilakukan evaluasi harga. Setelah dilakukan evaluasi harga, Panitia/POKJA akan menetapkan peringkat peserta (peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya) dan kemudian Panitia akan menyampaikan peringkat peserta tersebut kepada Pemilik Pekerjaan/Pengguna Jasa; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) Tahapan Pengumuman Pemenang. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan calon pemenang lelang, Pemilik Pekerjaan/ Pengguna Jasa akan mengeluarkan surat penetapan pemenang kepada Panitia/POKJA dan kemudian Panitia/POKJA akan mengumumkan pemenang pengadaan barang dan jasa. ----------

c. Tahapan Sanggah dan/atau Sanggah Banding. ----

14.27.6. Secara formal dalam sistem pengadaan barang dan jasa baik secara elektronik (*LPSE*) maupun konvensional terdapat 2 (dua) mekanisme keberatan yang dapat dilakukan oleh peserta, yaitu mekanisme Sanggah atau Sanggah Banding. ----------

14.27.7. Tahapan Sanggah dan/atau Sanggah Banding ini terjadi apabila setelah pengumuman pemenang, terdapat peserta yang merasa keberatan. Namun apabila tidak ada peserta yang mengajukan Sanggah dan/atau Sanggah Banding atau Sanggah dan/atau Sanggah Banding tersebut ditolak, maka proses tender dilanjutkan dengan tahap penandatanganan Kontrak antara Pemenang Pengadaan Barang/Jasa dengan Pemilik Pekerjaan/Pengguna Jasa;----------

14.27.8. Hal-hal lain yang disampaikan oleh peserta di luar mekanisme Sanggah atau Sanggah Banding tersebut sifatnya merupakan pengaduan; ----------

14.27.9. Sehingga sepanjang yang disampaikan oleh Peserta baik kepada Panitia/Pokja maupun kepada Pemilik Pekerjaan bukan Sanggah atau Sanggah Banding, maka Panitia/POKJA maupun Pemilik Pekerjaan tidak memiliki kewajiban untuk menjawab (sifatnya boleh dijawab/ditanggapi dan boleh untuk tidak dijawab/ditanggapi oleh Panitia), karena mekanisme

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keberatan yang diatur hanyalah Sanggah dan/atau Sanggah Banding. ----------

14.27.10. Begitu pula dengan surat permintaan rincian data hasil evaluasi yang disampaikan oleh Peserta kepada Panitia/POKJA dimaka penyampaian surat tersebut tidak diatur di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, maka Panitia/POKJA tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi surat tersebut. ----------

14.27.11. Apabila Sanggah atau Sanggah Banding yang diajukan diterima oleh Panitia atau Pemilik Pekerjaan, maka Panitia harus melakukan evaluasi ulang dan tendernya tidak dibatalkan. ----------

14.27.12. Perpres Pengadaan Barang dan Jasa mengatur mengenai tender gagal, yaitu gagal dalam proses kualifikasi atau gagal ketika ditemukan hal-hal yang dinyatakan sebagai temuan dan lelang dapat dinyatakan gagal/dibatalkan. Selain itu tender gagal dapat disebabkan karena perubahan dokumen pengadaan. ----------

Perubahan dokumen pengadaan merupakan wewenang dari Pemilik Pekerjaan/Pengguna Jasa, sebagai contoh di dalam proses tender ditemukan adanya dokumen tender yang tidak benar atau tidak sebagaimana mestinya setelah pemasukan penawaran, sehingga Panitia/Pengguna Jasa dapat membatalkan atau tidak melanjutkan proses tender karena adanya perubahan-perubahan dokumen antara lain, *Design*, Spesifikasi, atau aturan-aturan yang seharusnya ada tetapi belum termuat dalam dokumen tender; ----------

14.27.13. Apabila sebelum dilakukannya pemasukan dokumen penawaran terdapat perubahan dokumen tender yang meliputi ruang lingkup dan spesifikasi maka dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan Amandemen dokumen tender. Namun apabila perubahan dokumen tender atau penyesuaian kembali terhadap lingkup pekerjaan, setelah dilakukannya pemasukan dokumen penawaran, maka dokumen tender sebelumnya ditarik/dinyatakan tidak berlaku oleh Panitia/POKJA dan Panitia/POKJA dapat menghentikan/ membatalkan tender dan selanjutnya dilakukan tender ulang (tender kembali); ----------

14.27.14. Selain diatur di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, pembatalan tender biasanya juga dapat diatur dalam dokumen tender (*Request for Proposal*), karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemilik Pekerjaan/ Pengguna Barang dan Jasa; ----------

14.27.15. Adapun kondisi-kondisi yang mendasari pembatalan tender antara lain karena: ----------

a. Adanya proses yang keliru, misalnya terbukti terdapat kesalahan/kekeliruan dalam melakukan evaluasi, maka konsekuensinya dilakukan evaluasi ulang oleh Panitia; ----------

b. Adanya dokumen tender yang keliru; ----------

(1) Kekeliruan dokumen tender, baik karena adanya perubahan dokumen tender atau penyesuaian kembali terhadap lingkup pekerjaan, maka dokumen tender yang keliru tersebut tidak dapat digunakan lagi dan tender harus dibatalkan. Karena jika dokumen tender yang keliru tersebut tetap digunakan, akan timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan anggaran.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2) Perubahan dokumen tender akibat terjadi kekeliruan, dipastikan akan mengubah nilai-nilai teknis dalam pekerjaan. Perubahan dokumen tender juga menyebabkan indikator penilaian dan tata cara evaluasi berubah, termasuk perubahan-perubahan persentase dan pembobotan penilaian. Jadi, tidak benar/keliru jika perubahan dokumen tender yang konsep dan ruang lingkupnya sudah berubah tetapi indikator penilaian dan tata cara evaluasi masih sama/tidak berubah. ----

(3) Perubahan dokumen tender tidak selalu menyebabkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena HPS merupakan hak dan kewenangan Pemilik Pekerjaan;----------

(4) Sebagai konsekuensi dari dibatalkannya tender, maka Panitia/POKJA atau Pemilik Pekerjaan dapat melakukan tender ulang/tender baru. Tender baru sekilas merupakan sesuatu yang baru karena dokumen tendernya baru, sehingga sepanjang dokumen tendernya baru maka dapat dikatakan sebagai tender baru. Tender baru atau tender ulang adalah sama saja, hanya masalah istilah. ----------

c. Adanya ketentuan baru yang muncul dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah; ----------

d. Adanya anggarannya dibatalkan; ----------

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa mengatur bahwa tender dapat dilaksanakan sebelum adanya anggaran. Namun apabila setelah tender dilaksanakan kemudian ternyata anggarannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak tersedia, maka tender harus dihentikan/dibatalkan; ----------

14.27.16. Pembatalan tender yang dilakukan karena adanya perubahan dokumen tender tidak ada hubungannya dengan surat-surat yang disampaikan oleh peserta.---

14.27.17. Perpres Pengadaan Barang dan Jasa tidak secara eksplisit menguraikan setiap tindakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk tindak lanjut dari pembatalan tender apakah dilakukan tender baru atau tender ulang dapat ditafsirkan sendiri. Dalam *best practice* di lapangan, penyebutan tender ulang atau tender baru sebagai akibat dari pembatalan tender bukan menjadi masalah; ----------

14.27.18. Di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa mengatur bahwa Pengguna Anggaran ("PA")/Kuasa Pengguna Anggaran ("KPA") berhak untuk tidak menandatangani Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa ("SPPBJ") sepanjang ditemukan adanya hal-hal yang menyebabkan PA/KPA berhak untuk tidak menandatangani SPPBJ. Artinya pembatalan tender dapat dilaksanakan pada setiap tahapan; ----------

14.27.19. Sepanjang di dalam dokumen tender Panitia tidak diwajibkan untuk menyampaikan alasan pembatalan tender, maka panitia tidak harus menyampaikan alasan-alasan pembatalan kepada peserta.----------

14.27.20. Salah satu prinsip tender dalam tender yaitu terbuka dan transparan, dengan demikian sepanjang tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) siapa pun peserta dapat mengikuti tender tersebut. Apabila seluruh peserta dalam tender yang dibatalkan kemudian ikut/mendaftar kembali dalam tender yang baru, dapat diartikan bahwa seluruh peserta tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah menyetujui pembatalan tender dan menyetujui ketentuan tender yang baru; ----------

14.27.21. Pembatalan tender merupakan keputusan yang wewenangnya dimiliki oleh Pemilik Pekerjaan. Prinsip transparansi dalam tender merupakan transparan dalam proses, transparansi itu artinya semua informasi-informasi harus disampaikan dan diketahui serta tidak ada yang ditutup-tutupi, sedangkan keputusan-keputusan dalam hal ini keputusan pembatalan tender merupakan wewenang dari Pemilik Pekerjaan, yang tidak wajib di publish. Apabila ada peserta yang keberatan atas keputusan pembatalan maka peserta dapat menanyakan langsung kepada Pemilik Pekerjaan atau melakukan upaya Sanggah dan/atau Sanggah Banding; ----------

14.27.22. Perpres Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan bahwa Panitia/POKJA dibentuk dan diangkat oleh PA/KPA. Oleh sebab itu, Panitia/POKJA wajib untuk melaporkan secara periodik setiap tindakan atau tahapan tender yang sudah dilaksanakan. Dalam hal tender dilakukan di lingkungan BUMN/BUMD, maka Panitia wajib melaporkan hal tersebut kepada atasannya;----------

Apabila Panitia/POKJA tidak melaporkan secara periodik setiap tahapan tender kepada PA/KPA, hal tersebut merupakan kesalahan administratif dan tidak ada sanksinya di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. Namun dalam proses tender PA/KPA memiliki hak/kewenangan untuk mengganti Panitia/POKJA;----------

14.27.23. Ketika peserta sudah mengikuti proses tender maka peserta tersebut dianggap menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang diatur di dalam dokumen tender.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Apabila ada peserta yang tidak setuju dengan syarat dan ketentuan dalam dokumen tender, maka peserta tersebut tidak akan mendaftar dan menyampaikan penawaran. Sehingga dibaca atau tidaknya dokumen tender tersebut, sepanjang peserta sudah mendaftar dan kemudian menyampaikan penawaran maka peserta tersebut dianggap menyetujui dokumen tender.----------

14.28. Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 11 Mei 2023, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

14.28.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ("Perpres No.16/2018"), Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Lembaga Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;----------

14.28.2. Di lingkungan BUMN/BUMD atau pengadaan yang dananya merupakan pinjaman atau hibah dari luar negeri, maka ketentuan pengadaannya boleh mengacu pada ketentuan yang dibuat sendiri. ---------
Biasanya BUMN/BUMD sudah mempunyai standar baku mengenai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa. Meskipun BUMN/BUMD mempunyai aturan/standar baku mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, namun prinsip dan etika pengadaannya harus tetap mengacu pada Perpres No. 16/2018. -----

14.28.3. Sepengetahuan Ahli, di Provinsi DKI Jakarta sudah mempunyai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;----------

14.28.4. Berdasarkan Perpres No. 16/2018, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah: ------

a. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa: -------

(1) Efektif dan Efisien, yaitu memastikan bagaimana pengadaan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dengan alokasi yang sudah ditetapkan; -------

(2) Transparan dan Terbuka, yaitu dimana pelaksanaan harus transparan atas proses (persyaratan, kriteria, barang yang dibutuhkan, spesifikasi teknis dan komponen penilaian) yang dapat diakses oleh semua pihak. Pengadaan tersebut terbuka bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengajukan penawaran. - Namun demikian, Pokja tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan alasan pembatalan tender, karena apabila peserta yang tidak puas dengan hasil keputusan Pokja maka ketentuan perundang-undangan sudah menyediakan mekanisme sanggah dan sanggah banding. ----------

Meskipun prinsip pengadaan itu adalah transparan dan terbuka, namun bukan berarti semua yang dilakukan oleh Pokja (tatacara penilaian, pertimbangan pengumunan) harus diumumkan kepada semua peserta; ----------

(3) Adil berlaku sama terhadap semua peserta yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan; -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(4) Bersaing, yaitu adanya persaingan yang kompetitif dari sisi harga dan fasilitas yang ditawarkan oleh peserta;----------

(5) Akuntabel artinya semua proses tidak ada upaya Kolusi Korupsi dan Nepotisme.----------

b. Etika Pengadaan Barang dan Jasa, dimana semua pihak menandatangani pacta integritas, misalnya penanda-tanganan pacta integritas oleh Pokja untuk tidak membocorkan informasi rahasia kepada siapapun atau penandatanganan pacta integritas oleh peserta untuk tidak saling mempengaruhi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.----------

14.28.5. Prosedur/tahapan lelang/tender yang berlaku di lingkungan BUMN/BUND dapat mengikuti atau menyesuaikan dengan Prosedur/tahapan lelang/tender yang tercantum dalam Perpres No. 16/2018. Namun perlu ditegaskan bahwa secara umum tahapan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari peren-canaan, seleksi/tender, penetapan pemenang, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan. ----------

14.28.6. Mekanisme sanggah dan sanggah banding: bagian dari tahapan tender (seleksi). Apabila ada peserta tender yang merasa kurang puas atas hasil keputusan panitia lelang, maka peserta tersebut dapat mengajukan sanggah/keberatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan kepada Pokja Pemilihan. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka sanggah tidak akan diterima dan akan menjadi pengaduan. Sedangkan upaya sanggah banding adalah upaya yang dapat ditempuh oleh peserta tender apabila upaya sanggah tidak diterima oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokja Pemilikan. Upaya sanggah Banding ditujukan kepada Pengguna Anggaran; ----------

14.28.7. Para peserta tender dibolehkan untuk menyampaikan surat dalam bentuk apapun seperti meminta informasi. Namun pokja pemilihan akan menyeleksi apakah surat tersebut masuk dalam tahapan tender (seleksi). Apabila ternyata surat dari peserta tersebut tidak masuk dalam tahap tender (sanggah/sanggah banding), maka Pokja akan mengabaikan surat tersebut, karena tidak ada kewajiban Pokja untuk membalas surat tersebut. ----------

Jika ada surat dari peserta tender tidak dijawab (diabaikan) oleh Pokja, maka surat tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali apabila surat tersebut disampaikan kepada inspektorat/SPI. Namun demikian, inspektorat tidak dapat ikut campur sebelum tender tersebut selesai;----------

14.28.8. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk oleh Pengguna Anggaran, sehingga semua kegiatan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Pengguna Anggaran sesuai SOP yang berlaku di instansi yang bersangkutan. ----------

Pengguna Anggaran akan melaporkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk selanjutnya diterbitkan SPBJ dan dilakukan penandatanganan Kontrak;----------

Tim pengadaan mempunyai independensi (tidak dapat diintervensi) terkait struktur organisasi (unit kerja) dan hasil penilaiannya (evaluasi) atas dokumen penawaran. Namun terkait evaluasi kinerja, merupakan kewenangan dari pimpinan instansi tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.28.9. Pembatalan tender/tender gagal bisa terjadi dan diatur dalam Perpres No. 16/2018, bahkan dalam standar kontrak baku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diadopsi juga mengenai tender gagal. Biasanya Gagal dan batal dalam Pengadaan Barang dan Jasa bisa jadi dianggap sama. Tender yang gagal itu adalah tender yang batal. ----------

Tender Batal biasanya terjadi dalam situasi tertentu, misalnya karena pandemi covid-19 atau karena anggarannya tidak ada. ----------

Sedangkan Tender Gagal diatur dalam Perpres No.16/2018. Tender gagal terjadi antara lain karena: -

a. Adanya kesalahan dalam evaluasi penawaran (administrasi, teknis atau harga) atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka tindak lanjut kondisi tersebut adalah dilakukan evaluasi ulang; ----------
b. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada peserta yang mendaftar; -----
c. Adanya indikasi KKN/persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan seluruh peserta atau panitia pelaksana/ Pokja/PPK;----------
d. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada saat negosiasi, maka dilakukan penawaran ulang. -----

14.28.10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 6 Perpres No. 16/2018, ditentukan bahwa tindak lanjut dari tender/seleksi gagal adalah: (i) evaluasi penawaran ulang; (ii) penyampaian penawaran ulang; (iii) Tender/ Seleksi ulang; ----------

14.28.11. Kewenangan pembatalan tender sepenuhnya ada pada Pokja (Pengguna Jasa), karena Perpres tidak mengatur pada tahapan mana tender tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tender dapat dilakukan baik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebelum pengumuman pemenang maupun setelah pengumuman pemenang (karena ditemukan bahwa pemenang tender telah melakukan perbuatan melawan hukum). Bahkan setelah penandatanganan Kontrak, Pokja dapat membatalkan tender (karena wanprestasi); ----------

14.28.12. Bagi peserta yang diduga melanggar (belum dibuktikan) pada proses tender, maka belum ada konsekuensi apapun yang dapat diberlakukan. Oleh karena belum terjadi penandatanganan kontrak, maka Peserta tersebut masih dapat mengikuti tender;

14.28.13. Indikasi tindakan persaingan usaha tidak sehat, asumsinya tidak mungkin dilakukan oleh 1 peserta saja. Berbeda dengan tindakan monopoli pasar yang bukan bagian dari proses tender. Jika persaingan usaha tidak sehat itu hanya dilakukan oleh 1 peserta, maka sanksi nya diatur oleh Pokja karena tidak ada aturan tegas yang mengaturnya. ----------

14.28.14. Pembatalan tender/seleksi gagal biasanya diatur dalam dokumen pemilihan, seperti ketentuan induk (RFP). Penyusunan RFP merupakan kewenangan panitia tender/Pokja (pengguna jasa) dibantu oleh tenaga ahli. Namun biasanya standar baku RfP sudah ada, panitia hanya melakukan penyesuaian dan review. Idealnya dalam RfP tersebut harus memuat prinsip dan etika pemilihan. RfP merupakan turunan Perpres yang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja.---
Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, peserta dapat menyampaikannya pada saat *aanwijing* agar RfP dapat diperbaiki/ disesuaikan. ----------

14.28.15. Pokja yang membatalkan tender dan membuat tender baru dengan nama proyek yang sama, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pokja sendiri. Istilah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender “baru” atau tender “ulang” hanya masalah istilah. Ahli menyakini bahwa tender ulang tersebut merupakan tender yang baru. ----------

14.28.16. Apabila setelah tender dibatalkan terdapat peserta tender yang ikut lagi dalam tender ulang/baru, maka dapat dikatakan bahwa peserta tender tersebut telah setuju/menerima keputusan pembatalan tender dari Pokja/panitia Pemilihan; ----------

14.28.17. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo. Pasal 22 Perpres No. 16/2018 yang mengatur mengenai etika pengadaan, pada intinya mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses tender dilarang untuk saling mempengaruhi atau bersekongkol untuk menentukan pemenang. Baik persekongkolan tender yang dilakukan oleh peserta dengan peserta atau pelaksana tender dengan peserta tender untuk menentukan pemenang. ----------

14.28.18. Tender yang menggunakan sistem 2 sampul, biasanya akan mengedepankan kualitas. Penilaian akan dititikberatkan pada kualitasnya atau nilai teknisnya. Jika dalam pengadaan sistem 2 sampul terjadi kesalahan teknis atau kualitasnya belum terpenuhi tujuan pengadaan, maka Pokja dapat mengabil keputusan untuk membatalkan tender sambil memperbaiki kualitas teknisnya. ----------

Uraian Keterangan Saksi Fakta Majelis Komisi dan Pemeriksaan Setempat----------

14.29. Saksi Budi Setiawan Nurcahyo, selaku karyawan PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Oleh karena Saksi tidak dapat hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang menyebutkan bahwa “Dalam hal saksi yang sudah diperiksa dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyelidikan di bawah sumpah atau janji tidak hadir dalam sidang majelis komisi, keterangan saksi tersebut bernilai sama dengan keterangan dibawah sumpah atau janji yang telah disampaikan dalam Pemeriksaan".----------

14.30. Pemeriksaan Setempat ----------

Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 di Taman Ismail Marzuki, yang terletak di Jl. Cikini Raya No.73, RT 8/RW 2, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat. Adapun hasil Pemeriksaan Setempat tersebut pada intinya sebagai berikut: ----------

14.30.1. Tim Proyek Jakpro menjelaskan bahwa Proyek TIM Tahap III merupakan pekerjaan interior yang terdiri dari pekerjaan *special lighting interior, equipment, stage missionary, audio & video dan overhoul star ball*, meliputi area-area interior pada: ----------

a. Area Perpustakaan dan Wisma pada Gedung Ali Sadikin/Gedung Panjang; ----------
b. Area Galeri Seni pada Gedung Annex; ----------
c. Area Theater Panggung pada Gedung Graha Bakti Budaya;----------
d. Area Theater Arena Dan Theater Bintang serta Area Kineforum pada Gedung Planetarium; ---------
e. Area Cafetaria/UMKM; dan lain-lain. ----------

14.30.2. Tim Proyek PP-JAKIN KSO menjelaskan bahwa area-area yang merupakan area *guidelines* (*design and build*) meliputi area-area sebagai berikut: (i) Area Cafetaria pada Gedung Ali Sadikin/Gedung Panjang; (ii) Co-Working Space pada Area Perpustakaan; (iii) Area Theater Arena, Area UMKM dan Area Kineforum pada Gedung Planetarium. ----------

Selain itu, dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek TIM III terdapat pekerjaan tambah/kurang, sebagai contoh pekerjaan Sainage (petunjuk arah) merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan tambah yang item pekerjaannya tidak termuat di dalam Kontrak. ----------

14.30.3. Tim Andramartin menjelaskan bahwa gambar tender untuk area ter*design* dan area *guidelines* yang digunakan pada tender awal (yang dibatalkan) dengan tender ulang/tender baru adalah gambar tender yang sama. ----------

Apa yang menjadi gagasan/konsep yang disiapkan oleh Andramartin sebagai pemenang Sayembara *Design* Taman Ismail Marzuki Tahap III telah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan/direalisasikan oleh Kontraktor, sehingga Andramartin merasa cukup puas dengan hasil pekerjaan. ----------

14.30.4. Tim Proyek Jakpro menjelaskan bahwa saat ini Proyektor *Starball* belum dapat digunakan karena pekerjaan *Overhaul* Proyektor *Starball* (*upgrade komponen proyektor*) belum dapat dilaksanakan karena setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kerusakan yang terjadi pada Proyektor sebelum dan sesudah proses tender berbeda (*kerusakannya bertambah karena usia teknis dari Proyektor Starball*).

Uraian Keterangan TERLAPOR I, TERLAPOR II Dan TERLAPOR III ------

14.31. TERLAPOR I, yang diwakili oleh Bapak Solihin, selaku Direktur Dukungan Bisnis PT Jakpro, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.31.1. Bapak Solihin menjabat sebagai Direktur Dukungan Bisnis di PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (“Jakpro”) sejak tanggal 28 November 2022. Selaku Direktur Dukungan Bisnis, Bapak Solihin membawahi Divisi Pengadaan, Divisi Procurement, Divisi General Affair, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi IT; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.31.2. Untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, Jakpro sudah mempunyai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang disusun dan dikelola oleh Divisi Pengadaan; ----------

14.31.3. Apabila Jakpro hendak mengadakan pengadaan suatu pekerjaan, biasanya Divisi Pengadaan Jakpro akan menyusun *Request for Proposal* (RfP). Selanjutnya Divisi Pengadaan akan mengusulkan Tim Pengadaan. Tim Pengadaan dapat terdiri dari personal dari Divisi Pengadaan, Manajemen Konstruksi, user dan ahli; ----------

14.31.4. Semua calon peserta tender untuk jasa konsultasi harus terdaftar terlebih dahulu di Jakpro;----------

14.31.5. Semua calon peserta tender yang dilaksanakan oleh Jakpro tidak pernah terlibat dalam pembuatan atau penyusunan dokumen-dokumen tender ternasuk syarat-syarat dan ketentuan tender yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dan RfP; ----------

14.31.6. Bapak Solihin mengetahui bahwa Rfp TIM Tahap III mencantumkan ketentuan Pasal 38 RfP mengenai Hak Pengguna Jasa untuk melakukan Pembatalan. Namun Bapak Solihin tidak mengetahui apakah pencantuman ketentuan pembatalan tersebut merupakan kebiasaan yang selalu di cantumkan dalam RfP. ----------

14.31.7. Sehubungan dengan ketentuan 38 RfP mengenai pembatalan tender yang belum mengatur alasan pembatalan, maka Bapak Solihin melakukan kajian kembali mengenai ketentuan tersebut. ----------

14.31.8. Bapak Solihin belum terlibat pada saat tender pekerjaan Proyek Tahap III dilaksanakan, karena sebelumnya Bapak Solihin menjabat sebagai Direktur Keuangan pada anak perusahaan Jakpro;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.31.9. Sepengetahuan Bapak Solihin alasan pembatalan tender TIM Tahap III yang pertama adalah karena adanya persepsi mengenai definisi interior yang akan mempengaruhi penilaian terhadap penawaran dari peserta tender serta adanya persepsi mengenai pemahaman 'kota besar' di Indonesia;----------

14.31.10. Bapak Solihin tidak mengetahui apakah ada keterlibatan Manajemen Konstruksi ("MK") dalam tindakan pembatalan yang dilakukan oleh Jakpro. Sepengetahuan Bapak Solihin, Jakpro menilai bahwa MK kurang perform dalam melaksanakan tugasnya; --

14.31.11. Sepengetahuan Bapak Solihin, berdasarkan laporan dari Satuan Pengawas Internal Jakpro, pembatalan tender yang dilakukan oleh Jakpro sudah rasional; ---

14.31.12. Sepengetahuan Bapak Solihin, acuan pembatalan tender di Jakpro adalah apabila (i) terdapat indikasi peserta yang melakukan persaingan usaha tidak sehat; (ii) terjadi indikasi pengaturan bersama; (iii) peserta tender tidak cukup tanggap terhadap dokumen pengadaan;----------

14.31.13. Tidak ada keharusan/kewajiban bagi Tim Pengadaan untuk melaporkan setiap tahapan pelaksanaan/proses pengadaan. Namun ketika Tim Pengadaan akan menentukan pemenang, maka Tim Pengadaan harus membuat laporan mengenai tahapan pelaksanaan/proses pengadaan kepada Direktur yang membawahi Divisi Pengadaan;----------

14.31.14. Apabila indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Jakpro dan belum terbukti, maka Jakpro akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, bisa berupa surat peringatan atau skoring. Namun jika indikasinya tersebut telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbukti maka Jakpro akan melakukan pemutusan hubungan kerja.----------

14.32. TERLAPOR II, yang diwakili oleh Bapak Aprinauza, selaku Senior Manager Marketing pada PT PP (Persero) Tbk, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------

14.32.1. Proses keikutsertaan PT PP (Persero), Tbk ("PP"), adalah sebagai berikut: ----------

a. PP menerima undangan untuk mengikuti tender di *e-proc* Jakpro, PP langsung men*download* dokumen tender, kemudian mempelajarinya;-------

b. Selanjutnya PP memutuskan untuk mendaftar sebagai peserta tender; ----------

c. Tahap belikutnya mengikuti acara *aanwizing*;------

d. Menyampaikan dokumen penawaran. Pada tahap ini PP sudah ber-KSO dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk ("Jakon"); ----------

e. Menerima hasil evaluasi teknis, harga dan hasil evaluasi kombinasi teknik dan harga;----------

f. PP juga melakukan *self assessment* terhadap tender TIM Tahap III;----------

g. Oleh karena nilai *self assessment* lebih tinggi dibandingkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia tender dan dalam *e-proc* Jakpro tidak mencantumkan rincian detail penilaian teknis, maka PP-JAKON KSO menyampaikan surat permintaan Data Rincian terkait penilaian teknis yang dilakukan oleh panitia. ----------

h. Menerima pengumuman mengenai penundaan penetapan pemenang tender; dan----------

i. Menerima pengumuman bahwa tender TIM Tahap III dibatalkan. PP tidak mengetahui alas an pembatalan tender tersebut;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.32.2. Apabila terjadi kegagalan dalam tender, PP selalu melakukan evaluasi internal dengan tujuan untuk mempelajari penyebab kegagalan agar pada tender berikutnya PP tidak mengalami kegagalan;----------

14.32.3. Biasanya untuk proyek-proyek pemerintah, apabila PP merasa keberatan, maka PP akan menggunakan hak sanggah. Namun seingat Bapak Aprinauza, PP pernah mengajukan permohonan data rincian teknis pada proyek Gedung Sarinah; ----------

14.32.4. Setelah tender TIM Tahap III yang pertama dibatalkan, PP kembali menerima undangan tender dari Jakpro untuk pekerjaan TIM Tahap III. Proses/tahapan pelaksanaan tender TIM Tahap III yang kedua, pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan/tahapan tender TIM Tahap III sebelumnya. ----------

14.32.5. Setelah PP-JAKON KSO menandatangani kontrak dengan Jakpro, tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan TIM Tahap III beralih ke Departemen Operasi; ----------

14.32.6. Dalam tender TIM Tahap III yang kedua, PP kembali ber-KSO dengan Jakon menggunakan perjanjian KSO yang berbeda dengan perjanjian KSO pada tender TIM Tahap III; ----------

14.32.7. Tujuan PP untuk ber-KSO dengan perusahaan lain adalah untuk memperkuat posisi PP sebagai peserta tender dan agar mendapatkan nilai yang maksimal, karena pada pekerjaan TIM Tahap III ini mengedepankan pekerjaan interior;----------

14.32.8. Sejak tender TIM Tahap III yang pertama, PP sudah membuka komunikasi untuk ber-KSO dengan PT Adhi Karya (Persero), Tbk, PT Wijaya Karya (Persero),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tbk. dan Jakon. Namun pada saat itu yang merespons ajakan PP untuk ber-KSO hanya Jakon; ---

14.32.9. Sepengetahuan PP, Jakon sudah punya pengalaman di bidang interior, seperti pekerjaan interior di Colomadu, BNI Pejompongan dan Bandara Kulonprogo. Dengan ber-KSO, diharapkan PP dan Jakon dapat menggabungkan komponen pengalaman interior yang dapat memperkuat posisi PP-JAKON KSO. ----------

14.32.10. PP juga sudah punya pengalaman ker-KSO dengan Jakon, seperti pada pekerjaan Revitalisasi TIM Tahap II dan Proyek Jakarta International Stadium; ----------

14.32.11. Selain ber-KSO, PP-JAKON KSO juga bermitra dengan sub-kontraktor spesialis interior yaitu PT Gema Graha Sarana, yang dinilai mempunyai produk-produk unggulan; ----------

14.32.12. Dalam pelaksanaan tender, PP telah memperhitungkan resiko-resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tender tersebut, diantaranya adalah resiko finansial, kualitas dan harga; ----------

14.32.13. Sub-kontraktor (vendor) yang bermitra dengan PP-JAKON KSO pada pekerjaan TIM Tahap III, diantaranya untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:----------

a. Pekerjaan spesialis interior: PT Gema Graha Sarana ----------
b. Pekerjaan spesialis lighting: PT Mandala Putra Prima----------
c. Pekerjaan spesialis audio video: PT Visualindo Presenta Prima ----------
d. Pekerjaan Plafond: CV. Indah Dwijaya ----------
e. Pekerjaan Cat: PT Adela Surya Kencana ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.32.14. Pada pekerjaan TIM Tahap III yang pertama dan yang kedua tidak ada perubahan lingkup pekerjaan. Akan tetapi pada tender TIM Tahap III yang kedua persyaratannya lebih detail dan terperinci. ----------

14.32.15. Harga penawaran pada tender yang kedua lebih rendah dari pada harga penawaran pada tender yang pertama karena PP-JAKON KSO telah melakukan review harga penawaran. ----------

14.32.16. Review harga dilakukan karena sudah melihat harga penawaran dari peserta tender lain pada tender yang pertama. Semua item harga (*real cost*) di evaluasi kembali dan PP-JAKON KSO melakukan efisiensi harga (negosiasi harga) baik kepada vendor maupun efisiensi dalam pelaksanaan. ----------

14.32.17. Sepengetahuan Bapak Aprinauza, PP-JAKON KSO sudah menyelesaikan pekerjaan TIM Tahap III, namun Bapak Aprinauza belum pernah mengunjungi/melakukan pengecekan hasil pekerjaan PP-JAKON KSO; ----------

14.32.18. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Jakpro puas dengan hasil pekerjaan PP dan Jakon baik pada pekerjaan Jakarta International Stadion maupun pada pekerjaan TIM Tahap II; ----------

14.32.19. Kuasa Hukum PP-JAKON KSO juga memberikan klarifikasi bahwa pekerjaan interior di Planetarium memang belum selesai karena ada kesepakatan antara PP-JAKON KSO dan Jakpro untuk mengurangi item pekerjaan *Overhaul Starball*. Kesepakatan tersebut juga sudah mendapatkan justifikasi dari PT Yodya Karya (Persero) selaku MK dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Justifikasi tersebut akan dijadikan sebagai Bukti Tambahan dari Terlapor II dan Terlapor III. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.33. TERLAPOR III, yang diwakili oleh Bapak Arga Budiwijaya, selaku Kepala Departemen Estimasi PT Jakon, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

14.33.1. Bapak Arga Budiwijaya bekerja di Jakon sejak tahun 1997 di Departemen Perencanaan Jakon. Selanjutnya sejak tahun 2014 Bapak Arga Budiwijaya ditugaskan sebagai Kepala Departemen Estimasi di Jakon;----------

14.33.2. Departemen Estimasi mempunyai tugas untuk mempersiapkan setiap dokumen penawaran mulai dari proses identifikasi dokumen tender sampai dengan penyampaian dokumen penawaran kepada panitia tender; ----------

14.33.3. Dalam proyek Taman Ismail Marzuki, Jakon tidak mengikuti tender Tahap I, hanya mengikuti tender Tahap II dan Tahap III. Pada tender Tahap II, Jakon bekerjasama dengan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dan PT PP (Persero), Tbk. Sedangkan pada tender Tahap III, Jakon hanya bekerjasama dengan PT PP (Persero), Tbk;----------

14.33.4. Dalam pelaksanaan tender Proyek TIM Tahap III Departemen Estimasi Jakon melakukan identifikasi dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam tender Proyek TIM Tahap III dan identifikasi mengenai bagaimana Jakon dapat memenuhi persyaratan tender serta menyampaikan Surat Penawaran Harga bersama-sama dengan PT.PP (Persero), Tbk (“PP”), sebagai Kerjasama Operasi (“KSO”) kepada panitia; ---

14.33.5. Dalam pelaksanaan tender Proyek TIM Tahap III, Jakon berupaya untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia, namun ada kekhawatiran bahwa dokumen yang dimiliki oleh Jakon tidak dapat memenuhi semua persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender yang ditetapkan. Oleh karena itu Jakon memutuskan untuk ber-KSO dengan PP; ----------

14.33.6. Keputusan untuk ber-KSO dengan PP baik pada tender awal maupun tender ulang dilakukan setelah acara aanwizing dilakukan. Dalam acara aanwizing tersebut, panitia memperbolehkan peserta tender untuk ber-KSO. Sehingga pada saat penyampaian dokumen penawaran, Jakon sudah ber-KSO dengan PP; ----------

14.33.7. Perjanjian KSO yang digunakan/dilampirkan pada tender batal berbeda dengan perjanjian KSO yang digunakan/ dilampirkan pada tender ulang/baru. Pada tender batal dan tender ulang/baru yang menjadi *leader*-nya adalah PP, karena PP mempunyai *sharing* modal lebih banyak daripada Jakon, yaitu 60:40. Di Jakon, perjanjian KSO disiapkan oleh Departemen Marketing; ----------

14.33.8. Alasan ber-KSO dengan PP antara lain: agar dapat melengkapi persyaratan pengalaman perusahaan untuk pekerjaan interior serta Jakon sudah terbiasa bekerjasama dengan PP sehingga ada kesamaan dalam proses perhitungan dan pelaksanaan pekerjaan; ----------

14.33.9. Tujuan penyampaian surat permintaan data rincian adalah karena: ----------

a. KSO ingin mengevaluasi kinerja mengenai penyebab KSO kalah dalam tender; dan ----------

b. KSO menilai seharusnya KSO mendapatkan penilaian lebih besar daripada penilaian panitia. --

14.33.10. Benar bahwa tender Proyek TIM Tahap III telah dibatalkan oleh panitia. Jakon tidak mengetahui mengenai alasan pembatalan yang dilakukan oleh panitia. Berdasarkan pengalaman Jakon, biasanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jika ada tender yang dibatalkan, maka *user* akan mengadakan tender ulang/baru; ----------

14.33.11. Selanjutnya pada tender ulang/baru, Jakon diundang kembali oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk mengikuti tender pekerjaan Proyek TIM Tahap III. Oleh karena pada tender batal, PP-JAKON KSO kalah (bukan peringkat pertama), maka pada tender ulang/baru PP-JAKON KSO berinisiatif untuk menambahkan persyaratan dokumen agar dapat memperkuat posisi PP-JAKON KSO dalam tender Proyek TIM Tahap III. Perkuatan tersebut dilakukan antara lain dari sisi pengalaman perusahaan, surat dukungan dari vendor dan dari sisi komersil; ----------

a. Perkuatan dari sisi pengalaman perusahaan, yaitu pengalaman perusahaan di bidang interior dengan lebih banyak melampirkan pengalaman perusahaan di bidang interior. PP-JAKON KSO juga melampirkan pengalaman perusahaan untuk pekerjaan cinema dan retail; ----------

b. Perkuatan dari sisi surat dukungan vendor: pada tender ulang/baru, vendor yang disertakan lebih banyak dari pada vendor yang disertakan pada tender awal/batal (ada penambahan vendor). Misalnya vendor untuk pekerjaan akustik. Pada tender awal/batal vendornya hanya 1 (satu) sedangkan pada tender ulang/baru ada 2 (dua) vendor; ----------

c. Perkuatan dari sisi komersial, yaitu dengan melakukan efisiensi harga (melakukan renegosiasi dengan vendor) sehingga penawaran yang diajukan oleh PP-JAKON KSO menjadi lebih rendah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.33.12. Pemenuhan semua persyaratan (seperti pengalaman perusahaan dan nama-nama vendor) dan penyusunan dokumen penawaran dilakukan secara bersama-sama antara PP dan Jakon;----------

14.33.13. Antara KAK tender awal/batal dan KAK tender ulang/baru, ruang lingkup pekerjaannya masih sama. Hanya saja pada KAK tender ulang/baru persyaratannya lebih detail. Contohnya persyaratan tenaga ahli di bidang perencana interior pada KAK tender ulang/baru;----------

14.33.14. Selain itu, perbedaan terlihat pada penilaian ambang batas yang ditetapkan. Pada tender batal ambang batasnya 80, sedangkan pada tender ulang/baru ambang batasnya 85;----------

14.33.15. Sepengetahuan Bapak Arga Budiwijaya, seluruh pekerjaan Proyek TIM Tahap III sudah selesaikan seluruhnya oleh PP - JAKON KSO. Secara kontraktual, berdasarkan Addendum IV pekerjaan *overhaul* teater bintang dikeluarkan dari lingkup pekerjaan TIM III. ----------

Addendum IV tersebut belum ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Addendum IV berisi mengenai perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan, variation order dan final account. --------

Persesuaian Bukti-Bukti Surat Serta Tanggapan TERLAPOR II Dan TERLAPOR III ----------

Bukti-bukti Surat INVESTIGATOR ----------

14.34. Mengenai Bukti C14 = Bukti TII-1 = Bukti TIII-1, berupa: --------

Surat Elektronik (*Email*) dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada Peserta (*i.c PT PP (Persero) Tbk & PT Jaaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk*), tanggal 6 Mei 2021 yang berisikan Surat Undangan Nomor: 001/UND/PKT.18/V/2021, tanggal 6 Mei 2021.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti C14 = Bukti TII-1 = Bukti TIII-1, pada intinya membuktikan bahwa: ----------

Pada tanggal 6 Mei 2021, TERLAPOR I mengundang TERLAPOR II dan TERLAPOR III untuk mengikuti Tender Proyek TIM Tahap III. Dalam undangan tersebut disampaikan bahwa pendaftaran dilakukan secara *online* pada hari Kamis s.d Jumat, tanggal 6 Mei 2021 s.d tanggal 7 Mei 2021 dan Dokumen Pengadaan dapat di *download* pada hari Jumat s.d Sabtu, tanggal 07 Mei 2021 s.d tanggal 8 Mei 2021. ----------

14.35. Mengenai Bukti C13 = Bukti TII-2 = Bukti TIII-2 = Bukti TI-20, berupa:----------

Dokumen Permintaan Proposal/*Request for Proposal* (RfP) Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Mei 2021 ("RfP Tender Awal/Batal").----------

Bukti C13 = Bukti TII-2 = Bukti TIII-2 = Bukti TI-20 pada intinya membuktikan bahwa:----------

14.35.1. Dalam BAB II RfP, huruf A Butir 2 angka 9 menyebutkan bahwa Pekerjaan Jasa Spesialis adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Interior, *Special Lighting Interior, Operating Equipment* dan lain-lain.----------

14.35.2. Dalam BAB II RfP, huruf F Butir 38.2 dan Butir 38.3, menyebutkan bahwa:----------

38.2 Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT Jakarta Propertindo (Perseroda);

38.3 Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada peserta Pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.

14.35.3. Dalam BAB III RFP, huruf A butir 11, menyebutkan bahwa bobot unsur-unsur pokok yang dinilai dalam evaluasi teknis yaitu: ----------

a. Pengalaman perusahaan sebesar 15%; ----------
b. Metode kerja sebesar 20%; ----------
c. Personil inti sebesar 10%; ----------
d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan sebesar 10%; ------
e. Daftar spesifikasi barang 20%; ----------
f. Daftar spesifikasi alat, workshop dan warehouse 20%; ----------
g. Rencana penerapan sebesar 5%. ----------

14.36. Mengenai Bukti C11 dan C12 = Bukti TII-5 = Bukti TIII-5 = Bukti TI-7, berupa: ----------

14.36.1. Risalah Penjelasan (*Aanwijzing*) Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, tanggal 10 Mei 2021; dan ----------

14.36.2. Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III Nomor: 003/BA.AW/PKT.18/V/2021, tanggal 10 Mei 2021. ---

Bukti C11 dan C12 = Bukti TII-5 = Bukti TIII-5 = Bukti TI-7 pada intinya membuktikan bahwa: ----------

14.36.3. Total Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”) untuk pengadaan adalah sebesar Rp 481.997.141.120,- sudah termasuk PPN 10%; ----------

14.36.4. Evaluasi penawaran dilakukan dengan penilaian komposisi Teknis 70% dan Harga 30% serta ambang batas teknis (*passing grade*) 80. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.36.5. Peserta diperbolehkan untuk membentuk Kerja Sama Operasi ("KSO") (*vide ketentuan BAB II huruf B angka 16.2 RfP*); ----------

14.36.6. Sesuai dengan RfP, Peserta mengunggah/*upload* dokumen penawaran ke sistem aplikasi *eProcurement* JAKPRO dan mengirimkan *hardcopy* dokumen penawaran administrasi, teknis dan jaminan penawaran asli; ----------

14.36.7. Masa sanggah banding tanggal 10 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021 dengan jaminan sanggah banding sebesar Rp 5.000.000.000,- (*Lima milyar Rupiah*); ----------

Selain itu, di dalam Risalah Penjelasan (*Aanwijzing*) tersebut, TIDAK ada peserta yang menyampaikan keberatan/menolak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RfP, khususnya ketentuan 38.2 dan 38.3. ----------

14.37. Mengenai Bukti C20, C92, = Bukti TII-9 = Bukti TIII-9, berupa:

14.37.1. Surat Elektronik (*Email*) dari Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada Para Peserta Lelang (*PT PP (Persero) Tbk selaku Leader PP-JAKON KSO*) tanggal 10 Juni 2021, Perihal: Pemberitahuan Hasil Evaluasi Admin, Teknis dan Harga. ----------

14.37.2. Bukti C20, C92, = Bukti TII-9 = Bukti TIII-9, pada intinya membuktikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Tim Pengadaan pada tanggal 10 Juni 2021, diperoleh hasil/peringkat penilaian bahwa PP-JAKON KSO menduduki peringkat ke-3, sebagaimana tabel di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Data Penyedia Barang/Jasa						
No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Adminstrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	77.94	409.678.000.000,00	0,00	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
2.	PT Hutama Karya (Persero)	LULUS	79.06	382.200.382.200,00	0,00	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
3.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	92.62	418.388.404.711,00	418.388.000.000,00	1
4.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	89.57	397.018.888.888,00	397.018.888.888,00	2
5.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	92.78	446.264.400.000,00	446.264.400.000,00	3

14.38. Mengenai Bukti C148, berupa: ----------

14.38.1. Laporan Pembahasan Atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, tanggal 10 Juni 2021. ----------

14.38.2. Bukti C148, pada intinya membuktikan bahwa:--------

a. Tujuan dilakukannya pembahasan oleh PT JAKPRO dan Tim Managemen Konstruksi adalah untuk mendapatkan penyiedia jasa yang terbaik dari sisi mutu, jumlah dan waktu;----------

b. Perbedaan atas penilaian teknis peserta disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran mengenai: ----------

(1) Definisi interior yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Kerangka Acuan Kerja;---------

(2) Skor pembahasan review tidak mengikat peserta karena hasil evaluasi teknis telah diumumkan. ----------

Mekanisme pengumuman hasil review tidak terdapat dalam RfP dan RfP merupakan kesepakatan Para Pihak. Memasukkan mekanisme baru akan berpotensi menimbulkan sanggah dari Peserta. ----------

14.39. Mengenai Bukti C91, C127, C162 = Bukti TII-10 = Bukti TIII-10, berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.39.1. Surat PP-JAKON KSO kepada Tim Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor: 002/Ext/VI/PP-JAKON/ 2021, tanggal 12 Juni 2021, Perihal: Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III. ----------

14.39.2. Bukti C91, C127, C162 = Bukti TII-10 = Bukti TIII-10, pada intinya membuktikan bahwa Surat tersebut hanya berisikan permintaan/permohonan dari PP-JAKON KSO kepada Tim Pengadaan untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/penilaian teknis PROYEK TIM TAHAP III dan sama sekali TIDAK berisikan permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan untuk membatalkan Tender Awal. ----------

14.40. Mengenai Bukti C15, C17, C31, C41 = Bukti TII-11 = Bukti TIII-11 = Bukti TI-21, berupa: ----------

14.40.1. Pengumuman Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Nomor: 013/PENG-PKT.18/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021. ----------

14.40.2. Bukti C15, C17, C31, C41 = Bukti TII-11 = Bukti TIII-11 = Bukti TI-21, pada intinya membuktikan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pada Pasal 38.2 dan 38.3 dalam RfP disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal. ----------

14.41. Mengenai Bukti C120 = Bukti TII-13 = Bukti TIII-13 = Bukti TI-12, berupa: ----------

14.41.1. Dokumen Permintaan Proposal/Request for Proposal (RfP) Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, tanggal 12 Juli 2021 ("RfP Tender Ulang/Baru"). -------

14.41.2. Bukti C120 = Bukti TII-13 = Bukti TIII-13 = Bukti TI-12, pada intinya membuktikan bahwa:----------

a. Dalam BAB II RfP, huruf A Butir 2 angka 9 menyebutkan bahwa Pekerjaan Jasa Spesialis adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Interior, Akustik, *Special Lighting Interior, Operating Equipment, Overhoul Proyektor Teater Bintang* dan lain-lain: ---

b. Pekerjaan Interior: Perencanaan dan pelaksanaan khusus finishing elemen ruang, elemen tata cahaya, furniture, elemen estetis untuk kenyamanan ruang. ----------

c. Pekerjaan Akustik: Pekerjaan yang berkaitan dengan ragam bunyi yang dihasilkan dalam suatu ruang. Akustik ruang meliputi, kebisingan, getaran dan bahan peredam suara.----------

d. *Special Lighting*: Pencahayaan khusus yang digunakan untuk aktivitas visualisasi, display, estetika, karya seni, tata panggung. ----------

e. *Operating Equipment*: Peralatan-peralatan yang menunjang fungsi masing-masing ruang yang disyaratkan. ----------

f. *Overhaul dan peningkatan (Upgrading) (dilakukan di Jena, Germany):* ----------

(1) Uprading LED untuk *stars*, *milky way deep sky objects*;----------

(2) Perubahan dan *upgrading motor controller*;

(3) Pengadaan 1 (set) *full set new slides*; ----------

(4) *Upgrading system control* (*hardware & software*); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(5) Pengadaan untuk kabel-kabel dan konektor-konektor; ----------

(6) Pengadaan set baru untuk komponen *wear* dan *tear* untuk *starball*;----------

(7) Pembongkaran, pembersihan, pemasangan kembali, perbaikan yang diperlukan dan penyesuaian;----------

(8) Pengetesan fungsional;----------

(9) Pemasangan unit di Jakarta dan pelatihan.---

14.41.3. Dalam BAB II RfP, huruf F Butir 39.2 dan Butir 39.3, menyebutkan bahwa:----------

39.2 Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT Jakarta Propertindo (Perseroda);

39.3 Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.

14.41.4. Dalam BAB III RFP, huruf A butir 11, menyebutkan bahwa bobot unsur-unsur pokok yang dinilai dalam evaluasi teknis yaitu: ----------

a. Pengalaman Perusahaan 15%; ----------

b. Metode Pelaksanaan 20%;----------

c. Penilaian terhadap proposal *design* 10% ----------

d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan 5% ----------

e. Data Personil inti 10%; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material yang digunakan 20% ----------
g. Daftar spesifikasi teknis alat, workshop dan Gudang yang digunakan 15%; ----------
h. Rencana Penerapan *Building Information Modeling* (BIM) yang digunakan 5%; ----------

14.42. Mengenai Bukti C78, C79 = Bukti TII-16 = Bukti TIII-16 = Bukti TI-23, berupa: ----------

14.42.1. Risalah Penjelasan (*Aanwijzing*) Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, tanggal 14 Juli 2021 ("Risalah *Aanwijzing* Tender Ulang/Baru"). ----------

14.42.2. Bukti C78, C79 = Bukti TII-16 = Bukti TIII-16 = Bukti TI-23, pada intinya membuktikan bahwa: ----------

a. Total HPS untuk pengadaan adalah sebesar Rp 438.179.219.200,- belum termasuk PPN 10%; -
b. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode skoring dengan komposisi penilaian teknis 70% dan harga 30% dengan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) 85%; ----------
c. Peserta diperbolehkan membentuk KSO dengan peserta lain;----------
d. Sesuai RfP, Peserta mengunggah/*upload* dokumen penawaran ke sistem aplikasi *e-Procurement* JAKPRO dan mengirimkan *hardcopy* dokumen penawaran administrasi, teknis dan jaminan penawaran asli; ----------
e. Masa sanggah banding tanggal 09 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2021 dengan jaminan sanggah banding sebesar Rp 5.000.000.000,- (*Lima milyar Rupiah*).----------

14.42.3. Selain itu, di dalam Risalah Penjelasan (*Aanwijzing*) Tender Ulang/Baru tersebut, TIDAK ada peserta yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan keberatan/menolak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RfP dan tidak ada yang menanyakan/mempermasalahkan pembatalan tender awal.----------

14.43. Mengenai Bukti C86 = Bukti TII-17 = Bukti TIII-17, berupa:-----

14.43.1. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT PP (Persero) Tbk dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk tanggal 19 Juli 2021.----------

14.43.2. Bukti C86 = Bukti TII-17 = Bukti TIII-17, pada intinya membuktikan bahwa antara PT PP dan PT Jakon telah sepakat membentuk KSO baru untuk mengikuti tender ulang/baru. ----------

14.44. Mengenai Bukti C121 = Bukti TII-20 = Bukti TIII-20, berupa: ---

14.44.1. Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Admin, Teknis & Harga dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada PP-JAKON KSO tanggal 8 Agustus 2021. ----------

14.44.2. Bukti C121 = Bukti TII-20 = Bukti TIII-20, pada intinya membuktikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, PP-JAKON KSO memperoleh peringkat 1, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:----------

Data Penyedia Barang / Jasa						
No	Nama Penyedia Barang / Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1	PP – JAKON (KSO)	Lulus	96,13%	Rp415.815.000.000,- (*empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp378.013.636.364,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat I
2	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.	Lulus	92,85%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat II

14.45. Mengenai Bukti C108, C106, C107, berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.45.1. Surat Keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk kepada Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (“Surat Keberatan PT Wika Gedung”); ------

14.45.2. Surat Tanggapan PT Jakarta Propertido (Perseroda) atas Surat Keberatan Pembatalan Lelang PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: 008/OP100/ 102/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021 (“Surat Tanggapan PT Jakpro”); ----------

14.45.3. Surat Aduan atas Hasil Proses dan Penyelenggaraan Tender Ulang dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No: PS.03. 09/A.DIR.WG.5452/2021, tanggal 12 Agustus 2021 (“Surat Aduan PT Wika Gedung”); -------

Bukti C108, C106 dan C107, pada intinya membuktikan bahwa: ----------

14.45.4. Surat Keberatan PT Wika Gedung: pembatalan proses tender tanpa menjelaskan alasannya menunjukan penyelenggaraan tender jauh dari nilai professional dan tidak transparan.----------

14.45.5. Surat Tanggapan PT Jakpro: Keberatan dari PT Wika Gedung diajukan di luar mekanisme sanggah yang diatur dalam RfP, sehingga PT Wika Gedung tidak memiliki legal standing. Pembatalan dapat dilakukan setiap saat sebelum penetapan pemenang. Pengguna Barang dan Jasa tidak memiliki kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta. ----------

14.45.6. Surat Aduan PT Wika Gedung: PT Wika Gedung merasa keberatan atas proses dan hasil Penyelenggaraan Tender TIM Tahap III, karena pembatalan tender didasarkan pada alasan yang sangat subyektif dan merupakan keputusan sepihak.-

Bukti-bukti Surat TERLAPOR I ----------

Dalam persidangan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, TERLAPOR I telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda TI - 1 s/d TI - 43.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggapan TERLAPOR II dan TERLAPOR III Terhadap bukti-bukti yang diajukan TERLAPOR I adalah sebagai berikut: ----------

14.46. Mengenai Bukti T - 41 berupa: ----------

14.46.1. Laporan Hasil Review Satuan Pengawas Internal PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Review terhadap Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III, Nomor: LHR-06/UT1000/IX/2021, tanggal 21 September 2021. ----

14.46.2. Bukti T - 41, pada intinya membuktikan bahwa: -------

a. Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebagaimana yang dibatalkan melalui pengumuman Nomor: 013/PENG.PKT.18/VI/2021, secara umum telah sesuai dengan ketentuan manual Pengadaan Barang dan Jasa serta SOP Pengadaan Barang dan Jasa. ----------

b. Tidak adanya penjelasan mengenai Definisi Interior di dalam RfP dan KAK menyebabkan adanya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan berubahnya penilaian teknis yang sudah diumumkan. ----------

c. Perbedaan penilaian teknis tersebut dikarenakan adanya: ----------

(1) Permintaan review (penilaian ulang) kepada Manajemen Konstruksi setelah adanya pembahasan dari user. Hal tersebut disebabkan: ----------

(2) KAK belum menguraikan definisi yang jelas dan komperhensif terkait dengan pengalaman perusahaan terutama pada definisi interior; --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) Tim Manajemen Konsultan yang terlibat dalam proses pengadaan belum melaksanakan pekerjaannya sesuai ekspektasi user; ----------

(4) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara user dengan Manajemen Konsultan sebagai konsultan yang menyiapkan dokumen pengadaan, sehingga tujuan lingkup pekerjaan terdapat di KAK tidak dapat diterjemahkan ke dalam evaluasi teknis yang terdapat dalam RfP dan bobot – bobot unsur yang dinilai terdapat dalam penilaian teknis. ----------

d. Selain itu, adanya *concern* Direksi untuk dilakukan pemaparan terlebih dahulu sebelum dilakukan pegumuman adalah untuk meyakinkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Panitia telah sesuai dengan RfP dan KAK; ----------

Bukti-Bukti Surat TERLAPOR II Dan TERLAPOR III ----------

Dalam persidangan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, TERLAPOR II & TERLAPOR III telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda TII - 1 s/d TII - 36 dan TIII - 1 s/d TIII - 34, dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

14.47. Mengenai Bukti TII - 1 = Bukti TIII - 1 = Bukti C14, berupa: -----
Surat Elektronik (*email*) dari Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (*procurement@jakarta-propertindo.com*) kepada destykusuma@gmail.com tanggal 6 Mei 2021, *email* tersebut berisikan surat Undangan dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., Nomor: 001/UND/PKT.18/V/ 2021, tanggal 6 Mei 2021; -

14.48. Mengenai Bukti TII - 2 = Bukti TIII - 2 = Bukti C13 berupa: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*/RFP) Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Mei 2021;----------

14.49. Mengenai Bukti TII - 3 dan Bukti TIII - 3 berupa: ----------

14.49.1. Bukti Pendaftaran PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. sebagai peserta tender Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III pada tanggal 6 Mei 2021; dan ----------

14.49.2. Bukti Pendaftaran PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk sebagai peserta tender Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III pada tanggal 6 Mei 2021.----------

Bukti TII - 3 dan Bukti TIII - 3, pada intinya membuktikan bahwa: ----------

14.49.3. TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah terdaftar untuk mengikuti Tender Jasa Konstuksi Pembangunan Proyek TIM Tahap III di PT JAKPRO.----------

14.49.4. Pada saat mendaftar sebagai peserta tender, TERLAPOR II dan TERLAPOR III belum membentuk KSO. ----------

14.50. Mengenai Bukti TII - 4 dan Bukti TIII - 4 berupa: ----------

14.51. Surat Elektronik (*email*) dari Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (*procurement@jakarta-propertindo.com*) kepada Seluruh Peserta Tender Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), tanggal 6 Mei 2021 mengenai Undangan Aanwizing Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III;----------

Bukti TII - 4 dan Bukti TIII - 4, pada intinya membuktikan bahwa Tim Pengadaan TERLAPOR I mengundang seluruh peserta tender (termasuk *TERLAPOR II dan TERLAPOR III*)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk mengikuti Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, secara *online* melalui Aplikasi MS-Teams. ----------

14.52. Mengenai Bukti TII - 5 = Bukti TIII - 5 = Bukti C11 & C12, berupa:----------

Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III Nomor: 003/BA.AW/PKT.18/ V/2021, tanggal 10 Mei 2021 *jo.* Risalah Penjelasan/*Aanwijzing* Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, tanggal 10 Mei 2021. -

14.53. Mengenai Bukti TII - 6 dan Bukti T III - 6 berupa: ----------

14.53.1. Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, No. 01, tanggal 10 Mei 2021, dibuat di hadapan Fatimah Anwar, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor; dan----------

14.53.2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) sehubungan dengan tender Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III antara PT PP (Persero), Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. ----------

Bukti TII - 6 dan Bukti TIII - 6, pada intinya membuktikan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 antara TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah sepakat untuk membentuk KSO dengan nama PP-JAKON KSO, dengan komposisi modal sebagai berikut: ----------

14.53.3. PT PP sebesar 60% (enam puluh persen); ----------

14.53.4. PT JAKON sebesar 40% (empat puluh persen) ----------

14.54. Mengenai Bukti TII - 7 dan Bukti TIII - 7 berupa: ----------

14.54.1. Bukti Unggah (*Upload*) Data Penawaran dari PP-JAKON KSO melalui laman *eproc.jakarta-propertindo.com/main* milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) pada tanggal 24 Mei 2021; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.54.2. Bukti TII - 7 dan Bukti TIII - 7, pada intinya membuktikan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 PP-JAKON KSO telah menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen penawaran File I (*Administrasi dan Teknis*) serta dokumen penawaran File II (*harga*). ----------

14.55. Mengenai Bukti TII - 8 dan Bukti TIII - 8 berupa: ----------

14.55.1. Surat Elektronik (*email*) dari Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) *(procurement@jakarta-propertindo.com)* kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., *(destykusuma@ gmail.com)* tanggal 31 Mei 2021, Subject: Pengumuman Peringkat Teknis; ---

14.55.2. Bukti TII - 8 dan Bukti TIII - 8, pada intinya membuktikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian atas dokumen penawaran File I, PP-JAKON dinyatakan lulus dan memperoleh skor tertinggi dengan nilai 92,78, sebagaimana dimaksud dalam tabel sebagai berikut: ----------

Data Penyedia Barang/Jasa				
No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	92.78	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	92.62	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	89.57	3
4.	PT Hutama Karya (Persero)	LULUS	79.06	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
5.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	77.94	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

14.56. Mengenai Bukti TII - 9 = Bukti TIII - 9 = Bukti C20 dan C92, berupa:----------

Surat Elektronik (*email*) dari Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) *(procurement@jakarta-propertindo.com)* kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., *(destykusuma@ gmail.com)* tanggal 10 Juni 2021, Subject: Pemberitahuan Hasil Evaluasi Admin, Teknis dan Harga; --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.57. Mengenai Bukti TII - 10 = Bukti TIII - 10 = Bukti C91, C12 dan C162, berupa: ----------
Surat PP-JAKON KSO kepada Tim Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Nomor: 002/ Ext/VI/PP-JAKON/2021, tanggal 12 Juni 2021, Perihal: Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III ("Surat PP-JAKON KSO No.002/2021");----------

14.58. Mengenai Bukti TII - 11 = Bukti TIII - 11 = Bukti C15, C17, C31, dan C41, berupa: ----------
Pengumuman Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Nomor: 013/PENG-PKT.18/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021; ----------

14.59. Mengenai Bukti TII - 12 dan Bukti TIII - 12 = Bukti C40 berupa:

14.59.1. Surat Elektronik (*email*) dari Divisi Pengadaan (*procurement@jakarta-propertindo.com*) kepada (*ptpp.dvo.dua@gmail.com*) tanggal 12 Juli 2021, yang berisikan surat PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Nomor: 001/UND/PKT.25/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal: Undangan; ----------

14.59.2. Bukti TII - 12 dan Bukti TIII - 12, pada intinya membuktikan bahwa setelah tender Proyek TIM Tahap III dibatalkan, Tim Pengadaan TERLAPOR I kembali mengundang rekanan terdaftar PT JAKPRO (*termasuk TERLAPOR II dan TERLAPOR III*) untuk mengikuti Tender Ulang/Baru Proyek TIM Tahap III. --

14.60. Mengenai Bukti TII - 13 = Bukti TIII - 13 = Bukti C120, berupa:
Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*) Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, 12 Juli 2021; ----------

14.61. Mengenai Bukti TII - 14 dan Bukti TIII - 14 berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.61.1. Bukti Pendaftaran PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. sebagai peserta tender Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III pada tanggal 12 Juli 2021;----------

14.61.2. Bukti TII - 14 dan Bukti TIII - 14, pada intinya membuktikan bahwa: ----------

a. TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah terdaftar untuk mengikuti Tender Ulang/Baru Proyek TIM Tahap III; ----------

b. Pada saat mendaftar sebagai peserta tender pada Tender Ulang/Baru, TERLAPOR II dan TERLAPOR III belum membentuk KSO. ----------

14.62. Mengenai Bukti TII - 15 dan Bukti TIII - 15 berupa: ----------

14.62.1. Surat Elektronik (*email*) dari Divisi Pengadaan (*procurement@jakarta-propertindo.com*) kepada (*destykusuma@gmail.com*) tanggal 12 Juli 2021, yang berisikan surat PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada PT PP (Persero), Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk Nomor: 001/UND/ PKT.25/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, perihal: Undangan *Aanwijing*; ----------

14.62.2. Bukti TII - 15 dan Bukti TIII -15, pada intinya membuktikan bahwa TERLAPOR I mengundang peserta tender yaitu TERLAPOR II dan TERLAPOR III untuk mengikuti Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Tender Ulang/Baru pada tanggal 14 Juli 2021 secara *online* melalui aplikasi MS-Teams. ----------

14.63. Mengenai Bukti TII - 16 = Bukti TIII - 16 = Bukti C78 dan Bukti C79, berupa: ----------

Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor: 003/BAAW/ PKT.25/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021 *jo.* Risalah Rapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penjelasan/*Aanwijzing* Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III tanggal 14 Juli 2021; -

14.64. Mengenai Bukti TII - 17 = Bukti TIII - 17 = Bukti C86, berupa:-- Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, No.01, tanggal 19 Juli 2021, dibuat di hadapan Fatimah Anwar, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor; ----------

14.65. Mengenai Bukti TII - 19 dan Bukti TIII - 19, berupa: ----------

14.65.1. Surat Elektronik (*email*) dari Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) *(procurement@jakarta-propertindo.com)* kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., *(ptpp.dvo.dua@gmail.com)* tanggal 2 Agustus 2021, yang berisikan: Pengumuman Peringkat Teknis Nomor: 005/ BAEVT/ PKT.25/VIII/2021 Tanggal 02/08/2021;----------

14.65.2. Bukti TII - 19 dan Bukti TIII - 19, pada intinya membuktikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penawaran administrasi dan teknis, PP-JAKON KSO dinyatakan lulus dengan memperoleh skor tertinggi dengan nilai 95,07, sebagaimana dalam tabel di bawah ini: ----------

PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021
Tanggal 02/08/2021

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis no : 005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021 tanggal 02/08/2021 tentang hasil evaluasi atas penawaran Administrasi dan teknis untuk Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III

Dengan ini kami sampaikan hasil peserta yang dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan Pembukaan Penawaran Harga Sampul II adalah sebagai berikut :

Data Penyedia Barang/Jasa				
No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	95.07	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	89.78	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	76.13	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
4.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	74.97	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

Selanjutnya akan dilakukan Pembukaan dan Evaluasi Sampul II terhadap peserta yang dinyatakan lulus.

14.66. Mengenai Bukti TII - 20 = Bukti TIII - 20 = Bukti C121, berupa:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada PP-JAKON KSO, tanggal 8 Agustus 2021, mengenai Pemberitahuan Hasil Evaluasi Admin, Teknis dan Harga; --------

14.67. Mengenai Bukti TII - 21 = Bukti TIII - 21 berupa: ----------

14.67.1. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 012/BAKLANEG/ PKT.25/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021; ----------

14.67.2. Bukti Bukti TII - 21 = Bukti TIII - 21, pada intinya membuktikan bahwa antara Tim Pengadaan TERLAPOR I dengan PP-JAKON KSO telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga. ----------

14.68. Mengenai Bukti TII - 22 = Bukti TIII - 22 berupa: ----------

14.68.1. Pengumuman Hasil Pengadaan yang dimuat pada laman eproc.jakarta-propertindo.com/main milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda);----------

14.68.2. Bukti TII - 22 = Bukti TIII - 22, pada intinya membuktikan bahwa PP-JAKON KSO diumumkan sebagai pemenang pengadaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III.----------

14.69. Mengenai Bukti TII - 23 = Bukti TIII - 23, berupa: ----------

14.69.1. Simulasi penilaian sendiri yang disusun oleh PP-JAKON KSO pada Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III;----------

14.69.2. Bukti Bukti TII - 23 = Bukti TIII - 23, pada intinya membuktikan bahwa berdasarkan hasil penilaian sendiri, seharusnya nilai penawaran teknis PP-JAKON KSO pada tender awal adalah sebesar 95,77, bukan 92,78. ----------

14.70. Mengenai Bukti TII - 24a s/d Bukti TII - 24d, berupa: ----------

14.70.1. Berita Acara Serah Terima Pertama Parsial No. 001/BASTP/ KSO- TIM- III/ ANNEX/ VI/ 2021, tanggal 2 Juni 2021, pekerjaan Interior, Equipment &

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Spesial Lightning Interior Galeri Annex Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III;----------

14.70.2. Berita Acara Serah Terima Pertama Parsial No. 001/BASTP/ KSO-TIM-III/PWS/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021, pekerjaan Interior, Equipment & Spesial Lightning Interior Gedung Perpustakaan & Wisma Seni Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III;----------

14.70.3. Berita Acara Serah Terima Pertama Parsial No. 008/BASTP/ KSO-TIM-III/PLT/IX/ 2021, tanggal 7 September 2021, pekerjaan Interior, Equipment & Spesial Lightning Interior Gedung Planetarium Dan Pusat Latihan Seni Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III;----------

14.70.4. Berita Acara Serah Terima Pertama Parsial No. 001/BASTP/ KSO-TIM-III/GBB - GERBANG/ PAGAR/ IX/ 2021, tanggal 27 September 2021, pekerjaan Interior, *Equipment & Spesial Lightning Interior* Graha Bakti Budaya, Gerbang dan Pagar Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III;----------

Bukti TII - 24a s/d Bukti TII - 24d, pada intinya membuktikan bahwa Hasil pekerjaan PP-JAKON KSO telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima (*Provisional Hand Over*) secara parsial antara *Owner* i.c TERLAPOR I dengan Kontraktor i.c TERLAPOR II dan TERLAPOR III.----------

14.71. Mengenai Bukti TII - 25a dan Bukti TII - 25b = Bukti TIII - 24a dan Bukti TIII - 24b, berupa:----------

14.71.1. Daftar Sub-Kontraktor (pekerjaan spesialis) PP-JAKON KSO pada tender awal (tender batal); ----------

14.71.2. Daftar Sub-Kontraktor (pekerjaan spesialis) PP-JAKON KSO pada tender ulang (tender baru); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti TII - 25a dan Bukti TII - 25b = Bukti TIII - 24a dan Bukti TIII - 24b pada intinya membuktikan bahwa pada jumlah Sub-Kontraktor PP-JAKON KSO pada tender awal/batal sebanyak 7 (tujuh) penyedia dan jumlah Sub-Kontraktor pada tender ulang/baru sebanyak (10) penyedia. ----------

14.72. Mengenai Bukti TII - 26, berupa:----------

14.72.1. Daftar pengalaman TERLAPOR II i.c PT PP (Persero) Tbk dalam mengikuti tender/lelang yang dibatalkan, dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2021 s/d 2023). ----------

Bukti TII - 26, pada intinya membuktikan bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun tahun terakhir, PT PP telah mengikuti 6 (enam) tender yang dibatalkan, yaitu tender: ----------

14.72.2. Paket Pembangunan Bangunan Gedung Stadion Provinsi Jambi; ----------

14.72.3. Paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Kesehatan Pembangunan Rumag Sakit RSUD AM Parikesit;----------

14.72.4. Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Makassar *Government Center and Services*;----------

14.72.5. Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya; ----------

14.72.6. Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar; dan----------

14.72.7. Paket Bangunan Olah Raga Terbuka Pemanen: Pembangunan Stadion Rugby Provinsi Papua. ----------

14.73. Mengenai Bukti TII - 27a dan Bukti TII - 27b = Bukti TIII - 25a dan Bukti TIII - 25b, berupa:----------

14.73.1. Daftar Pengalaman Perusahaan i.c PP-JAKON KSO dalam Dokumen Penawaran Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, yang disampaikan pada tender awal (tender batal). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.73.2. Daftar Pengalaman perusahaan i.c PP-JAKON KSO dalam Dokumen Penawaran Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, yang disampaikan pada tender ulang (tender baru). ----------

Bukti TII - 27a dan Bukti TII - 27b = Bukti TIII - 25a dan TIII - 25b, pada intinya membuktikan bahwa pengalaman perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan sejenis yang disampaikan oleh PP-JAKON KSO pada tender awal/batal sebanyak 31 (tiga puluh satu), sedangkan pada tender ulang/baru sebanyak 106 (seratus enam). ----------

14.74. Mengenai Bukti TII - 28 = Bukti TIII - 26, berupa: ----------

14.74.1. Bukti pengiriman Surat Elektronik (*email*) dari PT PP (Persero) Tbk kepada Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (*procurement@jakarta-propertindo.com*) terkait Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, tanggal 12 Juni 2021. ----------

14.74.2. Bukti TII - 28 = Bukti TIII - 26, pada intinya menyebutkan bahwa Surat PP-JAKON KSO kepada Tim Pengadaan TERLAPOR I Nomor: 002/ Ext/VI/PP-JAKON/2021, tanggal 12 Juni 2021, disampaikan melalui *email* tanggal 12 Juni 2021. ----------

14.75. Mengenai Bukti TII - 29a s/d Bukti TII-29d = Bukti TIII - 27a s/d Bukti TII-27c, berupa:----------

14.75.1. Klausul Pasal 39.2 dan Pasal 39.3, halaman 48 - 49 mengenai Pembatalan Tender dalam Dokumen *Request for Proposal* (RfP) Pekerjaan Jasa Konstruksi Hunian Pendukung Operasional Jakarta Internasional Stadium (“HPPO JIS”) - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Tahun 2022; ----------

14.75.2. Klausul Pasal 38.2 dan Pasal 38.3, halaman 50 - 51 mengenai Pembatalan Tender dalam Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Request for Proposal (RfP) Pekerjaan Jasa Konstruksi Kontrak Utama Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap II - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Tahun 2022. ----------

14.75.3. Klausul Pasal 44.2 dan Pasal 44.3, halaman 50 - 51 mengenai Pembatalan Tender dalam Dokumen *Request for Proposal* (RfP) Pekerjaan Jasa Konstruksi Rancang Dan Bangun Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Di Jalan CikinI Raya No.73 - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Tahun 2019. ----------

14.75.4. Klausul Pasal 41.2 dan Pasal 41.3, halaman 29-30 mengenai Pembatalan Tender dalam Dokumen *Request for Proposal* (RfP) Paket Pekerjaan Jasa Rancang Bangun (*Design & Build*) Proyek Pembangunan Lintasan Balap (Formula E) (*E-Prix*) Tahun 2022; ----------

Bukti TII - 29a s/d Bukti TII-29d = Bukti TIII - 27a s/d Bukti TII-27c, pada intinya membuktikan bahwa dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) pada tender-tender lain milik TERLAPOR I seperti: (1) Dokumen RfP Tender HPPO JIS; (2) Dokumen RfP Tender Proyek TIM Tahap I; (3) Dokumen RfP Tender Proyek TIM Tahap II; dan (4) Dokumen RfP Tender Proyek Formula E, juga terdapat klausula yang mengatur mengenai pembatalan tender. ----------

14.76. Mengenai Bukti TII - 30 dan Bukti TIII - 28, berupa: ----------

14.76.1. Surat PT PP (Persero) Tbk. kepada Tim Lelang Sarinah, Nomor: 301/EXT/PP/SVP.Ops.G2/2018, tanggal 27 Desember 2018, Perihal: Surat permohonan Penjelasan mengenai Metode Evaluasi Penawaran Lelang Paket Pekerjaan: Pengadaan Pekerjaan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) Pembangunan Gedung Sarinah II; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.76.2. Surat PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk kepada Pokja BPPJ 3, Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor: 044/ET/DE/JK/9/2021, tanggal 10 September 2021, Perihal: Keberatan terhadap Pengumuman Hasil Penilaian Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. ----------

Bukti TII - 30 dan Bukti TIII - 28, pada intinya membuktikan bahwa TERLAPOR II dan TERLAPOR III juga pernah mengajukan permohonan permintaan evaluasi kepada Panitia Tender pada tender-tender lainnya.----------

14.77. Mengenai Bukti TII - 31 = Bukti TIII - 29, berupa: ----------

14.77.1. Surat PT Yodya Karya (Persero) kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor: 079.A/YK/TIM-III/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, perihal: Tindak Lanjut atas Pelaksanaan pekerjaan *Overhaul Starball*;

14.77.2. Bukti TII - 31 = Bukti TIII - 29, pada intinya membuktikan bahwa: Terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan pekerjaan *overhaul*, antara lain: ----------

a. Pekerjaan *Overhaul* dilaksanakan oleh Sub-Kontraktor tunggal yaitu PT Virtual Reality Solution Sdn Bhd selaku *Exclusive Sales Representative* di Asia Tenggara dari Carl Zeiss Jena Gmbh selaku *Principal*;----------

b. Pihak Subkontraktor meminta agar PP-JAKON KSO melakukan pembayaran 100% di muka agar Pekerjaan *Overhaul* dapat dilaksanakan dan tidak dapat dinegosiasikan lagi karena dampak dari Pekerjaan lain yang sebelumnya dilaksanakan di Jakarta, Indonesia; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Pihak Subkontraktor tersebut tidak dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas pembayaran 100% di muka tersebut; ----------

Atas dasar hal-hal tersebut PT Yodya Karya (Persero) selaku MK mengusulkan agar Pekerjaan *Overhaul Proyektor Starball* dapat dilakukan penghapusan/pengurangan lingkup pekerjaan ("Pekerjaan Kurang"). ----------

14.78. Mengenai Bukti TII - 32 = Bukti TIII - 30, berupa: ----------

14.78.1. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tentang Proyek Revitalisasi Perjanjian Kerjasama Taman Ismail Marzuki Tahap III Nomor: 25/DATUN.DKI-JKT/ 08/2022, tanggal 26 Agustus 2022; ----------

14.78.2. Bukti TII - 32 = Bukti TIII - 30, pada intinya membuktikan bahwa Tidak adanya jaminan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Bank Garansi dari PT Virtual Reality Solution bertentangan dengan Poin 15 huruf a, *General Term and Condition* (GTC) Syarat dan Ketentuan Umum yang berlaku di PP-JAKON KSO serta Memorandum PT PP No. 070/ M/PP/OC&SCM/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, Perihal Penerbitan, Pengecekan dan Penyimpanan Dokumen Jaminan Vendor, sehingga keadaan dimaksud dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar sesuai ketentuan Sub Klausula 19 Persyaratan Umum dan Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi Bagi Bangunan dan Pekerjaan dengan Desain oleh Pengguna Jasa, maka Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa sepanjang disepakati Para Pihak, pekerjaan *overhaul & upgrade starball* dapat dikeluarkan dari kontrak Pekerjaan TIM Tahap III menjadi pekerjaan kurang. ----------

14.79. Mengenai Bukti TII - 33 = Bukti TIII - 31, berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.79.1. Surat PP-JAKON KSO kepada Direktur Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III Nomor: 684/Ext/KSO-TIM-III/IX/2022, tanggal 21 September 2022, Perihal: Reminder Tindak lanjut atas Permasalahan Pekerjaan *Overhaul Starball*; ----------

14.79.2. Bukti TII - 33 = TIII - 31, pada intinya membuktikan bahwa karena sampai dengan tanggal 21 September 2021 belum ada keputusan dari PT JAKPRO mengenai pekerjaan *overhaul*, maka PP-JAKON KSO kembali menyampaikan permohonan agar pekerjaan *overhaul* dapat disepakati sebagai pekerjaan kurang. -

14.80. Mengenai Bukti TII - 34 = Bukti TIII - 32, berupa: ----------

14.80.1. Site Instruction Nomor: 105/YK-TIM-III/SI/IX/2022, tanggal 22 September 2022, Hal: Pengurangan Lingkup Pekerjaan *Overhaul Starball.*----------

14.80.2. Bukti TII - 34 = Bukti TIII - 32, pada intinya membuktikan bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek TIM Tahap III, dengan ini diinstruksikan agar item pekerjaan *Overhaul Starball* dikeluarkan/dikurangkan dari Lingkup Pekerjaan PP-JAKON KSO. ----------

14.81. Mengenai Bukti TII - 35 = Bukti TIII - 33, berupa: ----------

14.81.1. Layout Item *Design and Build* Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, yang disusun oleh PP-JAKON KSO; ----------

14.81.2. Bukti TII - 35 = Bukti TIII - 33, pada intinya membuktikan bahwa Item Pekerjaan *Design and Build* i.c Area *Guidelines* yang dikerjakan oleh PP-JAKON KSO dalam Proyek TIM Tahap III, meliputi:----------

a. Lantai 1 s.d 3 dan Lantai 13 s.d Gedung Perpustakaan dan Wisma Seni; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Lantai 1, 2 dan Lantai 4 Gedung Planetarium untuk Teater Arena, UMKM, Studio dan Kineforum; ----------

14.82. Mengenai Bukti TII - 36 = Bukti TIII - 34, berupa: ----------

14.82.1. Dokumentasi *Before - After* Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, yang disusun oleh PP-JAKON KSO; ----------

14.82.2. Bukti TII - 36 = Bukti TIII - 34, pada intinya menunjukkan keadaan/ kondisi area-area pekerjaan Proyek TIM Tahap III, sebelum dikerjakan (0%), pada saat progress pekerjaan (50%) dan setelah pekerjaan selesai (100%). ----------

Tanggapan TERLAPOR II dan TERLAPOR III ----------

14.83. Mengenai Keikutsertaan TERLAPOR II Dan TERLAPOR III Sebagai Peserta pada Tender Awal/Batal dan Tender Ulang/Baru Proyek TIM Tahap III. ----------

14.83.1. Bahwa berdasarkan Bukti TII - 1 dan Bukti TIII - 1 = Bukti C14, terbukti bahwa TERLAPOR II dan TERLAPOR III merupakan rekanan terdaftar di PT JAKPRO yang memenuhi syarat sebagai Penyedia Jasa, sehingga TERLAPOR II dan TERLAPOR III sangat mempunyai kapasitas/kemampuan untuk mengikuti tender tender Proyek TIM Tahap III;

Bahwa berdasarkan Bukti TII - 2 dan Bukti TIII - 2 = Bukti C14 *jo.* Bukti TII - 5 dan TIII - 5 = Bukti C11 dan C12, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Hendra Riatno dan Saksi Githa Maharani, terbukti bahwa dalam tender Proyek TIM Tahap III, para peserta diperbolehkan untuk membentuk KSO. -

Dengan demikian tindakan TERLAPOR II dan TERLAPOR III yang mengadakan Kerjasama Operasi dengan nama PP-JAKON KSO dalam mengikuti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender Proyek TIM Tahap III TIDAK bertentangan dengan ketentuan dalam RfP;----------

14.83.2. Bahwa berdasarkan Bukti Bukti TII - 5 dan TIII - 5 = Bukti C11 dan C12, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Aji Hendrawan dan Saksi Hendra Riatno, terbukti bahwa pada saat Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*), panitia telah menjelaskan mengenai adanya ketentuan *Request for Proposal* (RfP) khususnya ketentuan pembatalan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38.2 dan 38.3 RfP.----------

14.83.3. Bahwa berdasarkan Bukti TII - 8 dan Bukti TIII - 8, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Tri Wahyu Edi dan Saksi Andy Fasial, terbukti bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis, PP-JAKON KSO dinyatakan lolos evaluasi teknis dengan mendapat skor sebesar 92,78, dan selanjutnya terhadap peserta yang lolos evakuasi teknis dilakukan pembukaan dokumen penawaran harga.----------

14.83.4. Bahwa berdasarkan Bukti TII - 9 dan Bukti TIII - 9 = Bukti C20 dan C92, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdy Fisal terbukti bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, diperoleh hasil/peringkat penilaian bahwa PP-JAKON KSO menduduki peringkat ke-3;----------

14.83.5. Bahwa berdasarkan Bukti TII-10 dan Bukti TIII-10 = Bukti C91, C17, dan C162 jo. Bukti TII - 30 dan Bukti TIII - 28 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahlabibi Aditya P.N., Saksi Hendra Riatno dan Saksi Githa Maharani, terbukti bahwa:----------

a. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/penilaian, PP-JAKON KSO menyampaikan surat Permohonan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Permintaan Data Rincian Penilaian Teknis Proyek TIM Tahap III kepada Tim Pengadaan TERLAPOR I, namun Tim Pengadaan TERLAPOR I tidak pernah memberikan respons baik secara lisan maupun tertulis terhadap surat permohonan PP-JAKON KSO tersebut; ----------

b. Permohonan permintaan rincian data tersebut disampaikan oleh PP-JAKON untuk digunakan sebagai evaluasi internal. Selain itu, baik TERLAPOR II maupun TERLAPOR III juga pernah menyampaikan surat permohonan/permintaan sejenis kepada Panitia/Tim Pengadaan pada tender-tender lain yaitu pada tender Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tender Proyek Gedung Sarinah. --

14.83.6. Berdasarkan keterangan Ahli Riad Horem, Dipl. H.E., Ahli Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., dan Ahli Setya Budi Arijanta, pada intinya menyatakan bahwa: ------

a. Di dalam Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, tidak terdapat larangan bagi peserta untuk menyampaikan surat apa pun (*i.c Surat Permohonan Rincian Data*) kepada panitia dalam proses tender; ----------

b. Apabila surat yang disampaikan oleh peserta di luar mekanisme yang diatur dalam tender, maka panitia tidak memiliki kewajiban untuk menjawab surat tersebut.----------

Dengan demikian, maka Surat PP-JAKON KSO kepada Tim Pengadaan TERLAPOR I Nomor: 002/Ext/VI/PP-JAKON/2021, Perihal: Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, merupakan hak PP-JAKON KSO dan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertentangan dengan RfP maupun ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa secara umum. ----------

14.83.7. Bahwa berdasarkan Bukti TII - 11 dan Bukti TIII - 11 = Bukti TI - 21 = Bukti Bukti C15, C17, C31, dan C41, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Faris Adriawan Triono, Saksi Ahmadi, Saksi Aji Hendrawan, Saksi M. Taufiqurrachman, Saksi Hendra Riatno, Saksi Githa Maharani, dan Saksi Alhabibi Aditya P.N., terbukti bahwa Pembatalan Tender Proyek TIM Tahap III didasarkan pada ketentuan Pasal 38.2 dan 38.3 RfP, BUKAN didasarkan pada Surat PP-JAKON KSO No.002/2021. ----------

14.83.8. Bahwa berdasarkan Bukti TII - 12 dan Bukti T - III 12 = Bukti C40, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Faris Adriawan Triono, Saksi Ahmadi, Saksi Nur Syamsul Rizal, Saksi Aji Hendrawan, Saksi Andi Faisal, Saksi Alhabibi Aditya P.N., Saksi Hendra Riatno dan Saksi Githa Maharani, terbukti bahwa setelah TERLAPOR I membatalkan tender Proyek TIM Tahap III, selanjutnya TERLAPOR I kembali mengundang seluruh peserta tender pada tender awal/batal (*termasuk TERLAPOR II dan TERLAPOR III*) untuk mengikuti tender ulang/baru Proyek TIM Tahap III. ----------

14.83.9. Bahwa berdasarkan Bukti TII-15 dan Bukri TIII-15; Bukti TII-16 dan Bukti TIII-16 = Bukti C78 dan Bukti C78 dan Bukti C79; Bukti TII-17 dan Bukti TIII-17 = Bukti C86; serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Alhabibi Aditya P.N, Saksi Hendra Riatno dan Saksi Githa Maharani, terbukti bahwa: ----------

a. TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah mendaftar sebagai peserta pada tender ulang/baru Proyek TIM Tahap III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Setelah mendaftar sebagai peserta tender (i.c tender ulang/baru) TERLAPOR II dan TERLAPOR III kembali diundang untuk megikuti Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) tender ulang/baru; --------

c. Dalam tender ulang/baru TERLAPOR II dan TERLAPOR III kembali membentuk KSO dengan nama PP-JAKON KSO berdasarkan Perjanjian KSO yang baru; ----------

d. Dokumen Penawaran PP-JAKON KSO pada tender awal/baru berbeda dengan Dokumen Penawaran PP-JAKON KSO pada tender ulang/baru; dan ------

e. Tahapan/proses tender ulang/baru sama dengan tender awal/batal, hal mana dalam tender ulang/baru tahapan/ proses tender diulang/dimulai dari tahapan awal antara lain yaitu: tahap undangan, *Aanwijzing*, pemasukan dokumen, pengumuman hingga penetapan pemenang. ----------

14.83.10. Bahwa berdasarkan Bukti T-19 dan Bukti TIII-19; Bukti TII-20 dan Bukti TIII-20 = Bukti C121, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Tri Wahyu Edi, Saksi Alhabibi Aditya P.N., Saksi Hendra dan Saksi Githa Maharani, terbukti bahwa: ----------

a. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, PP-JAKON KSO dinyatakan lulus dan mendapat skor tertinggi dengan nilai 95,07; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021
Tanggal 02/08/2021

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis no : 005/BAEVT/PKT.25/VIII/2021 tanggal 02/08/2021 tentang hasil evaluasi atas penawaran Administrasi dan teknis untuk Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III

Dengan ini kami sampaikan hasil peserta yang dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan Pembukaan Penawaran Harga Sampul II adalah sebagai berikut :

Data Penyedia Barang/Jasa

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	95.07	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	89.78	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	76.13	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
4.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	74.97	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

Selanjutnya akan dilakukan Pembukaan dan Evaluasi Sampul II terhadap peserta yang dinyatakan lulus.

b. Berdasarkan pengumuman hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, PP-JAKON KSO menempati peringkat 1.----------

Data Penyedia Barang / Jasa

No	Nama Penyedia Barang / Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Penawaran Harga	Harga Koreksi	Keterangan
1	PP – JAKON (KSO)	Lulus	96,13%	Rp415.815.000.000,- (*empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp378.013.636.364,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat I
2	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.	Lulus	92,85%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Rp372.752.000.101,- (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus satu rupiah*) belum termasuk PPN 10%	Peringkat II

14.83.11. Bahwa berdasarkan Bukti TII-21 = TIII-21 dan Bukti TII-22 = Bukti TIII-22, serta dihubungan dengan keterangan Saksi Alhabibi Aditya P.N., Saksi Hendra Riatno dan Saksi Githa Maharani, terbukti bahwa: ----

a. Setelah dilakukan pengumuman hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, kemudian Tim Pengadaan TERLAPOR I mengundang PP-JAKON KSO selaku penawar terbaik Peringkat I untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi harga; ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga, Tim Pengadaan TERLAPOR I mengumumkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender Proyek TIM Tahap III. ----------

14.83.12. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Paramayuda Maulana, Saksi M. Yovie Irawan Kuswa, Saksi Nur Syamsul Rizal, Saksi Andy Faisal, Saksi Yofan Saman A., Saksi M. Taufiqurrachman, Saksi Alhabibi Aditya P.N, Saksi Hendra Riatno dan Saksi Githa Maharani terbukti bahwa: ----------

a. Tidak ada peserta yang terlibat dalam penyusunan dokumen RfP;----------

b. Tidak ada informasi dan/atau dokumen tender yang dibagikan kepada peserta sebelum proses tender dimulai; ----------

c. Tidak ada intervensi dari TERLAPOR I terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh MK; ----------

d. Tidak pernah ada komunikasi-komunikasi baik antara sesama peserta tender, antara peserta tender dengan panitia maupun antara sesama peserta tender dengan panitia untuk mengatur dan memenangkan peserta tender tertentu; --------

Dengan demikian terbukti bahwa (i) keikutsertaan TERLAPOR II dan TERLAPOR III dalam proses tender Proyek TIM Tahap III dan (ii) penetapan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender adalah sah dan berdasarkan hukum. ----------

14.84. Mengenai Pembatalan Tender----------

14.84.1. Bahwa berdasarkan Bukti TII - 11 dan Bukti TIII - 11 = Bukti TI -21 = Bukti C15, C17, C31; Keterangan Saksi Nur Syamsul Rijal, Saksi AJi Hendrawan, Saksi Yofan Saman A., dan dihubungan dengan Keterangan Ahli Riad Horem, Dipl. H.E., dan Ahli Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., terbukti bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pembatalan merupakan hal yang biasa terjadi dalam pelaksanaan tender, biasanya pembatalan terjadi karena anggarannya tidak tersedia atau karena adanya perubahan teknis;----------

b. Pembatalan tender Proyek TIM Tahap III yang didasarkan pada ketentuan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP merupakan kewenangan penuh dari Tim Pengadaan TERLAPOR I; ----------

14.84.2. Bahwa berdasarkan Bukti TI - 41, dihubungkan dengan keterangan Saksi Yofan Saman A, Saksi Wolter Piri, Saksi Taufiqurrachman dan Keterangan TERLAPOR I serta Keterangan Ahli Riad Horem, Dipl., H.E dan Ahli Sabela Gayo, S.H., M.H., PhD., terbukti bahwa: ----------

a. Pembatalan tender dilakukan karena terdapat perbedaan penilaian terhadap penawaran teknis, yang disebabkan karena KAK dan RfP tender awal/batal belum menguraikan definisi yang jelas dan komperhensif mengenai pengalaman perusahaan terutama pada difinisi interior; -------

b. Berdasarkan Laporan Hasil Review Satuan Pengawas Internal PT JAKPRO, terbukti bahwa pembatalan tender awal/batal tersebut telah sesuai dengan ketentuan manual Pengadaan Barang dan Jasa dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa di PT JAKPRO. ----------

Dengan demikian, terbukti bahwa pembatalan tender sudah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa. ----------

14.84.3. Bahwa berdasarkan Bukti TII-12 dan Bukti TIII-12 = Bukti C40, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Fakta Nur Syamsul Rizal, Saksi Fakta Andi Faisal, Saksi Akhabibi Aditya P.N., Saksi Hendra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ritano, dan Saksi Githa Maharani, terbukti bahwa setelah tender Proyek TIM Tahap III dibatalkan, Tim Pengadaan TERLAPOR I kembali mengundang seluruh peserta untuk mengikuti tender ulang/baru (*termasuk TERLAPOR II dan TERLAPOR III*).----------

Dengan demikian setiap peserta tender telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tender ulang/baru. ---

14.84.4. Berdasarkan Bukti C108 dan Bukti C106, serta dihubungan dengan keterangan Saksi Andi Faisal, terbukti bahwa:----------

a. PT Wika Gedung telah mengajukan keberatan kepada Tim Pengadaan TERLAPOR I atas keputusan pembatalan tender Proyek TIM Tahap III. ----------

Terhadap keberatan PT. Wika Gedung tersebut, Tim Pengadaan TERLAPOR I telah menyampaikan tanggapan secara tetulis yang pada intinya menyatakan bahwa keberatan PT Wika Gedung tidak dapat diterima. ----------

b. PT Wika Gedung dapat menerima tanggapan dari Tim Pengadaan TERLAPOR I dan kemudian mendaftar dan mengikuti seluruh proses tender ulang/baru Proyek TIM Tahap III. ----------

Dengan demikian, maka PT Wika Gedung selaku penawar peringkat I pada tender awal/batal tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penawar peringkat I pada tender ulang/baru. ----------

14.85. Mengenai Pekerjaan Proyek TIM Tahap III. ----------

14.85.1. Bahwa berdasarkan Bukti TII-24a s/d Bukti TII-24b; Bukti TII-36 = Bukti TIII - 34, serta dihubungkan dengan keterangan TERLAPOR I, TERLAPOR II dan TERLAPOR III terbukti bahwa Pekerjaan Proyek TIM Tahap III telah diserah terimakan dari PP-JAKON KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada TERLAPOR I i.c *Owner* telah beroperasi/difungsikan untuk umum saat ini sedang dalam masa pemeliharaan pekerjaan. ----------

14.85.2. Bahwa berdasarkan Bukti TII - 32 = TIII - 30; Bukti TII - 33 = TIII - 31; dan Bukti TII - 34 = TIII – 32, serta dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat, terbukti bahwa Pekerjaan *Overhaul Starball* merupakan item Pekerjaan Kurang, akibat adanya kondisi *force majeure* yang menyebabkan PP-JAKON KSO tidak dapat melaksanakan Pekerjaan *Overhaul Starball*, hal mana dapat dibenarkan berdasarkan pendapat hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. ----------

Dengan demikian terbukti bahwa PP-JAKON KSO telah selesai melaksanakan seluruh pekerjaan Proyek TIM Tahap III dengan baik sesuai Kontrak berikut addendum-addendumnya; ----------

14.86. Mengenai Unsur-unsur Persekongkolan Tender ----------

14.86.1. Unsur Pelaku Usaha----------

Bahwa Pelaku Usaha sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.2 Tahun 2010 ("Peraturan KPPU No.2/2010"), adalah: --

"*setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*"

Bahwa dengan demikian, oleh karena TERLAPOR I, TERLAPOR II dan TERLAPOR III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* telah terpenuhi. ---

14.86.2. Unsur Bersekongkol ----------

Bahwa bersekongkol menurut Peraturan KPPU No.2/2010, adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".

Adapun unsur bersekongkol dapat berupa: ----------

a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;*
b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;*
c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
d. *menciptakan persaingan semu;*
e. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*
f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*
g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*

Bahwa tindakan PP-JAKON KSO dalam mengirimkan Surat Permohonan Permintaan Rincian Data kepada Tim Pengadaan TERLAPOR I melalui *email* tanggal 12 Juni 2021, merupakan hak dari peserta tender dan apabila surat-surat yang disampaikan oleh peserta tender diluar mekanisme tender hal tersebut dikualifikasikan sebagai pengaduan dan Tim Pengadaan tidak mempunyai kewajiban untuk menanggapinya; ----------

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Fakta, Bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti bahwa pembatalan tender awal Proyek TIM Tahap III, tidak terkait dengan adanya Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 kepada Panitia Tender, karena faktanya pembatalan tender awal Proyek TIM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahap III didasarkan pada ketentuan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP dan adanya perubahan spesifikasi/desain yang melebihi 10% ;----------

Selain itu dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan juga terbukti bahwa (i) tidak ada komunikasi-komunikasi antara satu peserta dengan peserta lainnya untuk memenangnya salah satu peserta tender (*horizontal*), (ii) tidak ada komunikasi antara peserta dengan panitia/user (*vertikal*) atau (iii) tidak ada komunikasi antara para peserta dengan panitia atau user (*horizontal maupun vertikal*) untuk mengatur atau menetapkan pemenang tender tertentu (*i.c PP-JAKON KSO*). ----------

Dengan demikian unsur bersekongkol dalam bentuk memfasilitasi peserta tender tertentu dan/atau secara langsung atau tidak langsung merupakan kerja sama yang menguntungkan peserta tender tertentu (*i.c PP-JAKON KSO*) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terbukti. -----

14.86.3. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah badan usaha lain yang turut serta dalam proses tender Proyek TIM III Tahap III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum. Sehingga unsur pelaku usaha lain dalam perkara a *quo* telah terpenuhi. ----------

14.86.4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

Bahwa unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam Peraturan KPPU No.2/2010 adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.*

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pembatalan tender awal Proyek TIM Tahap III, tidak terkait dengan adanya Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 kepada Panitia Tender, karena faktanya dalam proses persidangan perkara aquo telah dapat dibuktikan bahwa pembatalan tender awal Proyek TIM Tahap III didasarkan pada ketentuan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP dan adanya perubahan spesifikasi/desain yang melebihi 10%; ----------

Bahwa Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut merupakan surat yang berisikan permintaan/ permohonan untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/penilaian teknis PROYEK TIM TAHAP III dan sama sekali TIDAK berisikan permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan untuk membatalkan Tender Awal. ---------

Bahkan terhadap Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut, TERLAPOR I maupun Tim Pengadaan, TIDAK pernah memberikan respons baik secara lisan maupun tertulis. ----------

Berdasarkan ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP, keputusan pembatalan Tender Awal Proyek TIM Tahap III, merupakan hak TERLAPOR I sebagai pengguna barang dan jasa (Pelaku Usaha) dan calon penyedia jasa *i.c* PP-JAKON KSO (Pelaku Usaha Lain) sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bentuk apa pun terhadap TERLAPOR I dan bahwa pembatalan proses pengadaan dapat dilakukan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan oleh TERLAPOR I. ----------

TERLAPOR II dan TERLAPOR III TIDAK PERNAH melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung, dengan Tim Pengadaan, TERLAPOR I maupun peserta tender (*calon penyedia jasa*) lainnya, dengan tujuan untuk mengatur dan/atau menetapkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender PROYEK TIM TAHAP III. ----

PT. WIKA GEDUNG selaku Penyedia Jasa lainnya telah menggunakan hak sanggah sehubungan dengan penetapan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender PROYEK TIM TAHAP III serta dapat menerima penjelasan pihak *Owner*, sehingga tidak menggunakan upaya SANGGAH BANDING, bahkan sebagai bukti penerimaan tersebut PT WIKA GEDUNG mengikuti proses Tender Baru atas PROYEK TIM TAHAP III.----------

Dengan demikian, terbukti bahwa TERLAPOR II dan TERLAPOR III tidak melakukan tindakan untuk mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang *i.c* PP-JAKON KSO. Oleh karena itu, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender tidak terbukti.----------

14.86.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Peraturan KPPU No. 2/2010 adalah:----------

"*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa TERLAPOR I tidak pernah melakukan komunikasi/interaksi dengan TERLAPOR II dan TERLAPOR III yang bertujuan untuk mengatur pemenang tertentu (i.c. PP-JAKON KSO) dalam tender Proyek TIM Tahap III. ----------

Keputusan TERLAPOR I untuk membatalkan Tender Awal dilakukan berdasarkan ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP, yang pada intinya mengatur bahwa pembatalan Tender Awal/Batal merupakan hak TERLAPOR I sebagai pengguna barang dan jasa dan calon penyedia jasa *i.c* PP-JAKON KSO sudah memahami bahwa dalam ketentuan butir 38.2 dan 38.3 RfP juga diatur tidak adanya hak penyedia jasa untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pembatalan tender tersebut sepanjang dilakukan sebelum penetapan pemenang pengadaan oleh TERLAPOR I.----------

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka *unsur* Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi tidak terbukti.----------

14.87. Berdasarkan uraian Keterangan Saksi-saksi Fakta, Keterangan Ahli dan Persesuaian Bukti-bukti Surat serta Tanggapan TERLAPOR II dan TERLAPOR III di atas, maka terbukti bahwa:-

14.87.1. Keikutsertaan TERLAPOR II dan TERLAPOR III dalam tender Proyek TIM Tahap III dan penetapan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender adalah sah dan berdasarkan hukum; ----------

14.87.2. Surat PP-JAKON KSO No. 002/2021, tidak memiliki berhubungan dan tidak dijadikan dasar/alasan Pembatalan Tender Proyek TIM Tahap III oleh TERLAPOR I; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAB V PERMOHONAN

14.87.3. Pembatalan Tender sudah sesuai dengan ketentuan manual Pengadaan Barang dan Jasa serta SOP Pengadaan Barang dan Jasa di PT JAKPRO; ----------

14.87.4. Setelah pembatalan tender Proyek TIM Tahap III, seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mejadi pemenang pada tender ulang/baru yang diadakan oleh Panitia Tender sehubungan dengan Proyek TIM Tahap III; ----------

14.87.5. Tidak terdapat tindakan persekongkolan baik antara sesama peserta, antara peserta dengan panitia maupun antara sesama peserta dengan panitia dalam bentuk memfasilitasi tindakan peserta tender tertentu untuk menentukan dan/atau memenangkan peserta tender lainnya (i.c PP-JAKON KSO).----------

BAB IV KESIMPULAN

14.88. Berdasarkan uraian-uraian dan tanggapan TERLAPOR II dan TERLAPOR III atas Fakta-fakta, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti-bukti surat yang terungkap dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERLAPOR II dan TERLAPOR III menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: ----------

14.88.1. Bahwa TERLAPOR I selaku Pelaku Usaha dengan TERLAPOR II dan TERLAPOR III *i.c* PP-JAKON KSO selaku Pelaku Usaha Lain tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk memberikan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan PP-JAKON KSO sebagai pemenang tender Proyek TIM Tahap III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.88.2. Bahwa TERLAPOR I, Tim Pengadaan dan PP-JAKON KSO terbukti tidak pernah mengatur dan/atau menentukan pemenang tender Proyek TIM Tahap III;----------

14.88.3. Sebagai peserta tender, PP-JAKON KSO telah mengikuti dan menjalani tahapan dan proses tender Proyek TIM Tahap III sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Tim Pengadaan, sebagaimana tertuang dalam RfP, dan dijalankan secara "*jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha*". Terlebih lagi pada saat ini PP-JAKON KSO telah menyelesaikan pekerjaan Proyek TIM Tahap III hingga mencapai progres 100% dan telah dioperasikan untuk masyarakat umum. ---------

14.88.4. Dengan telah dapat difungsikannya PROYEK TIM TAHAP III untuk kepentingan masyarakat umum, maka Investasi yang dilakukan oleh TERLAPOR I terbukti telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena pada saat ini Taman Ismail Marzuki telah menjadi bangunan multifungsi atau *mixed-use building* yang bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat luas termasuk bagi para seniman tanah air untuk berkarya dan berkreasi. ----------

14.89. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil/tuduhan Tim Investigator KPPU dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar, keliru, mengada-ada dan karenanya telah sangat merugikan reputasi TERLAPOR II dan/atau TERLAPOR III sebagai perusahaan Konstruksi terkemuka yang selalu melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan berpedoman pada *Good Coorporate Governance* (GCG). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.90. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERLAPOR II dan TERLAPOR III mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----------

14.90.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, TIDAK TERBUKTI karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

14.90.2. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, yang diajukan oleh Tim Investigator; dan----------

14.90.3. Menyatakan TERLAPOR II dan TERLAPOR III tidak melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III. ----

Atau

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*). ----------

15. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13/KPPU/Pen/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 17/KPPU-L/2022, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 (*vide* Bukti A147). ------

16. Menimbang Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU/Kep.3/VI/2021 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara tanggal 21 Juni 2023. Perkara *a quo* dalam tahap Musyawarah Majelis Komisi, disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 menjadi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 (*vide* Bukti A157);----------
17. Menimbang bahwa masa jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023 berakhir pada tanggal 27 April 2023. ----------
18. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2023, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 27 April 2023. ----------
19. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. (selanjutnya disebut Terlapor II - Terlapor III (KSO)). ----------
4. Tentang Aspek Formil.----------
5. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait. ----------
6. Tentang Kronologis Tender.----------
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
10. Tentang Diktum dan Penutup.----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas para Terlapor.----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1. Terlapor I.----------

1.1.1. Bahwa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai 1, Lobby Timur, Jalan M.H. Thamrin Boulevard, RT.8/RW.4, Kb. Melati, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 1.061.014.5-051 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Pembangunan Pluit Jaya. Selanjutnya dilakukan perubahan nama menjadi PT Jakarta Propertindo melalui perubahan anggaran dasar yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dituangkan dalam Akta Nomor 89 tanggal 15 Desember 2000 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta. Berdasarkan perubahan anggaran dasar tersebut, Terlapor I ditetapkan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang real estat (pengembang). Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 39.650 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) lembar saham dan PD. Pasar Jaya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham (*vide* Bukti C126). ----------

Tabel 1.
Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 15 Desember 2000

Pemegang Saham	Jumlah Saham		%
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	39.650	saham	99%
PD Pasar Jaya	350	saham	1%

1.1.2. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 05 tanggal 6 April 2021 yang dibuat oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Pusat diketahui terdapat perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0219143 tanggal 7 April 2021 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saudara Daryanto AK. MIS, menjabat sebagai Komisaris Utama, Saudara Dr. Hadi Probowo, M.M., Saudara Ir. Yumada Faizal, M.Sc., dan Saudara Nurmansjah Lubis, S.E., Ak., M.M. masing-masing menjabat sebagai Komisaris, Saudara Dwi Wahyu Daryoto menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara M. Aprindy, Saudara Mohammad Hanief Arie Setianto, Saudara Muhammad Taufiqurrachman, dan Saudari Yuliantina Wangsawiguna masing-masing menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A serta PD. Pasar Jaya sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham seri B dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 13.572.380.230 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh) lembar saham seri B.----------

Tabel 2.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 6 April 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)	Seri Saham
1.	Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	1	A
2.	Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	13.572.380.230	B
3.	PD Pasar Jaya	-	350.000	B
4.	Daryanto AK. MIS	Komisaris Utama	-	-
5.	Dr. Hadi Probowo, M.M.	Komisaris	-	-
6.	Ir. Yumada Faizal, M.Sc.	Komisaris	-	-
7.	Nurmansjah Lubis, S.E., Ak., M.M.	Komisaris	-	-
8.	Dwi Wahyu Daryoto	Direktur Utama	-	-
9.	M. Aprindy	Direktur	-	-
10.	Mohammad Hanief Arie Setianto	Direktur	-	-
11.	Muhammad Taufiqurrachman	Direktur	-	-
12.	Yuliantina Wangsawiguna	Direktur	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh Mustangin, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Timur, diketahui terdapat perubahan Data Perseroan. Perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0447850 tanggal 14 September 2021 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Hamdan Zoelva, S.H., M.H. menjabat sebagai Komisaris Utama, Saudara Ir. Yumada Faizal, M.Sc., Saudara Nurmansjah Lubis, S.E., Ak., M.M., dan Saudara DR. Ir. H. Muhammad Hudori, M.Sc. masing-masing menjabat sebagai Komisaris, Saudara Widi Amanasto menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara M. Aprindy, Saudara Muhammad Taufiqurrachman, Saudari Yuliantina Wangsawiguna, dan Saudara Gunung Kartiko masing-masing menjabat sebagai Direktur. Adapun Pemegang Saham Perseroan masih memiliki komposisi yang sama dengan Akta Nomor 05 tanggal 6 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.2. ----------

Tabel 3.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 13 September 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)	Seri Saham
1.	Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	1	A
2.	Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	13.572.380.230	B
3.	PD Pasar Jaya	-	350.000	B
4.	Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	Komisaris Utama	-	-
5.	Ir. Yumada Faizal, M.Sc.	Komisaris	-	-
6.	Nurmansjah Lubis, S.E., Ak., M.M.	Komisaris	-	-
7.	DR. Ir. H. Muhammad	Komisaris	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Hudori, M.Sc.			
8.	Widi Amanasto	Direktur Utama	-	-
9.	M. Aprindy	Direktur	-	-
10.	Muhammad Taufiqurrachman	Direktur	-	-
11.	Yuliantina Wangsawiguna	Direktur	-	-
12.	Gunung Kartiko	Direktur	-	-

1.1.4. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 04 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, diketahui terdapat perubahan Data Perseroan. Perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0082838 tanggal 3 Desember 2022 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Hamdan Zoelva, S.H., M.H. menjabat sebagai Komisaris Utama, Saudara Dr. Suhajar Diantoro, M. Si., Saudara Dwi Wahyu Daryoto, Saudara Nurmansjah Lubis, S.E., Ak., M.M., dan Saudara Sigit Wijatmoko masing-masing menjabat sebagai Komisaris, Saudara Iwan Takwin menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara Adi Santosa, Saudara Adrian Rusmana, M.B.A., Saudara I Gede Adi Adnyana Toyeadi, S.H., dan Saudara Solihin masing-masing menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A serta PD. Pasar Jaya sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham seri B dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 17.403.380.230 (tujuh belas milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh) lembar saham seri B.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tabel 4.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 2 Desember 2022

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)	Seri Saham
1.	Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	1	A
2.	Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	17.403.380.230	B
3.	PD Pasar Jaya	-	350.000	B
4.	Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	Komisaris Utama	-	-
5.	Dr. Suhajar Diantoro, M. Si.	Komisaris	-	-
6.	Dwi Wahyu Daryoto	Komisaris	-	-
7.	Nurmansjah Lubis, S.E., Ak., M.M.	Komisaris	-	-
8.	Sigit Wijatmoko	Komisaris	-	-
9.	Widi Amanasto	Direktur Utama	-	-
10.	M. Aprindy	Direktur	-	-
11.	Muhammad Taufiqurrachman	Direktur	-	-
12.	Yuliantina Wangsawiguna	Direktur	-	-
13.	Gunung Kartiko	Direktur	-	-

1.1.5. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah melakukan kegiatan tender pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III. -----

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tersebut, Terlapor I menerbitkan Surat Tugas Nomor 118/OP0000/IV/2021/0026 tanggal 27 April 2021 terkait penugasan Tim Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dengan susunan sebagai berikut: ----------

Tabel 5.
Tim Pengadaan Berdasarkan Surat Tugas Nomor 118/OP0000/IV/2021/0026 tanggal 27 April 2021

Ketua Tim	:	1.	Achmad Ismarwan	(Divisi Pengadaan)
Sekretaris	:	2.	Budi Setiawan Nurcahyo	(Divisi Pengadaan)
Anggota	:	3.	Slamet Muhdori	(Divisi MPP)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	4.	Muharam Noor	(Divisi Akuisisi Lahan)
	5.	Irson Rodecorn	(Divisi MPP)
	6.	Surya Nugraha	(Divisi Pengadaan)
	7.	Farhan Ilkarim Hadiputra	(Proyek TIM)
Tim Ahli	1.	Tim MK PT Yodya Karya	
	2.	Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia	

1.1.6. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2021, Terlapor I menerbitkan Surat Tugas Nomor 118/OP0000/VII/2021/0045 untuk penugasan Tim Pelaksanaan Proses Pengadaan Kembali Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Adapun susunan Tim Pengadaan berkaitan dengan tender kedua adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 6.
Tim Pengadaan Berdasarkan Surat Tugas Nomor 118/OP0000/VII/2021/0045 tanggal 7 Juli 2021

Ketua Tim	:	1.	Budi Setiawan Nurcahyo	(Divisi Pengadaan)
Sekretaris	:	2.	Andy Irianto	(Divisi Pengadaan)
Anggota	:	3.	Surya Nugraha	(Divisi Pengadaan)
		4.	Slamet Muhdori	(Divisi MPP)
		5.	Irson Rodecorn	(Divisi MPP)
		6.	Muharam Noor	(Divisi Akuisisi Lahan)
		7.	Sigit Sukatrinenda	(Proyek TIM)
Tim Ahli		1.	Tim MK PT Yodya Karya	
		2.	Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia	

1.1.7. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 113/UT0000/I/2023/0003 tanggal 10

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Januari 2023, Terlapor I memberi kuasa kepada Advokat dari Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FAMS & P Lawyer, yang beralamat di Pakuwon Tower Lt. 21, Unit B&C, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, RT.014/RW.005, Kel. Menteng Dalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 (*vide* Bukti T1.1). ----------

1.2. Terlapor II. ----------

1.2.1. Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. yang beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jalan Letjend. TB. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.001.613.7-051.000 merupakan badan usaha yang semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953 dari Raden Mr. Soewandi Notaris di Jakarta (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2218. ----------

1.2.2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 *Jo.* Akta Perubahan Nomor 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah Nomor 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 14 September 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249/1974 (*vide* Bukti C94). ----------

1.2.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Fathuah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, diketahui terdapat perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-033679 tanggal 28 Mei 2021 dengan susunan direksi dan komisaris sebagai berikut: Saudara Novel Arsyad menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara Agus Purbianto, Saudara Eddy Herman Harun, Saudari Sinurlinda Gustina Manurung, Saudara Raden Mas Anton Satyo Hendriatmo, dan Saudara Yul Ari Pramuraharjo masing-masing menjabat sebagai Direktur, Saudara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea menjabat sebagai Komisaris Utama, Saudara Ernadhi Sudarmanto, Saudara Hedy Rahardian, Saudara Loso Judijanto, dan Saudara Ayodhia Gehak Lakunama Kalake masing-masing menjabat sebagai Komisaris, serta Saudara Noor Rochmad menjabat sebagai Komisaris Independen. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Masyarakat sebanyak 3.037.949.518 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas) lembar saham, Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham, dan 3.161.947.835 (tiga milyar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) lembar saham.----------

Tabel 7.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 28 Mei 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Negara Republik Indonesia	-	1
2.	Negara Republik Indonesia	-	3.161.947.835
3.	Masyarakat	-	3.037.949.518
4.	Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea	Komisaris Utama	-
5.	Ernadhi Sudarmanto	Komisaris	-
6.	Hedy Rahardian	Komisaris	-
7.	Loso Judijanto	Komisaris	-
8.	Ayodhia Gehak Lakunama Kalake	Komisaris	-
9.	Noor Rochmad	Komisaris Independen	-
10.	Novel Arsyad	Direktur Utama	-
11.	Agus Purbianto	Direktur	-
12.	Eddy Herman Harun	Direktur	-
13.	Sinurlinda Gustina Manurung	Direktur	-
14.	Raden Mas Anton Satyo Hendriatmo	Direktur	-
15.	Yul Ari Pramuraharjo	Direktur	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2.4. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 18 tanggal 5 April 2022 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Hendari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, diketahui terdapat perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0003167 tanggal 10 April 2022 dengan susunan direksi dan komisaris sebagai berikut: Saudara Novel Arsyad menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara Agus Purbianto, Saudara Eddy Herman Harun, Saudari Sinurlinda Gustina Manurung, Saudara Raden Mas Anton Satyo Hendriatmo, dan Saudara Yul Ari Pramuraharjo masing-masing menjabat sebagai Direktur, Saudara Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea menjabat sebagai Komisaris Utama, Saudara Ernadhi Sudarmanto, Saudara Hedy Rahardian, Saudara Loso Judijanto, dan Saudara Ayodhia Gehak Lakunama Kalake masing-masing menjabat sebagai Komisaris, serta Saudara Drs. Istiono, S.H. menjabat sebagai Komisaris Independen. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Masyarakat sebanyak 3.037.949.518 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas) lembar saham, Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham dan 3.161.947.835 (tiga milyar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) lembar saham.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 8.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 5 April 2022

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Negara Republik Indonesia	-	1
2.	Negara Republik Indonesia	-	3.161.947.835
3.	Masyarakat	-	3.037.949.518
4.	Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea	Komisaris Utama	-
5.	Ernadhi Sudarmanto	Komisaris	-
6.	Hedy Rahardian	Komisaris	-
7.	Loso Judijanto	Komisaris	-
8.	Ayodhia Gehak Lakunama Kalake	Komisaris	-
9.	Drs. Istiono, S.H.	Komisaris Independen	-
10.	Novel Arsyad	Direktur Utama	-
11.	Agus Purbianto	Direktur	-
12.	Eddy Herman Harun	Direktur	-
13.	Sinurlinda Gustina Manurung	Direktur	-
14.	Raden Mas Anton Satyo Hendriatmo	Direktur	-
15.	Yul Ari Pramuraharjo	Direktur	-

1.2.5. Bahwa ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi jasa konstruksi, realti (pengembang) dan properti, pra-cetak, peralatan, dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. ----------

1.2.6. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Terlapor II - Terlapor III (PP - JAKON KSO) yang kemudian menjadi peserta dan pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III (*vide* Bukti C86, C95, T2.11, T3.9, T3.20). ----------

1.2.7. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/SK/PP/DIR/2023 tanggal 19 Januari 2023, Terlapor II memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Nengah Sujana &

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rekan Law Firm, yang beralamat di ITS Tower Lt.7, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan 12510 (*vide* Bukti T2.2).----------

1.3. Terlapor III. ----------

1.3.1. Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. yang beralamat di Jalan Taman Bintaro, RT.017/RW.008, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.362.643.7-013.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 23 Desember 1982 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan teknik, perdagangan umum, serta mengusahakan perusahaan tanah dan bangunan (*real estate*)(*vide* Bukti C82).----------

1.3.2. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor III telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Terlapor III pada saat pelaksanaan proses tender *a quo* Nomor 75 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, diketahui terdapat perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0426746 tanggal 8 Juli 2021 dengan susunan direksi dan komisaris sebagai berikut: Saudara Umar Ganda menjabat sebagai Presiden Direktur, Saudara Ida Bagus Rajendra dan Saudara Okky Dharmosetio masing-masing menjabat sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Wakil Presiden Direktur, Saudara Zali Yahya menjabat sebagai Direktur, Saudara Trisna Muliadi menjabat sebagai Presiden Komisaris, Saudara Masagoes Ismail Ning menjabat sebagai Komisaris, serta Saudara Kristianto Indrawan dan Saudara Frans Satyaki Sunito masing-masing menjabat sebagai Komisaris Independen. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Masyarakat sebanyak 6.378.932.110 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus sepuluh) lembar saham dan PT Pembangunan Jaya sebanyak 9.929.587.750 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham (*vide* Bukti C83).----------

Tabel 9.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor III berdasarkan Akta Nomor 75 tanggal 22 Juni 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Masyarakat	-	6.378.932.110
2.	PT Pembangunan Jaya	-	9.929.587.750
3.	Trisna Muliadi	Presiden Komisaris	
4.	Masagoes Ismail Ning	Komisaris Independen	-
5.	Kristianto Indrawan	Komisaris Independen	-
6.	Umar Ganda	Presiden Direktur	-
7.	Ida Bagus Rajendra	Wakil Presiden Direktur	-
8.	Okky Dharmosetio	Wakil Presiden Direktur	-
9.	Zali Yahya	Direktur	-

1.3.3. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 89 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, diketahui terdapat perubahan Direksi dan Komisaris serta Pengangkatan Kembali. Perubahan Direksi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisaris serta Pengangkatan Kembali tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-29273 tanggal 5 Juli 2022 dengan susunan direksi dan komisaris sebagai berikut: Saudara Umar Ganda menjabat sebagai Presiden Direktur, Saudara Ida Bagus Rajendra dan Saudara Okky Dharmosetio masing-masing menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, Saudara Hardjanto Agus Priambodo menjabat sebagai Direktur, Saudara Letjen TNI (Purn) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso, S.H. menjabat sebagai Presiden Komisaris, Saudara Masagoes Ismail Ning menjabat sebagai Komisaris, serta Saudara Kristianto Indrawan dan Saudara Frans Satyaki Sunito masing-masing menjabat sebagai Komisaris Independen. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Masyarakat sebanyak 6.378.932.110 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus sepuluh) lembar saham dan PT Pembangunan Jaya sebanyak 9.929.587.750 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham. ----------

Tabel 10.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor III berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 22 Juni 2022

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Masyarakat	-	6.378.932.110
2.	PT Pembangunan Jaya	-	9.929.587.750
3.	Letjen TNI (Purn) Dr. (H.C.) H.Sutiyoso, S.H.	Presiden Komisaris	
4.	Masagoes Ismail Ning	Komisaris Independen	-
5.	Kristianto Indrawan	Komisaris	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
		Independen	
6.	Umar Ganda	Presiden Direktur	-
7.	Ida Bagus Rajendra	Wakil Presiden Direktur	-
8.	Okky Dharmosetio	Wakil Presiden Direktur	-
9.	Hardjanto Agus Priambodo	Direktur	-

1.3.4. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Terlapor II - Terlapor III (PP - JAKON KSO) yang kemudian menjadi peserta dan pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III (*vide* Bukti C86, C95, T2.11, T3.9, T3.20). ----------

1.3.5. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor JKON/BOD2/-/0002-2/02-2003 tanggal 1 Februari 2023, Terlapor III memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Nengah Sujana & Rekan Law Firm, yang beralamat di ITS Tower Lt.7, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan 12510 (*vide* Bukti T3.27). ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------

2.1. Tentang Objek Perkara.----------

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, yaitu:----------

Tabel 11.
Objek Perkara

Nama Pekerjaan	:	Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lokasi Pekerjaan	:	Jalan Cikini Raya Nomor 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
Nilai HPS (Awal)	:	Rp481.997.141.120,- (empat ratus delapan puluh satu miliyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta serätus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan/atau Rp438.179.219.200,- (empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) belum termasuk PPN 10%
Nilai HPS (Tender Ulang)	:	Rp481.997.141.120,- (empat ratus delapan puluh satu miliyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta serätus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan/atau Rp438.179.219.200,- (empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) belum termasuk PPN 10%
Sumber Dana	:	PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Tahun Anggaran 2021

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran.----------

2.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 22 tersebut sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."----------

2.2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud bersekongkol adalah *"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu." ----------

Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa:--------

a. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih.* ----------
b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya.* ----------
c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.* ----------
d. *Menciptakan persaingan semu.* ----------
e. *Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.* ----------
f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.* ---------
g. *Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.* ----------

3. Tentang Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. (selanjutnya disebut Terlapor II - Terlapor III (KSO)).----------

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, Terlapor II dan Terlapor III membentuk kerja sama operasi untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti C86, C95, T2.11): ----------

3.1. Bahwa berdasarkan akta pembentukan (KSO) Terlapor II - Terlapor III (KSO) tersebut disepakati antara lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.1.1. KSO disepakati dibentuk dengan nama PP - JAKON KSO dengan keikutsertaan modal (*sharing*) sebagai berikut: ----------

c. Terlapor II sebesar 60% (*enam puluh persen*).-------

d. Terlapor III sebesar 40% (*empat puluh persen*). -----

Terlepas *sharing* dalam KSO yang ditetapkan di atas, masing - masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan perjanjian KSO termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat - menyurat, dan lain – lain. ----------

3.1.2. Terlapor II merupakan perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan bertindak untuk dan atas nama KSO. Selanjutnya, wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Saudara Andek Prabowo yang kedudukannya sebagai *Senior Vice President - Head of Operation Building Division* Terlapor II (Kuasa KSO). ----------

3.2. Dalam pelaksanaan tender menyatakan dan menyetujui pakta integritas sebagai berikut: ----------

3.2.1. Tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; ----------

3.2.2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ----------

3.2.3. Apabila melanggar hal - hal yang dinyatakan dalam huruf a dan b maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai peraturan perundang-undangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II - Terlapor III (KSO) telah menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki - Tahap III.----------

4. Tentang Aspek Formil. ----------

4.1. **Tentang Perbedaaan Penafsiran dan/atau Penyebutan Istilah terhadap Tender Ulang - Tender Baru.----------**

4.1.1. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyebutkan tender kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 setelah dibatalkannya tender pertama yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 sebagai "*tender ulang*" (*vide* Bukti I2, I4).----------

4.1.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti T1.4, T1.44): ----------

a. Bahwa lelang berdasarkan SK Tim Pengadaan Nomor 18/OP0000/VII/2021/0045 tanggal 07 Juli 2021 bukan merupakan lelang ulang, tetapi merupakan "*lelang baru*". Lelang baru merupakan konsekuensi dari lelang yang dibatalkan, sedangkan lelang ulang merupakan konsekuensi dari lelang gagal. Yang membedakan antara lelang gagal dengan lelang baru adalah pada lelang gagal, KAK dan RFP tetap sama (tidak ada perubahan) dengan KAK dan RFP lelang pertama, sedangkan pada lelang baru, KAK dan RFP berbeda atau setidak-tidaknya terdapat perbedaan dengan KAK dan RFP lelang sebelumnya (*vide* Bukti T1.4, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.44). ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa penggantian Tim Pengadaan dalam lelang baru terkait dengan temuan adanya dugaan persekongkolan antara oknum Manajemen Konstruksi (MK) dan oknum Tim Pengadaan untuk memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. menjadikan Tim Pengadaan tersebut adalah Tim Pengadaan yang baru, hal ini menegaskan kembali bahwa lelang ini merupakan lelang baru, bukan lelang ulang (*vide* Bukti T1.4, T1.8, T1.44). ----------

4.1.3. Bahwa sebelum Majelis Komisi menilai adanya perbedaan penafsiran dan/atau penyebutan terhadap istilah tender ulang - tender baru, Majelis Komisi terlebih dahulu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C13, C110, C111, C120, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T2.7, T2.18): ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Kerangka Acuan Kerja (selanjutnya disebut KAK) pada tender pertama dan tender kedua dapat diuraikan adanya perbedaan sebagai berikut: ------

Tabel 12.
Perbedaan KAK Tender Pertama dan KAK Tender Kedua

No.	Pembeda	KAK Tender Pertama	KAK Tender Kedua	Keterangan
1.	I. Maksud dan Tujuan	Adapun Tujuan dari Pengadaan ini adalah sebagai berikut: 1. Memilih Penyedia Jasa Pelaksana yang mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Desain yang dibuat oleh konsultan yang ditunjuk dan sudah disetujui oleh Pemberi Tugas PT Jakarta Propertindo (Perseroda). 2. Mendapatkan Penyedia Jasa Pelaksana yang mampu dan berkualitas dalam mengerjakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi dan syarat ketentuan yang diberikan. 3. Memilih Penyedia Jasa Pelaksana yang akan bekerja sesuai dengan Jadwal Proyek yang sudah direncanakan.	Adapun Tujuan dari Pengadaan ini adalah sebagai berikut: 1. Memilih Penyedia Jasa yang mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Desain yang dibuat oleh konsultan yang ditunjuk dan sudah disetujui oleh Pemberi Tugas PT Jakarta Propertindo (Perseroda), antara lain pekerjaan interior, *special lighting* Interior, *operating equipment*, *overhaul* Proyektor Teater Bintang dan lain-lain. 2. Mendapatkan Penyedia Jasa yang mampu dan berkualitas dalam mengerjakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi dan syarat ketentuan yang diberikan. 3. Memilih Penyedia Jasa yang akan bekerja sesuai dengan Jadwal Proyek yang sudah direncanakan.	Dijelaskan lebih detail mengenai pekerjaannya yaitu pekerjaan interior, *special lighting interior, operating equipment*, overhaul proyektor teater bintang dan lain-lain
2.	II. Sasaran	II. SASARAN Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Penyedia Jasa Pelaksana Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dengan sasaran tepat waktu, biaya dan sesuai dengan perencanaan serta syarat ketentuan yang diberikan.	II. SASARAN Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Penyedia Jasa Pelaksana Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, *n.aliputi* pekerjaan interior, *special lighting* Interior, *operating equipment, overhaul* Proyektor Teater Bintang dan lain-lain, dengan sasaran tepat waktu, biaya dan sesuai dengan perencanaan serta syarat ketentuan yang diberikan.	Dijelaskan lebih detail mengenai pekerjaannya yaitu pekerjaan *interior, special lighting interior, operating equipment*, *overhaul* proyektor teater bintang dan lain-lain
3.	VI. Lingkup Pekerjaan dan Kegiatan pada angka 1 hurf a dan b	VI. LINGKUP PEKERJAAN DAN KEGIATAN 1. Lingkup Pekerjaan: a) Melakukan pekerjaan interior, *Special Lighting* Interior, *Operating Equipment* dan lain-lain; b) Melaksanakan pekerjaan interior *Special Lighting* Interior *Operating Equipment* dan lain-lain Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dengan rincian sebagai berikut :	I. Lingkup Pekerjaan: a) Melakukan pekerjaan interior, *special lighting* interior, *operating equipment, overhaul* Proyektor Teater Bintang dan lain-lain; b) Melaksanakan pekerjaan interior *special lighting* interior *operating equipment, overhaul* Proyektor Teater Bintang dan lain-lain Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dengan rincian sebagai berikut:	Ditambah pekerjaan overhaul proyektor teater bintang
4.	VI. Lingkup Pekerjaan dan Kegiatan pada angka 1 huruf b	• Bangunan Renovasi *(Upgrading)* Planetarium dan Bangunan melekat Planetarium terdiri dari Lobby Drop off, Lobby Planetarium, Museum Planetarium, Teater Bintang, Ruang Pameran Planetarium, Auditorium Planetarium, Galeri Cipta, Museum Koleksi TIM, Pusat Latihan Seni mulai dari pekerjaan interior, *Special Lighting* Interior, *Operating Equipment* dan lain-lain serta beberapa ruang lainnya yang diatur dalam kategori Desain *Guideline* dilakukan secara rancang bangun terkecuali untuk area yang disewakan.	• Bangunan Renovasi *(Upgrading)* Planetarium dan Bangunan melekat Planetarium terdiri dari Lobby Drop off, Lobby Planetarium, Museum Planetarium, Teater Bintang, Ruang Pameran Planetarium, Auditorium Planetarium, Galeri Cipta, Museum Koleksi TIM, Pusat Latihan Seni mulai dari pekerjaan interior, *special lighting* interior, *operating equipment, overhaul* Proyektor Teater Bintang dan lain-lain serta beberapa ruang lainnya yang diatur dalam kategori Desain *Guideline* dilakukan secara rancang bangun terkecuali untuk area yang disewakan.	Ditambah pekerjaan *overhaul* proyektor teater bintang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.	VI. Lingkup Pekerjaan dan Kegiatan pada angka 1 huruf B	**B. Elektrikal** 1) Pekerjaan Elektrikal: • Pekerjaan Sistem Elektrikal Arus Kuat Dalam Gedung dan Luar Gedung; • Pekerjaan Sistem Elektrikal Arus Lemah Dalam Gedung dan Luar Gedung. 2) *Special Lighting*	**B. Elektrikal dan Elektronik** 1) Pekerjaan Elektrikal: • Pekerjaan Sistem Elektrikal Dalam Gedung dan Luar Gedung; • Pekerjaan Sistem Elektronik Dalam Gedung dan Luar	- Terdapat perubahan judul pada poin B, dari elektrikal menjadi elektrikal dan elektronik - Angka 2) tentang special lighting dihapus
6.	VI. Lingkup Pekerjaan dan Kegiatan pada angka 1 huruf D		**D. *Overhaul* Proyektor Teater Bintang**	Ditambah mengenai poin *overhaul* proyektor teater bintang yang sebelumnya tidak ada.
7.	3. Tanggungjawab Penyedia Jasa huruf a. Umum		ii. Membuat perencanaan untuk desain ruangan "*under guideline*" yang disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan diketahui Pemberi Tugas PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk pelaksanaannya;	Poin ii ini sebelumnya tidak ada di KAK sebelumnya.
8.	Tenaga Ahli Pelaksanaan		3 SITE MANAGER 1 (satu) orang S1 Teknik Arsitektur / Interior sebagai Deputi Project Manager / Site Manager, minimal pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Site Manager pembangunan bangunan sejenis dengan minimal pengalaman 4 (empat) Gedung dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dan memiliki SKA Ahli Madya Arsitektur / Interior.	Ada tambahan *site manager*.
9.	IX. Masukan		2. Penyedia Jasa harus bermitra dengan penyedia jasa spesialis sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan.	Ditambahkan klausul penyedia jasa harus bermitra dengan penyedia jasa spesialis
10.	X. Keluaran		**2. Tahap Perencanaan Teknis DED untuk desain "*under guideline*"** a. Pengembangan Rancangan: • Gambar Pengembangan Rancangan (Arsitektur, Struktur, Mekanikal dan Elektrikal, Tata Lingkungan/Lansekap dan Interior); • Uraian Rencana dan Perhitungan-Perhitungan yang Diperlukan; • Garis Besar Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS); • Prakiraan Rencana Anggaran Biaya. b. Rancangan Gambar Rancangan Detail/Detail Engineering Design (DED): • Gambar Rancangan Detail/DED (Arsitektur, Struktur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing dan Lansekap); • Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); • Rencana Anggaran Biaya (RAB); • SOP maintenance bangunan gedung dan infrastruktur kawasan; • Gambar 3D render V ray kualitas HD masing masing bangunan dan keseluruhan.	Ada tambahan mengenai tahap perencanaan teknis DED untuk desain under guideline
11.	XIII. Ketentuan Pekerjaan Teknis		c. Penyedia jasa wajib membuat desain perencanaan "*under guideline*" dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan diketahui Pemberi Tugas PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk pelaksanaannya	Terdapat penambahan metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, dokumen *Request for Proposal* (selanjutnya disebut RfP) pada tender pertama dan tender kedua dapat diuraikan adanya perbedaan sebagai berikut: ----------

Tabel 13.
Perbedaan RfP Tender Pertama dan Tender Kedua

No.	Pembeda	RfP Tender Pertama	RfP Tender Kedua	Keterangan
1.	Pekerjaan Jasa Spasial	2.9 **Pekerjaan Jasa Spesialis** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Interior, *Special Lighting Interior, Operating Equipment* dan lain-lain;	2.9 **Pekerjaan Jasa Spesialis** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Interior, Akustik, *Special Lighting Interior, Operating Equipment, Overhaul Proyektor Teater Bintang* dan lain-lain; - Pekerjaan Interior : Perencanaan dan pelaksanaan khusus finishing elemen ruang, elemen tata cahaya, furniture, elemen estetis untuk kenyamanan ruang - Pekerjaan akustik : pekerjaan yang berkaitan dengan ragam bunyi yang dihasilkan dalam suatu ruang. Akustik ruang meliputi, kebisingan, getaran dan bahan peredam suara. - *Special Lighting*: Pencahayaan khusus yang digunakan untuk aktifitas visualisasi, display, estetika, karya seni, tata panggung - *Operating Equipment:* Peralatan – peralatan yang menunjang fungsi masing-masing ruang yang disyaratkan - *Overhaul dan peningkatan (upgrading) (dilakukan di Jena, Germany):* • *Upgrading LED untuk stars, milky way deep sky objects.* • *Perubahan dan upgrading motor controller.* • *Pengadaan 1 (satu) full set new slides.* • *Upgrading sistim control (hardware dan*	Di RfP baru ada tambahan pekerjaan akustik dan overhaul proyektor serta penjelasan lebih detail mengenai pekerjaan interior, pekerjaan akustik special lighting, operating equipment serta overhaul dan peningkatan sementara di RfP tender batal tidak ada.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			software). • *Pengadaan untuk kabel-kabel dan konektor-konektor.* • *Pengadaan set baru untuk komponen wear dan tear untuk starball.* • *Pembongkaran, pembersihan, pemasangan kembali, perbaikan yang diperlukan dan penyesuaian-penyesuain.* • *Pengetesan fungsional.* • *Pemasangan unit di Jakarta dan pelatihan*	
2.	Kemitraan/KSO	2.10 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional, yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.	2.10 **Kemitraan** adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian tertulis. 2.11 **Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.	Pengertian mengenai kemitraan dan KSO dipisah dan dibedakan pada RfP tender baru.
3.	Dokumen Penawaran pada bagian Dokumen Teknis	b. **Dokumen Teknis** Terdiri dari: a) Data Pengalaman Perusahaan, terdiri atas: • Daftar pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, terutama untuk Pekerjaan interior dan peralatan; • Referensi dari pengguna jasa; • Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). b) Metode Pelaksanaan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Interior dan Peralatan c) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan d) Jenis, Kapasitas, Komposisi, Dan Jumlah Peralatan Utama; e) Daftar Personil inti f) Organisasi Manajemen Pelaksanaan; g) Site Manajemen di area Taman Ismail Marzuki Tahap III h) Daftar Kontraktor Spesialis i) Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan nominasi sub kontraktor; j) Konsep Penanganan Dampak Lingkungan	b. **Dokumen Teknis** Terdiri dari: a) Data Pengalaman Perusahaan, terdiri atas: • Daftar pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi untuk Pekerjaan interior dan peralatan; • Referensi dari pengguna jasa; • Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). b) Metode Pelaksanaan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Interior dan Peralatan c) Proposal rancangan area under "Guidelines" d) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan e) Jenis, Kapasitas, Komposisi, Dan Jumlah Peralatan Utama; f) Daftar Personil inti g) Organisasi Manajemen Pelaksanaan; h) Site Manajemen di area Taman Ismail Marzuki Tahap III i) Daftar Kontraktor Spesialis j) Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan nominasi sub kontraktor; k) Konsep Penanganan Dampak Lingkungan dan Sosial l) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (RK3L); dan rencana pengendalian mutu	Ada tambahan mengenai: - proposal rancangan area under "Guidelines"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		dan Sosial k) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (RK3L); dan rencana pengendalian mutu l) Spesifikasi Teknis, Daftar Barang dan Vendor/Suplier. m) Rencana penerapan *Building Information Modelling* (BIM)	dan Sosial l) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (RK3L); dan rencana pengendalian mutu m) Spesifikasi Teknis, Daftar Barang dan Vendor/Suplier. n) Rencana penerapan *Building Information Modelling* (BIM)	
4.	32. Klarifikasi dokumen Teknis 33. Pengumuman Peringkat Teknis	32.1 Tim Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Adminitrasi, Teknis, dan Harga paling sedikit memuat: • Nama seluruh peserta; • Hasil evaluasi adminitrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; • Hasil evaluasi biaya setelah koreksi aritmatika; • Hasil evaluasi kualifikasi; • Peringkat hasil evaluasi diurutkan mulai nilai tertinggi atas kombinasi nilai teknis dan biaya; 32.2 Tim Pengadaan mengumumkan hasil evaluasi file I (satu) melalui notifikasi sistem aplikasi pengadaan e-procurement PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Untuk selanjutnya Tim Pengadaan melakukan pembukaan file II (dua) hanya untuk peserta yalulus evaluasi file I (satu) 32.3 Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis secara otomatis tidak dapat dibuka.	32.1 Klarifikasi dokumen teknis dilakukan untuk: • Untuk Meyakinkan Tim Pengadaan menentukan bobot nilai teknis dari dokumen yang telah disampaikan oleh calon penyedia jasa; 32.2 Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi terutama adalah : • Pengalaman yang telah dikerjakan; - Kesesuaian lingkup pekerjaan; - Keterkaitan lingkup pekerjaan; - Pengalaman sesuai KD yang disyaratkan; • Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja • Kualifikasi tenaga ahli • Jadwal Pelaksanaan pekerjaan • Penilaian terhadap proposal desain area under guidelines • Spesifikasi Teknis, Daftar Barang Dan Material Yang Digunakan • Peralatan kerja yang akan digunakan	Ada penambahan mengenai poin Klarifikasi Teknis yang sebelumnya tidak ada di tender batal. Adapun penambahan tersebut meliputi pengertian dan tujuan serta aspek-aspek yang perlu diklarifikasi.

			33.1 Tim Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Adminitrasi, Teknis, dan Harga paling sedikit memuat: • Nama seluruh peserta; • Hasil evaluasi adminitrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; • Hasil evaluasi biaya setelah koreksi aritmatika; • Hasil evaluasi kualifikasi; • Peringkat hasil evaluasi diurutkan mulai nilai tertinggi atas kombinasi nilai teknis dan biaya; 33.2 Tim Pengadaan mengumumkan hasil evaluasi file I (satu) melalui notifikasi sistem aplikasi pengadaan e-procurement PT Jakarta Propertindo (Perseroda)urement. Untuk selanjutnya Tim Pengadaan melakukan pembukaan file II (dua) hanya untuk peserta yang lulus evaluasi file I (satu) 33.3 Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis secara otomatis tidak dapat dibuka.	
5.	Tabel Nomor 11. Evaluasi Teknis 2. metode pelaksanaan 20% poin b	- Metode kerja setiap pekerjaan utama termasuk pengendalian mutunya harus diuraikan Sistematis (tersusun teratur) sesuai peruntukan pekerjaannya maupun penggunaan alatnya harus tepat fungsi dan memenuhi persyaratan teknis serta secara substantif menggambarkan	- Metode kerja setiap pekerjaan termasuk pengendalian mutunya harus diuraikan Sistematis (tersusun teratur) sesuai peruntukan pekerjaannya maupun penggunaan. Meliputi	Ada penambahan mengenai penjelasan pekerjaan termasuk pengendalian mutu yang harus tersusun teratur meliputi pekerjaan finishing: Lantai, Dinding, *Plafond*, *Special Lighting*, *Furniture* Terdapat penambahan mengenai alat yang harus tepat fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		- Metode kerja pekerjaan penunjang/sementara harus diuraikan Sistematis (tersusun teratur) dan memenuhi sasaran yang ingin dicapai untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan utama (apabila dipersyaratkan).	pekerjaan finishing: Lantai, Dinding, Plafond, Special Lighting, Furniture. - Alatnya harus tepat fungsi dan memenuhi persyaratan teknis serta secara substantif menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dari awal sampai akhir.	
6.	Tabel Nomor 11. Evaluasi Teknis 2. metode pelaksanaan 20% poin d	d. Kesesuaian dengan kebutuhan dan persyaratan teknis, uraiannya harus mencakup kondisi di lapangan dan pemecahan penyelesaian masalahnya yang meliputi: - Pengaturan dan metode dari usulan penawar terhadap pelaksanaan pekerjaan terintegrasi yang meliputi pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. - Pengaturan dalam hal mengelola koordinasi penggunaan akses lapangan. - Tanggapan terhadap kondisi sumber-sumber material dan keterbatasan yang ada. - Tanggapan terhadap *traffic management* maupun logistik. - Tanggapan terhadap pengaturan yang berhubungan dengan pengaturan rencana serah terima, penyelesaian as-built drawing, persiapan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan, dan lain- lain.	d. Kesesuaian dengan kebutuhan dan persyaratan teknis, uraiannya harus mencakup kondisi di lapangan dan pemecahan penyelesaian masalahnya yang meliputi: - Pengaturan dan metode dari usulan penawar terhadap pelaksanaan pekerjaan terintegrasi yang meliputi pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. - Pengaturan dalam hal mengelola koordinasi penggunaan akses lapangan. - Membuat tahapan atau flowchart dan management workshop/ fabrikasi dari bahan baku sampai pengiriman – install dilapangan. - Tanggapan terhadap pengaturan yang berhubungan dengan pengaturan rencana serah terima, penyelesaian as-built drawing, persiapan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan, dan lain- lain.	-Tanggapan terhadap kondisi sumber material dan keterbatasan yang ada dihapus. -Tanggapan terhadap *traffic management* maupun *logistic* dihapus. -Ada penambahan mengenai membuat tahapan atau *flowchart* dan *management workshop/ fabrikasi*
7.	Tabel Nomor 11. Evaluasi Teknis	f. Ambang batas untuk penilaian Metode Pelaksanaan adalah 70 (tujuh puluh).		Huruf f dihapus.

	2. metode pelaksanaan 20% poin f			
8.	Tabel Nomor 11 Evaluasi Teknis		3. **Penilaian terhadap proposal desain 10%** Menyampaikan pengembangan konsep Interior desain area under guidelines - Interior khusus finishing dinding, plafon, lantai - Akustik dan tata suara - Spesial Lighting/ dekoratif lighting - Tata panggung - Eleman Estetis - Furniture	Ada penambahan mengenai penilaian terhadap proposal desain 10%.
9.	Tabel Nomor 11 Evaluasi Teknis mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	**3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan 10%** - Jangka waktu pelaksanaan harus dibuat dengan persyaratan sebagai berikut: a. waktu pelaksanaan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. b. jadwal dibuat dalam bentuk Barchart plus Curve S dapat dilengkapi dengan network planning, dan uraian jenis pekerjaannya harus sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan.	4. **Jadwal pelaksanaan pekerjaan 5%** - Jangka waktu pelaksanaan harus dibuat dengan persyaratan sebagai berikut: a. waktu pelaksanaan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. b. jadwal dibuat dalam bentuk Barchart dan Curve S dapat dilengkapi dengan network planning, dan uraian jenis pekerjaannya harus sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan.	Bobotnya berkurang dari 10% menjadi 5%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.	Tabel Nomor 11 Evaluasi Teknis mengenai Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material	**5. Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material yang digunakan : 20%** a. Menyampaikan daftar spesifikasi material yang digunakan dilampirkan dengan surat dukungan supplier b. Tidak dilampirkan surat dukungan material dinyatakan tidak dinilai. c. Ada surat dukungan namun spesifikasi material/merk material yang ditawarkan tidak sesuai dinyatakan tidak dinilai. d. Ambang batas untuk penilaian Barang dan Material adalah 70 (tujuh puluh).	6. Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material yang digunakan : 20% a. Menyampaikan daftar spesifikasi material yang digunakan dilampirkan dengan surat dukungan supplier. b. Tidak dilampirkan surat dukungan material dinyatakan tidak dinilai. c. Ada surat dukungan namun spesifikasi material/merk material yang ditawarkan tidak sesuai dinyatakan tidak dinilai.	Mengenai ambang batas untuk penilaian barang dan material adalah 70 dihapus.
11.	Tabel Nomor 11 Evaluasi Teknis mengenai Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material	**6. Daftar Spesifikasi Teknis Alat, Workshop dan Gudang yang digunakan : 20%** a. Menyampaikan daftar spesifikasi peralatan yang digunakan dilampirkan dengan surat dukungan supplier. b. Tidak dilampirkan surat dukungan peralatan dinyatakan tidak dinilai. c. Ada surat dukungan namun spesifikasi peralatan yang ditawarkan tidak sesuai tidak dinilai. d. Menyampaikan luas workshop dan Gudang dengan melampirkan layout dan status kepemilikannya. e. Apabila diperlukan akan dilakukan peninjauan/kunjungan Workshop dan Gudang. f. Ambang batas untuk penilaian Alat, Workshop dan Gudang adalah 70 (tujuh puluh).	7. Daftar Spesifikasi Teknis Alat, Workshop dan Gudang yang digunakan : 15% a. Menyampaikan daftar spesifikasi peralatan yang digunakan dilampirkan dengan surat dukungan supplier. b. Tidak dilampirkan surat dukungan peralatan dinyatakan tidak dinilai. c. Ada surat dukungan namun spesifikasi peralatan yang ditawarkan tidak sesuai tidak dinilai. d. Menyampaikan luas workshop dan Gudang dengan melampirkan layout dan status kepemilikannya. e. Apabila diperlukan akan dilakukan peninjauan/kunjungan Workshop dan Gudang.	- Bobot turun dari 20% menjadi 15%. - Huruf mengenai ambang batas 70 dihapus.

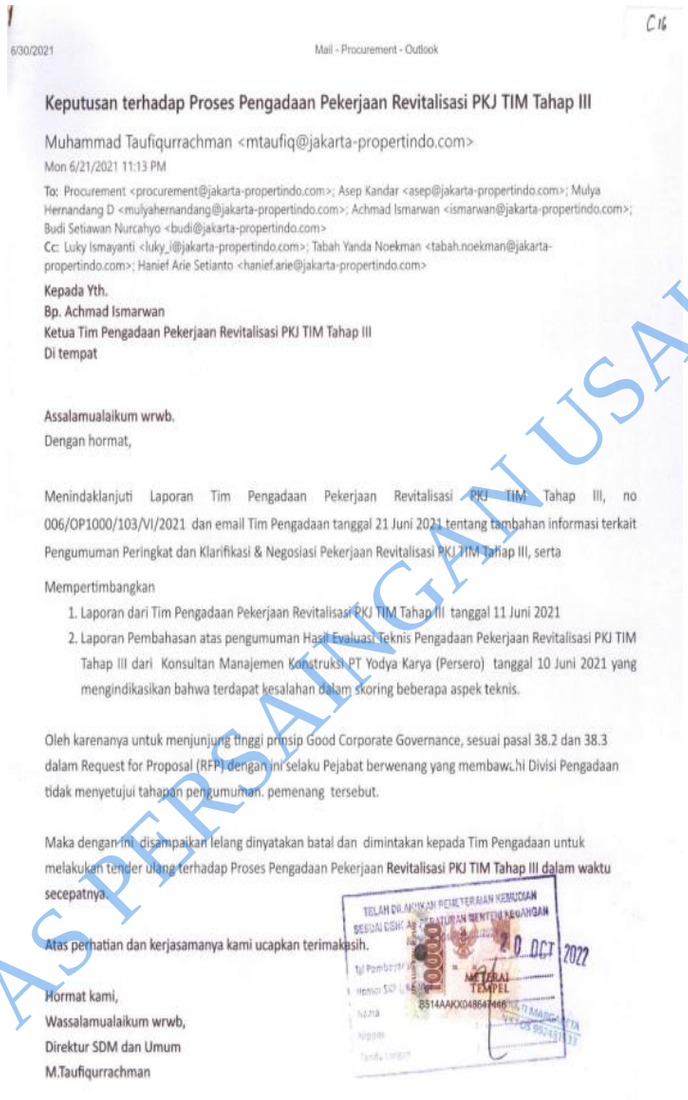
12.	Tabel Nomor 11 Evaluasi Teknis huruf D mengenai Ketentuan Evaluasi Teknis	**D.** Evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan : • Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis dan Presentasi Teknis. • Ambang batas nilai teknis adalah 80 (delapan puluh).	D. Evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan : • Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis dan Presentasi Teknis. • Ambang batas nilai teknis adalah 85 (delapan puluh lima).	Ambang batas nilai teknis naik dari 80 menjadi 85.

c. Bahwa terdapat alat bukti dokumen mengenai pembatalan tender yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai berikut (*vide* Bukti C15, C16, C17): --------

1) Tampilan *Screenshoot Email* Keputusan Direktur SDM dan Umum terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III (Tender Batal) kepada Ketua Tim Pengadaan sebagai berikut: ----------

Gambar 1.
Tampilan *Screenshoot Email* Keputusan Direktur SDM dan Umum terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III (Tender Batal)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



C16

6/30/2021 Mail - Procurement - Outlook

Keputusan terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III

Muhammad Taufiqurrachman <mtaufiq@jakarta-propertindo.com>
Mon 6/21/2021 11:13 PM

To: Procurement <procurement@jakarta-propertindo.com>; Asep Kandar <asep@jakarta-propertindo.com>; Mulya Hernandang D <mulyahernandang@jakarta-propertindo.com>; Achmad Ismarwan <ismarwan@jakarta-propertindo.com>; Budi Setiawan Nurcahyo <budi@jakarta-propertindo.com>
Cc: Luky Ismayanti <luky_i@jakarta-propertindo.com>; Tabah Yanda Noekman <tabah.noekman@jakarta-propertindo.com>; Hanief Arie Setianto <hanief.arie@jakarta-propertindo.com>

Kepada Yth.
Bp. Achmad Ismarwan
Ketua Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III
Di tempat

Assalamualaikum wrwb.
Dengan hormat,

Menindaklanjuti Laporan Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III, no 006/OP1000/103/VI/2021 dan email Tim Pengadaan tanggal 21 Juni 2021 tentang tambahan informasi terkait Pengumuman Peringkat dan Klarifikasi & Negosiasi Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III, serta

Mempertimbangkan

1. Laporan dari Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III tanggal 11 Juni 2021
2. Laporan Pembahasan atas pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dari Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero) tanggal 10 Juni 2021 yang mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan dalam skoring beberapa aspek teknis.

Oleh karenanya untuk menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance, sesuai pasal 38.2 dan 38.3 dalam Request for Proposal (RFP) dengan ini selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan tidak menyetujui tahapan pengumuman pemenang tersebut.

Maka dengan ini disampaikan lelang dinyatakan batal dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

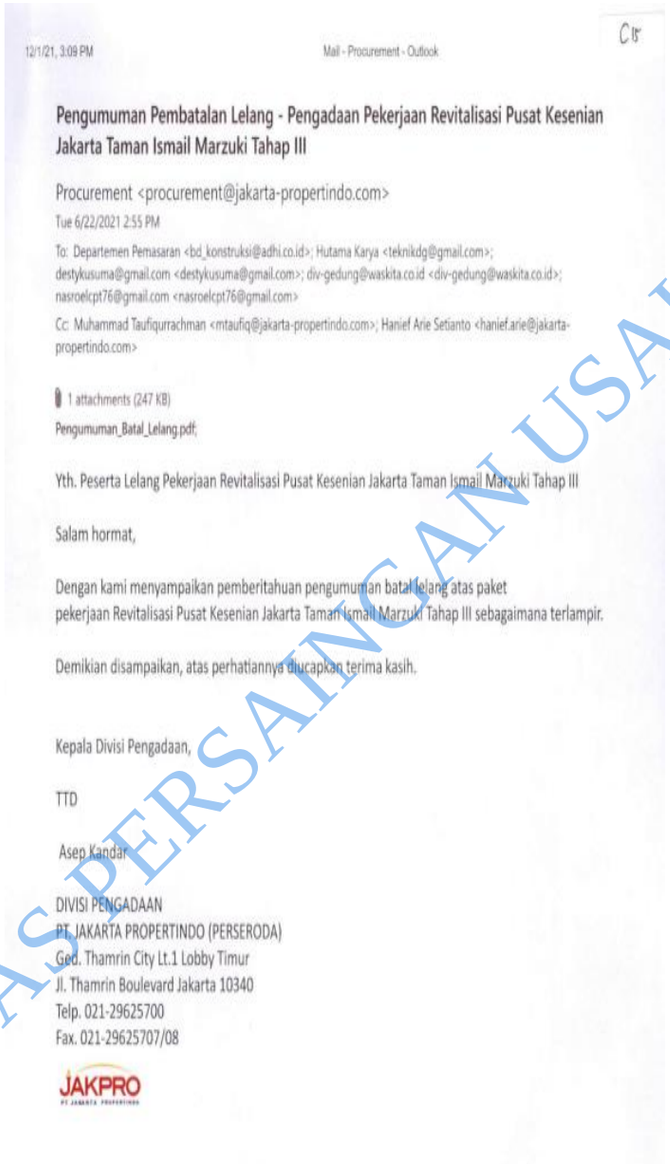
Hormat kami,
Wassalamualaikum wrwb,
Direktur SDM dan Umum
M.Taufiqurrachman

TELAH DILAKUKAN PENGETERAIAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
10000
20 OCT 2022
METERAI TEMPEL
B514AAKX048647446

2) Tampilan *Screenshoot Email* Pengumuman Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM Tahap III (Tender Batal) dari Kepala Divisi Pengadaan Terlapor I kepada Peserta Tender sebagai berikut: ----------

Gambar 2.
Tampilan *Screenshoot Email* Pengumuman Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM Tahap III (Tender Batal) dari Kepala Divisi Pengadaan Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



12/1/21, 3:09 PM Mail - Procurement - Outlook

Pengumuman Pembatalan Lelang - Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III

Procurement <procurement@jakarta-propertindo.com>
Tue 6/22/2021 2:55 PM

To: Departemen Pemasaran <bd_konstruksi@adhi.co.id>; Hutama Karya <teknikdg@gmail.com>; destykusuma@gmail.com <destykusuma@gmail.com>; div-gedung@waskita.co.id <div-gedung@waskita.co.id>; nasroelcpt76@gmail.com <nasroelcpt76@gmail.com>

Cc: Muhammad Taufiqurrachman <mtaufiq@jakarta-propertindo.com>; Hanief Arie Setianto <hanief.arie@jakarta-propertindo.com>

1 attachments (247 KB)
Pengumuman_Batal_Lelang.pdf;

Yth. Peserta Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III

Salam hormat,

Dengan kami menyampaikan pemberitahuan pengumuman batal lelang atas paket pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Divisi Pengadaan,

TTD

Asep Kandar

DIVISI PENGADAAN
PT. JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
Ged. Thamrin City Lt.1 Lobby Timur
Jl. Thamrin Boulevard Jakarta 10340
Telp. 021-29625700
Fax. 021-29625707/08

JAKPRO

3) Pengumuman Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM Tahap III (Tender Batal) sebagai berikut: ----------

Gambar 3.
Pengumuman Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM Tahap III (Tender Batal)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PENGUMUMAN PEMBATALAN LELANG

PENGADAAN PEKERJAAN REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III.
Nomor : 013/PENG-PKT.18/VI/2021
Tanggal 22 Juni 2021

Berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pada pasal 38.2 dan 38.3 dalam Request for Proposal disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal.

Demikian agar pengumuman ini diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2021
Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi
Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki – Tahap III
Ketua,

Achmad Ismarwan

d. Bahwa Majelis Komisi turut mempertimbangkan pendapat Saudara Ir. Riad Horem, Dipl., H.E. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Terlapor II dalam keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B20): ----------

1) Bahwa terdapat kesempatan untuk membatalkan atau tidak melanjutkan proses tender yang disebabkan adanya perubahan-perubahan dalam dokumen tender antara lain adanya perubahan desain, spesifikasi, atau aturan-aturan yang seharusnya masuk dalam dokumen tersebut. ----------

2) Bahwa ketika ditemukan ada dokumen yang tidak sama atau terdapat kesalahan dokumen maka sudah dipastikan dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender ulang. Jadi sepanjang dokumennya dilakukan perubahan, tidak lagi evaluasi ulang, tetapi dilangsungkan pembatalan tender sebelumnya dan kemudian dilakukan tender baru. Apakah itu disebut tender ulang? Ya, karena judulnya sama. Sepanjang judulnya sama maka tender tersebut adalah tender ulang.----------

3) Bahwa apabila evaluasinya salah, keliru, maka yang dilakukan adalah evaluasi ulang. Jika dokumennya yang salah maka dilakukan pembatalan dan tender ulang. -----

4) Bahwa kapan dilakukan tender ulang? Kalau ditemukan temuan-temuan tadi dan kemudian ada dokumen yang harus dilakukan penyusunan kembali maka karena dokumen baru dan ada temuan baru maka semuanya harus dilebur, ketika dilebur maka dilakukan tender ulang. ----------

5) Bahwa kalau memang tender ulang silakan disebutkan tender ulang tidak ada masalah. Tetapi yang disebut adalah akibat gagalnya proses itu dibatalkan atau tidak dilanjutkan itu harus dilakukan ulang. Ulang itu atau apakah itu istilahnya mau baru atau bukan baru, itu terserah yang memahaminya. Namun akibat dari suatu proses sebelumnya itu saja yang perlu diketahui. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan apakah namanya baru atau ulang, tetapi pemahaman saya, dokumen yang berubah, kalau dokumennya berubah maka silakan apakah itu mau ulang atau baru. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa Majelis Komisi turut mempertimbangkan pendapat Saudara Sabela Gayo, Ph.D., S.H., M.H. selaku Ahli Hukum di Bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Terlapor II dalam keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B23): ----------

1) Bahwa pembatalan seleksi atau tender gagal ini sebenarnya bisa terjadi dan itu memang diatur di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. ----------

2) Bahwa biasanya yang belum memahami ini secara mendalam, gagal dengan batal dalam arti pengadaan barang dan jasa ini bisa saja dianggap sama. Tender batal itu sebenarnya tender gagal. ----------

3) Bahwa pada saat ada kesalahan di dalam dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau negosiasi teknis atau negosiasi harga untuk seleksi konsultan tidak tercapai kesepakatan dimana tidak ada pemenang maka Pokja bisa menyatakan seleksi gagal kemudian dibatalkan oleh Pokja dan peserta diminta untuk mengirimkan penawaran ulang. ----------

4) Bahwa tender ulang itu sebenarnya tender baru. ----------

f. Bahwa Majelis Komisi turut mempertimbangkan pendapat Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., KN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Investigator dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B25): ----------

1) Bahwa kalau tender gagal itu pesertanya kurang dari 3, kemudian setelah masuk tidak ada yang lulus. Tetapi kalau dibatalkan itu contohnya kalau terjadi KKN, ditemukan pelanggaran prosedur, dan indikasi persekongkolan. ----------
2) Bahwa tender baru kalau ada perubahan lingkup pekerjaan. ----------
3) Bahwa peserta yang menawar harus diberi tahu alasannya tender dibatalkan karena apa sehingga dilakukan tender ulang. ----------
4) Bahwa sebenarnya istilah di Perpres itu memang tender gagal tetapi tindak lanjut tender gagal itu kalau di luar KKN di luar pelanggaran prosedur itu bisa evaluasi ulang, jadi bukan dimulai dari awal. Artinya terjadi kesalahan dalam evaluasi, itu berarti evaluasi ulang. Yang dimaksudkan harus diulang dari awal itu tadi yang dibatalkan karena terjadi KKN, dimana kalau terlibat KKN itu pihaknya diberikan sanksi dahulu dari Pokja diganti, PPK diganti dan penyedia jasanya juga di-*blacklist* tidak boleh ikut paket itu. Kemudian diubah skenario pemaketannya yang berarti lingkupnya berubah dan menjadi tender baru. Tetapi semuanya itu sebenarnya istilahnya tender batal. ----------

4.1.4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III yang dananya bersumber dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Tahun Anggaran 2021. ----
Adapun menurut pendapat Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., KN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Investigator, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya menggunakan anggaran APBN atau APBD harus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang sebelumnya tahun 2010-2018 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Apabila anggarannya murni dari BUMN, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasanya berdasarkan Peraturan Pemerintah BUMN yang diatur oleh Surat Keputusan Direksi BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN sedangkan untuk BUMD diatur oleh Kepala Daerah yang kemudian Kepala-Kepala Daerah boleh mendelegasikan kepada direksi BUMD masing-masing. ----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *vide* Bukti C15, C16, C17 sebagaimana diuraikan pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, terbukti terdapat fakta adanya pembatalan tender yang dilakukan oleh Terlapor I untuk tender pertama yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021. ----------

c. Bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti dokumen baik dokumen C dan/atau dokumen T

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan oleh para pihak dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2023, diketahui tender kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 merupakan tender dengan objek yang sama (Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III) dan nilai HPS yang sama meskipun faktanya ditemukan adanya beberapa perbedaan dalam dokumen KAK dan RfP antara tender pertama dan tender kedua sebagaimana diuraikan dalam Tabel 12 dan Tabel 13 sebagai berikut: ----------

1) Pekerjaan jasa spesialis yang diuraikan lebih detail; ----------
2) Adanya penambahan pekerjaan overhaul teater bintang; dan ----------
3) Adanya penambahan tahap perencanaan teknis DED untuk proposal/rancangan design area *underguidelines*. ----------

Namun demikian, perbedaan tersebut tidaklah cukup signifikan mengingat sifatnya hanya sebatas mendetailkan dan/atau menguraikan setiap jenis pekerjaan jasa spesialis terhadap gambar *design* yang telah dibuat oleh Andramatin sebagai Pemenang Sayembara Desain Revitalisasi Taman Ismail Marzuki pada tahun 2007 yang dalam keterangannya di persidangan dan pemeriksaan setempat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B5, B6, B26): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa tidak ada perubahan desain sehingga pemaparan baik terkait area ter-*design* dan area *underguidelines* adalah sama. ----------
2) Bahwa tidak ada perbedaan pemaparan terkait *design* dalam *aanwijzing* yang pertama dan *aanwijzing* yang kedua atau dapat dikatakan isinya sama persis. ----------
3) Bahwa dari gambar yang sudah disiapkan untuk dikerjakan, tidak ada perubahan gambar dari tender awal dengan tender ulang. ----------
4) Bahwa Tim Andramatin tidak melakukan perencanaan ulang. Artinya dari 6 (enam) *copy* yang diserahkan kepada Tim Pengadaan sebelum *aanwijzing* pertama itu, benar-benar tidak ada perubahan sama sekali atau dapat dikatakan sama persis. ----------
5) Bahwa dokumen yang kami serahkan tidak ada perubahan. Saksi memaparkan area interior dan sama persis tidak ada perubahan.----------

d. Bahwa di samping gambar *design* Andramatin yang disampaikan kepada Tim Pengadaan dan/atau dipaparkan kepada peserta tender dalam *aanwijzing* pada tender pertama dan tender kedua disebutkan sama persis, fakta tidak adanya perbedaan yang signifikan antara tender pertama dan kedua juga dikuatkan dengan keterangan para peserta tender yang diajukan sebagai Saksi Investigator dalam persidangan sebagai berikut (*vide* Bukti B3, B10, B17, B18): ----------

1) Saudara Fariz Andriawan Triyono selaku *Marketing Officer* PT Waskita Karya (Persero)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tbk pada pokoknya menyatakan tender kedua itu sama tendernya, judul proyek sama, pemilik sama, nilai sama, namun hanya menambahkan beberapa tambahan persyaratan. ----------

2) Saudara Aji Pramudiharto, S.T. selaku *Manager Engineering* PT Hutama Karya (Persero) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

   i. Bahwa setelah dibatalkan muncul tender ulang. ----------

   ii. Bahwa karena di tahap sebelumnya ada pemberitahuan tender batal sehingga di sesi undangan berikutnya Saksi mengasumsikan tender ulang. ----------

3) Saudara Andy Faisal selaku Manager Pemasaran Wilayah 2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk pada pokoknya menyatakan tender setelah dibatalkan adalah tender ulang.----------

e. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti tidak terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan pada tender kedua. Adapun perubahan dan/atau perbedaan yang terjadi hanya sebatas mendetailkan dan/atau menguraikan setiap jenis pekerjaan jasa spesialis. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saudara Yovan Saman Agusta selaku Staf Konsultan Manajemen Konstruksi (selanjutnya disebut Konsultan MK) dari PT Yodya Karya (Persero) sebagai Saksi dari Investigator

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B18).------

1) Bahwa secara lingkup sebenarnya tidak berubah. Lingkupnya sama-sama interior, akustik, ada teater bintang, semua sama, tidak berubah.----------

2) Bahwa perbedaannya lebih kepada menjelaskan namun secara lingkupnya tidak. Jadi, secara lingkup, setelah ditunjuknya pemenang Tahap III, itu lingkupnya tidak berubah, baik item pekerjaannya, lingkup pekerjaannya sama. Namun mungkin ada penyempurnaan di RfP. ----------

f. Bahkan Direktur SDM dan Umum Terlapor I sebagai Pejabat Berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan dalam Keputusannya terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengadaan pada pokoknya menyatakan lelang batal dan meminta kepada Tim Pengadaan untuk melakukan "*tender ulang*" terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III, hal mana membuktikan bahwa Terlapor I sendiri bahkan menyebutkan tender kedua setelah dibatalkannya tender pertama tersebut sebagai "*tender ulang*" dan bukan *"tender baru" (vide* Bukti C16, C28, T1.32, T1.41). ----------

g. Bahwa terhadap fakta adanya (i) nama objek tender dan nilai HPS yang sama; (ii) gambar *design* Andramatin yang disampaikan kepada Tim Pengadaan dan/atau dipaparkan kepada peserta tender dalam *aanwijzing* pada tender pertama dan tender kedua disebutkan sama persis, (iii)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perubahan dan/atau perbedaan yang terjadi hanya sebatas mendetailkan dan/atau menguraikan setiap jenis pekerjaan jasa spesialis; serta (iv) tidak adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan menunjukkan tender kedua dalam perkara *a quo* merupakan tender ulang dan bukan tender baru.----------

4.1.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat dalam analisis berikutnya untuk:----------

a. Tender pertama yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai "*tender batal*". ---------

b. Tender kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 setelah dibatalkannya tender pertama selanjutnya disebut sebagai "*tender ulang*". ----------

4.2. **Tentang Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Saudara Yofan Saman Agusta. ----------**

4.2.1. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saudara Yovan Saman Agusta sebagai Saksi harus ditolak karena dianggap memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dalam persidangan dengan menyatakan bahwa Saksi tidak terlibat lagi dalam lelang baru. Padahal dalam bukti T1.23 ditemukan Saudara Yovan Saman Agusta terlibat dan menghadiri kegiatan *aanwijzing* lelang baru. ----------

4.2.2. Bahwa sebelum Majelis Komisi menilai Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Saudara Yofan Saman Agusta, Majelis Komisi terlebih dahulu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa Saudara Yovan Saman Agusta selaku Staf dari Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) dalam keterangannya pada persidangan sebagai Saksi dari Investigator di bawah sumpah menyatakan terlibat dalam tender pertama Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III sebagai *Project Manager* yang bertugas antara lain membantu Tim Pengadaan membuat dokumen RfP dan melakukan evaluasi teknis sampai dengan PT Yodya Karya menyampaikan Laporan Pembahasan atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis kepada Terlapor I pada tanggal 10 Juni 2021. ----------
Adapun dalam tender ulang, Saksi menyatakan bahwa tidak banyak terlibat karena ditugaskan untuk fokus di lapangan (*vide* Bukti B18). ----------

b. Bahwa nama Saudara Yovan Saman Agusta diketahui masih tercantum sebagai Konsultan MK bersama dengan Saudara Tri Wahyuedi dan Saudara Moh. Iswahyudi dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor 003/BAAW/PKT.25/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh Saudara Yovan Saman Agusta dalam keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterlibatannya pada *aanwijzing* tender ulang adalah untuk membantu menjawab hal-hal teknis dan tidak terlibat dalam evaluasi (*vide* Bukti T1.23, B18). ----------

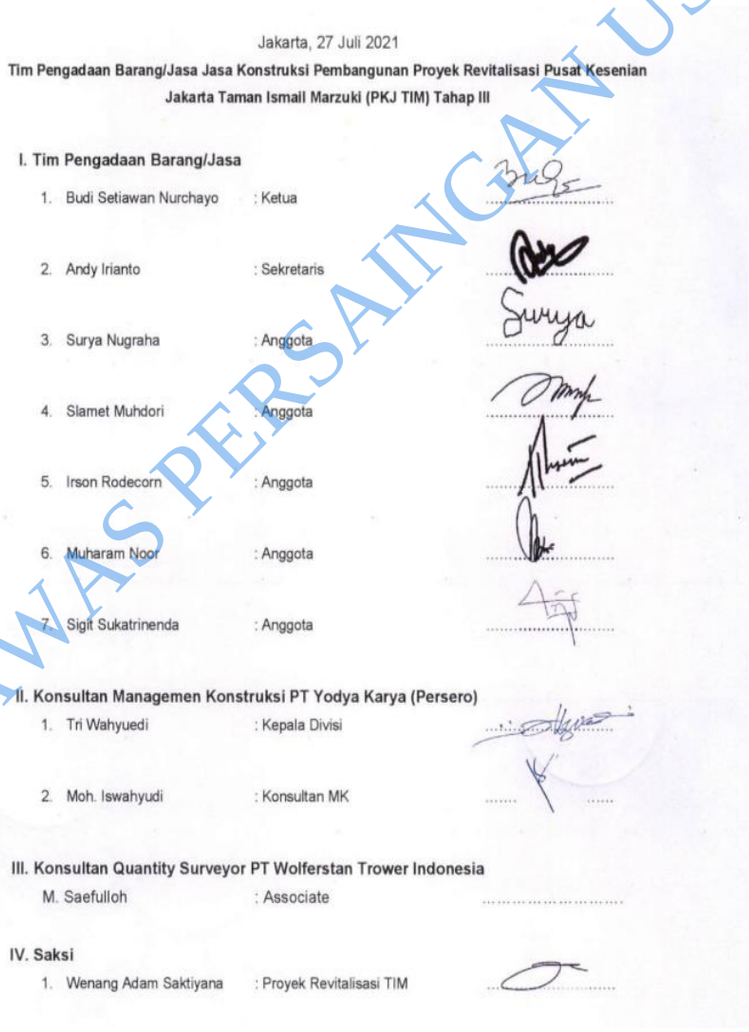
c. Bahwa nama Saudara Yovan Saman Agusta diketahui sudah tidak tercantum sebagai Konsultan MK dalam Berita Acara-Berita Acara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahapan tender ulang berikutnya antara lain sebagai berikut: ----------

(1) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran File I Nomor 004/BAPMB1/PKT.25/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 (*vide* Bukti C25);----------

Gambar 4.
Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran File I Nomor 004/BAPMB1/PKT.25/VII/2021



Jakarta, 27 Juli 2021

Tim Pengadaan Barang/Jasa Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) Tahap III

I. Tim Pengadaan Barang/Jasa

1. Budi Setiawan Nurchayo : Ketua
2. Andy Irianto : Sekretaris
3. Surya Nugraha : Anggota
4. Slamet Muhdori : Anggota
5. Irson Rodecorn : Anggota
6. Muharam Noor : Anggota
7. Sigit Sukatrinenda : Anggota

II. Konsultan Managemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero)

1. Tri Wahyuedi : Kepala Divisi
2. Moh. Iswahyudi : Konsultan MK

III. Konsultan Quantity Surveyor PT Wolferstan Trower Indonesia

M. Saefulloh : Associate

IV. Saksi

1. Wenang Adam Saktiyana : Proyek Revitalisasi TIM

(2) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (File II) Nomor 006/BAPMB2/PKT.25/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti C26);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 5.
Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (File II) Nomor 006/BAPMB2/PKT.25/VIII/2021



Jakarta, 02 Agustus 2021

Tim Pengadaan Barang/Jasa Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) Tahap III

I. Tim Pengadaan Barang/Jasa

1. Budi Setiawan Nurcahyo : Ketua
2. Andy Irianto : Sekretaris
3. Surya Nugraha : Anggota
4. Slamet Muhdori : Anggota
5. Irson Rodecorn : Anggota
6. Muharam Noor : Anggota
7. Sigit Sukatrinenda : Anggota

II. Tim Managemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero)

Agi Krisna : Konsultan MK

III. Tim Quantity Surveyor PT Wolferstan Trower Indonesia

M. Saefulloh : Team Leader

IV. Saksi (Proyek TIM)

1. Rr. Luky Ismayanti : Direktur Proyek
2. Tabah Yanda Noekman : Manager Proyek

(3) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Nomor 007/BAEVH/PKT.25/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 (*vide* Bukti C24).----------

Gambar 6.
Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Nomor 007/BAEVH/PKT.25/VIII/2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Jakarta, 05 Agustus 2021

Tim Pengadaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki ("PKJ TIM") Tahap III

I. Tim Pengadaan Barang/Jasa

1. Budi Setiawan Nurcahyo : Ketua .....
2. Andy Irianto : Sekretaris .....
3. Surya Nugraha : Anggota .....
4. Slamet Muhdori : Anggota .....
5. Irson Rodecorn : Anggota .....
6. Muharam Noor : Anggota .....
7. Sigit Sukatrinenda : Anggota .....

II. Konsultan Management Konstruksi PT Yodya Karya (Persero)

1. Tri Wahyuedi : Kepala Divisi .....
2. Moh. Iswahyudi : Konsultan MK .....

III. Konsultan Quantity Surveyor PT Wolferstan Trower Indonesia

M. Saefulloh : Associate .....

Adapun nama Konsultan MK yang masih tercantum dalam Berita Acara sebagaimana diuraikan di atas adalah Saudara Tri Wahyuedi dan Saudara Moh. Iswahyudi. ----------

4.2.3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 15 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PerKPPU 1/2019), Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang suatu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perkara pelanggaran undang-undang, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya pelanggaran undang-undang.--

b. Bahwa dalam fakta persidangan, Saksi Saudara Yovan Saman Agusta benar telah memberikan keterangan terkait sejauh mana keterlibatan dan kapasitas Saksi dalam Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III sesuai dengan pengetahuan yang Saksi miliki berdasarkan apa yang Saksi dengar, Saksi lihat, dan Saksi alami sendiri, yang mana keterangan Saksi dibuktikan dengan adanya kesesuaian dengan alat-alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 4.2.2. ----------

4.2.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat kesaksian Saudara Yovan Saman Agusta dalam persidangan dapat diterima. ----------

5. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait. ----------

5.1. **Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.----------**

5.1.1. Bahwa Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki merupakan proyek yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 50/2019).----------

5.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 50/2019, diatur mengenai prinsip-prinsip

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai berikut (*vide* Bukti C124):----------

a. *efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;* ----------
b. *efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;* ----------
c. *transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;* ----------
d. *terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;* ----------
e. *bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;*
f. *adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan*----------
g. *akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.*----------

5.1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 50/2019, semua pihak yang terlibat dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut (*vide* Bukti C124): ----------

a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;* ----------
b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;* ----------
c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*----------
d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;* ----------
e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;* ----------
f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;*----------
g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*----------
h. *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.* ----------

5.1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 50/2019, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi (*vide* Bukti C124): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. *memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for Money);* ----------
b. *memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;* ----------
c. *memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;* ----------
d. *mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);* ----------
e. *mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik:* ----------
f. *disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan yang berlaku; dan* ----------
g. *BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.*----------

5.2. **Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.**----------

5.2.1. Bahwa di dalam butir Menimbang, disebutkan agar revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dengan menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (selanjutnya disebut sebagai Pergub DKI Jakarta No. 63/2019) (*vide* Bukti C125). ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Pergub DKI Jakarta No. 63/2019, dalam pelaksanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab antara lain (*vide* Bukti C125): ----------

b. *melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pengembangan Revitalisasi PKJ TIM sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;*----------

c. *melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*----------

5.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Pergub DKI Jakarta No. 63/2019, diatur mengenai ketentuan pendanaan sebagai berikut (*vide* Bukti C125): ----------

(1) Sumber pendanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dibiayai oleh:----------

a. *penyertaan modal daerah;* ----------

b. *modal perusahaan;*----------

c. *patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;* ----------

d. *pinjaman dari lembaga keuangan;* ----------

e. *penerbitan surat hutang dan obligasi;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. *pinjaman dari pemerintah daerah;* ----------

g. *hibah yang sah dan tidak mengikat;* ----------

h. *pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau*----------

i. *bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.*----------

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

5.3. **Manual Jakpro Manual Pengadaan Barang/Jasa dengan No. Dok. MMAN-JPP-PPRKN-001 Rev. 1 Tanggal 12 Maret 2021.**

5.3.1. Bahwa Pengadaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III pada tender batal dilaksanakan dengan menggunakan Manual Pengadaan Barang/Jasa No. Dok. MMAN-JPP-PPRKN-001 Rev. 1 Tanggal 12 Maret 2021 (selanjutnya disebut Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021) (*vide* Bukti T1.14). ----------

5.3.2. Bahwa berdasarkan angka 2 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021, prinsip Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum yaitu efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, untuk mendapatkan penawaran yang terbaik bagi perusahaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.3.3. Bahwa berdasarkan angka 3 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika pengadaan yaitu profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan, mencegah terjadinya kepentingan/pemborosan/penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, serta tidak menerima/menawarkan/menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan/komisi dan apa saja dari atau menerima hadiah/imbalan/komisi dan apa saja dari atau kepada siapapun. ----------

5.3.4. Bahwa berdasarkan angka 7 tentang Akronim dan Definisi pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021, tender/seleksi yaitu metode pemilihan calon Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan untuk mendapatkan penawaran yang terbaik bagi Perusahaan dengan mengacu kepada Daftar Rekanan Perusahaan untuk nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau diundang secara terbuka. -----

5.3.5. Bahwa berdasarkan angka 8 tentang Batasan Kewenangan pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021, batasan kewenangan dalam kegiatan pengadaan dengan metode tender/seleksi dengan nilai sampai dengan Rp 50 miliar (lima puluh miliar rupiah) dan nilai di atas Rp 50 miliar (lima puluh miliar rupiah) dibedakan sebagai berikut:---------

Gambar 7.
Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021
Angka 8 tentang Batasan Kewenangan dalam Kegiatan Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	METODE PEMILIHAN	PERSETUJUAN PENYEDIA BARANG/JASA	PENANDATANGANAN PERIKATAN
1	Pembelian Langsung	Kepala Divisi / Unit	Kepala Divisi / Unit
2	Pengadaan Langsung	Direktur Pemegang Anggaran	Direktur Pemegang Anggaran
3	Tender Sederhana	Direktur Pemegang Anggaran & Direktur Atasan Divisi Pengadaan	Direktur Pemegang Anggaran
4	Tender / Seleksi		
	Nilai sampai dengan Rp 50 Miliar	Direktur Pemegang Anggaran & Direktur Atasan Divisi Pengadaan	Direktur Utama
	Nilai diatas Rp 50 Miliar	Direksi	
5	Penunjukkan Langsung		
	Nilai sampai dengan Rp 200 juta	Direksi	Kepala Divisi / Unit
	Nilai sampai dengan Rp 500 juta		Direktur Pemegang Anggaran
	Nilai sampai dengan Rp 5 Miliar		
	Nilai sampai dengan Rp 50 Miliar		Direktur Utama
	Nilai diatas Rp 50 Miliar		

Adapun berdasarkan angka 7 tentang Akronim dan Definisi, Direksi adalah Dewan Direksi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sedangkan Direktur Atasan Divisi Pengadaan adalah Direktur Operasi PT Jakarta Propertindo (Perseroda). ----------

5.3.6. Bahwa berdasarkan angka 9 tentang Alur Proses Pengadaan keterangan poin 9 pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021, Divisi Pengadaan melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOP.----------

5.3.7. Bahwa berdasarkan angka 9 tentang Alur Proses Pengadaan Barang/Jasa keterangan poin 10 pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021, usulan penetapan pemenang disampaikan kepada User/Direksi, sesuai Batasan kewenangan yang telah ditetapkan. Adapun sesuai dengan butir 5) di atas dan butir 7) ini maka untuk tender/seleksi dengan nilai di atas Rp 50 miliar (lima puluh miliar rupiah), usulan penetapan pemenangnya dilakukan oleh Dewan Direksi PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4. **Manual Jakpro Manual Pengadaan Barang/Jasa dengan No. Dok. MMAN-JPP-PGDN-001 Tanggal 15 Juli 2021.----------**

5.4.1. Bahwa Pengadaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III pada tender ulang dilaksanakan dengan menggunakan Manual Pengadaan Barang/Jasa No. Dok. MMAN-JPP-PGDN-001 Tanggal 15 Juli 2021 (selanjutnya disebut Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 15 Juli 2021). Dengan diterbitkannya dokumen Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 15 Juli 2021, maka Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 12 Maret 2021 menjadi tidak berlaku lagi (*vide* Bukti C63). ----------

5.4.2. Bahwa berdasarkan angka 5.4 tentang Batasan Kewenangan pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 15 Juli 2021, terdapat perubahan mengenai batasan kewenangan dalam kegiatan pengadaan dengan metode tender/seleksi menjadi sebagai berikut:

Gambar 8.
Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 15 Juli 2021 Angka 5.4 tentang Batasan Kewenangan dalam Kegiatan Pengadaan

Tabel 1 Batasan Kewenangan dalam Kegiatan Pengadaan

NO	METODE PEMILIHAN	PERSETUJUAN PENYEDIA BARANG/JASA	PENANDATANGANAN PERIKATAN (PO)
1	**Pembelian Langsung**		
	Nilai sampai dengan Rp 200 juta	Senior Manager Divisi Pengadaan	Senior Manager / General Manager / Project Director
2	**Pengadaan Langsung**		
	Nilai diatas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	Senior Manager Divisi Pengadaan	Direktur Pemegang Anggaran
3	**Tender Sederhana**		
	Nilai diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 Miliar	Direktur Atasan Divisi Pengadaan	Direktur Pemegang Anggaran
4	**Tender / Seleksi**		
	Nilai diatas Rp 5 Miliar	Direktur Atasan Divisi Pengadaan	Direktur Utama
5	**Penunjukkan Langsung**		
	Nilai sampai dengan Rp 200 juta	Senior Manager Pengadaan	Senior Manager / General Manager / Project Director
	Nilai diatas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	Senior Manager Divisi Pengadaan	Direktur Pemegang Anggaran
	Nilai diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 Miliar	Direktur Atasan Divisi Pengadaan	
	Nilai diatas Rp 5 Miliar		Direktur Utama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Adapun berdasarkan angka 4 tentang Akronim dan Definisi, Direktur Atasan Divisi Pengadaan adalah Direktur SDM dan Umum PT Jakarta Propertindo (Perseroda). ----------

5.4.3. Bahwa berdasarkan angka 5.5 tentang Alur Proses Pengadaan keterangan poin 7 pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 15 Juli 2021, Divisi Pengadaan melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai kebijakan yang berlaku.

5.4.4. Bahwa berdasarkan angka 5.5 tentang Alur Proses Pengadaan keterangan poin 8 pada Manual Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 15 Juli 2021, penetapan pemenang sesuai *tiering* dan SPMK ditandatangani oleh SM Pengadaan. Adapun sesuai dengan *tiering* (batasan kewenangan) maka penetapan pemenang dalam tender/seleksi dalam hal ini dilakukan oleh Direktur SDM dan Umum PT Jakarta Propertindo (Perseroda). --

6. Tentang Kronologis Tender. ----------

Bahwa Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap fakta-fakta terkait kronologis tender dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4, B18, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C31, C32, C33, C34, C41, C53, C54, C61, C62, C66, C67, C68, C70, C79, C91, C92, C93, C116, C121, C127, C148, C155, C162, T1.7, T1.8. T1.9, T1.15, T1.16, T1.18, T1.20, T1.21, T1.23, T1.26, T1.27, T1.28, T1.32, T1.41, T2.10, T2.16, T2.21, T2.26, T2.27, T3.8, T3.14, T3.19, T3.22, T3.23): ---

Tabel 13.
Kronologis Tender

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
TENDER PERTAMA		
6 Mei 2021	Terlapor I (dalam hal ini adalah M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum) membentuk Tim Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dengan susunan sebagai berikut (*vide* Bukti C23): Ketua Tim : 1. Achmad Ismarwan (Divisi Pengadaan) Sekretaris : 2. Budi Setiawan Nurcahyo (Divisi Pengadaan) Anggota : 3. Slamet Muhdori (Divisi MPP) 4. Muharam Noor (Divisi Akuisisi Lahan) 5. Irson Rodecorn (Divisi MPP) 6. Surya Nugraha (Divisi Pengadaan) 7. Farhan Ilkarim Hadiputra (Proyek TIM) Tim Ahli 1. Tim MK PT Yodya Karya 2. Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia	
6 Mei 2021	Undangan Pendaftaran	
	Kepala Divisi Pengadaan Terlapor I mengundang 11 (sebelas) perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar sebagai rekanan Terlapor I yaitu (*vide* Bukti C14): 1. PT Hutama Karya (Persero), Tbk; 2. PT Wijaya Karya (Persero), Tbk; 3. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk; 4. PT Waskita Karya (Persero), Tbk; 5. PT Adhi Karya (Persero), Tbk; 6. PT Brantas Abipraya (Persero); 7. PT Amarta Karya (Persero); 8. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk; 9. PT Nindya Karya (Persero); 10. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk; 11. PT Adhi Perkasa Gedung. Bahwa dalam surat undangan tersebut juga diinformasikan antara lain: – pendaftaran peserta dilakukan secara online pada tanggal 6 Mei 2021 (pukul: 09:30 WIB) sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 (pukul 09:30 WIB); – donwnload Dokumen Pengadaan (RKS) dapat dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 (pukul 09:35 - 12:00 WIB) melalui: eproc.jakarta-propertindo.com	
6-7 Mei 2021	Pendaftaran Peserta	
	Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta yaitu (*vide* Bukti C9): (1) PT Hutama Karya (Persero), Tbk (2) PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (3) PT Waskita Karya (Persero), Tbk (4) PT Adhi Karya (Persero), Tbk (5) PT Brantas Abipraya (Persero) (6) PT Amarta Karya (Persero) (7) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">10 Mei 2021</td><td colspan="2">Rapat Penjelasan (Aanwijzing)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Terlapor I menyelenggaran rapat penjelasan (aanwijzing) secara online yang diikuti oleh (vide Bukti C11, C12):

Terlapor I :
1. Achmad Ismarwan (Ketua Tim Pengadaan)
2. Budi Setiawan Nurcahyo (Sekretaris Tim Pengadaan)
3. Slamet Muhdori (Anggota)
4. Muharam Noor (Anggota)
5. Irson Rodecorn (Anggota)
6. Surya Nugraha (Anggota)
7. Farhan Ilkarim Hadiputra (Anggota)
8. M Saefulloh (QS)
9. Wolter N. Piri (MK)
10 Yofan Saman Agusta (MK)
11. Mulya Hernandang D (Divisi Pengadaan)
12. Rr. Luky Ismayanti (Proyek TIM)
13. Tabah Yanda Noekman (Proyek TIM)

Peserta
1. PT Adhi Karya (Persero), Tbk
2. PT Brantas Abipraya (Persero)
3. PT Hutama Karya (Persero)
4. PT PP (Persero), Tbk
5. PT Waskita Karya (Persero), Tbk
6. PT Jaya Kronstruksi Manggala Pratama, Tbk
7. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk
8. PT Amarta Karya (Perseroa)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24 Mei 2021</td><td colspan="2">Pembukaan Dokumen Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa hingga akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I menerima penawaran dari 5 (lima) peserta sebagai berikut (vide Bukti C10):

1. PT Waskita Karya (Persero), Tbk;
2. KSO PT PP - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (PP – JAKON KSO)
3. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk;
4. PT Adhi Karya (Persero), Tbk;
5. PT Hutama Karya (Persero), Tbk;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">30 Mei 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Administrasi Teknis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi teknis (File I) yang dilakukan oleh PT Yodya Karya diperoleh 3 (tiga) peserta yang lulus karena memenuhi ambang batas teknis sebagaimana tabel berikut (vide Bukti C8):

<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th>Nilai</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Waskita Karya (Persero), Tbk</td><td>77,94</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>92,78</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>92,62</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>89,57</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PT Hutama Karya (Persero)</td><td>79,06</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>31 Mei 2021</td><td colspan="2">Pengumuman Peringkat Teknis Nomor 005/BAEVT/PKT.18/V/2021 melalui email kepada seluruh peserta sebagai berikut (vide Bukti C93):</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>
PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
005/BAEVT/PKT.18/V/2021
Tanggal 31/05/2021

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis no : 005/BAEVT/PKT.18/V/2021 tanggal 31/05/2021 tentang hasil evaluasi atas penawaran Administrasi dan teknis untuk Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM)

Dengan ini kami sampaikan hasil peserta yang dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan Pembukaan Penawaran Harga Sampul II adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><td colspan="5">Data Penyedia Barang/Jasa</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Nama Penyedia Barang/Jasa</td><td>Administrasi</td><td>Nilai Teknis</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.</td><td>LULUS</td><td>92.78</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk</td><td>LULUS</td><td>92.62</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT ADHI KARYA (Persero) Tbk</td><td>LULUS</td><td>89.57</td><td>3</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PT Hutama Karya (Persero)</td><td>LULUS</td><td>79.06</td><td>Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>PT. Waskita Karya (Persero), Tbk</td><td>LULUS</td><td>77.94</td><td>Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis</td></tr>
</table>
Selanjutnya akan dilakukan Pembukaan dan Evaluasi Sampul II terhadap peserta yang dinyatakan lulus.

Demikian Pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
</td><td></td></tr>
<tr><td>1 Juni 2021</td><td>Bahwa Direktur SDM dan Umum Terlapor I mengirimkan undangan kepada PT Yodya Karya selaku Konsultan di bidang Manajemen Konstruksi (MK) melalui email yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis sebagaimana hasil peringkatnya telah diumumkan pada tanggal 31 Mei 2021 (vide Bukti B18, T1.41).</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2 Juni 2021</td><td>Pembukaan Sampul 2/Harga Penawaran</td><td></td></tr>
<tr><td>Bahwa penawaran harga yang disampaikan ketiga peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi teknis adalah sebagai berikut (vide Bukti C9):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th colspan="2">Nilai Penawaran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>IDR</td><td>446.264.400.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>IDR</td><td>418.388.000.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>IDR</td><td>397.018.888.888</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan Pemaparan Hasil Evaluasi Teknis sebagaimana permintaan dari Direktur SDM dan Umum Terlapor I (vide Bukti B18).</td><td></td></tr>
<tr><td>3 Juni 2021 s/d 9 Juni 2021</td><td>Bahwa terdapat permintaan pembahasan atas hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)PT Yodya Karya dari Direktur SDM dan Umum Terlapor I dengan uraian sebagai berikut (vide Bukti B18, T1.41):
1. Kamis 03 Juni 2021 Pukul 08.00 – 09.30
2. Jumat 04 Juni 2021 Pukul 09.30 – 10.30
3. Sabtu 05 Juni 2021 Pukul 11.00 – 12.30
Agenda : Reviu atas Hasil Evaluasi Teknis
4. Senin 07 Juni 2021 Pukul 09.00 – 10.30
5. Rabu 09 Juni 2021 Pukul 09.00 – 10.30</td><td></td></tr>
<tr><td>7 Juni 2021</td><td>Bahwa PT Wolferstan Trower Indonesia selaku Konsultan Quantity Surveyor (QS) mengirimkan Surat Perbandingan Penawaran Harga Nomor Ref.0394/MS/VI/21 kepada Terlapor I sebagai berikut (vide Bukti C22, C68, C70):
<table>
<tr><th>Nama Penyedia Barang/Jasa</th><th>Nilai Penawaran Harga (sudah termasuk PPN 10%)</th><th>Peringkat</th></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>Rp397.018.888,888</td><td>Pertama</td></tr>
<tr><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>Rp418.388.000,00</td><td>Kedua</td></tr>
<tr><td>PT PP – Jakon KSO</td><td>Rp446.264.400,00</td><td>Ketiga</td></tr>
</table>
PT Wolferstan Trower Indonesia selaku Konsultan Quantity Surveyor (QS) pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditemukan kesalahan aritmatika dalam penawaran sehingga tidak terdapat perubahan nilai penawaran.
</td><td></td></tr>
<tr><td>10 Juni 2021</td><td>
Laporan Pembahasan atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki – Tahap III tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero) dan diajukan kepada Tim Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (vide Bukti C148, T1.26)

23) Bahwa terdapat perbedaan terhadap penafsiran definisi interior (pada KAK tidak dinyatakan secara eksplisit tentang pekerjaan interior) sebagai berikut:

Nilai Awal
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pengalaman</th><th colspan="2">PT Adhi Karya</th><th colspan="2">PP-JAKON KSO</th><th colspan="2">Wika Gedung</th></tr>
<tr><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Interior/Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballroom</td><td>27.27</td><td>1.91</td><td>100</td><td>7.00</td><td>36.36</td><td>2.55</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Interior/Fitting Out Gedung Hotel Kelas Minimal bintang 3</td><td>100</td><td>7.00</td><td>38.46</td><td>2.69</td><td>46.15</td><td>3.23</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Interior/fitting out ruang kantor min. 10000 m2</td><td>86</td><td>6.00</td><td>93</td><td>6.50</td><td>99</td><td>6,50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Interior/fitting out komersial lainnya</td><td>100</td><td>6.00</td><td>88.89</td><td>5.33</td><td>51.85</td><td>3.11</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pekerjaan equipment Gedung pertunjukan auditorium dan ballroom</td><td>50</td><td>3.50</td><td>83.33</td><td>5.83</td><td>51.85</td><td>3.11</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pekerjaan equipment Gedung atau ruang komersial lainnya</td><td>80</td><td>4.80</td><td>100</td><td>6.00</td><td>40</td><td>2.40</td></tr>
</table>
Hasil Reviu
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pengalaman</th><th colspan="2">PT Adhi Karya</th><th colspan="2">PP-JAKON KSO</th><th colspan="2">Wika Gedung</th></tr>
<tr><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Interior/Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballroom</td><td>27.27</td><td>1.91</td><td>100</td><td>7.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Interior/Fitting Out Gedung Hotel Kelas Minimal bintang 3</td><td>86</td><td>6.00</td><td>78,57</td><td>5.50</td><td>50</td><td>3.50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Interior/fitting out ruang kantor min. 10000 m2</td><td>29</td><td>2.00</td><td>67.86</td><td>4.75</td><td>57</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Interior/fitting out komersial lainnya</td><td>91</td><td>5.45</td><td>72.73</td><td>4.36</td><td>59.09</td><td>3.55</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pekerjaan equipment Gedung pertunjukan auditorium dan ballroom</td><td>0</td><td>0.00</td><td>100</td><td>7.00</td><td>20</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pekerjaan equipment Gedung atau ruang komersial lainnya</td><td>100</td><td>6</td><td>100</td><td>6</td><td>50</td><td>3.00</td></tr>
</table>
24) Bahwa terdapat perbedaan terhadap penafsiran pengalaman kota besar untuk pengalaman di lokasi kota besar substansinya adalah kontraktor mengenal chemistry bekerja di kota besar baik dari sisi environment nya maupun dari sisi aturan setempat. Pekerjaan interior itu juga hal yang melekat dengan aturan setempat apalagi mengenai manajemen lalu lintas di lokasi kota besar dan segala macam hal lainnya. Karena itu Pengalaman di lokasi kota besar tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sejenis sebagai berikut:

Nilai Awal
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pengalaman</th><th colspan="2">PT Adhi Karya</th><th colspan="2">PP-JAKON KSO</th><th colspan="2">Wika Gedung</th></tr>
<tr><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengalaman di lokasi kota besar</td><td>100</td><td>7.50</td><td>52.38</td><td>3.93</td><td>100</td><td>7.50</td></tr>
</table>
Hasil Reviu
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pengalaman</th><th colspan="2">PT Adhi Karya</th><th colspan="2">PP-JAKON KSO</th><th colspan="2">Wika Gedung</th></tr>
<tr><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th><th>Score</th><th>Nilai</th></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th colspan="2">Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>1</td><td>Pengalaman di lokasi kota besar</td><td>100</td><td>7.50</td><td>72.73</td><td>5.45</td><td>36.36</td><td>2.73</td></tr>
</table>

25) Bahwa dalam kesimpulannya terkait proses pelaksanaan evaluasi teknis pengadaan yang tengah berjalan yaitu:
e) Skor hasil pembahasan reviu ini tidak mengikat kepada peserta tender, karena hasil evaluasi teknis telah diumumkan pada tanggal 31 Mei 2021;
f) Perlu juga disampaikan bahwa mekanisme pengumuman hasil reviu tidak terdapat dalam RfP. Dimana RfP merupakan kesepakatan antara penyelenggara tender dengan peserta. Dan saat memasukkan mekanisme baru yang tidak disepakati di awal atau di dalam RfP, maka berpotensi akan menimbulkan penyampaian sanggah oleh peserta.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10 Juni 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Teknis dan Harga Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa hasil evaluasi teknis dan harga penawaran adalah sebagai berikut (vide Bukti C19):
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nama Peserta</th><th rowspan="2">Nilai Penawaran Sebelum Koreksi Aritmatik (Rp)</th><th rowspan="2">Nilai Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)</th><th colspan="3">Hasil Evaluasi Akhir</th><th rowspan="2">Peringkat</th></tr>
<tr><th>Skor Teknis</th><th>Skor Biaya</th><th>Total Skor</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.</td><td>Rp418.388.404.711,- (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah) termasuk PPN 10%</td><td>Rp418.388.000.000,- (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) termasuk PPN 10%</td><td>64.83%</td><td>28.47%</td><td>93.30%</td><td>I</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk.</td><td>Rp397.018.888.888,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) termasuk PPN 10%</td><td>Rp397.018.888.888,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) termasuk PPN 10%</td><td>62.70%</td><td>30.00%</td><td>92.70%</td><td>II</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT PP (Persero), Tbk – PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. (KSO)</td><td>Rp446.264.400.000,- (empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)) termasuk PPN 10%</td><td>Rp446.264.400.000,- (empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)) termasuk PPN 10%</td><td>64.95%</td><td>26.69%</td><td>91.64%</td><td>III</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pemberitahuan Hasil Evaluasi Admin, Teknis dan Harga melalui email pada pukul 21.12 WIB dari Kepala Divisi Pengadaan kepada Peserta yang pada pokoknya berisi tentang (vide Bukti C20, C92, T1.41):
1) Pengumuman peringkat hasil evaluasi admin, teknis dan harga dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk sebagai peringkat I, PT Adhi Karya (Persero), Tbk sebagai peringkat II dan Terlapor II – Terlapor III (KSO) sebagai peringkat III.
2) Pemberitahuan bahwa peserta yang dinyatakan lulus dengan peringkat pertama agar hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi dengan undangan yang akan dikirimkan kemudian.
</td></tr>
<tr><td>11 Juni 2021</td><td colspan="2">Laporan Hasil Akhir yang dibuat oleh Tim Pengadaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (“PKJ TIM”) Tahap II yang unsurnya terdiri dari Tim Pengadaan Barang/Jasa, Tim Manajemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero), dan Tim Quantity Surveyor PT Wolferstan Trower Indonesia (vide Bukti T1.18)</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	1) Bahwa terhadap hasil pengumuman dan laporan hasil evaluasi harga, terdapat permintaan dari Direktur atasan pengadaan untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis. Pembahasan dilakukan bersama dengan user (proyek tim) yang berdampak pada penundaan pengumuman peringkat dan jadwal selesainya tender. 2) Bahwa di samping itu terdapat perbedaan penafsiran terhadap definisi interior pada aspek pengalaman kerja yang pada saat pembahasan akhir kembali berkembang ke penafsiran terhadap pengalaman kota besar. 3) Bahwa hasil pembahasan terhadap poin 10, konsultan MK diminta untuk membantu *user* (proyek tim) untuk menghitung kembali skors teknis. Bahwa terhadap hasil perhitungan kembali tersebut dan mempertimbangkan terhadap tahapan–tahapan selanjutnya, Tim Pengadaan berpendapat: a) Tidak melakukan pengumuman terhadap score hasil reviu yang dimaksud karena mekanisme tersebut tidak diatur dalam RFP dan berpotensi besar untuk diajukannya sanggah serta tingginya kemungkinan sanggah terbukti yang berakibat pada kondisi lelang gagal. b) Selain itu, apabila diumumkan maka dalam proses negosiasi tidak berjalan optimal karena nilai peringkat pertama adalah peserta yang menawar dengan harga tertinggi, sementara penawar harga terendah tidak lolos passing grade sub aspek teknis pengalaman perusahaan (tidak masuk dalam pengumuman peringkat).	
12 Juni 2021	PT PP – Jakon KSO mengirimkan Surat Nomor 002/Ext/VI/PP-JAKON/2021 perihal Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis kepada Tim Pengadaan (*vide* Bukti C91, C127, C162).	
14 Juni 2021	Klarifikasi dan Negosiasi	
	Bahwa Tim Pengadaan Terlapor I melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk yang dihadiri: Achmad Ismarwan (Ketua Tim Pengadaan), Dodi Suryosuasta, Khomensyah Nasution, Budi Setiawan, Rosmar H., Djunaidi, dan Rizky Dimas (PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk), Rr. Luky Ismayanti, Tabah Yanda Noekman, dan Sigit Sukatrinenda (Proyek Taman Ismail Marzuki), serta PT Yodya Karya (Persero) (Tim Teknis *Management* Konstruksi) dan PT Wolferstan Trower Indonesia (Tim Teknis Konsultan *Quantity Surveyor*) (*vide* Bukti C21). Adapun setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi maka disetujui hal - hal sebagai berikut: 1) Penawaran Awal adalah sebesar Rp418.388.000.000,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dan setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi mejadi sebesar Rp418.000.000.000,00 (empat ratus delapan belas miliar rupiah) sudah termasuk PPN 10%; 2) Metode pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tahap 1 dapat berjalan dengan baik karena merupakan pekerjaan PT. Wika Gedung, untuk bangunan yang berhubungan dengan Tahap 2 harus dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kontraktor Tahap 2; 3) Jumlah dan kapasitas peralatan yang dipergunakan harus sesuai dengan KAK yang disyaratkan dan yang ditawarkan adalah jumlah dan kapasitas peralatan minimal. Kontraktor berkewajiban menambah jumlah dan kapasitas tanpa adanya penambahan biaya jika diperlukan;	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	4) Akses menggunakan Jalan Cikini Raya dan akan berkoordinasi dengan Kontraktor Tahap 2 untuk menggunakan izin jalan dari sekolah seni; 5) Untuk metode percepatan pekerjaan, Kontraktor merencanakan penggunaan *passanger hoist*; 6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 11 Desember 2021; 7) Terkait personil K3 Ahli Madya yang tidak sesuai karena melihat disiplin pekerjaan yang dilaksanakan, namun apabila harus disesuai dengan KAK Kontraktor bersedia menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan KAK; 8) Mulai Pelaksanaan Pekerjaan tidak perlu menunggu Serah Terima Lahan; 9) Pengalaman Wika Gedung untuk pekerjaan teater di Cibubur namun kelas internasional dan kapasitas lebih kecil dari proyek yang akan dilaksanakan; 10) Rancangan *Guidelines* harus menyesuaikan dengan KAK atau dokumen yang ada. Kontraktor memastikan bahwa dapat memenuhi semua guidelines tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Jakpro dan Seniman; 11) Item pekerjaan Rancangan *Guidelines* adalah *Design and Build* yang harus mendapatkan persetujuan dari Jakpro dan MK; 12) Penawaran Kontraktor untuk merk tata suara adalah Meyer; 13) Serah Terima Pekerjaan dan Training untuk *equipment* akan didetailkan lebih lengkap dan harus dihadiri oleh pihak Principal equipment tersebut. Untuk kebutuhan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Jakpro; 14) Tidak diperlukan Direksi Keet untuk Tim Jakpro dan Tim Konsultan MK, namun akan ada berbagi pelayanan misal: *Security*; 15) Seluruh spesifikasi material dan *brand* harus sesuai dengan KAK, Gambar dan Outline Spesifikasi yang dipilih dan disetujui; 16) Daftar Sub-kontraktor atau vendor yang ditawarkan tidak dapat diubah dengan alasan apapun tanpa pesetujuan tertulis dari Jakpro dan Konsultan MK; 17) *ZEISS UNIVERSARIUM MVIII Starball Overhaul and Upgrade* akan dilakukan di Kota Jena, Germany dengan skup pekerjaan sebagai berikut: *j) LED Upgrade for stars, milky way deep sky objects;* *k) Motor Controller exchange and upgradel* *l) 1 full set of new slides;* *m) Control System Upgrade (Hardware and Software);* *n) New set of cables and connectors;* *o) New set & wear tear components for the starball;* *p) Diss-assembling, cleaning, re-assembling, repair where necessary and new adjustment;* *q) functional testing;* *r) Instalation (in Jakarta), training.*	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	18) Kontraktor harus memberikan jaminan secara tertulis dari ZEISS Germany kepada Jakpro bahwa Overhaul dan Upgrade ZEISS UNIVERSARIUM MVIII Starball dapat berfungsi dengan baik selama 20 tahun dan jaminan ketersediaan spare parts; 19) Untuk area Planetarium: c) Interior: *under GuideIines* sebagai *design and build*; d) Kineforum -> seperti bioskop -> akustik treatment - Equipment: Tata suara Dolby Atmos - Proyektor film dlsb; e) Ruang-ruang latihan: disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, contohnya seni musik make diperlukan *equipment-equipment* yang berhubungan dengan alat-alat musik. Hal ini berlaku juga untuk Teater Arena dan ruangan-ruangan lainnya; f) Perencana Design and Build harus mendapatkan persetujuan dari Jakpro. 20) Area Theater/Auditorium/GBB: f) Interior : *under GuideIines* sebagai *design and build:* – Akustikal - *wood panel sesuai Specifation RPG made in USA* bukan yang china; – Tirai panggung *safety curtain* berbahan *silika zetex dart* pastikan sesuai dengan persyaratan dalam KAK. g) *Equipment* Tata Suara: – PA; – Space map surrounds; – *Variabel Accoustic - mic* tersembunyi 32 buah, jumlah *speake surrounds* dan *constellation* untuk memastikan hasil terbaik buat *GBB based pn Principal Requirement* mempengaruhi total *chanel* dan *mixer*; – *Mixer* harus berbasis *mixer theatre.* h) Tata Lampu – Lighting konsol; – *Dimmer Rack – modular*; – Harus benar-benar sesuai KAK dan OS. i) *Stace Machinery* – *Flying bar 72* nos harus di *hoist* dengan kerekan variabel speed; – *Hoist* harus bisa *disyncronised, controlled, computerized* dengan fitur-fitur untuk penggunaan user. j) Untuk pembuktian dokumen asli terkait personil yang ditawarkan akan dilakukan tanggal 15 Juni 2021 pukul 17.00 WIB dengan pihak Tim Pengadaan dan Konsultan Manajemen Konstruksi. 21) Tata Cara Pembayaran Adapun tata cara pembayaran akan dilaksanakan setelah diterimanya *invoice*, dengan tahapan sebagai berikut: d) Uang Muka: 10% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani dan diserahkan Jaminan Uang Muka dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum; e) Termin: *Monthly progress payment* berdasarkan progress lapangan sesuai dengan kurva-S dikurangi cicilan uang muka 10% dan retensi 5% dari nilai yang ditagihkan disertai dengan *invoice* dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Tagihan bisa dilakukan setelah kontrak ditandatangani; f) Retensi: sebesar 5% dibayarkan setelah masa pemeliharaan (retensi) selesai dilengkapi dengan BAST II selama 12 bulan. 22) Jangka Waktu Pelaksanaan d) Total waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Penetapan Mitra Kerja (SPMK) sampai dengan 31 Desember 2021 untuk seluruh massa bangunan yang dikerjakan secara keseluruhan; e) Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyusun matrik tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing item pekerjaan; f) Rencana dan Waktu Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang disampaikan.	
15 Juni 2021	Pemunduran Pengumuman Pemenang (*vide* Bukti C155). Adapun pengunduran pengumuman pemenang ini disampaikan melalui email dari Kepala Divisi Pengadaan kepada Peserta yang pada pokoknya menyatakan pengumuman pemenang diundur sampai dengan finalisasi BAKN selesai.	
17 Juni 2021	Notulensi Rapat tanggal 17 Juni 2021 dengan agenda rapat "*Project Update TIM,LRT Fase 1,LRT Fase 2A & 2B, JIS, FPSA, Pantai KMB*" yang dihadiri oleh Dewan Direksi Terlapor I (Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Pengembangan Bisnis, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Pengelolaam Aset bersama dengan BoD Support yang terdiri dari Divisi TMO, Divisi Corsec, Divisi Hukum, dan Divisi SPI (*vide* Bukti T1.32). 1) Bahwa Bpk Taufiq sebagai Direktur yang membawahi Pengadaan memutuskan untuk melakukan Lelang Ulang. 2) Bahwa Divisi Hukum telah mengingatkan sekalipun terdapat ketentuan Pasal 38 dalam RfP yang mengatur hak bagi Jakpro untuk melakukan pembatalan tender, maka sesuai klausul tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai justifikasi bagi Jakpro jika ingin melakukan pembatalan. 3) Bahwa user menyampaikan surat yang disampaikan MK adalah atas penilaian awal, reviu penilaian bersama user. Namun kesimpulan dari MK tetap mengacu pada keputusan yang sudah diumumkan yang kemudian ditanggapi oleh Direktur Utama Terlapor I yang menyampaikan Bapak Taufiq yang memutuskan, namun Tim Adhoc yang mengumumkan kepada Peserta Tender, adapun Surat dari Tim Adhoc dan surat MK tetap ada sebagai referensi Bapak Taufiq dalam memberikan keputusan. 4) Bahwa terkait dasar pembatalannya, Direktur SDM dan Umum menyatakan karena adanya perbedaan definisi kriteria dan melakukan *scoring* yang berbeda, hal ini juga diakui oleh MK. Kemudian MK	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	menyatakan bahwa keputusan hasil reviu tidak mengikat/tidak diumumkan terhadap peserta karena tidak diatur dalam RfP . 5) Bahwa Direktur Utama Terlapor I menyatakan proses usulan penetapan pemenang diganti menjadi usulan pembatalan tender dengan dokumentasi hasil meeting klarifikasi antara MK dengan *user*. 6) Bahwa dalam akhir pembahasan, Direktur Utama Terlapor I menyebutkan dengan hasil klarifikasi, seharusnya Surat Penyampaian dari Tim MK, Memo Penyampaian Usulan Pembatalan Tender dari Tim Adhoc, dari dokumen tersebut, Bapak Taufiq selaku Pejabat yang berwenang, memberikan Keputusan serta dengan dasar Surat Pembatalan tersebut, Tim Adhoc menyampaikan pengumuman kepada Peserta terkait Pembatalan Tender. 7) Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Tim Adhoc direkomendasikan agar dapat menyampaikan Memo Usulan Pembatalan tender ke Direktur terkait dengan dilengkapi Dokumen yang detail atas pembatalan tersebut pada tanggal 18 Juni 2021.	
18 Juni 2021	Tim Panitia Pengadaan menyampaikan memo kepada Direktur SDM dan Umum selaku Direktur yang membawahi Divisi Pengadaan perihal Laporan Progress Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi TIM Tahap III yang memuat antara lain (*vide* Bukti T1.41): a. Pada tanggal 05 Juni 2021, sesuai permintaan dilakukan reviu atas hasil evaluasi teknis proposal dengan hasil adanya perbedaan penafsiran antara Tim MK dan User yang tidak dijelaskan secara eksplisit di RfP dan KAK, namun pihak MK dan Tim Panitia Pengadaan tetap berpegang pada hasil pengumuman teknis yang sudah diterima peserta. b. Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen pengadaan. c. Terhadap butir b. di atas menurut pandangan Panitia Pengadaan, telah terjadi persaingan yang sehat karena seluruh peserta yang menyampaikan penawaran telah lulus evaluasi administrasi, 3 (tiga) peserta dinyatakan lulus teknis dan harga serta nilai penawaran yang bersaing; dalam pelaksanaannya tim independent dan diikat dengan pakta integritas; dan peserta telah tanggap (responsif) terhadap RfP dan hasil Aanwijzing dengan disampaikan penawaran baik administrasi, teknis dan harga termasuk penyampaian surat dukungan dari kontraktor spesialis. d. Mengingat proses sudah mengalami pengunduran jadwal yang cukup lama, maka sebaiknya hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga (telah dilakukan tanggal 14 Juni 2021) segera dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu Pengumuman Pemenang. e. Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 terdapat surat pengaduan dari PP-Jakon KSO yang telah ditindaklanjuti oleh Tim/Panitia Pengadaan berupa pembahasan dengan Tim MK dan Divisi Pengadaan, yang antara lain menyimpulkan bahwa pengaduan ini tidak dapat dijadikan justifikasi tender ulang, karena sesuai RfP poin 48.1 yang menyatakan “Dalam hal pelelangan	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	dinyatakan gagal sebagaimana disebutkan dalam poin 47, maka dilakukan pelelangan ulang". Adapun kondisi yang terjadi tidak terdapat unsur yang memenuhi poin 47 RfP.	
21 Juni 2021	Tambahan informasi terkait pengumuman peringkat dan klarifikasi & negosiasi Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III yang disampaikan melalui email pukul 15.17 WIB dari Tim Pengadaan kepada Direktur SDM dan Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C16, C28): 1) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk sebagai peringkat pertama. 2) Telah tercapai kesepakatan klarfikasi dan negosiasi. 3) Selanjutnya dapat dilakukan pengumuman pemenag.	
	PEMBATALAN HASIL TENDER/PENGADAAN	
	Direktur SDM dan Umum mengirimkan email terkait keputusan terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III kepada Ketua Tim Pengadaan yang isinya "Lelang dinyatakan Batal" dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya, keputusan tersebut diambil mengacu kepada pasal 38.2 dan 38.3 dalam *Request for Proposal* (RfP) dan selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan tidak menyetujui tahapan pengadaan selanjutnya yaitu pengumuman pemenang. Adapun pertimbangan pembatalan lelang yaitu (*vide* Bukti C16, C28, T1.41): 1) Laporan dari Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III tanggal 11 Juni 2021. 2) Laporan Pembahasan atas pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dari Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero) tanggal 10 Juni 2021 yang mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan dalam skoring beberapa aspek teknis.	
22 Juni 2021	Tim Pengadaan menyampaikan Laporan Hasil Pengadaan dengan kesimpulan sbb: Direktur SDM dan Umum mengadakan rapat perihal Pembatalan Lelang bersama-sama dengan Senior Manager Divisi Pengadaan, Ketua Tim Pengadaan Revitalisasi TIM Tahap III, dan User yang dilakukan secara *online* melalui Microsoft Teams pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, Hasil rapat tersebut antara lain: 1) Senior Manajer Divisi Pengadaan menyampaikan bahwa dengan pembatalan lelang maka proses pengadaan dinyatakan selesai dan akan ditindak lanjuti dengan pengumuman pembatalan lelang. 2) Ketua Tim Pengadaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III membacakan aturan yang tertuang dalam RfP terkait Pembatalan Lelang, Lelang Gagal, dan Lelang Ulang serta menyatakan bahwa pembatalan lelang oleh Direktur SDM dan Umum dengan alasan terdapat kesalahan dalam skoring adalah tidak diatur dalam RfP. Dengan demikian alasan atas pembatalan lelang ini diserahkan sepenuhnya kepada Direktur SDM dan Umum. 3) Senior Manajer Divisi Pengadaan menyampaikan konfirmasi apakah Pembatalan Lelang ini akan dilanjutkan pada pengumuman pembatalan lelang mengingat bahwa pembatalan lelang ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RfP. 4) Direktur SDM dan Umum menyatakan tetap pada keputusannya yaitu tetap menyatakan pembatalan lelang.	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>22 Juni 2021</td><td colspan="2">Pengumuman pembatalan lelang disampaikan Tim Panitia Pengadaan kepada peserta tender melalui email Procurement tanggal 22 Juni 2021 pukul 13.55 WIB. Pengumuman pembatalan lelang nomor : 013/PENG-PKT.18/VI/2021 yang memuat antara lain:

“Berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pada pasal 38.2 dan 38.3 dalam Request for Proposal disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">TENDER ULANG</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6 Juli 2021</td><td colspan="2">Pembentukan/Pergantian Tim Pengadaan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Terlapor I (dalam hal ini adalah M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum) membentuk dan/atau penggantian susunan Tim Pengadaan, dengan susunan menjadi sebagai berikut (vide Bukti C34):

Ketua Tim : 1. Budi Setiawan Nurcahyo (Divisi Pengadaan)
Sekretaris : 2. Andy Irianto (Divisi Pengadaan)
Anggota : 3. Surya Nugraha (Divisi Pengadaan)
4. Slamet Muhdori (Divisi MPP)
5. Irson Rodecorn (Divisi MPP)
6. Muharam Noor (Divisi Akuisisi Lahan)
7. Sigit Sukatrinenda (Proyek TIM)
Tim Ahli 1. Tim MK PT Yodya Karya
2. Tim QS PT Wolferstan Trower Indonesia</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12 Juli 2021</td><td colspan="2">Undangan Pendaftaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Kepala Divisi Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengundang 11 (sebelas) perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar sebagai rekanan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yaitu (vide Bukti C40):

1. PT Hutama Karya (Persero), Tbk;
2. PT Wijaya Karya (Persero), Tbk;
3. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk;
4. PT Waskita Karya (Persero), Tbk;
5. PT Adhi Karya (Persero), Tbk;
6. PT Brantas Abipraya (Persero);
7. PT Amarta Karya (Persero);
8. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk;
9. PT Nindya Karya (Persero);
10. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk;
11. PT Adhi Perkasa Gedung.

Bahwa dalam surat undangan tersebut juga diinformasikan antara lain:

– pendaftaran peserta dilakukan secara online pada tanggal 12 Juli 2021 (pukul: 13:30 WIB) sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 (pukul 15:00 WIB);
– donwload Dokumen Pengadaan (RKS) dapat dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 (pukul 15:05WIB) sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 (pukul 09:00 WIB) melalui: eproc.jakarta-propertindo.com</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">13 Juli 2021</td><td>Pendaftaran Peserta</td><td></td></tr>
<tr><td>Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, terdapat 5 (lima) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta yaitu (vide Bukti C33):
1. PT Wijaya Karya (Persero), Tbk;
2. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk;
3. PT Waskita Karya (Persero), Tbk;
4. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk;
5. PT Adhi Karya (Persero), Tbk;</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">14 Juli 2021</td><td>Rapat Penjelasan (Aanwijzing)</td><td></td></tr>
<tr><td>Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Terlapor I menyelenggaran rapat penjelasan (aanwijzing) secara online yang diikuti oleh (vide Bukti C79):
<table>
<tr><td>Terlapor I :</td><td>1. Budi Setiawan Nurcahyo</td><td>(Ketua Tim Pengadaan)</td></tr>
<tr><td></td><td>2. Andy Irianto</td><td>(Sekretaris Tim Pengadaan)</td></tr>
<tr><td></td><td>3. Surya Nugraha</td><td>(Anggota)</td></tr>
<tr><td></td><td>4. Slamet Muhdori</td><td>(Anggota)</td></tr>
<tr><td></td><td>5. Irson Rodecorn</td><td>(Anggota)</td></tr>
<tr><td></td><td>6. Muharam Noor</td><td>(Anggota)</td></tr>
<tr><td></td><td>7. Sigit Sukatrinenda</td><td>(Anggota)</td></tr>
<tr><td></td><td>8. M Saefulloh</td><td>(QS)</td></tr>
<tr><td></td><td>9. Tri Wahyuedi</td><td>(MK)</td></tr>
<tr><td></td><td>10 Yofan Saman Agusta</td><td>(MK)</td></tr>
<tr><td></td><td>11. Mulya Hernandang D</td><td>(Divisi Pengadaan)</td></tr>
<tr><td></td><td>12. Rr. Luky Ismayanti</td><td>(Proyek TIM)</td></tr>
<tr><td></td><td>13. Tabah Yanda Noekman</td><td>(Proyek TIM)</td></tr>
<tr><td>Peserta</td><td>1. PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3. PT PP (Persero), Tbk</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4. PT Waskita Karya (Persero), Tbk</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5. PT Waskita Karya (Persero), Tbk</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>8. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">27 Juli 2021</td><td>Pembukaan Dokumen Penawaran</td><td></td></tr>
<tr><td>Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I menerima penawaran dari 4 (empat) peserta sebagai berikut (vide Bukti C25):
1. KSO Waskita Karya (Persero), Tbk – PT MSP,
2. PT Adhi Karya (Persero), Tbk;
3. KSO PT PP - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (PP – JAKON KSO)
4. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk;</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 Agustus 2021</td><td>Evaluasi Administrasi Teknis</td><td></td></tr>
<tr><td>Bahwa berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan oleh PT Yodya Karya diperoleh 2 (dua) peserta yang lulus karena memenuhi ambang batas teknis sebagaimana tabel berikut (vide Bukti C29):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th>Nilai</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KSO PT Waskita Karya (Persero),Tbk - PT MSP</td><td>74,97</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>95,07</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>89,78</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>76,13</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2 Agustus 2021</td><td colspan="2">Pembukaan Sampul 2/Harga Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa penawaran harga yang disampaikan ketiga peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi teknis adalah sebagai berikut (vide Bukti C26):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th></th><th>Nilai Penawaran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PP - JAKON KSO</td><td>IDR</td><td>415.815.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>IDR</td><td>372.752.000.101</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5 Agustus 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Teknis dan Harga Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa hasil evaluasi teknis dan harga adalah sebagai berikut (vide Bukti C24):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Peserta</th><th>Hasil Evalusi</th><th>Peringkat</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PP - JAKON KSO</td><td>96,13%</td><td>I</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>92,85%</td><td>II</td></tr>
</table>
Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan harga tersebut maka PP - JAKON KSO disimpulkan memenuhi persyaratan terbaik dari aspek administrasi, teknis, dan harga.</td></tr>
<tr><td>6 Agustus 2021</td><td colspan="2">Klarifikasi dan Negosiasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa Tim Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran PP - JAKON KSO yang dihadiri: Budi Setiawan Nurcahyo (Ketua Tim Pengadaan), Joko Rahardjo (PP – JAKON KSO), Rr. Luky Ismayanti, Bapak Tabah Yanda Noekman, dan Bapak Wenang (Proyek Taman Ismail Marzuki), Konsultan Management Konstruksi PT Yodya Karya (Persero), dan Konsultan Quantity Surveyor PT Wolferstan Trower Indonesia.

Adapun setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi maka disetujui hal - hal sebagai berikut (vide Bukti C27):

11) Penawaran Awal adalah sebesar Rp378.013.636.364,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) belum termasuk PPN 10%, atau Rp415.815.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi adalah sebesar Rp377.272.727.273,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus Klarifikasi tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh dan negosiasi puluh tiga rupiah) belum termasuk PPN 10, atau Rp415.000.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

12) Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan yang diajukan dalam penawaran selama 4,5 bulan kalender sudah dengan pertimbangan terhadap pandemi covid;

13) Bahwa kontraktor tidak akan mengganti kemitraan yang sudah di masukkan dalam penawaran;

14) Semua spesifikasi material yang di gunakan akan menyesuaikan dengan yang ada dalam spesifikasi teknis;

15) Semua personil yang ditugaskan adalah sesuai dengan personil dalam</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	dokumen penawaran, jika ada pergantian personil harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan kualifikasi min sama atau lebih baik; 16) Kontraktor akan melakukan presentasi ke user mengenai Tahap Perencanaan Teknis DED untuk desain "*under guideline*" pada saat dilakukan *kick-off metting*; 17) Kontraktor bersedia untuk mulai kerja setelah Surat Penetapan Mitra Kerja (SPMK) ditandatangani, tanpa menunggu SPK/Kontrak jadi terlebih dahulu; 18) Kontraktor tidak mendetailkan biaya pada Pekerjaan Persiapan (Bill No. 1) sehingga *progress* lapangan pekerjaan ini akan mengikuti *progress* lapangan pekerjaan terukur (Bill No. 2 sd 9); 19) Tata Cara Pembayaran Adapun tata cara pembayaran akan dilaksanakan setelah diterimanya *invoice*, dengan tahapan sebagai berikut: d) Uang Muka: 10% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp37.727.272.727,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) belum termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani dan diserahkan Jaminan Uang Muka dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum; e) Termin Bulanan: *Monthly Progress Payment* berdasarkan progress lapangan sesuai dengan kurva-S dikurangi cicilan uang muka 10% dan retensi 5% dari nilai yang ditagihkan disertai dengan *invoice* dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Tagihan bisa dilakukan setelah kontrak ditandatangani; f) Retensi: Sebesar 5% dibayarkan setelah masa pemeliharaan (retensi) selesai dilengkapi dengan BAST II selama 12 bulan. 20) Jangka Waktu Pelaksanaan d) Total waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Penetapan Mitra Kerja (SPMK) sampai dengan 31 Desember 2021 untuk seluruh massa bangunan yang dikerjakan secara keseluruhan; e) Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyusun matrik tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing item pekerjaan; f) Rencana dan Waktu Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang disampaikan.	
8 Agustus 2021	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga (File I dan File II	
	Bahwa Tim Pengadaan menyampaikan pemberitahuan kepada para peserta tender terkait hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti C121):	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th colspan="2">Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>Nama Peserta</th><th>Adm</th><th>Nilai Teknis</th><th>Penawaran Harga (Rp)</th><th>Harga Koreksi (Rp)</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>PT PP - JAKON KSO</td><td>Lulus</td><td>95,07</td><td>415.815.000.000</td><td>378.013.636.364</td><td>Peringkat I</td></tr>
<tr><td>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk</td><td>Lulus</td><td>89,78</td><td>372.752.000.101</td><td>372.752.000.101</td><td>Peringkat II</td></tr>
<tr><td>PT Adhi Karya (Persero), Tbk</td><td>Lulus</td><td>76,13</td><td></td><td>-</td><td>Tidak Lulus</td></tr>
<tr><td>Waskita - MSP (KSO)</td><td>Lulus</td><td>74,97</td><td></td><td>-</td><td>Tidak Lulus</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9 Agustus 2021</td><td colspan="3">Pengumuman Pemenang Tender</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bahwa Tim Pengadaan mengumumkan PP-Jakon KSO sebagai pemenang tender dengan masa sanggah ditetapkan mulai tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 pukul 15:30 WIB (vide Bukti C40).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12 Agustus 2021</td><td colspan="3">Usulan Penetapan Pemenang Tender</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bahwa Tim Pengadaan menyampaikan laporan proses tender dan mengusulkan PP-Jakon KSO sebagai kontraktor pelaksana kepada Direktur SDM dan Umum Terlapor I (vide Bukti B12, C30, C38).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16 Agustus 2021</td><td colspan="3">Penetapan Pemenang Tender</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bahwa PP-Jakon KSO ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana jasa konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisai Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (vide Bukti B12, C40).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14 September 2021</td><td colspan="3">Kontrak</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bahwa Terlapor I menandatangani kontrak pekerjaan dengan pemenang tender (PP-Jakon KSO) dengan nilai proyek sebesar Rp.415.000.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen)(vide Bukti C113).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">21 September 2021</td><td colspan="3">Laporan Hasil Reviu Tim Pengawas Intern PT Jakarta Propertindo (Perseroda) terhadap Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM) TAHAP II</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kesimpulan dimaksud pada pokoknya sebagai berikut:
1) Permintaan reviu (penilaian ulang) kepada konsultan MK dilakukan setelah adanya pembahasan dengan User sebagaimana disampaikan pada butir 14 di atas. Namun demikian kesimpulan yang dituangkan pada Laporan Pembahasan Atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki – Tahap III tanggal 10 Juni 2021 konsultan MK menyatakan:
a) Skor hasil pembahasan reviu (penilaian ulang) tidak mengikat kepada peserta tender, karena hasil evaluasi teknis telah diumumkan pada tanggal 31 Mei 2021.
b) Mekanisme pengumuman hasil reviu (penilaian ulang) tidak terdapat dalam RfP. Dimana RfP merupakan kesepakatan antara penyelenggara tender dengan peserta. Dan saat memasukan mekanisme baru yang tidak disepakati diawal atau didalam RfP, maka berpotensi akan menimbul penyampaian sanggah oleh peserta.
2) Adanya concern dari Direksi untuk dilakukan pemaparan terlebih dahulu kepada Direksi sebelum dilakukan pengumuman kepada pihak</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	eksternal dapat dipahami, untuk meyakinkan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian yang sesuai dengan RfP dengan merujuk pada KAK. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 97 ayat 1 UU PT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Sesuai SOP Pengadaan Barang dan Jasa, tidak terdapat adanya prosedur pemaparan kepada Direksi sebelum pengumuman hasil evaluasi disampaikan kepada peserta lelang. Kondisi tersebut disebabkan: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum menguraikan definisi yang jelas dan komprehensif terkait dengan pengalaman perusahaan terutama pada definisi interior. 2) Tim Konsultan MK yang terlibat dalam proses pengadaan belum melaksanakan pekerjaannya sesuai ekspektasi User/Proyek Revitalisasi TIM. 3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara User dengan konsultan MK sebagai konsultan yang menyiapkan dokumen pengadaan (KAK, RfP, Penilaian Teknis) sehingga tujuan lingkup pekerjaan yang terdapat di KAK tidak dapat diterjemahkan kedalam evaluasi teknis yang terdapat di RfP dan bobot unsur-unsur yang dinilai yang terdapat dalam penilaian teknis Bahwa opini hasil reviu Tim Pengawas Intern Terlapor I secara umum pada pokoknya menyatakan: (Pelaksanaan Pegadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III telah sesuai dengan ketentuan Manual Pengadaan Barang/Jasa dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa serta ketentuan lain yang mendasarinya, namun demikian terkait penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terdapat prinsip transparansi yang belum sepenuhnya dijalankan yaitu tidak terdapatnya penjelasan yang memadai terkait definisi “Interior” dalam Kerangka Acuan Kerja sehingga berdampak adanya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan berubahnya penilaian teknis yang sudah terlanjur diumumkan.	

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

7.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-

7.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

7.2.1. *Unsur Pelaku Usaha;* ----------

7.2.2. *Unsur Bersekongkol.* ----------

7.2.3. *Unsur Pelaku Usaha Lain;* ----------

7.2.4. *Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan* ----------

7.2.5. *Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.* ----------

7.3. Unsur Pelaku Usaha. ----------

7.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".* ----------

7.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

7.3.3. Bahwa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Terlapor I merupakan pelaku usaha yang secara badan hukum telah diberikan penugasan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan dan perawatan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. ----------

7.3.4. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada Tim Pengadaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 tentang Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

7.3.5. Bahwa Tim Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I sehingga perbuatan dan/atau tindakannya secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk dan atas nama serta menjadi tanggung jawab Terlapor I.----

7.3.6. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**. ----------

7.4. Unsur Bersekongkol. ----------

7.4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*. ----------

7.4.2. Bahwa perubahan konstruksi Pasal 22 UU No. 5 1999 terkait frasa pihak lain, maka dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, maka yang dimaksud bersekongkol adalah *"Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain atas inisiatif siapapun dan dengan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

cara apapun dalam upaya memenangkan tender tertentu". ----------

7.4.3. Bahwa dalam pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bersekongkol dapat berupa: ----------

a. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih;* ----------

b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan Tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;* ----------

c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*----------

d. *Menciptakan persaingan semu;*----------

e. *Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------

f. *Tidak menolak melakukan suatu Tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*----------

g. *Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.* ----------

7.4.4. Tentang Tindakan Terlapor I Menyetujui dan/atau Memfasilitasi Terjadinya Persekongkolan. ----------

a. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4):----------

1) Bahwa Terlapor I diduga melakukan tindakan berupa memfasilitasi Terlapor II - Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(KSO) untuk memenangkan tender dengan cara Terlapor I membatalkan tender pertama dan melakukan tender ulang untuk memenangkan Terlapor II - Terlapor III (KSO). -

2) Bahwa Terlapor I membatalkan tender proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dengan alasan yang berubah-ubah. ----------

3) Bahwa pembatalan tender pertama dilakukan oleh Direktur SDM dan Umum Terlapor I setelah keluar hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang mana pada tender pertama tersebut peringkat pertama adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. dan peringkat kedua adalah Terlapor II - Terlapor III (KSO). ----------

4) Bahwa pengumuman pembatalan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Terlapor I hanya memberitahukan bahwa Direktur SDM dan Umum tidak menyetujui tahapan pengumuman tender dan tender dinyatakan batal tanpa menyertakan alasan pembatalan tender tersebut. ----------

5) Bahwa pada tender ulang, Terlapor II - Terlapor III (KSO) memenangkan tender dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) Tbk. menjadi peringkat kedua. ----------

b. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti T1.4, T1.44): ----------

1) Bahwa terdapat indikasi kuat adanya kolusi/persekongkolan antara oknum Manajemen Konstruksi (MK) dan oknum Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan untuk memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. antara lain: ----------

i. Bahwa setelah Tim Pengadaan mengetahui kesalahannya berdasarkan reviu yang dilakukan, secara tiba-tiba Tim Pengadaan mengumumkan pemenang pada tanggal 10 Juni 2021 secara sepihak. Bahkan oknum Manajemen Konstruksi (MK) sekalipun mengakui terjadi perbedaan hasil penilaian antara nilai awal dengan nilai hasil reviu tetap memaksakan untuk mengumumkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. sebagai pemenang. Padahal PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk bukan peserta terbaik dalam penilaian awal maupun penilaian reviu. Di sisi lain, pengumuman tersebut dilakukan oleh oknum Manajemen Konstruksi (MK) dengan dalih hasil reviu tidak dikenal dalam RfP. ----------

ii. Bahwa Terlapor I mendapatkan informasi terdapat peserta lelang yang hasil evaluasi administrasi teknis tertinggi tetapi menjadi peringkat terendah setelah evaluasi harga. Hal ini aneh, karena lelang *a quo* adalah lelang kualitas (*quality bidding*) yang memberikan porsi teknis lebih besar dari porsi harga (70% : 30%). Menyikapi hal tersebut, Terlapor I meminta kepada Tim Pengadaan untuk melakukan reviu ulang atas hasil evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis untuk memastikan penilaian dilakukan dengan objektif.----------

2) Bahwa terdapat indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat antara lain: ----------

i. Bahwa terdapat praktik banting harga yang tidak wajar. ----------

ii. Bahwa terdapat tindakan oknum Tim Pengadaan yang tertutup dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Terlapor I sebagai *user* (Pengguna Barang) dan memiliki kecenderungan terhadap salah satu peserta lelang, oleh karenanya kemudian Direksi melakukan rapat dan memutuskan untuk membatalkan lelang tersebut. ----------

c. Bahwa sebelum menganalisis lebih lanjut, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan alat bukti dokumen sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6 tentang Kronologis Tender sebagai berikut: --------

(1) Laporan Pembahasan atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki – Tahap III tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) dan diajukan kepada Tim Pengadaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (*vide* Bukti C148, T1.26).----------

(2) Laporan Hasil Akhir tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat oleh Tim Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

("PKJ TIM") Tahap II yang unsurnya terdiri dari Tim Pengadaan Barang/Jasa, Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero), dan Tim *Quantity Surveyor* PT Wolferstan Trower Indonesia (*vide* Bukti T1.18). ----------

(3) Notulensi Rapat tanggal 17 Juni 2021 dengan agenda rapat "*Project Update TIM, LRT Fase 1, LRT Fase 2A & 2B, JIS, FPSA, Pantai KMB*" (*vide* Bukti T1.32).----------

(4) Laporan Hasil Reviu Tim Pengawas Intern PT Jakarta Propertindo (Perseroda) terhadap Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III tanggal 21 September 2021 (*vide* Bukti T.41).--

(5) Keterangan Saudara M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai Saksi dari Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan alasan pembatalan adalah karena; (i) adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu adanya praktik banting harga yang tidak wajar; dan (ii) adanya oknum Tim Pengadaan yang tertutup dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Terlapor I sebagai *user* (Pengguna Barang) dan memiliki kecenderungan terhadap salah satu peserta lelang, oleh karenanya kemudian Direksi melakukan rapat dan memutuskan untuk membatalkan lelang tersebut (*vide* Bukti B21). Dalam hal ini, Manajemen Konstruksi (MK) dianggap gagal menerjemahkan kebutuhan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan konsep Terlapor I pada lelang yang dibatalkan. Dimana, RfP lelang batal yang disusun oleh Konsultan MK tidak sesuai dengan kebutuhan dan konsep Terlapor I.------

d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Bahwa alasan pembatalan tender sebagaimana diuraikan Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya, keterangan Saksi serta alat-alat bukti dokumen yang diajukan Terlapor I selama proses penyelidikan dan/atau proses persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 4.1.3, butir 6, dan butir 7.4.4 adalah sebagai berikut:----------

Tabel 14.
Alasan Pembatalan Tender Terlapor I

NAMA DOKUMEN	TANGGAL	VIDE BUKTI	ISU PENTING
Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan Terlapor I	30 Januari 2023 & 5 Juni 2023	T1.4, T1.44	Terdapat indikasi kuat adanya kolusi/persekongkolan antara oknum Manajemen Konstruksi (MK), dan oknum Tim Pengadaan untuk memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk
Keterangan Saudara M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai Saksi Terlapor I	9 Mei 2023	B21	1. Terdapat indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu adanya praktik banting harga yang tidak wajar; dan 2. Terdapat oknum Tim Pengadaan yang tertutup dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Terlapor I sebagai *User* (Pengguna Barang) dan memiliki kecenderungan terhadap salah satu peserta lelang, oleh karenanya kemudian Direksi melakukan rapat dan memutuskan untuk membatalkan lelang tersebut. Manajemen Konstruksi (MK) dianggap gagal menerjemahkan kebutuhan dan konsep Terlapor I pada Lelang yang dibatalkan. Dimana, RFP Lelang Batal yang disusun oleh Manajemen Konstruksi (MK) tidak sesuai dengan kebutuhan dan konsep Terlapor I.
Laporan Pembahasan Atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki	10 Juni 2021	C148, T1.26	1. Perbedaan terhadap penafsiran definisi interior (pada KAK tidak dinyatakan secara eksplisit tentang pekerjaan interior) 2. Perbedaan terhadap penafsiran pengalaman Kota Besar untuk pengalaman di Lokasi Kota Besar substansinya adalah Kontraktor mengenal chemistry bekerja di kota besar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NAMA DOKUMEN	TANGGAL	VIDE BUKTI	ISU PENTING
– Tahap III			baik dari sisi environment nya maupun dari sisi aturan setempat. Pekerjaan interior itu juga hal yang melekat dengan aturan setempat apalagi mengenai manajemen lalu lintas di Lokasi Kota Besar dan segala macam hal lainnya. Karena itu Pengalaman di Lokasi Kota Besar tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sejenis.
Laporan Hasil Akhir	11 Juni 2021	T1.18	Terdapat perbedaan penafsiran terhadap definisi interior pada aspek pengalaman kerja yang pada saat pembahasan akhir kembali berkembang ke penafsiran terhadap pengalaman kota besar
Notula Rapat	17 Juni 2021	T1.32	1. Cara penilaian teknis dan pemahaman MK mengenai cara menilai serta definisi kriteria yang memang agak meragukan 2. Kesalahan dalam proses evaluasi 3. Terdapat perbedaan definisi kriteria dan melakukan scoring yang berbeda
Laporan Hasil Reviu dari SPI	21 September 2021	T1.41	1. Adanya *miss interpretasi* yang menghasilkan perbedaan penilaian yaitu pada unsur penilaian Pengalaman Perusahaan yang belum sesuai KAK terkait pekerjaan Interior. 2. Menurut pandangan Panitia Pengadaan, telah terjadi persaingan yang sehat karena seluruh peserta yang menyampaikan penawaran telah lulus evaluasi administrasi, 3 (tiga) peserta dinyatakan lulus teknis dan harga serta nilai penawaran yang bersaing; dalam pelaksanaannya tim independen dan diikat dengan pakta integritas; dan peserta telah tanggap (responsif) terhadap RfP dan hasil *aanwijzing* dengan disampaikan penawaran baik administrasi, teknis dan harga termasuk penyampaian surat dukungan dari kontraktor spesialis 3. Ketua Tim Pengadaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III membacakan aturan yang tertuang dalam RfP terkait Pembatalan Lelang, Lelang Gagal, dan Lelang Ulang serta menyatakan bahwa pembatalan lelang oleh Direktur SDM dan Umum dengan alasan terdapat kesalahan dalam skoring adalah tidak diatur dalam RfP. 4. Senior Manajer Divisi Pengadaan menyampaikan konfirmasi apakah Pembatalan Lelang ini akan dilanjutkan pada pengumuman pembatalan lelang mengingat bahwa pembatalan lelang ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RfP. 5. Direktur SDM dan Umum menyatakan tetap pada keputusannya yaitu tetap menyatakan pembatalan lelang.

2) Bahwa adanya alasan pembatalan tender yang diajukan Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam Tabel 14, dapat dianggap sebagai justifikasi Terlapor I untuk membenarkan pembatalan tender dilakukan dalam rangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menindaklanjuti adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat. ----------

Namun demikian, Majelis Komisi menilai perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan/atau aturan-aturan terkait pembatalan tender yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Ahli Pengadaan sebagai berikut:------

Saudara Ir. Riad Horem, Dipl., H.E. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Terlapor II dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya menyatakan PA/KPA dapat membuat surat penetapan lelang tidak dilanjutkan ketika terdapat justifikasi (dasar pembatalan). ----------

Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., KN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Investigator dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B25): -

i. Bahwa pembatalan tender harus dengan alasan yang sah.----------
ii. Bahwa alasan pembatalan tender itu harus sesuai aturan dan dapat diterima misalnya terjadi KKN, ditemukan kesalahan, ditemukan pelanggaran prosedur, atau ditemukan tindakan *post bidding.* ----------
iii. Bahwa kalau alasan pembatalannya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan, itu diperbolehkan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana diuraikan di atas, pembatalan tender dapat dilakukan selama terdapat justifikasi yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.-

3) Bahwa terhadap justifikasi Terlapor I dalam hal terdapat indikasi kuat adanya kolusi/persekongkolan antara oknum Konsultan MK dan oknum Tim Pengadaan untuk memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. yang menurut Terlapor I ditunjukkan dengan adanya penggantian oknum Tim Pengadaan dan staf Konsultan MK tidak cukup terbukti mengingat; (i) Terlapor I tidak pernah mengajukan bukti tambahan baik tertulis maupun tidak tertulis selama proses persidangan serta (ii) Terlapor I tidak melakukan pembuktian secara intensif dalam pemeriksaan Saksi terhadap Saudara M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum Terlapor I serta Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) baik terhadap Sdr. Tri Wahyuedi S.Sn., dan Saudara Antariksa Artidi masing-masing selaku Kepala Divisi Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Periode sebelum bulan Februari 2022 dan Periode sesudah bulan Februari 2022 serta Saudara Yofan Saman Agusta dan Saudara Wolter N. Piri selaku staf Konsultan MK sebagai pihak yang terkait langsung dengan indikasi kolusi dimaksud. Hal tersebut bahkan dikuatkan dengan keterangan Saudara Yofan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saman Agusta dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sudah tidak terlibat secara aktif dalam proses tender ulang karena Saksi ditugaskan untuk fokus bekerja di lapangan dan kepindahan Saksi ke Medan dikarenakan mendapatkan promosi jabatan dan bukan demosi (*vide* Bukti B18). ----------

Bahkan dalam Notula Rapat Agenda *Biweekly Project Progress Update* tanggal 17 Juni 2023, tidak tergambar adanya pembahasan mengenai penggantian oknum Tim Pengadaan dan/atau Konsultan MK dikarenakan adanya dugaan kolusi/persekongkolan sebagaimana disampaikan Terlapor I dalam Tanggapan LDP dan Kesimpulannya (*vide* Bukti T1.32). ---------

4) Bahwa terhadap justifikasi Terlapor I dalam hal terdapat praktik banting harga yang tidak wajar yang ditunjukkan dengan rendahnya item harga untuk *overhaul* teater bintang sebesar ± Rp. 8 milyar, dimana harga tersebut memiliki selisih harga yang sangat jauh (± Rp. 12 milyar) dengan 2 (dua) peserta lain dan harga HPS tidak cukup terbukti mengingat Terlapor I tidak melakukan pembuktian secara intensif dalam pemeriksaan Saksi terhadap Saudara Andy Faisal selaku Manager Pemasaran Wilayah 2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. sebagai pihak yang diduga melakukan indikasi banting harga dimaksud. ----------

Bahwa Klausul 35.4 pada dokumen RfP terkait Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, mengatur ketentuan mengenai salah satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

aspek penilaian yang dilakukan oleh Konsultan *Quantity Surveyor* (selanjutnya disebut Konsultan QS) antara lain klarifikasi terhadap biaya satuan harga yang ditawarkan oleh peserta dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran (*vide* Bukti C13, T1.10, T2.7). ----------

Adapun berdasarkan alat bukti dokumen terkait Perbandingan Penawaran Harga Peserta Lelang dengan Perhitungan HPS WT Partnership selaku Konsultan QS pada tender batal menunjukkan bahwa Konsultan QS telah memeriksa penawaran dan tidak ditemukan koreksi aritmatika di dalam penawaran sehingga tidak ada perubahan nilai penawaran sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*vide* Bukti C22): ----------

Gambar 9.
Perbandingan Penawaran Harga (Tender Batal) Peserta Lelang dengan Perhitungan HPS WT Partnership



WT PARTNERSHIP
Quantity Surveyors and Construction Cost Consultants

Ref.0394/MS/VI/21
7 Juni 2021

PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
Gedung Thamrin City Lantai 1 Lobby Timur
Jalan Thamrin Boulevard
Jakarta

UP: Bapak Achmad Ismarwan – Ketua Tim Pengadaan
Bapak Budi Setiawan Nurcahyo – Sekretaris Tim

Dengan hormat,

RE: PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA
TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III
PERBANDINGAN PENAWARAN HARGA

Bersama ini kami kirimkan Perbandingan Penawaran Harga untuk Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dengan urutan peringkat sebagai berikut :

Nama Penyedia Barang / Jasa	Nilai Penawaran Harga (sudah termasuk PPN 10%)	Peringkat
PT Adhi Karya (Persero)	Rp.397,018,888,888	Pertama
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Rp.418,388,000,000	Kedua
PP – JAKON KSO	Rp.446,264,400,000	Ketiga

Kami telah memeriksa penawaran dan tidak ditemukan kesalahan aritmatika didalam panawaran sehingga tidak ada perubahan nilai penawaran.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA
TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III
REKAPITULASI HARGA - PEMASUKAN TANGGAL 24 MEI 2021

WT PARTNERSHIP

		WT PARTNERSHIP IDR	PT ADHI KARYA (PERSERO) IDR	PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG IDR	PT PP JAKON KSO IDR
BILL NO. 1	PEKERJAAN PERSIAPAN	20.426.285.000	1.154.103.500	7.593.500.000	11.264.090.300
BILL NO. 2	PENERAPAN SMK3	773.968.000	507.800.000	1.500.000.000	663.921.762
BILL NO. 3	PERPUSTAKAAN DAN WISMA SENI	80.712.304.900	74.546.510.964	59.325.490.280	61.077.947.[illegible]
BILL NO. 4	GRAHA BAKTI BUDAYA	150.305.824.900	153.446.673.757	154.166.809.570	150.245.716.322
BILL NO. 5	PLANETARIUM DAN PUSAT LATIHAN SENI	54.525.636.700	50.175.553.056	54.543.032.070	47.451.941.610
BILL NO. 6	GALERI ANNEX	516.535.500	536.732.940	415.055.270	436.057.980
BILL NO. 7	INTERIOR SPECIAL LIGHTING DAN LIGHTING CONTROL	26.492.919.500	16.844.397.553	17.036.747.327	27.424.645.521
BILL NO. 8	AUDIO VIDEO COMMUNICATION DAN LAMPU PANGGUNG TEATER GBB	83.292.601.900	42.695.313.078	76.919.308.465	86.084.856.756
BILL NO. 9	PERALATAN TEATER BINTANG - OVERHAUL	21.133.142.800	21.019.177.778	8.853.144.410	21.045.500.000
	TOTAL: -	438.179.219.200	360.926.262.626	380.353.087.192	405.694.909.091
	PPN 10%:-	43.817.921.920	36.092.626.263	38.035.308.719	40.569.490.909
	TOTAL KE SURAT PENAWARAN	481.997.141.120	397.018.888.888	418.388.000.000	446.264.400.000
	PERINGKAT		#1	#2	#3

Dibuat oleh :
WT Partnership

IR. M. SAEFULLOH, IPM
Associate / Team Leader

Bahwa demikian juga dalam prosesnya, Konsultan QS diketahui telah melakukan proses klarifikasi teknis dan negosiasi harga dimana tujuan klarifikasi teknis dan negosiasi harga tersebut adalah untuk menilai kewajaran harga dari harga yang berlaku di pasaran yang mana dalam proses tersebut telah diperoleh kesepakatan. Dengan demikian, tidak cukup terbukti bahwa harga yang ditawarkan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. merupakan bagian dari praktik banting harga. Hal tersebut dikuatkan juga dengan tidak adanya pembahasan khusus terkait praktik banting harga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (*vide* Bukti C21).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa terhadap justifikasi Terlapor I dalam hal terdapat oknum Tim Pengadaan yang tertutup dalam menjalankan tugasnya yang menurut Terlapor I ditunjukkan dengan tidak adanya laporan berkala dari Tim Pengadaan kepada Direktur SDM dan Umum tidak cukup terbukti mengingat Terlapor I tidak melakukan pembuktian secara intensif dengan tidak menghadirkan Tim Pengadaan yang sesuai dengan fakta persidangan telah diajukan sebagai Saksi Majelis Komisi sebagai pihak yang terkait langsung dengan indikasi dimaksud. ----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, Tim Pengadaan sebagaimana Surat Tugas Nomor 118/OP0000/IV/2021/0026 tanggal 27 April 2021 diketahui terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Tim Pengadaan Barang/Jasa, Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero), dan Konsultan QS PT Wolferstan Trower Indonesia yang terbukti telah beberapa kali melakukan komunikasi dan/atau koordinasi dengan menyampaikan laporan berkala kepada Direktur SDM dan Umum selama proses tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut (*vide* Bukti C23): ----------

Tabel 15.
Rangkaian Komunikasi dan/atau Penyampaian Laporan Tim Pengadaan kepada Direktur SDM dan Umum Selama Proses Tender

Tanggal Email	*Vide* Bukti	Pengirim	Penerima	Judul Surat/Email	Isi Email
30 Mei 2021	C8	PT Yodya Karya (Persero)	Jakpro	Surat: Penilaian Hasil Evaluasi Teknis	1. Mengenai jumlah penawar 2. Hasil Penilaian Teknis
1 Juni 2021	B18				Undangan untuk Paparan menjelaskan cara melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal Email	*Vide* Bukti	Pengirim	Penerima	Judul Surat/Email	Isi Email
					evaluasi dan hasil penilaian di hadapan Direktur SDM dan Umum, Tim Pengadaan, dan *User*
2 Juni 2021	B18				Pelaksanaan Paparan
3 Juni 2021 Pukul 08.00-09.30	T1.41	Direktur SDM dan Umum melalui Sekretaris Direktur SDM dan Umum	Konsultan MK		Permintaan Direktur SDM dan Umum untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis yang telah diumumkan tanggal 31 Mei 2021
4 Juni 2021 Pukul 09.30-10.30	T1.41	Direktur SDM dan Umum melalui Sekretaris Direktur SDM dan Umum	Konsultan MK		Permintaan Direktur SDM dan Umum untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis yang telah diumumkan tanggal 31 Mei 2021
5 Juni 2021 Pukul 11.00-12.30	T1.41	Direktur SDM dan Umum melalui Sekretaris Direktur SDM dan Umum	Konsultan MK		Permintaan Direktur SDM dan Umum untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis yang telah diumumkan tanggal 31 Mei 2021
7 Juni 2021 Pukul 09.00-10.30	T1.41	Direktur SDM dan Umum melalui Sekretaris Direktur SDM dan Umum	Konsultan MK		Permintaan Direktur SDM dan Umum untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis yang telah diumumkan tanggal 31 Mei 2021
7 Juni 2021 pukul 05.55	C70	WT Partnership	Tim Pengadaan	Perbandingan Harga Penawaran	Mengirimkan laporan perbandingan penawaran harga tender pada tender batal
9 Juni 2021 Pukul 09.00-10.30	T1.41	Direktur SDM dan Umum melalui Sekretaris Direktur SDM dan Umum	Konsultan MK		Permintaan Direktur SDM dan Umum untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis yang telah diumumkan tanggal 31 Mei 2021
10 Juni 2021	C19				Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Harga
10 Juni 2021	C148, T1.26	Konsultan MK	Tim Pengadaan	Laporan Pembahasan atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis	1. Skor hasil pembahasan reviu ini tidak mengikat kepada peserta tender, karena hasil evaluasi teknis telah diumumkan pada tanggal 31 Mei 2021. 2. Mekanisme pengumuman hasil reviu tidak terdapat dalam RfP. Dimana RfP merupakan kesepakatan antara penyelenggara tender dengan peserta. Dan saat memasukkan mekanisme baru yang tidak disepakati di awal atau di dalam RfP, maka berpotensi akan menimbulkan penyampaian sanggah oleh peserta.
11 Juni 2021	T1, 18, T1.41	Tim Pengadaan	Direktur SDM dan Umum	Laporan Hasil Akhir	1. Terhadap hasil pengumuman dan laporan hasil evaluasi harga, terdapat permintaan dari Direktur SDM dan Umum untuk melakukan pembahasan atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal Email	*Vide* Bukti	Pengirim	Penerima	Judul Surat/Email	Isi Email
					hasil evaluasi teknis. Pembahasan dilakukan bersama dengan *User* (Proyek TIM) yang berdampak pada penundaan pengumuman peringkat dan jadwal selesainya tender. 2. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap definisi interior pada aspek pengalaman kerja yang pada saat pembahasan akhir kembali berkembang ke penafsiran terhadap pengalaman kota besar. 3. Konsultan MK diminta untuk membantu *User* (Proyek TIM) untuk menghitung kembali *score* teknis. Terhadap hasil perhitungan kembali tersebut selanjutnya Tim Pengadaan berpendapat: a. Tidak melakukan pengumuman terhadap score hasil reviu yang dimaksud karena mekanisme tersebut tidak diatur dalam RfP dan berpotensi besar untuk diajukannya sanggah serta tingginya kemungkinan sanggah terbukti yang berakibat pada kondisi lelang gagal. b. Apabila itu diumumkan maka dalam proses negosiasi tidak berjalan optimal karena nilai peringkat pertama adalah peserta yang menawar dengan harga tertinggi, sementara penawar harga terendah tidak lolos passing grade sub aspek teknis pengalaman perusahaan.
17 Juni 2021 pukul 13.30-16.00	T1.31				Notula Rapat Dewan Direksi x BoD Support x Proyek TIM 1. Sudah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Rangking 1 dari 3 (tiga) kandidat yang lolos dalam perhitungan Tim Adhoc. 2. Cara penilaian teknis dan pemahaman Konsultan MK mengenai cara menilai serta definisi kriteria yang memang agak meragukan. 3. Kesalahan dalam proses evaluasi. 4. Terdapat perbedaan definisi kriteria dan melakukan *scoring* yang berbeda. 5. Direktur SDM dan Umum akan melakukan pembatalan lelang dan meminta Tim Pengadaan untuk lelang ulang.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal Email	*Vide* Bukti	Pengirim	Penerima	Judul Surat/Email	Isi Email
18 Juni 2021	T1.41	Tim Pengadaan	Direktur SDM dan Umum	Memo Perihal Laporan Progress Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi TIM Tahap III	1. Sesuai permintaan dilakukan reviu atas hasil evaluasi teknis proposal dengan hasil adanya perbedaan penafsiran antara Tim MK dan *User* yang tidak dijelaskan secara eksplisit di RfP dan KAK, namun pihak MK dan Tim Panitia Pengadaan tetap berpegang pada hasil pengumuman teknis yang sudah diterima peserta. 2. Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen pengadaan. 3. Menurut pandangan Panitia Pengadaan, telah terjadi persaingan yang sehat karena seluruh peserta yang menyampaikan penawaran telah lulus evaluasi administrasi, 3 (tiga) peserta dinyatakan lulus teknis dan harga serta nilai penawaran yang bersaing; dalam pelaksanaannya tim independent dan diikat dengan pakta integritas; dan peserta telah tanggap (responsif) terhadap RfP dan hasil *Aanwijzing* dengan disampaikan penawaran baik administrasi, teknis dan harga termasuk penyampaian surat dukungan dari kontraktor spesialis. 4. Mengingat proses sudah mengalami pengunduran jadwal yang cukup lama, maka sebaiknya hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga segera dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu Pengumuman Pemenang. 5. Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 terdapat surat pengaduan dari PP-Jakon KSO, Tim MK dan Divisi Pengadaan, yang antara lain menyimpulkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal Email	*Vide* Bukti	Pengirim	Penerima	Judul Surat/Email	Isi Email
					bahwa pengaduan ini tidak dapat dijadikan justifikasi tender ulang, karena sesuai RfP poin 48.1 yang menyatakan "*Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal sebagaimana disebutkan dalam poin 47, maka dilakukan pelelangan ulang*". Adapun kondisi yang terjadi tidak terdapat unsur yang memenuhi poin 47 RfP.
21 Juni 2021 pukul 15.17	C16, C28	Tim Pengadaan	Direktur SDM dan Umum	Tambahan Informasi terkait Pengumuman Peringkat dan Klarifikasi & Negosiasi Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III	1. Disampaikan PT Wika Gedung sebagai peringkat pertama. 2. Dilampirkan pengumuman peringkat hasil evaluasi teknis dan harga. 3. Disampaikan telah tercapai kesepakatan klarifikasi dan negosiasi. 4. Selanjutnya dapat dilakukan pengumuman pemenang.
21 Juni 2021 pukul 23.13	C16, C28, T1.41	Direktur SDM dan Umum	Tim Pengadaan	Keputusan terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III	1. Pejabat berwenang yang membawahi divisi pengadaan tidak menyetujui tahapan pengumuman pemenang. 2. Menyatakan lelang batal. 3. Meminta Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang dalam waktu secepatnya.
22 Juni 2021 pukul 13.00	T1.41				Rapat antara Direktur SDM dan Umum x Senior Manajer Divisi Pengadaan x Ketua Tim Pengadaan: 1. Senior Manajer Divisi Pengadaan menyampaikan bahwa dengan pembatalan lelang maka proses pengadaan dinyatakan selesai dan akan ditindak lanjuti dengan pengumuman pembatalan lelang. 2. Ketua Tim Pengadaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III membacakan aturan yang tertuang dalam RfP terkait Pembatalan Lelang, Lelang Gagal, dan Lelang Ulang serta menyatakan bahwa pembatalan lelang oleh Direktur SDM dan Umum dengan alasan terdapat kesalahan dalam skoring adalah tidak diatur dalam RfP. Dengan demikian alasan atas pembatalan lelang ini diserahkan sepenuhnya kepada Direktur SDM dan Umum. 3. Senior Manajer Divisi Pengadaan menyampaikan konfirmasi apakah Pembatalan Lelang ini akan dilanjutkan pada pengumuman pembatalan lelang mengingat bahwa pembatalan lelang ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RfP.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal Email	*Vide* Bukti	Pengirim	Penerima	Judul Surat/Email	Isi Email
					4. Direktur SDM dan Umum menyatakan tetap pada keputusannya yaitu tetap menyatakan pembatalan lelang.

6) Bahwa sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai justifikasi Terlapor I dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap definisi interior pada aspek pengalaman kerja yang pada saat pembahasan akhir kembali berkembang ke penafsiran terhadap pengalaman kota besar, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan alat bukti dokumen sebagai berikut:----------
Dokumen Kerangka Acuan Kerja ("KAK") Tender Batal (*vide* Bukti C110).----------

i. Bahwa Kerangka Acuan Kerja ("KAK") dipersiapkan *user* yang dalam hal ini adalah proyek Tim Terlapor I (*vide* Bukti B11. B12, B21). ----------

ii. Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) butir XII terkait Persyaratan Peserta disebutkan bahwa Penyedia Jasa Pelaksana adalah BUMN, BUMD, atau anak perusahaannya yang sudah terdaftar di dalam Daftar Rekanan Perusahaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang mana kriteria dan persyaratan penyedia jasanya adalah sebagai berikut: ----------
Pekerjaan interior/*fitting out*: ----------
- Gedung pertunjukan, auditorium dan *ballroom.*----------
- Hotel kelas minimal bintang 3.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Ruang kantor minimal 1000m2. ------
- Komersial lainnya.----------

Pekerjaan *equipment*:----------

- Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom.----------
- Gedung atau ruang komersial lainnya.----------

Dokumen Kerangka Acuan Kerja ("KAK") Tender Ulang (*vide* Bukti C111). ----------

i. Bahwa Kerangka Acuan Kerja ("KAK") dipersiapkan *user* yang dalam hal ini adalah proyek Tim Terlapor I (*vide* Bukti B11. B12, B21). ----------

ii. Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) butir XII terkait Persyaratan Peserta disebutkan bahwa Penyedia Jasa Pelaksana adalah BUMN, BUMD, atau anak perusahaannya yang sudah terdaftar di dalam Daftar Rekanan Perusahaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang mana kriteria dan persyaratan penyedia jasanya adalah sebagai berikut: ----------

Pekerjaan interior/*fitting out*: ----------

- Gedung pertunjukan, auditorium dan *ballroom.*----------
- Hotel kelas minimal bintang 3.--------
- Ruang kantor minimal 1000m2. ------
- Cinema dan Retail. ----------

Pekerjaan *equipment*:----------

- Gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Gedung atau ruang komersial lainnya.----------

Bahwa berdasarkan KAK tersebut, Tim Pengadaan bersama Konsultan MK dan Konsultan QS membuat Dokumen Permintaan Proposal (*Request For Proposal/"RfP"*) termasuk membuat kriteria penilaian (*vide* Bukti C13, C120, B11, B12, B21). ----------

Dokumen Permintaan Proposal (*Request For Proposal/"RfP")* Tender Batal Bulan Mei 2021 (*vide* Bukti C13, T2.7). ----------

i. Pasal 16 RfP, terkait Dokumen Penawaran dalam hal Dokumen Penawaran Administrasi mengatur ketentuan lampiran data pengalaman perusahaan antara lain sebagai berikut:-
   - Mempunyai pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, pekerjaan interior, dan peralatan. ----
   - Melampirkan *copy* kontrak dan BAST dari pengguna jasa dilengkapi dengan BQ pekerjaan interior dan peralatan. ----------
   - Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). ----------

ii. Pasal 16 RfP, terkait Dokumen Penawaran dalam hal Dokumen Teknis mengatur ketentuan data pengalaman perusahaan antara lain sebagai berikut:-
- Daftar pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) terakhir baik untuk jasa konstruksi, terutama untuk pekerjaan interior dan peralatan. ----------
- Referensi dari pengguna jasa. ---------
- Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). ----------

iii. Pasal 31 RfP terkait Evaluasi Teknis disebutkan bahwa evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan ("LDP"). Adapun Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Tim Pengadaan Terlapor I sesuai yang tercantum dalam LDP.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iv. Bahwa dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) butir 11 terkait Evaluasi Teknis, bobot unsur pokok yang dinilai diuraikan sebagai berikut:----------

Tabel 16.
Pembobotan Unsur Pokok Evaluasi Teknis

Unsur Pokok Evaluasi Teknis	Nilai
Ambang Batas Nilai Teknis	**80**
Pengalaman perusahaan	15%
Metode pelaksanaan	20%
Jadwal pelaksaan pekerjaan	10%
Daftar Personil Inti	10%
Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material Yang Digunakan	20%
Daftar Spesifikasi Teknis, Alat, Workshop, dan Gudang Yang Digunakan	20%
Rencana Penerapan Building Information Modelling (BIM) Yang Digunakan	5%

Adapun bobot unsur-unsur pokok yang dinilai khususnya terkait pengalaman perusahaan, uraiannya harus terdiri dari: ----------

- Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/pemberi tugas /pemilik pekerjaan.----------
- Apabila tidak dilengkapi referensi atau kontrak sebelumnya yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka tidak dinilai. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam. ----------
- Sub unsur yang dinilai adalah pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, untuk bangunan bertingkat tinggi, manajerial mengelola kontrak, dan kapastias mempekerjakan pegawai tetap. -------
- Ambang batas untuk penilaian pengalaman perusahaan adalah 70 (tujuh puluh). ----------

v. Bahwa dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) disebutkan ambang batas nilai teknis adalah 80 (delapan puluh). ----------

Dokumen Permintaan Proposal (*Request For Proposal/"RfP")* Tender Ulang tanggal 12 Juli 2021 (*vide* Bukti C120, T2.18). ----------

i. Pasal 16 RfP, terkait Dokumen Penawaran dalam hal Dokumen Penawaran Administrasi mengatur ketentuan lampiran data pengalaman perusahaan antara lain sebagai berikut:-
   - Mempunyai pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, pekerjaan interior, dan peralatan. ----
   - Melampirkan copy kontrak dan BAST dari pengguna jasa dilengkapi dengan BQ pekerjaan interior dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peralatan serta bukti-bukti lain yang mendukung. ----------

- Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). ----------

ii. Pasal 16 RfP, terkait Dokumen Penawaran dalam hal Dokumen Teknis mengatur ketentuan data pengalaman perusahaan antara lain sebagai berikut:-

- Daftar pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) terakhir baik untuk jasa konstruksi, terutama untuk pekerjaan interior dan peralatan. ----------
- Referensi dari pengguna jasa. ---------
- Uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iii. Pasal 31 RfP terkait Evaluasi Teknis disebutkan bahwa evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan ("LDP"). Adapun Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Tim Pengadaan Jakpro sesuai yang tercantum dalam LDP. ----------

iv. Bahwa dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) butir 11 terkait Evaluasi Teknis, bobot unsur pokok yang dinilai diuraikan sebagai berikut:----------

Tabel 17.
Pembobotan Unsur Pokok Evaluasi Teknis

Unsur Pokok Evaluasi Teknis	Nilai
Pengalaman perusahaan	15%
Metode pelaksanaan	20%
Penilaian terhadap Proposal Design	10%
Jadwal pelaksanaan pekerjaan	5%
Daftar Personil Inti	10%
Daftar Spesifikasi Teknis Barang dan Material Yang Digunakan	20%
Daftar Spesifikasi Teknis, Alat, Workshop, dan Gudang Yang Digunakan	15%
Rencana Penerapan Building Information Modelling (BIM) Yang Digunakan	5%

Adapun bobot unsur-unsur pokok yang dinilai khususnya terkait pengalaman perusahaan, uraiannya harus terdiri dari: ----------

- Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/pemberi tugas /pemilik pekerjaan.----------

- Apabila tidak dilengkapi referensi atau kontrak sebelumnya yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka tidak dinilai. ----------
- Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam.----------
- Sub unsur yang dinilai adalah pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir baik untuk jasa konstruksi, pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan. ----------

v. Bahwa dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) disebutkan ambang batas nilai teknis adalah 85 (delapan puluh lima). ----------

Dokumen Rekapitulasi Penilaian dan Uraian Penilaian Teknis Peserta Tender Batal dari Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) kepada Terlapor I (*vide* Bukti C56, C59).--------

Bahwa dalam kertas kerja penilaian teknis terkait unsur pengalaman perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir, sub unsur yang dinilai adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 18.
Pembobotan Unsur Pokok Evaluasi Teknis Tender Batal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

				Jumlah Nilai
Pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir	1	Pengalaman pekerjaan sejenis kurun waktu 10 tahun terakhir	40,00	100
	a	Pekerjaan interior/*fitting out* gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom,	7,00	
	b	Pekerjaan interior/*fitting out* hotel kelas minimal bintang 3 (main lobby dan kamar)	7,00	
	c	Pekerjaan interior/*fitting out* ruang kantor minimal 1000 m^2 (main lobby, ruang kerja)	7,00	
	d	Pekerjaan interior/*fitting out* cinema dan mall	6,00	
	e	Pekerjaan equipment gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (system tata suara)	7,00	
	f	Pekerjaan *equipment* gedung atau ruang lainnya (*furniture fixtures* dan *equipment*)	6,00	
	2	Pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan	30,00	
	3	Pengalaman di Lokasi Sejenis (Kota Besar)	7,50	
	4	Pengalaman mengelola kontrak	15,00	
	5	Kapasitas mempekerjakan pegawai tetap	7,50	

Dokumen Rekapitulasi Penilaian dan Uraian Penilaian Teknis Peserta Tender Ulang dari Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) kepada Terlapor I (*vide* Bukti C57, C58). --------

Bahwa dalam kertas kerja penilaian teknis terkait unsur pengalaman perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir, sub unsur yang dinilai adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 19.
Pembobotan Unsur Pokok Evaluasi Teknis Tender Ulang

				Jumlah Nilai
Pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir	1	Pengalaman pekerjaan sejenis kurun waktu 10 tahun terakhir		100
	a	Pekerjaan interior/*fitting out* gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom,	8,00	
	b	Pekerjaan interior/*fitting out* hotel kelas minimal bintang 3 (main lobby dan kamar)	8,00	
	c	Pekerjaan interior/*fitting out* ruang	8,00	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		kantor minimal 1000 m^2 (main lobby, ruang kerja)		
	d	Pekerjaan interior/*fitting out* cinema dan mall	8,00	
	e	Pekerjaan *equipment* gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (system tata suara)	10,00	
	f	Pekerjaan *equipment* gedung atau ruang lainnya (*furniture fixtures* dan *equipment*)	8,00	
	2	Pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan	20,00	
	3	Pengalaman mengelola kontrak	30,00	

7) Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan di atas, justifikasi Terlapor I dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap definisi interior pada aspek pengalaman kerja yang pada saat pembahasan akhir kembali berkembang ke penafsiran terhadap pengalaman kota besar tidak cukup terbukti mengingat kriteria terkait interior dan/atau pengalaman kota besar tidak didefinisikan secara eksplisit dalam dokumen KAK dan/atau dokumen RfP baik pada tender batal maupun tender ulang sebagai pedoman dan/atau acuan bersama para peserta tender.
Terdapat fakta bahwa sub unsur pokok pengalaman kota besar hanya disebutkan dalam Rekapitulasi Penilaian dan Uraian Penilaian Teknis Peserta Tender Batal dari Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) kepada Terlapor I sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 18, sedangkan pada tender ulang, pengalaman kota besar tersebut tidak disebutkan kembali sebagai salah satu sub unsur pokok evaluasi teknis sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 19. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal demikian membuktikan bahwa aspek pengalaman di lokasi sejenis (kota besar) tidak cukup signifikan menjadi sub unsur pokok dalam penilaian unsur pengalaman perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir mengingat bobot penilaian dimaksud hanya sebesar 7,50, yang mana bobot tersebut jauh lebih kecil dari sub unsur pokok yang lain yaitu pengalaman pekerjaan sejenis kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang memiliki bobot sebesar 40 (empat puluh) dan pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan yang memiliki bobot sebesar 30 (tiga puluh).---

Namun demikian, hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Tim Pengadaan pada tender batal tersebut tidak diterima oleh Direktur SDM dan Umum yang kemudian dimintakan reviu oleh *user* dan menghasilkan bobot penilaian yang berbeda. Hal tersebut tentunya menjadi bertentangan dengan justifikasi Terlapor I yang menyebutkan bahwa alasan pembatalan tender karena adanya perbedaan penafsiran interior dan pengalaman kota besar mengingat aspek penilaian tersebut diketahui sudah sejak awal disebutkan di dalam dokumen Rekapitulasi Penilaian dan Uraian Penilaian Teknis Peserta Tender dari Konsultan MK PT Yodya Karya (Persero) kepada Terlapor I sebagai salah satu aspek penilaian dalam evaluasi teknis namun pada faktanya pada tender ulang, aspek penilaian tersebut justru ditiadakan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor I turut menyebutkan alasan pembatalan tender *a quo* cukup berdasar karena sesuai dengan ketentuan Pembatalan Tender sebagaimana diatur dalam Klausul 38.2 dan Klausul 38.3 RfP mengenai Hak Pengguna Barang/Jasa untuk Menerima atau Menolak Penawaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut (*vide* Bukti C13, C17). ----------

Klausul 38.2 menyebutkan: ----------

"Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa /peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT Jakarta Propertindo (Perseroda)"----------

Klausul 38.3 menyebutkan: ----------

"Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan usaha yang sehat., terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen pengadaan". ----------

Gambar 10.
Pengumuman Pembatalan Lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PENGUMUMAN PEMBATALAN LELANG

PENGADAAN PEKERJAAN REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III.
Nomor : 013/PENG-PKT.18/VI/2021
Tanggal 22 Juni 2021

Berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum tanggal 21 Juni 2021 selaku Pejabat berwenang yang membawahi Divisi Pengadaan, dengan mengacu pada pasal 38.2 dan 38.3 dalam Request for Proposal disebutkan bahwa tahapan pengumuman pemenang tidak disetujui dan dinyatakan bahwa tender batal.

Demikian agar pengumuman ini diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2021
Tim Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi
Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki – Tahap III
Ketua,

Achmad Ismarwan

METERAI TEMPEL
10000
31949AKX054634798
Nama
Nippos
JAJAT JATNIKA
Nippos : 976366885

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ketentuan pembatalan tender sebagaimana diatur dalam Klausul 38.2 dan Klausul 38.3 RfP tender *a quo* sudah lazim digunakan dalam setiap pengadaan barang dan/jasa yang dilakukan oleh Terlapor I antara lain dalam Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap I, Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap II, Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Pekerjaan Jasa Konstruksi Rancang dan Bangun Pembangunan Hunian Pekerja Pendukung Operasional JIS, serta Paket Pekerjaan Jasa Rancang Bangun (*Design & Build*) Proyek Pembangunan Lintasan Balap Formula E (E-PRIX) (*vide* Bukti C157, C158, C159, C163, C164, C165, T2.41, T2.42, T2.43, T2.44). -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa ketentuan pembatalan tender demikian dinilai cenderung berpotensi memberikan ruang gerak bagi pihak penyelenggara tender untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan menyalahi prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik karena peserta tender tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila ditemukan adanya indikasi-indikasi persaingan tidak sehat, hal mana keberatan tersebut dapat menjadi *tools* bagi pihak penyelenggara tender untuk menguji alasan pembatalan tender apakah alasan pembatalan tender cukup berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., KN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Investigator (*vide* Bukti B25). ----------

e. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Bahwa alasan yang disampaikan Terlapor I dalam melakukan pembatalan tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Tabel 14 tidak cukup signifikan dijadikan sebagai justifikasi yang sah untuk membatalkan tender sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku sebagaimana dikuatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagai berikut:----------

i. Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., KN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Investigator yang pada pokoknya menyatakan pembatalan tender harus sesuai aturan dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (*vide* Bukti B25).----------

ii. Saudara Ir. Riad Horem, Dipl., H.E. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan PA/KPA dapat membuat surat penetapan lelang tidak dilanjutkan ketika terdapat justifikasi (dasar pembatalan)(*vide* Bukti B20).------

2) Bahwa tanpa adanya justifikasi yang sah dan berdasar, di samping berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 4.1 diketahui; (i) objek tender dan nilai HPS tender batal dan tender ulang sama; (ii) gambar design dari Andramatin pada tender batal dan tender ulang sama persis; (iii) tidak terdapat perubahan ruang lingkup melainkan hanya penjabaran setiap jenis pekerjaan jasa spesialis; serta (iv) adanya penambahan item *overhaul* teater bintang menurut Terlapor I yang kemudian diketahui item tersebut ternyata sudah menjadi bagian dari perhitungan HPS oleh Konsultan QS sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 9;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membuktikan bahwa pembatalan tender *a quo* tidak seharusnya dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M. Sc. selaku Ahli Manajemen Konstruksi dari Universitas Parahyangan Bandung dari Investigator di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B24): ----------

i. Bahwa pembatalan dilakukan hanya jika ada perubahan yang sangat frontal sekali, merubah semuanya, pekerjaannya berubah secara frontal. ----

ii. Bahwa pembatalan harus ada justifikasi teknis yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuktikan bahwa ini memang harus merombak secara frontal, baik kemampuan, peserta dan sebagainya. ---

iii. Bahwa pembatalan tidak boleh dilakukan tiba-tiba jika tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kalau tidak ada perubahan yang signifikan maka itu tidak wajar. ----------

iv. Bahwa pembatalan dapat dilakukan jika perubahannya signifikan terhadap nilai uang. ----------

v. Bahwa pembatalan dapat dilakukan jika dapat dibuktikan ada kolusi. ----------

f. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan Terlapor I sebagai bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II – Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

7.4.5. Tentang Tindakan Terlapor I Memberikan Kesempatan Eksklusif kepada Terlapor II – Terlapor III (KSO) dalam Evaluasi Teknis. ----------

a. Bahwa dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender, indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender atau lelang antara lain dapat berupa "*panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender atau lelang tertentu*". ----------

b. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor I melakukan diskriminasi dalam bentuk mengakomodasi keberatan Terlapor II - Terlapor III (KSO) terkait hasil evaluasi teknis dan bahkan ditindaklanjuti dengan pembatalan lelang, namun tidak memberikan jawaban substansial terhadap keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. karena keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk dilakukan di luar mekanisme sanggah (*vide* Bukti I2, I4). ----------

c. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti T1.4, T1.44): ----------

1) Bahwa keberatan peserta tender hanya dapat difasilitasi melalui sanggahan dan keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. di luar mekanisme sanggah yang diatur dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen RfP sehingga PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. tidak memiliki *legal standing*. ----------

2) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I untuk tidak menindaklanjuti ketidakpuasan dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. melalui surat keberatan di luar waktu dan mekanisme sanggah merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan dokumen RfP atau peraturan perundang-undangan. -----

d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Bahwa dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan telah mendapatkan informasi bahwa terdapat peserta lelang yang hasil evaluasi administrasi teknis tertinggi, tetapi menjadi peringkat terendah setelah evaluasi harga. Informasi tersebut berkesesuaian dengan hasil evaluasi administrasi teknis (File I) sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Peringkat Teknis Nomor 005/BAEVT/PKT.18/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang mana Terlapor II - Terlapor III (KSO) menempati peringkat pertama dengan nilai sebesar 92,78, namun kemudian Terlapor II - Terlapor III (KSO) menempati peringkat terbawah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis dan Harga (File I dan File II) Nomor 007/BAEVH/PKT.18/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut (*vide* Bukti C8, C19, C93): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Gambar 11.
Hasil Evaluasi Teknis Tanggal 30 Mei 2021

No	Nama Peserta	Nilai	Keterangan
1	PT Waskita Karya (Persero), Tbk	77,94	TIDAK LULUS
2	PT PP - JAKON KSO	92,78	LULUS
3	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk	92,62	LULUS
4	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	89,57	LULUS
5	PT Hutama Karya (Persero)	79,06	TIDAK LULUS

Gambar 12.
Pengumuman Peringkat Teknis Nomor 005/BAEVT/PKT.18/V/2021 tanggal 31 Mei 2021

PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
005/BAEVT/PKT.18/V/2021
Tanggal 31/05/2021

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis no : 005/BAEVT/PKT.18/V/2021 tanggal 31/05/2021 tentang hasil evaluasi atas penawaran Administrasi dan teknis untuk Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM)

Dengan ini kami sampaikan hasil peserta yang dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan Pembukaan Penawaran Harga Sampul II adalah sebagai berikut :

Data Penyedia Barang/Jasa

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.	LULUS	92.78	1
2.	PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	LULUS	92.62	2
3.	PT ADHI KARYA (Persero) Tbk	LULUS	89.57	3
4.	PT Hutama Karya (Persero)	LULUS	79.06	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis
5.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk	LULUS	77.94	Tidak Lulus karena dibawah nilai ambang kelulusan teknis

Selanjutnya akan dilakukan Pembukaan dan Evaluasi Sampul II terhadap peserta yang dinyatakan lulus.

Demikian Pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gambar 13.
Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis dan Harga (File I dan File II) Nomor 007/BAEVH/PKT.18/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran Sebelum Koreksi Aritmatik (Rp)	Nilai Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)	Hasil Evaluasi Akhir			Peringkat
				Skor Teknis	Skor Biaya	Total Skor	
1	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.	Rp418.388.404.711,- (*empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah*) termasuk PPN 10%	Rp418.388.000.000,- (*empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) termasuk PPN 10%	64.83%	28.47%	93.30%	I
2	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	Rp397.018.888.888,- (*tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) termasuk PPN 10%	Rp397.018.888.888,- (*tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) termasuk PPN 10%	62.70%	30.00%	92.70%	II
3	PT PP (Persero), Tbk – PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. (KSO)	Rp446.264.400.000,- (*empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*)) termasuk PPN 10%	Rp446.264.400.000,- (*empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*)) termasuk PPN 10%	64.95%	26.69%	91.64%	III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa Terlapor II - Terlapor III (KSO) sebagai peserta tender yang pada hasil evaluasi teknis menempati peringkat pertama namun pada hasil evaluasi teknis dan harga penawaran menempati peringkat ketiga diketahui pernah menyampaikan Surat Nomor 002/Ext/VI/PP-JAKON/2021 tanggal 12 Juni 2021 perihal Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki Tahap III (Tender Batal) kepada Tim Pengadaan (*vide* Bukti C91, T2.15).----------

Adapun Permohonan Data Rincian Penilaian Teknis tersebut diajukan berdasarkan hasil simulasi terhadap evaluasi teknis yang dilakukan Terlapor II - Terlapor III (KSO) secara mandiri, yang mana dalam hasil simulasi tersebut menghasilkan nilai sebesar 95,77 (*vide* Bukti C89, T2.27, T3.35).----------

3) Bahwa dalam prosesnya, Direktur SDM dan Umum Terlapor I diketahui menyampaikan Keputusan terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III kepada Ketua Tim Pengadaan yang isinya "*Lelang dinyatakan Batal*" dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan "*tender ulang*" melalui email yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Pengumuman Pembatalan Lelang Nomor : 013/PENG-PKT.18/VI/2021 kepada peserta tender melalui email *Procurement* tanggal 22 Juni 2021 pukul 13.55 WIB (*vide* Bukti C15, C16, C17. C28, C31, C41, T1.21, T2.16, T3.14)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. sebagai peserta tender yang menempati peringkat pertama dalam evaluasi teknis dan harga penawaran kemudian menyampaikan keberatannya terkait pembatalan tender, hal mana pembatalan tender tersebut dilakukan Tim Pengadaan sebelum pengumuman tender dan/atau setelah dilakukannya proses klarifikasi dan negosiasi harga terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. (*vide* Bukti C21, C108).----------

5) Bahwa justifikasi Terlapor I yang menyatakan keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. terkait pembatalan tender tidak ditindaklanjuti karena dilakukan di luar mekanisme sanggah dinilai kurang tepat mengingat pembatalan tender itu sendiri dilakukan sebelum pengumuman tender. Adapun mekanisme sanggah yang lazim berlaku dalam pengadaan barang dan/jasa pada umumnya dapat dilakukan peserta setelah diumumkannya pengumuman pemenang sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Sabela Gayo, Ph.D., S.H., M.H. selaku Ahli Hukum di Bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Terlapor II dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya menyatakan masa sanggah itu dilakukan setelah penetapan pemenang (*vide* Bukti B23). Namun demikian, Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., KN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Investigator dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya menyatakan apabila terdapat keberatan yang disampaikan di luar mekanisme sanggah maka keberatan tersebut harus ditindaklanjuti sebagai bentuk pengaduan, hal mana pengaduan itu sendiri wajib ditanggapi oleh Tim Pengadaan (*vide* Bukti B25). ----------

Dalam prosesnya kemudian diketahui bahwa terhadap keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. terkait pembatalan tender, Terlapor I telah menyampaikan tanggapannya melalui Surat Nomor 008/OP100/102/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dalam praktiknya pembatalan tender tetap dilanjutkan untuk kemudian dilakukan tender ulang meskipun tanpa disertai penjelasan mengenai alasan dilakukannya tender ulang (*vide* bukti C106). -

6) Bahwa justifikasi Terlapor I yang menyatakan salah satu alasan dilakukannya tender batal dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dalam hal interior dan pengalaman kota besar sebagaimana diuraikan dalam butir 6 dan butir 7.4.4 dinilai Majelis Komisi tidak cukup terbukti karena pada faktanya tidak berkesesuaian dengan alat bukti dokumen yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dimasukkannya sub unsur pengalaman kota besar di dalam unsur pengalaman perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir pada Rekapitulasi Penilaian dan Uraian Penilaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Teknis Peserta tender ulang yang dilakukan oleh Konsultan MK sebagaimana diuraikan dalam Tabel 18 dan Tabel 19. ----------

7) Bahwa pembatalan tender sebagaimana pendapat Majelis Komisi pada butir 7.4.4 huruf f yang pada pokoknya menyatakan pembatalan tender merupakan bentuk fasilitasi Terlapor I dalam rangka memenangkan Terlapor II-Terlapor III (KSO) pada tender *a quo* dilakukan antara lain melalui adanya pemberian kesempatan eksklusif sebagaimana diuraikan sebagai berikut:----------

i. Bahwa berdasarkan kronologis tender sebagaimana diuraikan dalam butir 6, Majelis Komisi turut mempertimbangkan adanya fakta persidangan hal mana Direktur SDM dan Umum diketahui pernah mengirimkan email kepada Konsultan MK pada tanggal 1 Juni 2021 terkait permohonan dilakukannya pemaparan terhadap hasil evaluasi teknis yang kemudian pembahasannya dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 yang mana dalam praktiknya ditemukan adanya perbedaan nilai dalam hasil evaluasi teknis. Adanya perbedaan nilai dalam hasil evaluasi teknis tersebut kemudian dituangkan juga dalam Laporan Pembahasan Atas Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jakarta - Taman Ismail Marzuki - Tahap III tanggal 10 Juni 2021, Laporan Hasil Akhir Tim Pengadaan tanggal 11 Juni 2021, dan Notula Rapat Agenda *Biweekly Project Progress Update* tanggal 17 Juni 2021 yang mana dalam penjelasannya, perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya penafsiran yang berbeda terhadap definisi interior dan pengalaman kota besar. Adapun adanya perbedaan nilai dalam hasil evaluasi teknis dapat diuraikan sebagai berikut (*vide* Bukti B18, C148, T1.18, T1.32): ----------

Tabel 20.
Perbandingan Nilai Evaluasi Teknis Secara Keseluruhan pada Tender Batal dan Tender Ulang

	Unsur evaluasi teknis	Bobot yang ditetapkan		PT PP-Jakon (KSO)/Pemenang				PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk			
				Batal		Ulang		Batal		Ulang	
		Batal	Ulang	Jumlah nilai	Bobot nilai	Jumlah nilai	Bobot nilai	Jumlah nilai	Bobot nilai	Jumlah nilai	Bobot nilai
1	Pengalaman Perusahaan	15	15	83,33	12,50	**96,09**	14,41	84,79	12,72	**63,13**	9,47
2	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	20	20	90,75	18,15	**97,50**	19,50	88,25	17,65	**98,50**	19,70
3	Penilaian terhadap Proposal Design	-	**10**	-	-	**87,50**	8,75	-	-	**95,00**	9,50
4	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	**10**	**5**	98,60	9,86	**100,00**	5,00	92,25	9,23	**100,00**	5,00
5	Daftar Personil Inti	10	10	100,00	10,00	**86,31**	8,63	98,50	9,85	**81,16**	8,12
6	Spesifikasi Teknis, Daftar Barang dan Material yang Digunakan	20	20	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00
7	Spesifikasi Peralatan yang Digunakan	**20**	**15**	92,50	18,00	**100,00**	15,00	100,00	20,00	100,00	15,00
8	Rencana Penerapan Building Information Modelling (BIM)	5	5	75,50	3,77	75,50	3,78	63,50	3,17	**60,00**	3,00
					92,28		95,07		92,62		89,79

ii. Bahwa berdasarkan perbandingan nilai dalam evaluasi teknis pada tender batal dan tender ulang secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 20 diketahui terdapat kenaikan nilai pada hasil evaluasi teknis Terlapor II -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III (KSO) antara lain pada 4 (empat) unsur yaitu unsur pengalaman perusahaan, metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan spesifikasi peralatan yang digunakan. Adapun hasil evaluasi teknis PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. hanya menunjukkan adanya kenaikan nilai pada 2 (dua) unsur yaitu unsur metode pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.----------

iii. Bahwa terhadap kenaikan nilai unsur pengalaman pada Terlapor II - Terlapor III (KSO), menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan dari 83,33 menjadi 96,09, hal mana pada unsur yang sama, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. justru mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 84,79 menjadi 63,13. Perbandingan terkait adanya perbedaan nilai unsur pengalaman yang cukup signifikan dalam evaluasi teknis tersebut dapat diuraikan secara detail sebagai berikut: ----------

Tabel 21.
Perbandingan Nilai Evaluasi Teknis Konsultan MK pada Tender Batal, Reviu, dan Tender Ulang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Unsur Evaluasi Teknis			PT PP - Jakon (KSO)			PT Wika Gedung		
			Score Batal berdasarkan penafsiran Tim Pengadaan dan MK	Score Reviu berdasarkan penafsiran User	Score Ulang berdasarkan penafsiran User	Score Batal berdasarkan penafsiran Tim Pengadaan dan MK	Score Reviu berdasarkan penafsiran User	Score Ulang berdasarkan penafsiran User
1	**Pengalaman Perusahaan**		**83,33**	**86,11**	**96,09**	**84,79**	**70,67**	**63,13**
	1	Pengalaman pekerjaan sejenis kurun waktu 10 tahun terakhir						
		a Pekerjaan Interior/Fitting Out Gedung Pertunjukan, Auditorium dan Ballroom	100,00	100,00	100,00	36,36	0,00	22,22
		b Pekerjaan Interior/Fitting Out Hotel kelas minimal bintang 3	38,46	78,57	64,00	46,15	50,00	100,00
		c Pekerjaan Interior/Fitting Out Ruang Kantor Min. 1000 m2 (main loby, ruang kerja dan meeting room)	93,00	67,86	100,00	93,00	57,00	19,00
		d Pekerjaan Interior/Fitting Out Komersial lainnya	88,89	72,73	87,00	51,85	59,09	100,00
		e Pekerjaan equipment gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (sistem tata suara professional, audio visual dan lampu teater)	83,33	100,00	100,00	100,00	20,00	0,00
		f Pekerjaan equipment gedung atau ruang lainnya (furniture fixture & equipment	100,00	100,00	100,00	40,00	50,00	25,83
	2	Pengalaman sesuai KD yang dipersyaratkan	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Pengalaman di Lokasi Sejenis (Kota Besar)	52,38	72,73	-	100,00	36,36	-
	4	Pengalaman Mengelola Kontrak	96,94	96,94	100,00	100,00	100,00	72,53
	5	Kapasitas mempekerjakan pegawai tetap	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-

iv. Bahwa berdasarkan uraian unsur pengalaman perusahaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 21, nilai Terlapor II - Terlapor III (KSO) terbukti mengalami kenaikan pada 3 (tiga) sub unsur yaitu pada pekerjaan interior/*fitting out* hotel kelas minimal bintang 3, pekerjaan interior/*fitting out* ruang kantor min. 1000 m2 (*main loby*, ruang kerja dan *meeting room*), serta pekerjaan *equipment* gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (sistem tata suara professional, audio visual dan lampu teater). Adapun nilai PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. justru menunjukkan adanya penurunan pada 4 (empat) sub unsur yaitu pada pekerjaan interior/*fitting out* gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom, pekerjaan interior/*fitting out* ruang kantor min. 1000 m2 (*main loby*, ruang kerja dan *meeting room*), pekerjaan *equipment* gedung pertunjukan, auditorium dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ballroom (sistem tata suara professional, audio visual dan lampu teater), serta pekerjaan *equipment* gedung atau ruang lainnya (*furniture fixture* & *equipment*). ---

Bahwa terhadap penurunan nilai PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk., nilai pada sub unsur pekerjaan interior/*fitting out* ruang kantor min. 1000 m2 (*main loby*, ruang kerja dan *meeting room* serta pekerjaan *equipment* gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (sistem tata suara professional, audio visual dan lampu teater) pada tender ulang mengalami penurunan yang cukup signifikan, terlebih pada sub unsur pekerjaan *equipment* gedung pertunjukan, auditorium dan ballroom (sistem tata suara professional, audio visual dan lampu teater) yang awalnya mendapatkan nilai 100 (seratus) pada tender batal bahkan hanya mendapatkan nilai nol pada tender ulang. ----------

v. Bahwa pemberian nilai nol dalam evaluasi teknis pada tender ulang dinilai tidak lazim mengingat berdasarkan alat bukti dokumen, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. melakukan penambahan lampiran daftar pengalaman 10 (sepuluh) tahun terakhir yang cukup signifikan di dalam dokumen penawarannya sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

juga dilakukan oleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) sebagai berikut: ----------

- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. diketahui menambahkan pengalaman dari tender batal sebanyak 22 (dua puluh dua) pengalaman menjadi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) pengalaman pada tender ulang (*vide* Bukti C151, C152). ----------
- Terlapor II - Terlapor III (KSO) diketahui menambahkan pengalaman dari tender batal sebanyak 31 (tiga puluh satu) pengalaman menjadi sebanyak 106 (seratus enam) pengalaman pada tender ulang (*vide* Bukti C161, C162). ----------

Di samping itu, berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan bahwa terdapat kesamaan vendor yang digunakan baik oleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) maupun PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. dalam tender *a quo* sebagai berikut (*vide* Bukti T2.35, T2.36, C151, C152): ----------

Tabel 22.
Kesamaan Vendor Terlapor II-Terlapor III (KSO) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. dalam tender *a quo*

Nama Perusahaan	Pekerjaan yang Disubkontrakkan
PT Kairos Multi Jaya	*Audio Video Communication*
PT Lelco Trindo Graha Nusantara	Lampu Panggung Theater, *Special Lighting*
PT Mandala Putera Prima	Lampu Panggung Theater, *Special Lighting*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Perusahaan	Pekerjaan yang Disubkontrakkan
Virtual Reality Solution Sdn Bhd	Sistem Theater Bintang (*Starball - Zeiss*)

vi. Bahwa nilai nol pada suatu sistem penilaian pengadaan barang dan/atau jasa lazimnya digunakan apabila peserta tender sama sekali tidak melampirkan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan, terlebih lagi dalam hasil reviu yang dilakukan terhadap hasil evaluasi teknis, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. mendapatkan nilai 20 (dua puluh). Kalaupun penambahan lampiran daftar pengalaman pada tender ulang tidak memenuhi persyaratan, lampiran daftar pengalaman setidaknya bisa mendapatkan nilai minimal sebesar yang diperoleh pada hasil reviu yaitu sebesar 20 (dua puluh). ----------
Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, Tim Pengadaan dalam tender ulang diketahui memiliki tata cara penilaian yang berbeda, hal mana nilai nol tersebut tidak hanya diberikan kepada peserta tender yang tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan namun juga terhadap penyampaian dokumen yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Meskipun demikian terdapat kejanggalan terkait tata cara penilaian pada tender ulang dimaksud mengingat:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Bahwa pemberian nilai nol pada penyampaian dokumen yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan hanya diberikan pada unsur pengalaman perusahaan, sedangkan pada keenam unsur penilaian teknis yang lain masih diberikan penilaian sebesar 50% x bobot sub unsur (*vide* Bukti C4, C56, C57, C58, C59). --------
- Bahwa Terlapor II - Terlapor III (KSO) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. diketahui melampirkan pengalaman yang sama sebagai berikut (*vide* Bukti C154, C161, T2.39): ----------

Gambar 14.
Pengalaman PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk.

114	JIEXPO Theatre & Conventional Center	Stage Machinery	Pengadaan Stage Machinery	Jakarta	PT. Jakarta International Expo	Jakarta	24/CBD-LGL-PTJIE/IV/2018	97,5 Milyar	4/9/2018	4/22/2021
		Theater Lighting System	Pengadaan dan Pemasangan Theater Lighting System							
		Special Lighting & Control	Pengadaan Interior Special Lighting							
		Stage Drapery	Pengadaan dan Pemasangan Stage Drapery							
		Stage Machinery	Pemasangan Stage Machinery							

Gambar 15.
Pengalaman Terlapor II - Terlapor III (KSO)

5	Proyek Theater dan Convention Center Jakarta International Expo	Pengadaan dan Pemasangan Stage Machinery, Theater Lighting System, Interior Special Lighting & Control, Stage Drapery, Stage Machinery	Jakarta	PT Jakarta International Expo	Gedung Pusat Niaga Lt.1 Arena PRJ Kemayoran, Jakarta	No. 24/CBD-LGL-PTJIE/IV/2018 Tgl. 09 April 2018	97.500.000.000	97.500.000.000	37 Bulan	22-Apr-21	22-Apr-21

- Bahwa pemberian nilai nol terhadap penyampaian dokumen yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan baru diberlakukan pada tender ulang,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang mana diketahui pada tender batal masih diberikan nilai sebesar 50% x bobot sub unsur (*vide* Bukti C4, C56, C57, C58, C59). ----------

vii. Bahwa adanya perubahan tata cara penilaian pada unsur penilaian teknis khususnya pada unsur pengalaman membuktikan adanya tindakan yang sengaja dilakukan oleh Tim Pengadaan dalam rangka menaikkan nilai teknis Terlapor II - Terlapor III (KSO) mengingat sebagaimana diuraikan dalam Tabel 20, dari kedelapan unsur penilaian teknis, nilai unsur pengalaman perusahaan milik Terlapor II-Terlapor III (KSO) lebih rendah dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. ----------

Bahkan Tim Pengadaan juga dengan sengaja melakukan perubahan tata cara penilaian dengan meniadakan sub unsur pengalaman di lokasi sejenis (kota besar) yang pada awalnya dijadikan justifikasi alasan pembatalan tender Terlapor I, mengingat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. memperoleh nilai sempurna 100 (seratus) yang jauh lebih tinggi dari nilai Terlapor II - Terlapor III (KSO) pada tender batal sebagaimana diuraikan dalam Tabel 21.----------

e. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya (i) permintaan pemaparan Direktur SDM dan Umum terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan MK; (ii) adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permohonan data rincian penilaian teknis dari Terlapor II - Terlapor III (KSO) kepada Tim Pengadaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan fakta adanya pembatalan tender; serta (iii) adanya perubahan tata cara penilaian pada tender ulang membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II - Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender *a quo*. Bentuk eksklusivitas tersebut dikuatkan dengan adanya perubahan tata cara penilaian yang mengakibatkan nilai evaluasi teknis yang diperoleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) dalam tender ulang meningkat cukup signifikan hingga memperoleh prosentase nilai evaluasi teknis yang cukup tinggi, yang mana nilai evaluasi teknis Terlapor II - Terlapor III (KSO) pada tender ulang sebesar 95,07 (sembilan puluh lima koma tujuh) juga turut berkesesuaian dan/atau mendekati hasil simulasi evaluasi teknis Terlapor II - Terlapor III (KSO) dalam tender batal sebesar 95,77 (sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) yang diketahui menjadi dasar Terlapor II – Terlapor III (KSO) mengajukan surat permohonan data rincian penilaian teknis kepada Terlapor I. -----

7.4.6. Tentang Tindakan Terlapor II - Terlapor III (KSO) Melakukan Penyesuaian Dokumen baik secara Terang-Terangan maupun Diam-Diam. ----------

a. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4): ----------

1) Bahwa setelah tender dibatalkan dan dilakukan tender ulang, Terlapor II - Terlapor III (KSO) menambahkan dokumen data terkait dengan pengalaman pekerjaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa penambahan data pengalaman pekerjaan dalam jumlah yang cukup banyak yang dilakukan oleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) didasarkan pada hasil evaluasi atas pelaksanaan tender yang batal dan memperkirakan perlu menambah pengalaman untuk meningkatkan nilai. ----------

b. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti T1.4, T1.44):----------

1) Bahwa tindakan Terlapor II - Terlapor III (KSO) dalam mengirimkan Surat Permohonan Permintaan Rincian Data kepada Tim Pengadaan Terlapor I melalui *email* tanggal 12 Juni 2021, merupakan hak dari peserta tender dan apabila surat-surat yang disampaikan oleh peserta tender di luar mekanisme tender, hal tersebut dikualifikasikan sebagai pengaduan dan Tim Pengadaan tidak mempunyai kewajiban untuk menanggapinya.

2) Bahwa tidak ada komunikasi-komunikasi antara satu peserta dengan peserta lainnya untuk memenangkan salah satu peserta tender (*horizontal*). ----------

3) Bahwa tidak ada komunikasi antara peserta dengan panitia/*user* (*vertikal*). ----------

4) Bahwa tidak ada komunikasi antara para peserta dengan panitia atau *user* (*horizontal maupun vertikal*) untuk mengatur atau menetapkan pemenang tender tertentu.---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa sebelum menganalisis lebih lanjut, Majelis Komisi turut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:----------

1) Bahwa secara limitatif ketentuan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa :
a. Keterangan saksi,
b. Keterangan ahli,
c. Surat dan atau dokumen,
d. Petunjuk,
e. Keterangan pelaku usaha.

2) Bahwa lebih lanjut, Pasal 12 Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PerKPPU 2/2023) menyatakan: ----------

Pasal 12

(1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya.
(3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis.
(4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertemuan atau komunikasi antar pihak dengan atau tanpa menjelaskan substansi pertemuan atau komunikasi tersebut.

3) Bahwa merujuk pada pengertian bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 PerKPPU 2/2023 maka bukti petunjuk dapat dikategorikan sebagai bukti tidak langsung atau yang lebih dikenal sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

indirect evidence/circumstantial evidence karena menguraikan adanya kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang. ----------

4) Bahwa *Black's Law Dictionary (1968), 4th Ed.* mendefinisikan *circumstantial evidence* sebagai berikut:----------

"The proof of various facts or circumstances which is usually attend the main *fact in dispute, and therefore tend to prove its existence, or to sustain, by their concistency, the hypothesis claimed."* ----------

Terjemahan lepas: ----------

"*Pembuktian berbagai fakta atau keadaan yang biasanya menyertai fakta utama yang dipersengketakan, dan oleh karena itu* cenderung *untuk mendukung fakta utama atau mempertahankan konsistensi hipotesis yang diklaim*". ----------

5) Bahwa Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apakah kekuatan alat bukti tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diasumsikan kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama sepanjang secara logis dapat menjelaskan serta memiliki kausalitas antara bukti petunjuk (bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi) dengan bukti lainnya yang mengarahkan kepada suatu kesimpulan tentang adanya suatu tindakan persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan baik dalam bentuk pemeriksaan dokumen, keterangan Saksi, keterangan Ahli, serta keterangan Terlapor sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.4 dan butir 7.4.5 merupakan rangkaian peristiwa/kejadian yang berkesesuaian dan memiliki keterkaitan dengan objek perkara *a quo* atau memiliki kausalitas dan dapat mendukung bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai bukti petunjuk. ----------

7) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai penggunaan bukti petunjuk sebagai bagian dari proses pembuktian pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo* dapat menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara. ----------

d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Bahwa fakta adanya tindakan Terlapor I yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.4 membuktikan pembatalan tender sengaja dilakukan Terlapor I sebagai bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II – Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

2) Bahwa tindakan Terlapor I memfasilitasi Terlapor II – Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender *a quo* ditunjukkan dengan adanya; (i) intervensi Direktur SDM dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum yang mengajukan adanya permintaan pemaparan terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan MK pada saat proses tender masih berjalan hingga akhirnya tender dibatalkan dan (ii) perubahan tata cara penilaian pada tender ulang membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam rangka meningkatkan nilai teknis Terlapor II - Terlapor III (KSO) khususnya pada nilai unsur pengalaman perusahaan yang dalam tender batal diketahui nilainya lebih rendah dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. ----------

3) Bahwa tindakan eksklusivitas Terlapor I terhadap Terlapor II - Terlapor III (KSO) pada tender *a quo* turut dikuatkan dengan adanya penilaian dokumen teknis yang tidak berimbang antara nilai yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II - Terlapor III (KSO) maupun kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.5, mengingat vendor yang digunakan keduanya sama, di samping jumlah pengalaman yang dilampirkan sama banyaknya. Namun demikian, adanya perubahan tata cara penilaian dan tidak diaturnya ketentuan mengenai unsur pengalaman secara eksplisit di dalam KAK dan/atau RfP mengakibatkan penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I menjadi tidak konsisten dan cenderung subjektif. ----------

4) Bahwa pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipertanggungjawabkan tersebut dalam prosesnya diketahui memberikan keuntungan bagi Terlapor II - Terlapor III (KSO) dengan berkesempatan untuk menyesuaikan kelengkapan dokumen teknis khususnya pada sub-sub unsur pengalaman yang pada tender batal, nilainya diketahui lebih rendah dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. sebagai pesaing kompetitif sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.5. ----------

Adapun penyesuaian dokumen Terlapor II - Terlapor III (KSO) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai teknis pada tender ulang ditunjukkan dengan adanya fakta penambahan dokumen teknis khususnya terkait pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang awalnya 31 (tiga puluh satu) pengalaman dalam tender batal menjadi 106 (seratus enam) pengalaman dalam tender ulang yang mana dalam proses evaluasinya, penambahan daftar pengalaman tersebut cukup signifikan meningkatkan nilai teknis yang diperoleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) menjadi sebesar 96,09 yang mana jauh lebih tinggi dari nilai PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. sebesar 63,13. ----------

e. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya bentuk komunikasi langsung antara Terlapor I dan Terlapor II - Terlapor III (KSO), namun demikian fakta terdapat rangkaian proses yang menunjukkan adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

upaya Terlapor I memfasilitasi Terlapor II - Terlapor III (KSO) melalui tindakan Direktur SDM dan Umum yang melakukan intervensi terhadap Tim Pengadaan pada saat proses tender masih berjalan serta adanya permohonan data rincian penilaian teknis Terlapor II - Terlapor III (KSO) kepada Tim Pengadaan yang kemudian dalam prosesnya ditindaklanjuti dengan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan membuktikan adanya bentuk komunikasi dan/atau koordinasi diantara Terlapor I dan Terlapor II - Terlapor III (KSO) yang dalam praktiknya tindakan fasilitasi tersebut berkesesuaian dengan adanya tindakan penyesuaian dokumen yang dilakukan Terlapor II - Terlapor III (KSO) dan tindakan eksklusivitas Terlapor I melalui perubahan tata cara penilaian dan penilaian dokumen teknis yang tidak berimbang hingga akhirnya Terlapor II - Terlapor III (KSO) ditetapkan sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

7.4.7. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol **terpenuhi**.----------

7.5. Unsur Pelaku Usaha Lain.----------

7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 7.3.1 selain Terlapor I dalam tender perkara *a quo*. ----------

7.5.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.

7.5.3. Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk selaku Terlapor II dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk selaku Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 dan butir 1.3 Bagian Tentang Identitas Terlapor. ----------

7.5.4. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III membuat kerja sama operasi dengan nama PP-JAKON KSO untuk mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

7.5.5. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

7.5.6. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

7.6. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -----

7.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.6.2. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4): ----------

a. Bahwa Terlapor I menindaklanjuti keberatan dari Terlapor II - Terlapor III (KSO) dengan membatalkan lelang. ----------

b. Bahwa Pembentukan Tim Pengadaan Baru ditujukan untuk mengakomodir Terlapor II - Terlapor III (KSO). ----------

c. Bahwa pembatalan tender pertama proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dilakukan setelah proses evaluasi administrasi, teknis dan harga telah dilakukan dan telah ada peringkat hasil tender. ----

d. Bahwa sejak diumumkan hasil evaluasi teknis tanggal 31 Mei 2021, Direksi SDM & Umum Terlapor I, pada tanggal 3-9 Juni 2021 menyampaikan email kepada konsultan MK untuk melakukan reviu ulang atas hasil penilaian teknis tersebut. ----------

7.6.3. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti T1.4, T1.44): ----------

a. Bahwa proses pengadaan ini melibatkan pihak independen dalam menyusun spesifikasi teknis, KAK, dan RfP yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) dan HPS oleh Konsultan *Quantity Surveyor* (QS). ----------

b. Bahwa untuk menjamin *fairness* dan independensi dalam penilaian atau evaluasi dalam Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Terlapor I juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyerahkan tugas tersebut kepada Manajemen Konstruksi (MK) untuk memberikan penilaian/evaluasi termasuk menentukan bobot dan kriteria penilaian sesuai dengan RfP.----------

c. Bahwa dengan penugasan kepada pihak independen, dalam hal ini adalah Manajemen Konstruksi (MK) untuk menyusun Spesifikasi Teknis, menentukan bobot dan kriteria penilaian, serta melakukan penilaian. Hal ini membuat Terlapor I tidak mungkin atau sangat sulit untuk melakukan tindakan mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang sehingga unsur mengatur dan/atau menentukan Pemenang Lelang.----------

7.6.4. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti T1.4, T1.44):----

a. Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 merupakan surat yang berisikan permintaan/permohonan untuk mendapatkan informasi mengenai cara Tim Pengadaan melakukan evaluasi/penilaian teknis Proyek TIM Tahap III dan sama sekali tidak berisikan permintaan/permohonan kepada Tim Pengadaan untuk membatalkan Tender Awal. ------

b. Bahwa pembatalan tender awal Proyek TIM Tahap III tidak terkait dengan adanya Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 kepada Panitia Tender, karena faktanya dalam proses persidangan perkara *a quo* telah dapat dibuktikan pembatalan tender didasarkan pada ketentuan Pasal 38.2 dan Pasal 38.3 RfP dan adanya perubahan spesifikasi/desain yang melebihi 10%. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahkan terhadap Surat PP-JAKON KSO No.002/2021 tersebut, Terlapor I maupun Tim Pengadaan tidak pernah memberikan respons baik secara lisan maupun tertulis. ----------

7.6.5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:----------

a. Bahwa berdasarkan kronologis tender sebagaimana diuraikan dalam butir 6, terdapat fakta adanya tindakan Terlapor I yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur SDM dan Umum sebagai pejabat yang berwenang membawahi divisi pengadaan mengirimkan email kepada Konsultan MK pada tanggal 1 Juni 2021 dalam rangka meminta dilakukannya pemaparan terhadap hasil evaluasi teknis. Bahkan berdasarkan permintaan tersebut, Konsultan MK telah melakukan pemaparan pada tanggal 2 Juni 2021. Direktur SDM dan Umum juga telah mengirimkan email pada tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 kepada Konsultan MK untuk melakukan pembahasan atas hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan yang mana dalam laporan pembahasan tersebut pada tanggal 10 Juni 2021 diuraikan adanya perbedaan nilai dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Konsultan MK pada tender batal dengan penafsiran menurut Konsultan MK sendiri serta reviu dengan penafsiran menurut *user* sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.5. ----------

b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui tindakan Direktur SDM dan Umum yang meminta pemaparan dan reviu terhadap hasil evaluasi

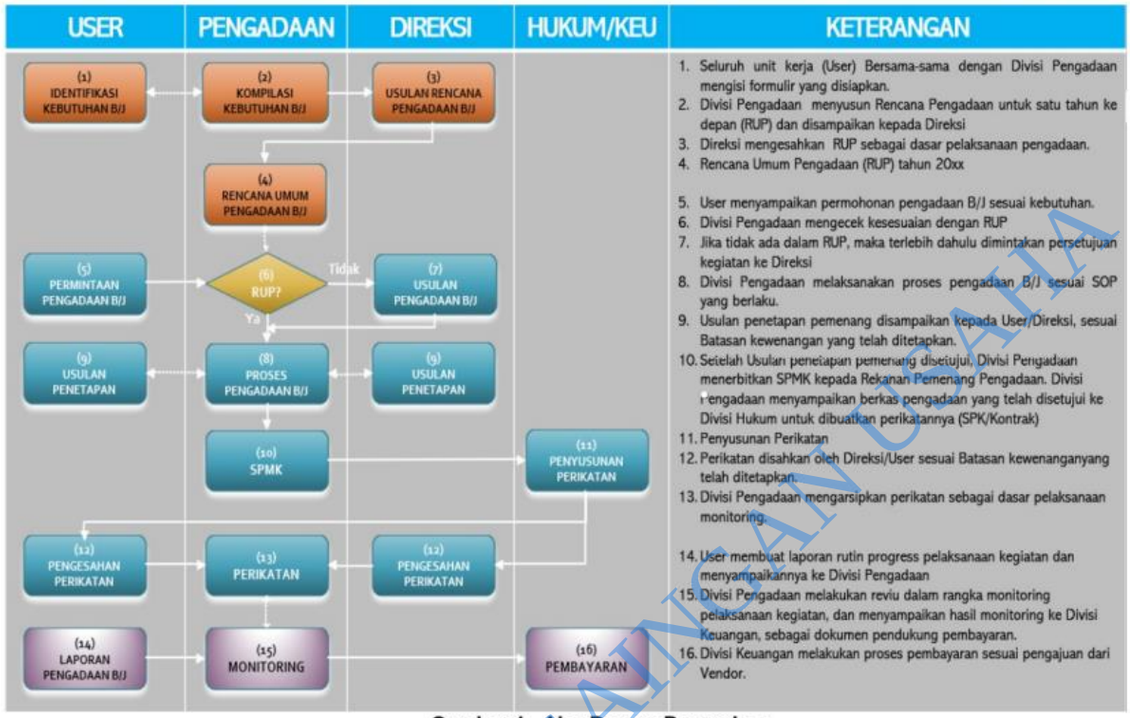
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis kepada Konsultan MK pada saat proses tender masih berlangsung membuktikan adanya intervensi Direksi terhadap Tim Pengadaan untuk mempengaruhi hasi evaluasi dalam rangka memfasilitasi dan/atau menentukan Terlapor II - Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender. Hal tersebut dinilai tidak tepat mengingat sebagaimana pendapat Saudara Ir. Riad Horem, Dipl., H.E. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Terlapor II dalam keterangannya pada persidangan pada pokoknya menyatakan Direksi atau *user* dilarang melakukan intervensi Tim Pengadaan dan hanya bisa memonitor proses yang masih berjalan sampai dengan proses penetapan pemenang (*vide* Bukti B20). ----------

Bahwa intervensi Direktur SDM dan Umum pada saat proses tender masih berjalan tersebut juga tidak sesuai dengan alur proses pengadaan internal Terlapor I sebagaimana diatur dalam Manual Jakpro Manual Pengadaan Barang/Jasa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor MMAN-JPP-PPRKN-001 Rev. 1 tanggal 12 Maret 2021 sebagai berikut (*vide* Bukti T1.14): ----------

Gambar 16
Manual Pengadaan Barang/Jasa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor MMAN-JPP-PPRKN-001 Rev. 1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Gambar 1 Alur Proses Pengadaan

Rincian alur proses perencanaan pengadaan, pengadaan barang/jasa, dan *monitoring*/pemantauan pengadaan barang/jasa dapat dilihat dalam SOP-JPP-PPRKN-001 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, SOP-JPP-PPRKN-002 Pengadaan Barang dan Jasa, serta SOP-JPP-PPRKN-003 Pemantauan (*Monitoring*) Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Bahwa adanya intervensi Direktur SDM dan Umum dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Konsultan MK yang kemudian berkesesuaian dengan adanya (i) pembatalan tender dengan justifikasi adanya perbedaan penafsiran mengenai definisi interior dan pengalaman, (ii) permohonan data rincian penilaian teknis oleh Terlapor II-Terlapor III (KSO); (iii) pembahasan dan/atau pemaparan hasil reviu terhadap evaluasi teknis yang mana berdasarkan alat bukti dokumen lebih dititikberatkan pada unsur pengalaman; (iv) penyesuaian dokumen penawaran Terlapor II - Terlapor III (KSO) melalui penambahan data pengalaman yang kemudian didukung dengan adanya (v) penilaian yang tidak berimbang dalam evaluasi teknis sebagaimana diuraikan dalam butir

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.4.4, butir 7.4.5, dan butir 7.4.6 membuktikan adanya tindakan pengaturan yang dilakukan Terlapor I dalam rangka memenangkan Terlapor II - Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

7.6.6. Bahwa dengan demikian, unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender **terpenuhi**.----------

7.7. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

7.7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".*----------

7.7.2. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4): ----------

a. Bahwa dalam tender proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, proses tender dijalankan secara tidak jujur dalam aspek penilaiannya. ----------

b. Bahwa tata cara penilaian yang digunakan oleh Tim Pengadaan baik pada tender pertama dan tender kedua bersifat kualitatif sehingga menimbulkan multitafsir dan mudah disalahgunakan. ----------

7.7.3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.4, butir 7.4.5, dan butir 7.4.6 diketahui terdapat perubahan tata cara penilaian teknis yang mana dalam implementasi penilaiannya terbukti tidak konsisten sehingga tindakan tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II - Terlapor III (KSO) untuk memenangkan tender *a quo*. ----------

b. Bahwa inkonsistensi Terlapor I dalam evaluasi teknis baik pada tender batal maupun tender ulang juga dikuatkan dengan uraian fakta persidangan sebagai berikut:----------

   i. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya pembatalan tender dilakukan dengan alasan terdapat perbedaan hasil penilaian dalam evaluasi teknis terkait adanya perbedaan penafsiran interior dan pengalaman kota besar namun pada faktanya sebagaimana diuraikan dalam Tabel 18 dan Tabel 19 menunjukkan bahwa justifikasi tersebut tidak terbukti mengingat sub unsur pengalaman kota besar tidak lagi dipertimbangkan sebagai indikator dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh konsultan MK pada tender ulang.----------

   ii. Bahwa Konsultan MK sebagai Konsultan yang ditunjuk Terlapor I untuk membantu menyusun dokumen RfP dan melakukan evaluasi teknis bersama Tim Pengadaan dan User dalam *output*-nya tidak menunjukkan hasil evaluasi yang konsisten. Hal tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikuatkan dengan adanya perbedaan hasil evaluasi teknis pada tender batal, hasil reviu, dan tender ulang untuk dokumen penawaran yang sama sebagaimana diuraikan dalam Tabel 20 dan Tabel 21. Hal tersebut menunjukkan belum adanya kesepahaman unsur Tim Pengadaan dalam menerjemahkan dokumen RfP sebagai dokumen internal yang disusun bersama, yang mana hal tersebut tidak dapat diabaikan mengingat dokumen RfP akan dijadikan sebagai pedoman bagi peserta tender dalam menyusun dokumen penawaran.

iii. Bahwa fakta adanya pemberian nilai nol yang tidak pada tempatnya pada salah satu sub unsur pengalaman PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. membuktikan tidak adanya indikator dan parameter penilaian yang terukur mengingat pada sub unsur tersebut, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. diketahui telah menambahkan data pengalaman yang cukup banyak pada tender ulang sebagaimana ditambahkan oleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) dalam dokumen penawarannya, di samping keduanya juga menggunakan vendor yang sama sebagaimana diuraikan dalam Tabel 22. ----------

c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4 dan butir 7.6, Terlapor I diketahui telah menyusun bobot dan kriteria penilaian secara kuantitatif namun demikian, adanya inkonsistensi Terlapor I dalam evaluasi teknis sebagaimana diuraikan di atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membuktikan bobot dan kriteria penilaian dalam dokumen RfP tender *a quo* belum didefinisikan secara eksplisit dan/atau detail sehingga memberikan ruang gerak bagi Terlapor I melakukan proses evaluasi secara subjektif dan cenderung menguntungkan Terlapor II – Terlapor III (KSO). Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., KN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Investigator dalam keterangannya pada persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B25): ----------

i. Bahwa persyaratan-persyaratan dalam dokumen pengadaan itu harus kuantitatif dan tidak boleh kualitatif. ----------

ii. Bahwa keseluruhan aspek penilaian itu wajib detail dan harus tertuang dalam dokumen pengadaan supaya tidak multitafsir supaya kalau diperiksa siapapun hasilnya sama. Ini tujuannya supaya tidak terjadi sengketa. Tujuannya di samping untuk *fairness*, itu juga untuk menghindari masalah di kemudian hari.

d. Bahwa adanya inkonsistensi Terlapor I dalam evaluasi teknis sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4 dan butir 7.6 membuktikan adanya pelanggaran terhadap prinsip dan etika pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut (*vide* Bukti C60, C63, C124): ----------

i. Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha Milik Daerah tanggal 24 Mei 2019 pada pokoknya mengatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMD antara lain harus memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel.----------

ii. Manual Pengadaan Barang/Jasa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor MMAN-JPP-PPRKN-001 Rev. 1 tanggal 12 Maret 2021 pada pokoknya mengatur (*vide* Bukti T1.14): ---------

"Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum yaitu efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, untuk mendapatkan penawaran yang terbaik bagi perusahaan". ----------

"Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa berkewajiban mematuhi etika pengadaan yaitu profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan, mencegah terjadinya pertentangan kepentingan/ pemborosan/ penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, serta tidak menerima/ menawarkan/ menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan/komisi dan apa saja dari atau menerima hadiah/imbalan/komisi dan apa saja dari atau kepada siapapun". ----------

iii. Manual Pengadaan Barang/Jasa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor MMAN-JPP-PGDN-001 tanggal 15 Juli 2021 pada pokoknya mengatur: ----------

"Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum yaitu efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, untuk mendapatkan penawaran yang terbaik bagi perusahaan". ----------

"Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa berkewajiban mematuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

etika pengadaan yaitu profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan, mencegah terjadinya pertentangan kepentingan/hadiah/imbalan/komisi dan apa saja dari atau kepada siapapun". ----------

Adapun adanya pelanggaran terhadap prinsip dan etika pengadaan barang dan/atau jasa tersebut turut dikuatkan dengan Laporan Hasil Reviu PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Reviu terhadap Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III Nomor LHR-06/UT1000/IX/2021 tanggal 21 September 2021 yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern Terlapor I yang dalam salah satu opininya pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut (*vide* Bukti T1.41) :----------

"Terkait penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terdapat prinsip Transparansi yang belum sepenuhnya dijalankan yaitu tidak terdapatnya penjelasan yang memadai terkait definisi "Interior" dalam Kerangka Acuan Kerja sehingga berdampak adanya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan berubahnya penilaian teknis yang sudah terlanjur diumumkan". ----------

e. Bahwa Terlapor I sebagai BUMD yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta seharusnya lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan *Good Corporate Governance* sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Adapun adanya opini belum terdapatnya prinsip transparansi pada tender *a quo* membuktikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I belum berjalan dengan baik, yang mana hal tersebut dapat berdampak pada adanya potensi merugikan keuangan negara mengingat sumber dana pada tender *a quo* dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui penyertaan modal daerah. ---------

f. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya perubahan tata cara penilaian dalam evaluasi teknis yang dalam implementasinya tidak tepat dan tidak konsisten, bahkan cenderung tidak berimbang antara hasil evaluasi teknis Terlapor II - Terlapor III (KSO) dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. menunjukkan tata cara penilaian tender *a quo* khususnya pada unsur pengalaman perusahaan masih belum didefinisikan secara eksplisit dan/atau detail sehingga membuktikan terdapat tindakan Terlapor I yang tidak jujur dalam proses pengadaan yang dapat menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.----------

7.7.4. Bahwa dengan demikian, unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**. ---

7.8. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**.----------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) untuk:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.1. Meningkatkan pengawasan terhadap BUMD-BUMD di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terkait implementasi terhadap kewenangan yang diberikan dalam hal penyusunan aturan internal perusahaan khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar sesuai dengan prinsip pengadaan dan etika pengadaan yang berlaku dalam Perundang-Undangan di Indonesia sebagai berikut:----------

8.1.1. Melakukan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. ----------

8.1.2. Melakukan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. ----------

8.2. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ----------

8.3. Menginstruksikan BUMD-BUMD di lingkungan DKI Jakarta untuk menghilangkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa baik dalam aturan internal perusahaan maupun dokumen pengadaan yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan praktik persaingan usaha tidak sehat seperti Klausul 38.2 dan Klausul 38.3 dalam Dokumen RfP tender *a quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.4. Mewajibkan bagi BUMD-BUMD di lingkungan DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk selalu mencantumkan alasan pembatalan tender dalam aturan internal perusahaan maupun dalam dokumen pengadaan. ------

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. ----------

9.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa: ----------

(c) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(g) pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)----------

9.3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021, Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:----------

a. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa; ----------

b. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa;----------

c. penghentian penolakan atau tindakan menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama; ----------

d. penghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;--------

e. penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di Pasar Bersangkutan; ----------

f. penghentian diskriminasi;----------

g. penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah;----------

h. penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa; ----------

i. penghentian Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;----------

j. penghentian Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. *penghentian Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/ atau pemasaran Pelaku Usaha pesaing;*----------

l. *perintah kepada Pelaku Usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; dan/ atau* ------

m. *perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang.* ----------

9.4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. ----------

9.5. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:-

(1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. *paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau*----------

b. *paling banyak sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. ----------

(2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. ----------

9.6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: ----------

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; --------

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ----------

c. faktor yang meringankan; ----------

d. faktor yang memberatkan; dan/atau ----------

e. kemampuan pelaku usaha untuk membayar. ----------

9.7. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: ----------

a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; ----------

b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; ----------

c. pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; ----------

d. pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; ----------

e. pelaku usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau ----------

f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

9.8. Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 6 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: ----------

a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau -----

b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. ----------

9.9. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor. ----------

9.10. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor, yaitu tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor. ----------

9.11. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor, yaitu: ----------

a. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersikap kooperatif yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama proses persidangan.----------

9.12. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut. ---------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.** ----------
2. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**----------
3. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. **Memerintahkan Terlapor I untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.------**
5. **Memerintahkan Terlapor I untuk meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan Klausul 38.3 dokumen *Request for Proposal* (RfP) perkara *a quo* dalam setiap pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU.----------**
6. **Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan/atau menyerahkan dokumen *Request for Proposal* (RfP) setiap selesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU.----------**
7. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).----------**
8. **Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Senin, 17 Juli 2023** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 18 Juli 2023** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
Ttd.	Ttd.
Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum.	Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.	Ttd.
Ita Damayanti Wulansari, S.E.	Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA